RANCANGAN AKHIR
RPJMD
2025-2029

HULU SUNGAI UTARA iBangkit

H. SAHRUJANI
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

HERO SETIAWAN
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA

BAPPEDALITBANG KAB. HSU

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34);

35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD;
   b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan RKPD;
   c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029; dan
   d. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD disusun paling sedikit memuat:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi Daerah;
   c. Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
   d. Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. penutup.

(2) Penjabaran dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD dan menyampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, untuk ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(2) Penetapan peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD ditetapkan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPD;
b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menyempurnakan dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Bupati hasil penyempurnaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD; dan
c. evaluasi terhadap hasil RPD.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RPJMD Tahun 2025-2029 dijadikan RPJMD transisi dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2029-2034 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode tahun 2029-2034.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4-61/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita serta sasaran pembangunan daerah agar selaras dengan Visi dan Misi Bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, serta program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA NOMOR 36

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		ix
Bab I.	**Pendahuluan**	**I-1**
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	I-6
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
	1.5. Sistematika Penulisan	I-8
Bab II.	**Gambaran Umum Daerah**	**II-1**
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-159
	2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-193
Bab III.	**Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**III-1**
	3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III-1
	3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-36
Bab IV.	**Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**IV-1**
	4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV-50
Bab V.	**Penutup**	**V-1**
	5.1. Kesimpulan	V-1
	5.2. Kaidah Pelaksanaan	V-2
	5.3. Evaluasi Hasil RPJMD	V-3
	5.4. Pedoman Transisi	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-1
Tabel 2.2	Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Data Kementerian KLHK	II-12
Tabel 2.3	Hasil Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Berdasarkan Kecamatan	II-14
Tabel 2.4	Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Kecamatan	II-15
Tabel 2.5	Daya Dukung untuk Pangan	II-17
Tabel 2.6	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-18
Tabel 2.7	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-20
Tabel 2.8	Rumah Berimbang Tahun 2026 – 2051	II-21
Tabel 2.9	Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-23
Tabel 2.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-24
Tabel 2.11	Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-25
Tabel 2.12	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-25
Tabel 2.13	Potensi Risiko Bencana Banjir Menurut Kecamatan	II-29
Tabel 2.14	Risiko Cuaca Ekstrim Setiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-34
Tabel 2.15	Risiko Bencana Kekeringan Setiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-36
Tabel 2.16	Kondisi Lahan Kritis Tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan	II-39
Tabel 2.17	Kondisi Lahan Kritis Tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan	II-40
Tabel 2.18	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	II-43
Tabel 2.20	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	II-44
Tabel 2.21	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	II-44

Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	II-45
Tabel 2.23	Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2030 (dalam ribu)	II-46
Tabel 2.24	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2030	II-47
Tabel 2.25	PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.26	Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2.27	PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II-52
Tabel 2.28	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-54
Tabel 2.29	PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-56
Tabel 2.30	Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita Per bulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.31	Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.32	Profil Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.33	Keluarga dan Individu Miskin Berdasarkan data P3KE pada Desil 1, 2 dan 3 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022	II-62
Tabel 2.34	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.35	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.36	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.37	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-76
Tabel 2.38	Distribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.39	Laju PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.40	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.41	Distribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024	II-78

Tabel 2.42	Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.43	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024	II-80
Tabel 2.44	TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019–2023	II-80
Tabel 2.45	Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2.46	Kontribusi Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.47	Perkembangan dan Struktur PMTB di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II-83
Tabel 2.48	Perkembangan Ekspor Neto di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2024	II-85
Tabel 2.49	Nilai SAKIP dan LPPD di Kab. HSU Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.50	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2.51	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.52	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.53	Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid, Sekolah Tahun 2019–2022	II-100
Tabel 2.54	Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II-102
Tabel 2.55	Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2019-2023	II-104
Tabel 2.56	Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.57	Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.58	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.59	Jumlah dan Jenis Jembatan Tahun 2019-2023	II-113
Tabel 2.60	Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2019-2023	II-113
Tabel 2.61	Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-114
Tabel 2.62	Capaian Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-116
Tabel 2.63	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Tahun 2019-2023	II-116
Tabel 2.64	Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2019-2023	II-117

Tabel 2.65	Deliniasi Luas Kumuh di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2023	II-118
Tabel 2.66	Cakupan Layanan PDAM Tahun 2023	II-120
Tabel 2.67	Cakupan Akses Terhadap Air Minum Tahun 2022	II-121
Tabel 2.68	Capaian Akses Penduduk Terhadap Air Bersih/Air Minum Tahun 2021-2023	II-122
Tabel 2.69	Cakupan Akses Aman Sanitasi Tahun 2021-2023	II-123
Tabel 2.70	Akses WC dan ODF Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-123
Tabel 2.71	Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2019 – 2023	II-125
Tabel 2.72	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. HSU Tahun 2018 dan 2023	II-125
Tabel 2.73	Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-126
Tabel 2.74	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-127
Tabel 2.75	Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-128
Tabel 2.76	Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2019-2023	II-128
Tabel 2.77	Volume Sampah Yang Dapat Diangkut Tahun 2019-2023	II-130
Tabel 2.78	Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-131
Tabel 2.79	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023	II-131
Tabel 2.80	Jumlah dan Rasio Akseptor KB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-132
Tabel 2.81	Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum Tahun 2023	II-133
Tabel 2.82	Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	II-133
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-134
Tabel 2.84	Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU Tahun 2019-2023	II-135
Tabel 2.85	Desa Blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-137
Tabel 2.86	Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif Tahun 2019-2023	II-138
Tabel 2.87	Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2019-2023	II-138
Tabel 2.88	Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2019-2023	II-139

Tabel 2.89	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN) Tahun 2020-2023	II-139
Tabel 2.90	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-139
Tabel 2.91	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi di Kabupaten HSU Tahun 2019-2023	II-140
Tabel 2.92	Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-141
Tabel 2.93	Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II-141
Tabel 2.94	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-142
Tabel 2.95	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2019–2023	II-143
Tabel 2.96	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-144
Tabel 2.97	Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik Tahun 2019-2023	II-144
Tabel 2.98	Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2019-2023	II-145
Tabel 2.99	Produksi Ternak Kabupaten HSU 2019-2023	II-146
Tabel 2.100	Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara Tahun 2019-2023	II-146
Tabel 2.101	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal/ Kaki Lima (PKL) Tahun 2019-2023	II-146
Tabel 2.102	Survey Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2023	II-148
Tabel 2.103	Produk Hukum Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2.104	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD di Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-149
Tabel 2.105	Opini BPK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II-149
Tabel 2.106	Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian di Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-150
Tabel 2.107	Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi	II-151
Tabel 2.108	Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-151
Tabel 2.109	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kab. HSU	II-152
Tabel 2.110	Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-152
Tabel 2.111	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	II-153
Tabel 2.112	Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian SPM dan Realisasi Tahun 2024	II-154

Tabel 2.113	Target, Indikator dan Realisasi Pencapaian SPM	II-156
Tabel 2.114	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-157
Tabel 2.115	Target Pencapaian SPM	II-157
Tabel 2.116	Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Sosial	II-158
Tabel 2.117	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-161
Tabel 2.118	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-163
Tabel 2.119	Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-165
Tabel 2.120	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-167
Tabel 2.121	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-169
Tabel 2.122	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-174
Tabel 2.123	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2020-2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-178
Tabel 2.124	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024	II-181
Tabel 2.125	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024	II-182
Tabel 2.126	Defisit Rill Anggaran Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-183
Tabel 2.127	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2026–2030 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-185
Tabel 2.128	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-187
Tabel 2.129	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-189
Tabel 2.130	Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024-2029 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-191
Tabel 2.131	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	II-201
Tabel 2.132	Sasaran Pembangunan Nasional	II-210
Tabel 2.133	Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam	II-215
Tabel 2.134	Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup	II-218

Tabel 2.135	Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	II-220
Tabel 2.136	Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim	II-225
Tabel 2.137	Ringkasan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	II-229
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Nasional	III-2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	III-15
Tabel 3.3	Rencana Pelaksanaan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	III-24
Tabel 3.4	Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	III-37
Tabel 3.5	Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam RPJMN Tahun 2025-2029	III-46
Tabel 3.6	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	III-55
Tabel 4.1	Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	IV-51
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	IV-53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-7
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-3
Gambar 2.2	Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020	II-8
Gambar 2.3	Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-10
Gambar 2.4	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air	II-12
Gambar 2.5	Proporsi Kebutuhan dan Ketersedian Air Setiap Kecamatan	II-13
Gambar 2.6	Luas Panen Padi Menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2017-2021	II-16
Gambar 2.7	Produksi Padi Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2017-2021	II-17
Gambar 2.8	Sebaran Lahan Baku Sawah	II-19
Gambar 2.9	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021-2024	II-23
Gambar 2.10	Risiko Banjir Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-30
Gambar 2.11	Risiko Karhutla Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-32
Gambar 2.12	Risiko Cuaca Ekstrim di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-35
Gambar 2.13	Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-38
Gambar 2.14	Lahan Kritis Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-41
Gambar 2.15	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024	II-43
Gambar 2.16	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2.17	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-58
Gambar 2.18	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional Tahun 2020–2024	II-61
Gambar 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2020–2024	II-62
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi	II-63

	Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2020–2024	
Gambar 2.21	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024	II-65
Gambar 2.22	Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II-66
Gambar 2.23	Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-68
Gambar 2.24	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. HSU Tahun 2020–2024	II-68
Gambar 2.25	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2023	II-69
Gambar 2.26	Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2023	II-70
Gambar 2.27	Indeks Ketimpangan Gerder (IKG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023	II-74
Gambar 2.28	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023	II-75
Gambar 2.29	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023	II-75
Gambar 2.30	Perkembagan Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2.31	Perkembangan Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 (%)	II-86
Gambar 2.32	Tingkat Inflasi di Tanjung dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-87
Gambar 2.33	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024	II-89
Gambar 2.34	Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024	II-90
Gambar 2.35	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Tahun 2019-2023	II-94
Gambar 2.36	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2019-2023	II-95
Gambar 2.37	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2022	II-96
Gambar 2.38	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI Tahun 2019-2023	II-97
Gambar 2.39	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2019-2023	II-97

Gambar 2.40	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2019-2023	II-98
Gambar 2.41	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat Tahun 2019-2023	II-99
Gambar 2.42	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2019-2023	II-99
Gambar 2.43	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2019-2023	II-100
Gambar 2.44	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-102
Gambar 2.45	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2019–2023	II-105
Gambar 2.46	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2019-2023	II-106
Gambar 2.47	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Tahun 2019-2023	II-107
Gambar 2.48	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2019-2023	II-108
Gambar 2.49	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2019-2023	II-108
Gambar 2.50	Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-109
Gambar 2.51	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-109
Gambar 2.52	Cakupan pelayanan anak balita Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-110
Gambar 2.53	Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II-111
Gambar 2.54	Penduduk yang Mengakses Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II-122
Gambar 2.55	Penggunaan Sanitasi Layak Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II-124
Gambar 2.56	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023	II-130
Gambar 2.57	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-147
Gambar 2.58	Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	II-209
Gambar 2.59	8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins)	II-211
Gambar 2.60	Tema/Fokus Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	II-238
Gambar 3.1	Keterkaitan Misi RPJMD HSU dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-12

Gambar 3.2	Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	III-14
Gambar 3.3	Prioritas Kepala Daerah “RAWA MAKMUR”	III-19
Gambar 3.4	Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	III-42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terarah, maka pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dilantiknya **H. Sahrujani sebagai Bupati dan Hero Setiawan sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029** pada tanggal 20 Februari 2025 menandai dimulainya pemerintahan jangka menengah yang baru. Pelantikan kepala daerah juga menjadi titik dimulainya proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 yang harus ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun dengan tahapan-tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dalam penyusunannya, tim penyusun melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah.

Dokumen RPJMD ini disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

a. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan kabupaten dengan memerhatikan rancangan RPJMD provinsi dan RPJMN 2025-2029.
e. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/sub kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
f. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
g. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Lebih lanjut, dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan hidup dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 kedalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dengan demikian, RPJMD yang dihasilkan tidak saja memprioritaskan aspek ekonomi dan sosial, namun juga aspek lingkungan hidup.

Dokumen ini disusun bersamaan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rensta Perangkat Daerah akan menjabarkan secara rinci program-program dalam RPJMD ke kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun. RKPD setiap tahun akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 terdiri atas peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2); dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Dokumen RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW serta memerhatikan RPJMD provinsi, RPJMN, dan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penjelasan keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya, sebagai berikut:

a. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

   Penyusunan RPJMD memedomani RPJPD yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

b. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara

   Penyusunan RPJMD memedomani RTRW dilakukan dengan penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

c. RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan RPJMN

   Penyusunan RPJMD memedomani RPJMN dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

d. RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

   Penyusunan RPJMD memedomani RPJMD Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program pembangunan untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

e. RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

   Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD. Program RPJMD dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra

masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, dalam mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD.

f. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD dengan menerjemahkan tujuan dan sasaran tahunan dan dilaksanakan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan. Target-target tahunan dalam RKPD ditetapkan dalam rangka pencapaian target akhir RPJMD.

g. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Selain mempedomani dokumen perencanaan di atas, penyusunan RPJMD juga memperhatikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang bertujuan untuk menjamin rencana yang disusun memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

h. RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Gambaran keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah.

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

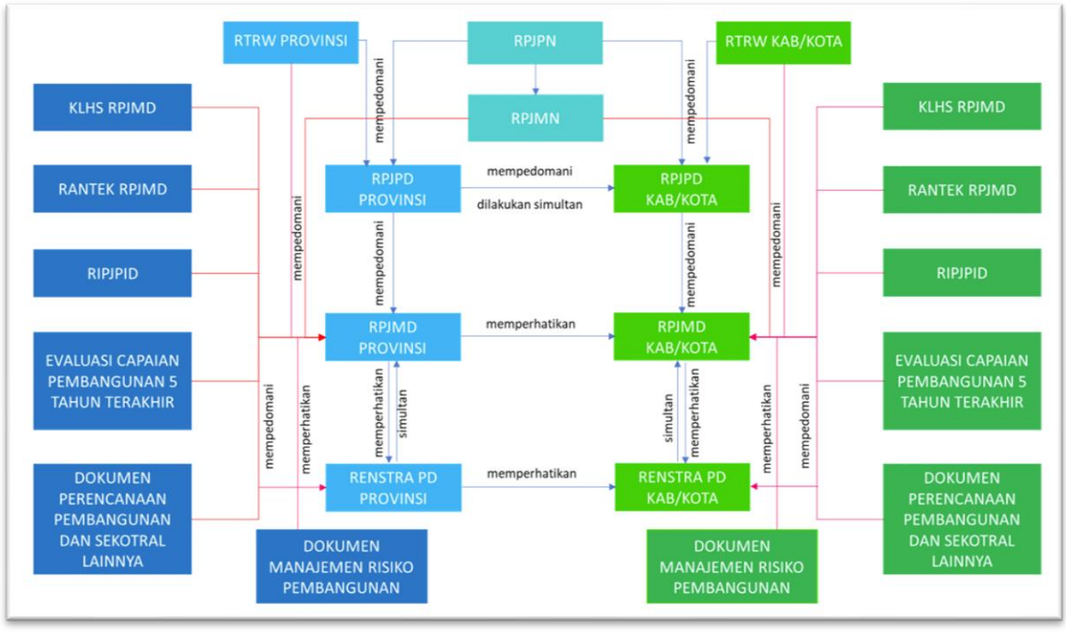

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyediakan pedoman pembangunan daerah

jangka waktu 5 (lima) tahun bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Hulu Sungai Utara tahun 2025-2039, yang selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD, yaitu:

a. Menyajikan analisis gambaran umum kondisi daerah.
b. Menyajikan proyeksi keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.
c. Merumuskan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
d. Merumuskan tujuan dan sasaran yang terukur sebagai penjabaran dari visi dan misi.
e. Menentukan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan.
f. Menentukan program perangkat daerah.
g. Menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan	:	Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD. Selain itu dijelaskan juga secara singkat hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.
Bab II. Gambaran Umum Daerah	:	Bab ini memuat pengolahan data dan informasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) aspek pembangunan yang disertai analisis deskriptif. Adapun keempat aspek, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum. Selain itu disajikan juga capaian Standar Pelaynan Minimal (SPM), dan kerjasama daerah yang telah dilakukan. Pada bab ini dimuat juga analisis gambaran singkat kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.

		Bab ini juga menyajikan identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
Bab III. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	:	Bab ini memuat visi dan misi bupati dan wakil bupati yang diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator yang terukur selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai misi dan sasaran RPJMD.
Bab IV. Program Pembangunan Daerah dan Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah	:	Bab ini memuat program perangkat daerah. Program perangkat daerah dilengkapi dengan outcome, indikator, target dan pagu anggaran selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, dimuat juga indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
Bab V. Penutup	:	Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pedoman transisi dari RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 907,72 Km^2. Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 192,77 km^2 atau 22,04% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 22,25 km^2 atau 2,07% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km^2)	%	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1.	Danau Panggang	136,24	16,53	-	16
2.	Babirik	82,01	8,06	-	23
3.	Sungai Pandan	59,92	6,84	-	33
4.	Amuntai Selatan	149,99	17,58	-	30
5.	Amuntai Tengah	77,09	9,49	5	24
6.	Banjang	110,64	12,27	-	20
7.	Amuntai Utara	37,85	4,24	-	26
8.	Haur Gading	38,96	4,25	-	18
9.	Sungai Tabukan	22,25	2,07	-	17
10	Paminggir	192,77	22,04	-	7
Jumlah		**907,72**	**100,00**	**5**	**214**

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2025

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37" sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan antara 114°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki ibukota di Amuntai.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada Gambar 2.1 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045.

Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara

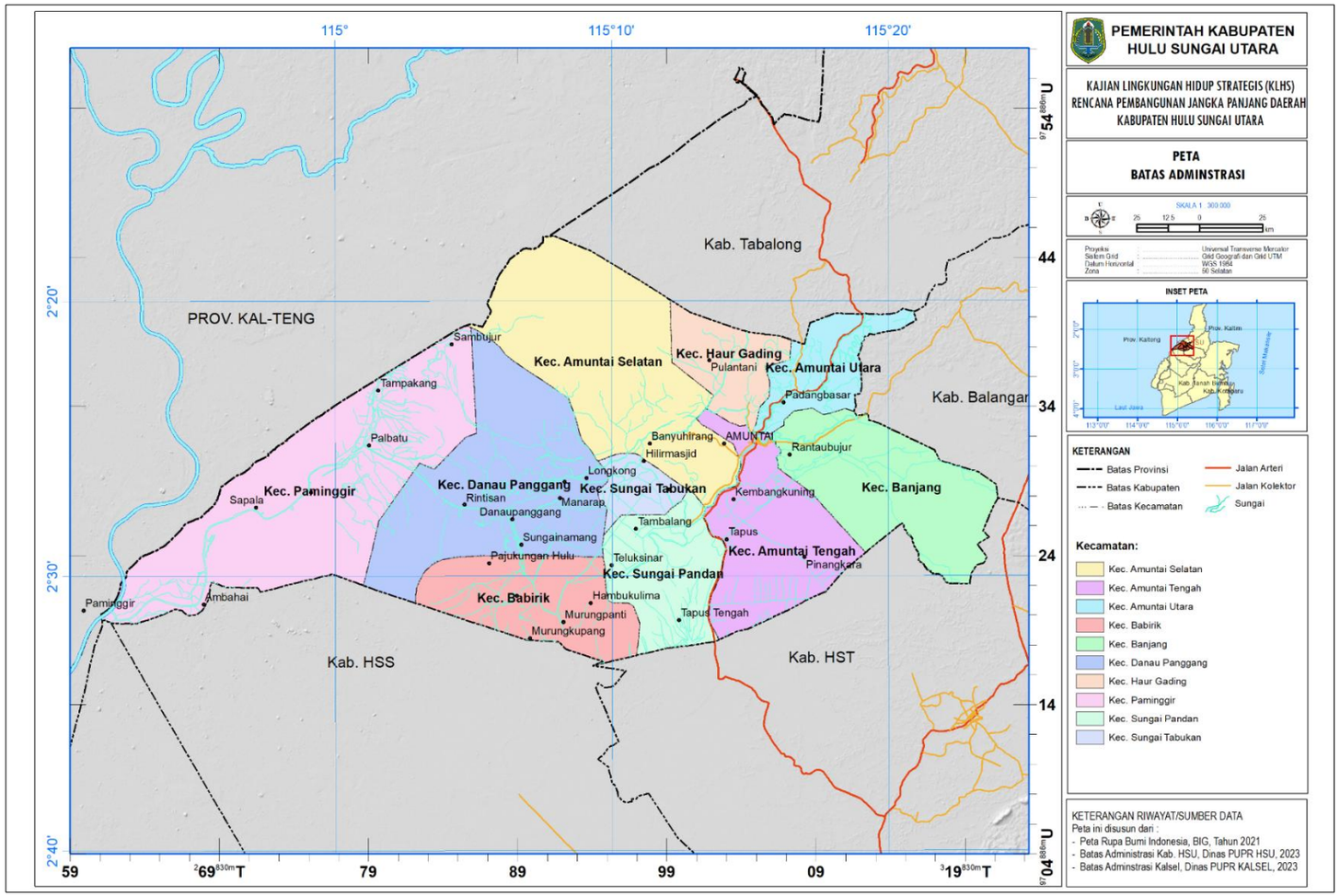

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

b. Topografi dan Geologi

Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0 – 2% pada seluruh kecamatan yang ada, Jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Selanjutnya, berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif uniform dari dataran banjir (*flood plain*) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran sungai.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan kedalam *back swamp* dan *peat swamp*. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan *levee* yang menempati sepanjang Sungai Nagara. Bentuk lahan *back swamp* sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput swamp atau ditanami padi. Bentuk lahan *peat swamp* dimana pada tengahnya seringkali terbentuk kubah gambut *(dome)* menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePProT secara regional Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah berupa *levee* dan rawa belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut (GBT), Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawanguwang (LWW).

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah komplek podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning, alluvial dan organosol gleihumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan orgonosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis komplek podsolik merah kuning dan latosol mempunyai

tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah komplek podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha (0,68%). Jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjang. Jenis tanah Alluvial ini terdapat di semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol gleihumus hanya terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang serta jumlah paling sedikit di Kecamatan Amuntai Utara.

c. Hidrologi dan Klimatologi

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km^2 dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin.

Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau

debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah:

1. Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit ± 350 m^3/detik merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing-masing mempunyai kapasitas debit ± 250 m^3/detik dan ± 300 m^3/ detik.
2. Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (Tc) debit limpasan air hujan menuju titik *outlet* DAS Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan.
3. Kapasitas Sungai Negara akan penuh (*full capacity*) jika debit dari Sungai Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit *inflow* dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikan keramba, bahan baku air bersih dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai ini terletak pada 115^0 17’ BT dan 02^0 17’ LS sampai 115^0 26’ LS dengan lokasi hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai Pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota Amuntai.

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal *retarding basin* dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan *inflow* debit dari Sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar 11,43 km^2 dengan luas areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar 57,02 km^2. Pada musim kemarau tinggi muka airdi areal rawa 0,2 – 0,5 m dan Danau Panggang antara 0,5 m – 1,5 m.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat

setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di lima kecamatan daerah pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara dan Haur Gading (1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai *Afaw* (menurut sistem *Koppen*) yaitu iklim isotermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa hutan rawa, disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, sawah, dan semak belukar. Berikut adalah perbandingan tutupan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 dengan tahun 2020.

Tabel 2.2.
Perbandingan Tutupan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2015 dan 2020

No	Kecamatan	2015		2020	
		Luas (ha)	Luas (%)	Luas (ha)	Luas (%)
1	Badan Air	1.888,34	2,08	1.907,37	2,10
2	Vegetasi	66.440,18	73,21	61.148,28	67,38
3	Lahan Terbangun	3.554,92	3,92	4.165,37	4,59
4	Lahan Terbuka	18.864,55	20,79	23.525,94	25,92
Total		**90.748**	**100**	**90.747,15**	**100**

Sumber: Revisi RTRW Kab.HSU Tahun 2012-2032

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tutupan lahan dari tahun 2015 mengalami perubahan di tahun 2020. Tutupan lahan vegetasi yang pada tahun 2015 sebesar 73,21 % dan total luas Kabupaten Hulu Sungai Utara berkurang menjadi 67,38 % pada tahun 2020. Sedangkan tutupan lahan berupa lahan terbangun yang dari awalnya pada tahun 2015 seluas 3,92% dari total luas Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertambah menjadi 4,591% pada tahun 2020.

Gambar 2.2.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020

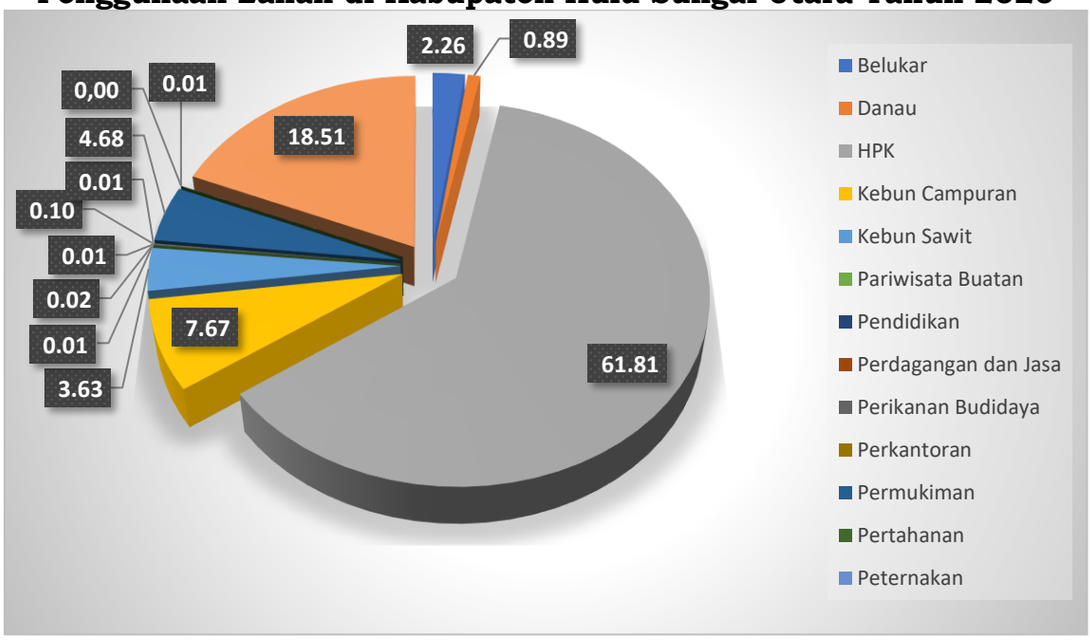

Sumber: Peta RBI Kab. Hulu Sungai Utara Skala 1:50.000, Tahun 2021

Berdasarkan pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tahun 2021 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana luasan kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi

Hutan Produksi 12.815 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi 28.945 Ha. Total kedua luasan kawasan hutan tersebut mencapai 45,98 % dari luas Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan kawasan tepi sungai yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 ha dan jalur sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Negara. Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di Kecamatan Danau Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan olah raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.

Kawasan cagar budaya berupa rencana pengembangan dengan cara dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya seluas kurang lebih 5 ha yang terdiri atas (a) kawasan Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 3 ha; (b) kawasan Mesjid Tua Sungai Banar di Desa Pandulangan atau di Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 ha; (c) kawasan Mesjid Jami' Besar di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 ha; dan (d) kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading yang merupakan makam keramat dengan luas kurang lebih 0,58 ha.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjang dengan luas kurang lebih 4.804 ha,

Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kuranglebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.

Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan rakyat. Secara rinci kawasan budidaya akan diuraikan pada potensi pengembangan wilayah.

Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dimana Kota Amuntai ditetapkan sebagai pusat layanan regional yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan persampahan.

Gambar 2.3.
Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara

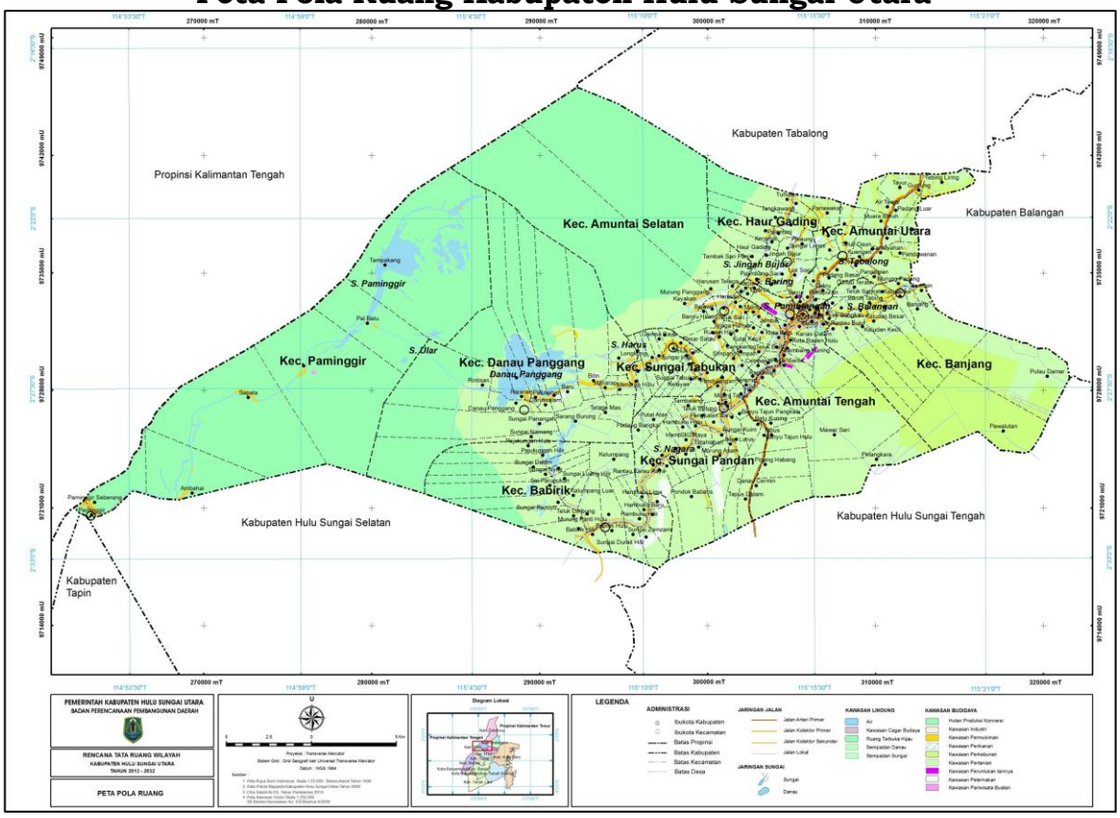

Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar - besar kemakmuran rakyat, sebagai amanat dalam Pasal 33 Ayat (21) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada saat ini, air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk mendapat air yang baik sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga secara kualitas, sumber daya air telah mengalami penurunan. Demikian pula secara kuantitas, yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana detail tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air *(water supply)* dan kebutuhan air (water demand) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air dengan mengikuti pedoman dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009. Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA).

Bila SA > DA , daya dukung air dinyatakan surplus.

Bila SA < DA , daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Sedangkan menurut Dr-Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), membagi menjadi:

DDA < 1 : Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1-3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA > 3 : Daya dukung air aman atau baik

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang daya dukung dan daya tampung air nasional untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukan bahwa daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melampaui.

Tabel 2.3.
Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Data Kementerian KLHK

Kecamatan	Status Air			
	Belum Melampaui		Melampaui	
	Luas (Ha)	%	Melampaui	%
Amuntai Selatan	14.102,76	91,46	1.316,68	8,54
Amuntai Tengah	6.969,79	81,97	1.532,96	18,03
Amuntai Utara	3.143,00	78,82	844,38	21,18
Babirik	6.637,73	92,17	564,27	7,83
Banjang	7.426,07	75,13	2.458,32	24,87
Danau Panggang	12.988,19	87,94	1.781,58	12,06
Haur Gading	3.257,11	85,65	545,62	14,35
Paminggir	14.059,17	72,75	5.265,12	27,25
Sungai Pandan	5.716,55	93,64	388,42	6,36
Sungai Tabukan	1.721,39	93,04	128,86	6,96
Hulu Sungai Utara	76.021,74	83,68	14.826,20	16,32

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan air di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kondisi setiap kecamatan dapat dilihat grafik pada Gambar berikut.

Gambar 2.4.
Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air

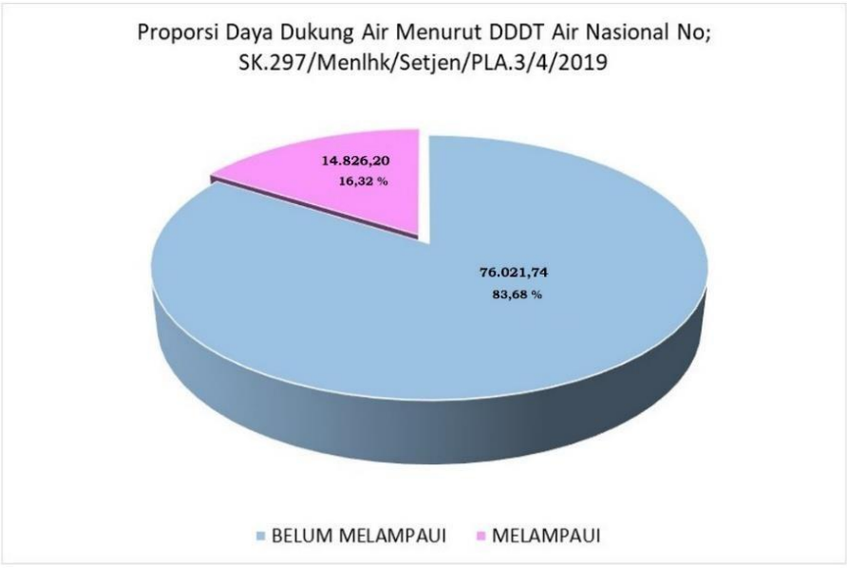

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Gambar 2.5.
Proporsi Kebutuhan dan Ketersedian Air Setiap Kecamatan

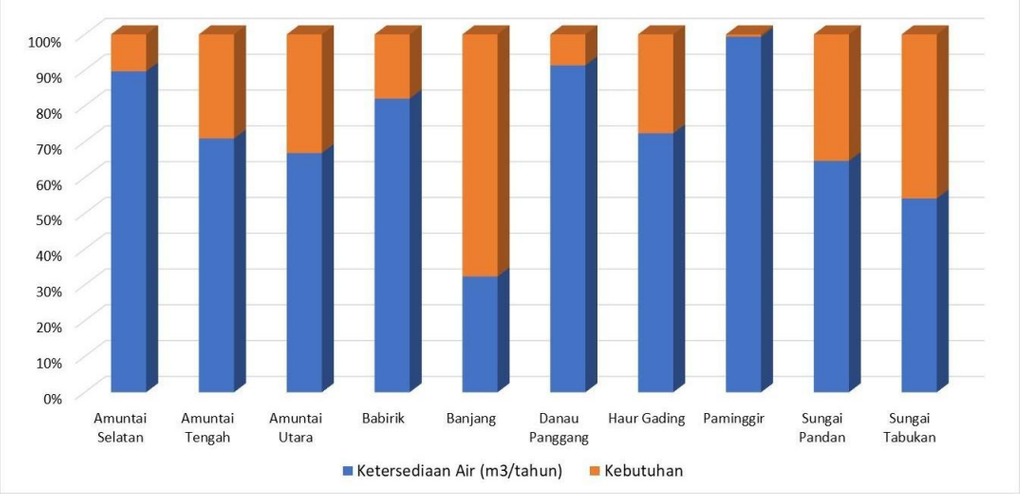

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Pada umumnya ketersediaan air di setiap kecamatan masih lebih besar dari kebutuhan, kecuali pada Kecamatan Banjang dan hampir seimbang pada Kecamatan Sungai Tabukan. Ketersediaan air di Kecamatan Banjang sekitar 70%, sedangkan ketersediaannya hanya 30%.

Upaya menjaga ketersediaan air bersih melibatkan serangkaian tindakan yang terpadu dan berkelanjutan. Pertama, perlindungan terhadap sumber-sumber air, seperti sungai dan mata air, sangat penting untuk mencegah pencemaran, yang dapat dilakukan melalui regulasi yang ketat terhadap limbah industri dan pertanian. Selain itu, rehabilitasi kawasan hutan di sekitar sumber air dapat meningkatkan infiltrasi dan kualitas air. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya penghematan air dan praktik penggunaan yang efisien, seperti pengumpulan air hujan dan penggunaan teknologi irigasi hemat, juga krusial. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya air, kita dapat memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan.

Tabel 2.4.
Hasil Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)			Selisih	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik	Total			
Amuntai Selatan	139.718.738,71	880.380	15.226.035	16.106.415	123.612.324	8,67	Aman atau Baik
Amuntai Tengah	81.609.901,51	1.477.812	32.009.730	33.487.542	48.122.359	2,44	Bersyarat atau Sedang
Amuntai Utara	48.582.785,18	598.892	23.506.656	24.105.548	24.477.237	2,02	Bersyarat atau Sedang
Babirik	62.230.039,77	566.480	13.038.935	13.605.415	48.624.624	4,57	Bersyarat atau Sedang
Banjang	68.308.968,99	545.748	142.281.209	142.826.957	-74.517.988	0,48	Melampaui
Danau Panggang	147.074.905,38	598.892	13.341.252	13.940.144	133.134.761	10,55	Aman atau Baik
Haur Gading	41.580.003,66	478.296	15.417.281	15.895.577	25.684.427	2,62	Bersyarat atau Sedang
Paminggir	264.088.441,67	233.600	1.497.888	1.731.488	262.356.954	152,52	Aman atau Baik
Sungai Pandan	64.286.529,55	807.088	34.361.889	35.168.977	29.117.553	1,83	Bersyarat atau Sedang
Sungai Tabukan	17.725.144,52	433.036	14.574.741	15.007.777	2.717.367	1,18	Bersyarat atau Sedang
Hulu Sungai Utara	935.205.458,95	6.620.224	305.255.615	311.875.839	623.329.620	3,00	Bersyarat atau Sedang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Tabel 2.5.
Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Status Air (Ha)						Total
		Aman atau Baik		Sedang		Melampaui		
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	Amuntai Selatan	13.581,85	69,37	1.795,67	9,17	12,52	0,06	19.578,44
2	Amuntai Tengah	5.589,12	41,41	2.092,24	15,50	802,72	5,95	13.498,08
3	Amuntai Utara	1.477,15	7,34	2.464,22	12,25	20,58	0,10	20.122,54
4	Babirik	5.738,28	50,05	1.417,05	12,36	30,02	0,26	11.464,38
5	Banjang	2.024,43	27,45	1.636,86	22,20	6.158,32	83,51	7.374,54
6	Danau Panggang	13.287,03	60,85	1.456,61	6,67	0,05	0,00	21.834,45
7	Haur Gading	2.130,74	9,94	1.661,00	7,75	5,10	0,02	21.432,85
8	Paminggir	19.062,29	20,55	149,63	0,16	71,10	0,08	92.780,96
9	Sungai Pandan	2.390,59	2,73	3.692,78	4,21	4,04	0,00	87.620,22
10	Sungai Tabukan	327,93	1,12	1.516,78	5,19	2,58	0,01	29.224,05
Hulu Sungai Utara		65.609,41	13,43	17.882,82	3,66	7.107,00	1,45	488.493,98

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan pangan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pangan pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung pangan adalah untuk mengetahui apakah daya dukung pangan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung pangan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan pangan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut, sedangkan kondisi daya dukung surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Luas panen padi di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 sebesar 18.752 hektar dengan produksi padi sebesar 103.031 ton. Luas panen tahun 2021 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Trend penurunan tersebut dapat dilihat secara rinci pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6.
Luas Panen Padi Menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2017-2021

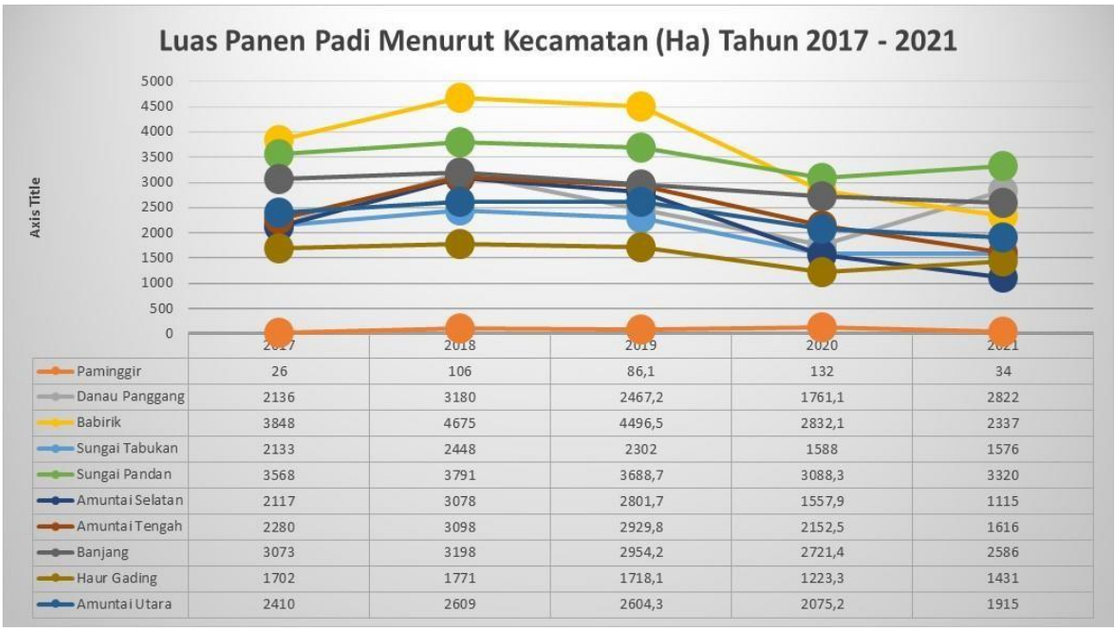

	2017	2018	2019	2020	2021
Paminggir	26	106	86,1	132	34
Danau Panggang	2136	3180	2467,2	1761,1	2822
Babirik	3848	4675	4496,5	2832,1	2337
Sungai Tabukan	2133	2448	2302	1588	1576
Sungai Pandan	3568	3791	3688,7	3088,3	3320
Amuntai Selatan	2117	3078	2801,7	1557,9	1115
Amuntai Tengah	2280	3098	2929,8	2152,5	1616
Banjang	3073	3198	2954,2	2721,4	2586
Haur Gading	1702	1771	1718,1	1223,3	1431
Amuntai Utara	2410	2609	2604,3	2075,2	1915

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Gambar 2.7.
Produksi Padi Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2017-2021

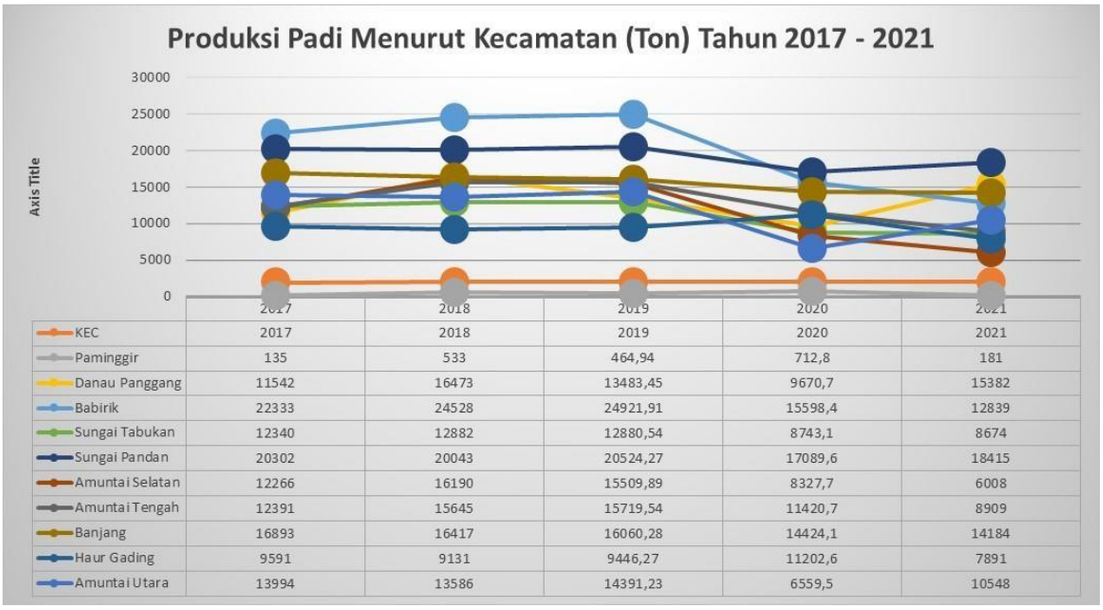

	2017	2018	2019	2020	2021
KEC	2017	2018	2019	2020	2021
Paminggir	135	533	464,94	712,8	181
Danau Panggang	11542	16473	13483,45	9670,7	15382
Babirik	22333	24528	24921,91	15598,4	12839
Sungai Tabukan	12340	12882	12880,54	8743,1	8674
Sungai Pandan	20302	20043	20524,27	17089,6	18415
Amuntai Selatan	12266	16190	15509,89	8327,7	6008
Amuntai Tengah	12391	15645	15719,54	11420,7	8909
Banjang	16893	16417	16060,28	14424,1	14184
Haur Gading	9591	9131	9446,27	11202,6	7891
Amuntai Utara	13994	13586	14391,23	6559,5	10548

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Berdasarkan di bawah, data daya dukung menunjukan bahwa produksi padi tahun 2020 sebesar 103.751 ton dan jika dikonversi ke beras sebesar 61.067 ton. Kebutuhan beras pada waktu yang sama sebesar 39.736 ton, sehingga pada tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami surplus beras sebesar 21.331 ton.

Tabel 2.6.
Daya Dukung untuk Pangan

Kabupaten	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (58,86%)	Jumlah Penduduk	Angka Konsumsi Beras (kg/ per kapita/per tahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Amuntai Selatan	8.328	4.902	48.261	124	5.984	0,82	-1.082
Amuntai Tengah	11.421	6.722	24.307	124	3.014	2,23	3.708
Amuntai Utara	11.203	6.594	52.537	124	6.515	1,01	79
Babirik	15.598	9.181	21.243	124	2.634	3,49	6.547
Banjang	14.424	8.490	20.192	124	2.504	3,39	5.986
Danau Panggang	9.671	5.692	10.195	124	1.264	4,50	4.428
Haur Gading	6.560	3.861	20.339	124	2.522	1,53	1.339
Paminggir	713	420	20.348	124	2.523	0,17	-2.103
Sungai Pandan	17.090	10.059	78.888	124	9.782	1,03	277
Sungai Tabukan	8.743	5.146	24.142	124	2.994	1,72	2.152
Hulu Sungai Utara	103.751	61.067	320.452	124	39.736	1,54	21.331

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Hulu Sungai Utara (HSU) Dalam Angka Tahun 2023, luas lahan panen Kabupaten HSU pada tahun 2022 seluas 7.165 ha dengan jumlah produksi sebesar 37.127 ton. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas padi di Kabupaten HSU sebesar 51,82 kuintal/ha.

Tabel 2.7.
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kuintal/ha)
1.	Danau Panggang	263	1.315	50,00
2.	Paminggir	-	-	-
3.	Babirik	821	4.343	52,87
4.	Sungai Pandan	1.216	6.596	54,22
5.	Sungai Tabukan	328	1.720	52,50
6.	Amuntai Selatan	349	1.810	51,85
7.	Amuntai Tengah	634	3.280	51,75
8.	Banjang	2.031	10.173	50,09
9.	Amuntai Utara	917	4.753	51,81
10.	Haur Gading	606	3.137	51,75
Kab. HSU		**7.165**	**37.127**	**51,82**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Gambar 2.8.
Sebaran Lahan Baku Sawah

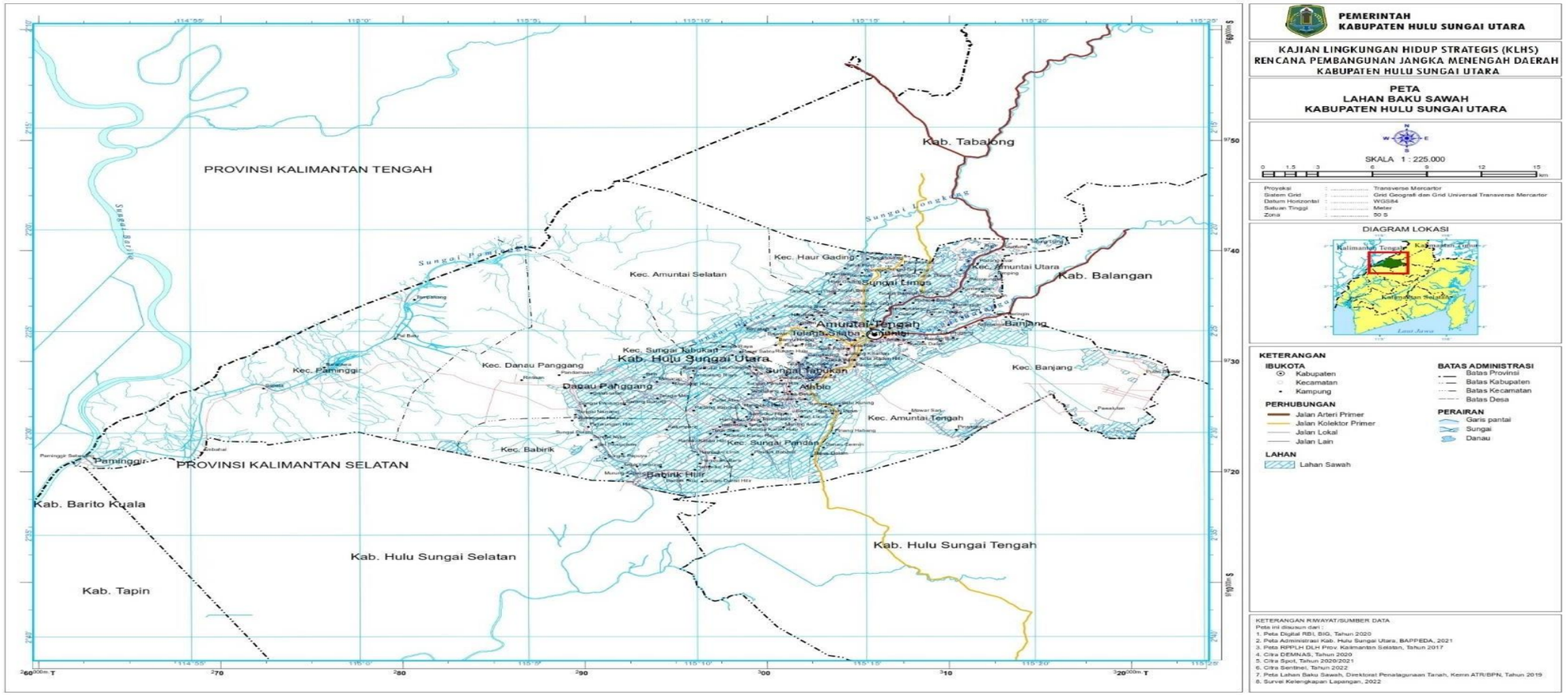

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

c. Daya Dukung Permukiman

Perkembangan permukiman dapat diketahui dari kebutuhan rumah dengan menggunakan perhitungan proyeksi penduduk selama 30 tahun mendatang dengan menggunakan asumsi 1 rumah diperkirakan dihuni 4 jiwa. Proyeksi kebutuhan rumah selama 30 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara mendatang disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.8.
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Kebutuhan Rumah (Unit)						
		2022	2027	2032	2037	2042	2047	2052
1	Paminggir	2.052	2.188	2.333	2.487	2.652	2.827	3.014
2	Danau Panggang	5.266	5.625	6.010	6.420	6.858	7.312	7.796
3	Babirik	4.978	5.313	5.670	6.052	6.459	6.886	7.342
4	Sungai Tabukan	3.806	4.063	4.339	4.633	4.947	5.274	5.623
5	Sungai Pandan	7.103	7.611	8.155	8.737	9.362	9.981	10.642
6	Amuntai Selatan	7.749	8.303	8.896	9.532	10.213	10.943	11.725
7	Amuntai Tengah	13.006	13.936	14.932	15.999	17.142	18.367	19.679
8	Banjang	4.797	5.119	5.464	5.832	6.224	6.643	7.090
9	Haur Gading	4.194	4.454	4.731	5.024	5.335	5.666	6.017
10	Amuntai Utara	5.271	5.648	6.051	6.484	6.947	7.443	7.975
Kab. Hulu Sungai Utara		58.223	62.261	66.580	71.198	76.138	81.343	86.904

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil kebutuhan rumah sampai dengan 30 tahun mendatang dapat diketahui jenis rumah dengan tipe sederhana (3) dengan luas lahan 100 m2, tipe sedang (2) dengan luas lahan 150 m2 dan tipe besar/mewah (1) dengan luas lahan 200 m2.

Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan rumah dan kebutuhan lahan yang harus disediakan untuk pembangunan rumah dengan tipe mewah, sedang dan sederhana dapat diketahui pada tahun 2051, luas lahan yang harus tersedia untuk rumah mewah diprediksikan 2.954.200 m2, sedangkan luas lahan yang disediakan untuk tipe rumah sedang sebesar 4.302.150 m2 dan luas lahan untuk rumah sederhana sebesar 4.345.200 m2. Rumah Berimbang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.9.
Rumah Berimbang Tahun 2026 – 2051

No	Kecamatan	2026			2031			2036		
		Mewah	Sedang	Sederhana	Mewah	Sedang	Sederhana	Mewah	Sedang	Sederhana
1	Paminggir	372	722	1.094	396	770	1.166	423	821	1.243
2	Danau Panggang	956	1.857	2.813	1.021	1.983	3.005	1.091	2.119	3.210
3	Babirik	903	1.753	2.657	964	1.871	2.835	1.029	1.997	3.026
4	Sungai Tabukan	691	1.341	2.032	737	1.432	2.169	787	1.529	2.316
5	Sungai Pandan	1.294	2.512	3.805	1.386	2.691	4.077	1.485	2.884	4.369
6	Amuntai Selatan	1.411	2.740	4.152	1.512	2.936	4.448	1.620	3.146	4.766
7	Amuntai Tengah	2.369	4.599	6.968	2.538	4.928	7.466	2.719	5.280	7.999
8	Banjang	870	1.690	2.560	929	1.803	2.732	991	1.925	2.916
9	Haur Gading	757	1.470	2.227	804	1.561	2.365	854	1.658	2.512
10	Amuntai Utara	960	1.864	2.824	1.029	1.997	3.026	1.102	2.140	3.242
Kab. Hulu Sungai Utara		10.583	20.548	31.130	11.317	21.973	33.290	12.102	23.497	35.599

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

Lanjutan Tabel 2.8

No	Kecamatan	2041			2046			2051		
		Mewah	Sedang	Sederhana	Mewah	Sedang	Sederhana	Mewah	Sedang	Sederhana
1	Paminggir	451	875	1.326	481	933	1.414	512	995	1.507
2	Danau Panggang	1.166	2.263	3.429	1.243	2.413	3.656	1.325	2.573	3.898
3	Babirik	1.098	2.132	3.229	1.170	2.273	3.443	1.248	2.423	3.671
4	Sungai Tabukan	841	1.633	2.473	896	1.741	2.637	956	1.856	2.812
5	Sungai Pandan	1.591	3.090	4.681	1.697	3.294	4.991	1.809	3.512	5.321
6	Amuntai Selatan	1.736	3.371	5.107	1.860	3.612	5.472	1.993	3.870	5.863
7	Amuntai Tengah	2.914	5.657	8.571	3.122	6.062	9.183	3.345	6.495	9.840
8	Banjang	1.058	2.054	3.112	1.129	2.192	3.321	1.205	2.340	3.545
9	Haur Gading	907	1.761	2.668	963	1.870	2.833	1.023	1.986	3.008
10	Amuntai Utara	1.181	2.293	3.474	1.265	2.457	3.722	1.356	2.632	3.988
Kab. Hulu Sungai Utara		12.941	25.128	38.069	13.826	26.845	40.671	14.771	28.681	43.452

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Data menunjukkan bahwa IKP Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 5 (lima) tahun cukup baik, kecuali pada tahun 2023 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2024, IKP Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat signifikan menjadi 81,2. Kondisi tersebut menunjukkan semakin meningkatnya ketahanan pangan di wilayah ini.

Tabel 2.10.
Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketahanan Pangan	80,40	81,05	82,05	74,23	81,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSU, 2024 dan Badan Ketahanan Pangan RI, 2025

b. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Konsumsi adalah Nilai kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Publikasi dari Badan Pangan Nasional, memberikan gambaran perkembangan SPPH Konsumsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambar 2.9.
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2021-2024

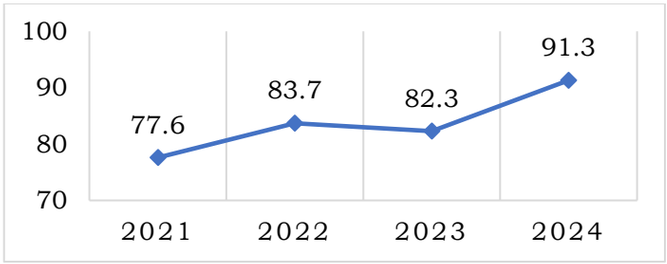

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024, nilai SPPH Konsumsi mencapai cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2023 sempat mengalami penurunan. Namun kondisi pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni mencapai 91,3.

c. Kapasitas Air Baku

Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara diperoleh informasi IKLH tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 65,04, 63,12 dan 65,04 dengan kriteria Sedang. Kondisi 3 (tiga) tahun ini menunjukkan kecenderungan penurunan nilai IKLH di Kabupaten HSU.

Secara lengkap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	47,08	60	55	50	50,67	51,33
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,77	89,11	89,40	89,03	92,13	95,99
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)				37,73	40,39	38,03
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			**65,04**	**63,12**	**64,74**	**66,50**
Kriteria			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. HSU, 2023 dan LKjIP Kab. HSU Tahun 2024

1. Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan pada 3 (tiga) lokasi pantau yaitu pada Sungai Balangan, Sungai Haur Gading dan Sungai Nagara dengan 7 (tujuh) parameter diantaranya DO, TTS, Total Posphat, BOD, COD, E Coli, Total Coliform. Dengan hasil dari titik pantau nilai IKA Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 dengan nilai 50,67 yang dianggap kualitas air baku dalam masih dalam kondisi sedang meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kualitas, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12.
Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks KualitasAir	47,80	60	55	50	50,67	51,33
Evaluasi	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	sedang	sedang

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2024

2. Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pada beberapa lokasi sampling yaitu pada pemukiman di Komplek Perumahan CPS Sei Malang; pada Perkantoran di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara dan Padat Transportasi di Terminal banua Lima dengan parameter yang terpenting diantaranya SO2 dan NO2. Katagori IKU baik dengan nilai 1 – 50; sedang nilai 51 – 100; tidak sehat nilai indeks 101 – 199; sangat tidak sehat nilai indeks 200 – 299 dan berbahaya niliai indeks 300 – lebih. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 telah mencapai 92,13 merupakan katagori kondisi sangat baik.

Tabel 2.2
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	89,77	89,11	89,40	89,03	92,13	95,99
Evaluasi	baik	baik	baik	baik	sangat baik	sangat baik

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2024

b. Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per

provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, berkelanjutan maupun adalah genetik. pemanfaatan Pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang.

c. Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) 108 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

d. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan Sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan 109 industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau

pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya.

e. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan 112 industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah

tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Bencana Banjir

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kondisi fisik yang didominasi oleh kawasan geomorfologi rawa dan gambut dengan kelerengan 0-7%. Rawa dan gambut yang identik dengan dataran rendah dengan beberapa sungai ini menyebabkan drainase Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat terpengaruh oleh pasang surut dan debit air sungai. Pada saat hujan dan kondisi pasang surut naik, maka sangat mudah terjadi genangan yang menimbulkan banjir. Perbedaan pasang surut di muara Sungai Barito adalah 2 meter di daerah muara dan semakin kecil di daerah hulu. Pengaruh pasang surut dari Sungai Barito akan berpengaruh pada sungai dan anak sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Genangan di beberapa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara umumnya diakibatkan oleh dua hal, yaitu air hujan kiriman dari hulu dan air pasang naik. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya genangan karena hujan di suatu kawasan. Pertama, intensitas hujan lebih besar daripada perhitungan dalam perencanaan saluran drainase. Kedua, intensitas hujan sesuai dengan perencanaan akan tetapi limpasan air hujan tidak mampu ditampung oleh saluran drainase yang ada.

Curah hujan cukup besar dan diikuti oleh pasang naik di muara barito berdampak pada timbulnya banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara terutama daerah bukaan baru berawa dan kawasan sempadan sungai. Berdasarkan hasil analisis spasial untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari data http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK dan kajian BPBD, menunjukan bahwa wilayah risiko banjir terdapat 21,26 % termasuk kategori rendah, 78,67% kategori sedang, dan tinggi hanya 0,07%. Distribusi secara administrasi, Kecamatan Amuntai Tengah, Banjang, Danau panggang, dan Paminggir mempunyai risiko tinggi, sebagaimana disajikan pada tabel dan gambar di bawah.

Tabel 2.14.
Potensi Risiko Bencana Banjir Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Risiko Bencana Banjir			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Amuntai Selatan	6.158,06	9.805,73		15.396,79
2	Amuntai Tengah	802,84	7.680,21	4,99	8.488,04
3	Amuntai Utara	769,14	3.211,80		3.980,94
4	Babirik	840,60	6.349,64		7.190,24
5	Banjang	1.570,07	8.262,54	34,38	9.866,99
6	Danau Panggang	4.977,24	9.762,45	7,93	14.747,63
7	Haur Gading	1.351,95	2.444,89		3.796,84
8	Paminggir	2.189,48	20.024,86	21,07	19.297,75
9	Sungai Pandan	898,94	5.195,68		6.094,62
10	Sungai Tabukan	469,91	1.377,37		1.847,29
HULU SUNGAI UTARA		20.028,23	74.115,16	68,38	94.211,78
Persentase		21,26	78,67	0,07	100,00

Sumber: Analisis http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK

Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kurang lebih 90% wilayahnya adalah rawa, pada kondisi curah hujan tinggi lokasi yang mengalami genangan air bertambah, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Gambar 2.10.
Risiko Banjir Kabupaten Hulu Sungai Utara

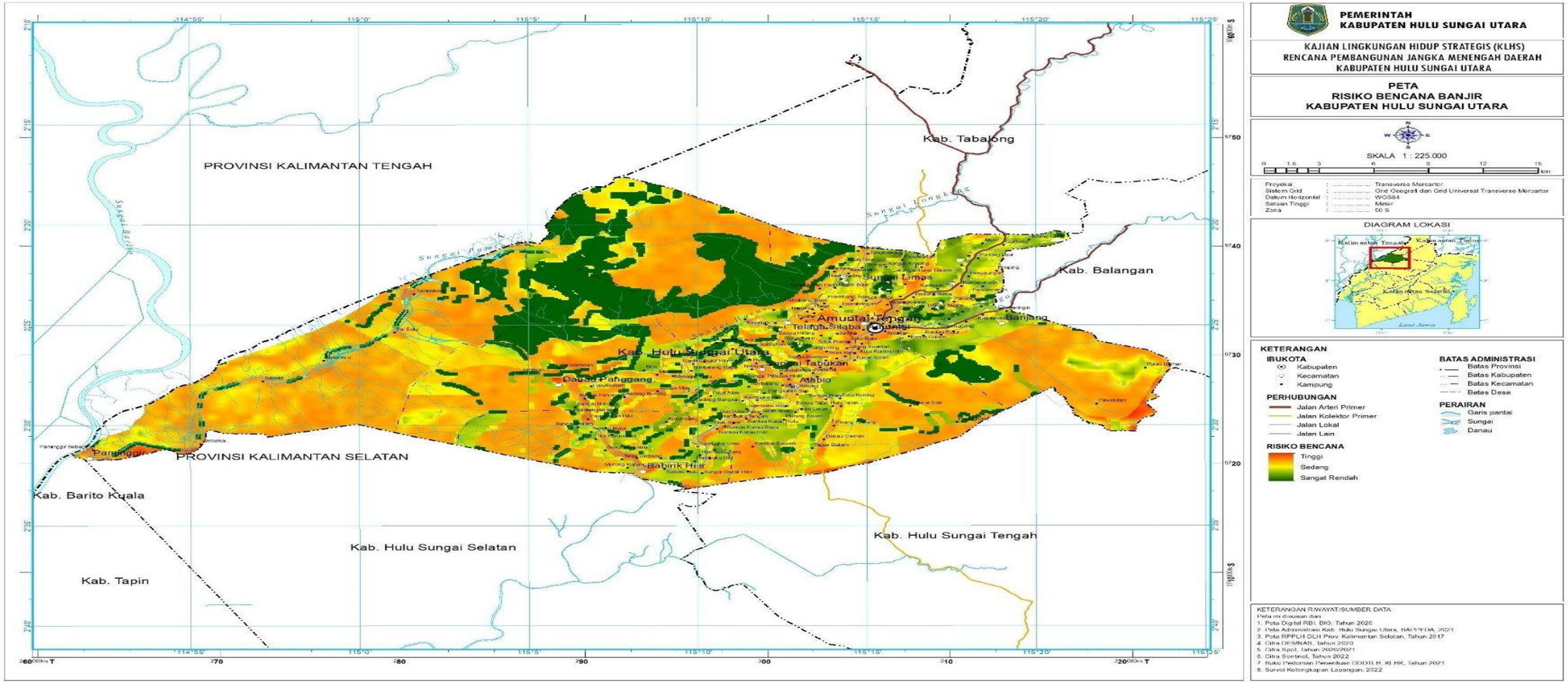

b. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran sering terjadi pada kawasan perkotaan daripada kawasan pedesaan, karena pusat pertumbuhan penduduk terpusat di perkotaan yang menyebabkan aktivitas di kawasan perkotaan semakin tinggi dan rumah lebih rapat, sehingga peluang terjadinya kebakaran di kawasan perkotaan lebih besar.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan diperlukan beberapa hal penting seperti:

1. Menganalisa titik rawan kebakaran terutama pada daerah lahan gambut dan lahan yang mudah terbakar.
2. Melakukan patroli secara rutin.
3. Mendeteksi kebakaran hutan atau lahan sedini mungkin.
4. Mempersiapkan alat pemadaman kebakaran.
5. Mengadakan penyuluhan dan edukasi.

Gambar 2.11.
Risiko Karhutla Kabupaten Hulu Sungai Utara

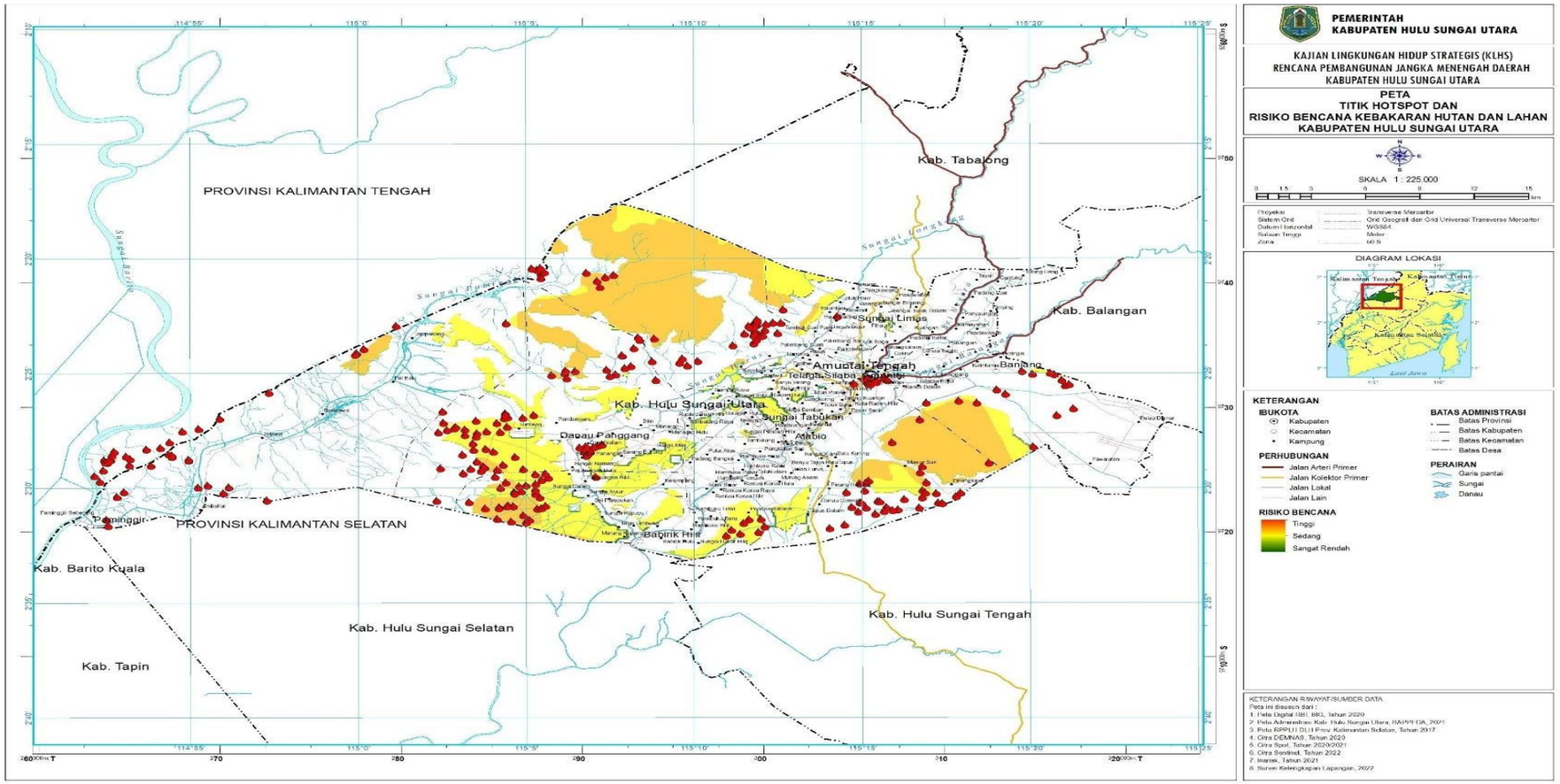

c. Risiko Bencana Cuaca Ekstrim

Angin puting beliung adalah sebuah angin kencang yang memiliki gerakan memutar, berasal dari awan cumulonimbus dengan kecepatan lebih dari 64,4 km/jam atau 34,8 knot serta terjadi dalam waktu singkat sekitar 5 menit dengan luas wilayah daratan tidak lebih dari 2 km persegi. Dengan kecepatan serta jangkauan yang dimilikinya angin puting beliung dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada wilayah yang dilewatinya. Angin puting beliung biasa terjadi pada siang hari atau sore hari terutama ketika musim pancaroba. Ketika kemarau, proses terjadinya puting beliung disebabkan pusat tekanan rendah lokal di suatu tempat. Umumnya terjadi di tempat terbuka seperti persawahan. Adanya wilayah terbuka, lalu terkena panas yang tinggi dan terjadi angin puting beliung. Pada musim hujan, angin puting beliung disebabkan pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup tebal yang membawa uap air, maka ketika terjadi hujan atau sebelum terjadi hujan awan tersebut akan menghasilkan angin downburst.

Memasuki musim kemarau, curah hujan berada pada level terendah. Kekeringan juga terjadi pada material bahan organik yang terdapat di rawa, semak, dan lahan sawah. Material bahan organik ini merupakan bahan yang mudah terbakar, sehingga potensial sekali dalam memicu kebakaran lahan. Selain kebakaran bencana yang potensial terjadi adalah angina puting beliung. Berkurangnya tutupan pohon dan meluasnya lahan terbuka permukiman mengakibatkan perubahan keseimbangan turbulensi udara yang dapat memicu terjadinya puting beliung.

Berdasarkan hasil analisis spasial untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari data http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/ arcgis / rest/services/inaRISK dan kajian BPBD, menunjukan bahwa risiko bencana cuaca ekstrim terdapat 90,52% termasuk kategori sedang, 1,0 kategori rendah, dan 7,17% kategori tinggi. Distribusi secara administrasi, semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat lokasi dalam kategori tinggi.

Tabel 2.15.
Risiko Cuaca Ekstrim Setiap Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Risiko Bencana Cuaca Ekstrim				Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	blank	
1	Amuntai Selatan	310,44	14.793,65	856,95	2,76	15.396,79
2	Amuntai Tengah		7.265,29	1222,75		8.488,04
3	Amuntai Utara	8,84	3.196,68	775,42		3.980,94
4	Babirik	473,70	6.251,80	464,74		7.190,24
5	Banjang		8.963,16	903,83		9.866,99
6	Danau Panggang	0,68	14.098,79	648,15		14.747,63
7	Haur Gading	0,68	3.523,08	273,08		3.796,84
8	Paminggir		20.416,00	587,66	1.231,74	19.297,75
9	Sungai Pandan	2,43	5.344,09	748,10		6.094,62
10	Sungai Tabukan	146,89	1.428,71	271,68		1.847,29
HULU SUNGAI UTARA		943,67	85.281,25	6.752,36	1.234,50	94.211,78
Persentase		1,00	90,52	7,17	1,31	100,00

Sumber: Analisis http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK

Pada tahun 2023 telah terjadi bencana puting beliung terjadi pada bulan Oktober 2023, jumlah rumah yang rusak akibat kejadian tersebut mencapai 40 unit dengan korban sebanyak 47 Kepala Keluarga (KK) dengan 122 jiwa (Antara Kalsel, 26 Oktober 2023).

Gambar 2.12.
Risiko Cuaca Ekstrim di Kabupaten Hulu Sungai Utara

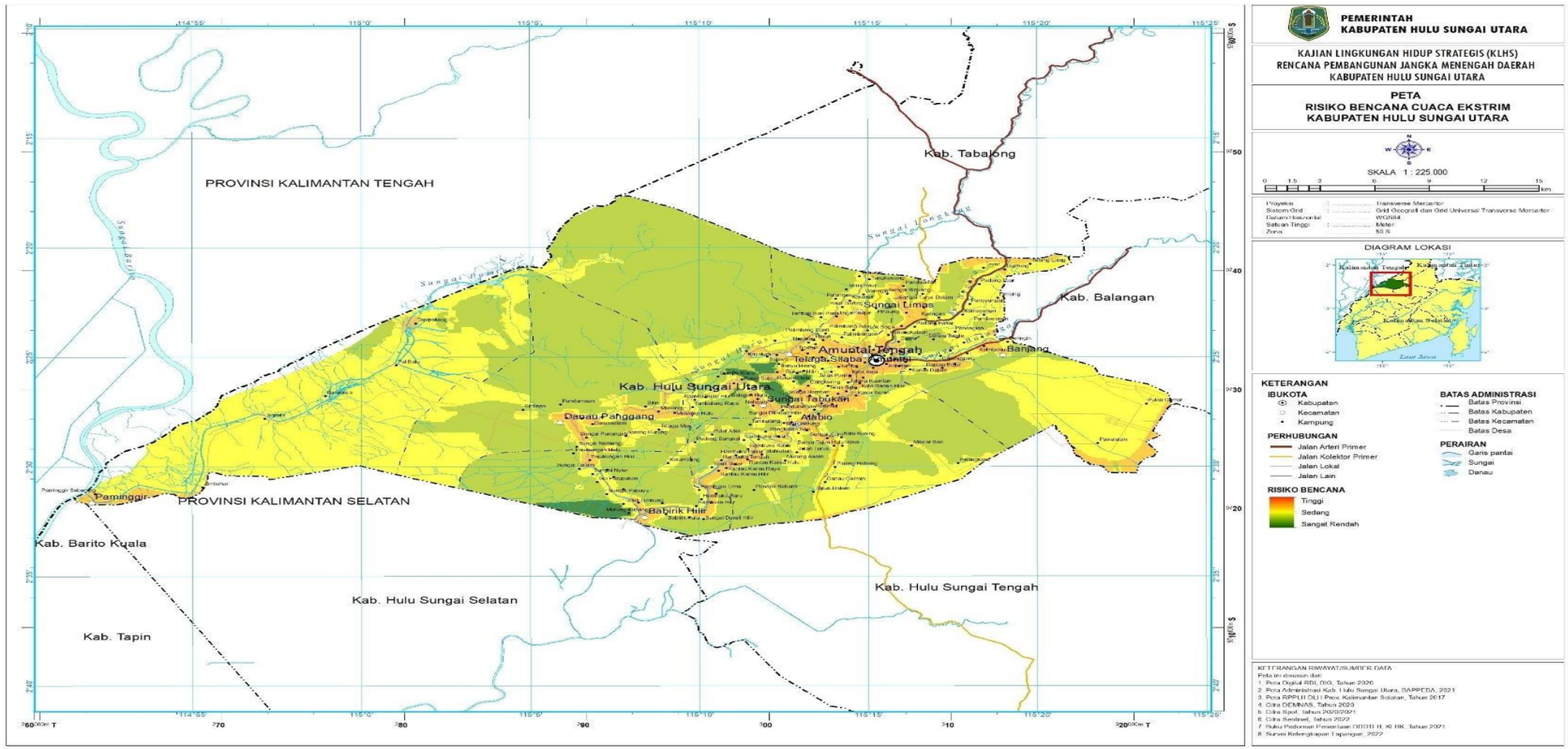

d. Risiko Bencana Kekeringan

Berdasarkan hasil analisis spasial untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari data http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/ arcgis/rest/ services/inaRISK dan kajian BPBD, menunjukan bahwa risiko bencana kekeringan terdapat 59,43% termasuk kategori sedang, kategori rendah 39,70% dan kategori tinggi 0,87%. Distribusi secara administrasi, semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat lokasi dalam kategori sedang dan beberapa kecamatan terdapat lokasi kategori tinggi yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Banjang dan Paminggir.

Tabel 2.16.
Risiko Bencana Kekeringan Setiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Risiko Bencana Kekeringan (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Amuntai Selatan	11.917,99	4.028,86	16,93	15.396,79
2	Amuntai Tengah	1.337,18	7.074,26	76,59	8.488,04
3	Amuntai Utara	1.631,12	2.333,85	15,97	3.980,94
4	Babirik	4.105,45	3.084,77	0,02	7.190,24
5	Banjang	2.835,86	6.586,69	444,44	9.866,99
6	Danau Panggang	7.810,18	6.937,44		14.747,63
7	Haur Gading	2.502,80	1.294,04		3.796,84
8	Paminggir	2.909,29	19.058,06	268,05	19.297,75
9	Sungai Pandan	1.672,64	4.421,98		6.094,62
10	Sungai Tabukan	678,67	1.168,62		1.847,29
HULU SUNGAI UTARA		37.401,19	55.988,58	822,01	90.707,12
Persentase		**39,70**	**59,43**	**0,87**	**100,00**

Sumber: Analisis http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kekeringan diperlukan beberapa hal penting seperti:

1. Pertama, membuat penampungan air (embung) yang berfungsi sebagai penampung air saat hujan. Embung dapat menjadi penyedia air pada saat musim kemarau tiba. Tentu, kapasitas air yang tersedia tergantung dari luas areal dari embung itu sendiri. Artinya, semakin besar kapasitas embungnya , maka persediaan air semakin banyak sehingga lahan yang dialiri airnya juga cukup luas.
2. Kedua, melakukan perbaikan dan pembangunan saluran dan sarana irigasi. Karena saat ini banyak sekali saluran dan sarana irigasi yang rusak. Perbaikan saluran yang rusak dapat mempertahankan debit air dari hulu hingga ke hilir.

3. Keempat adalah proses penghijauan dan mengurangi konversi lahan di daerah hulu. Tanaman yang ditanam pada lahan-lahan kosong dapat menjaga dan mengikat butiran tanah saat terjadi hujan. Tanaman yang rapat juga bisa meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Ini akan mengurangi aliran permukaan dan penguapan sehingga air tanah akan tersedia lebih lama. Sebaliknya, konversi lahan di daerah hulu dapat mengurangi kemampuan lahan dalam menyerap air hujan. Akibatnya, pada saat musim hujan, air lebih banyak dialirkan melalui permukaan dan pada saat musim kemarau air cepat mengering.
4. Kelima membangun Hutan Kota. Hutan Kota sengaja dibuat untuk memperbaiki dan memelihara lingkungan kota. Hutan Kota penting untuk keseimbangan ekologi manusia dalam berbagai hal seperti, kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindung terik matahari, kehidupan satwa dalam kota dan juga sebagai tempat rekreasi.

Gambar 2.13.
Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Hulu Sungai Utara

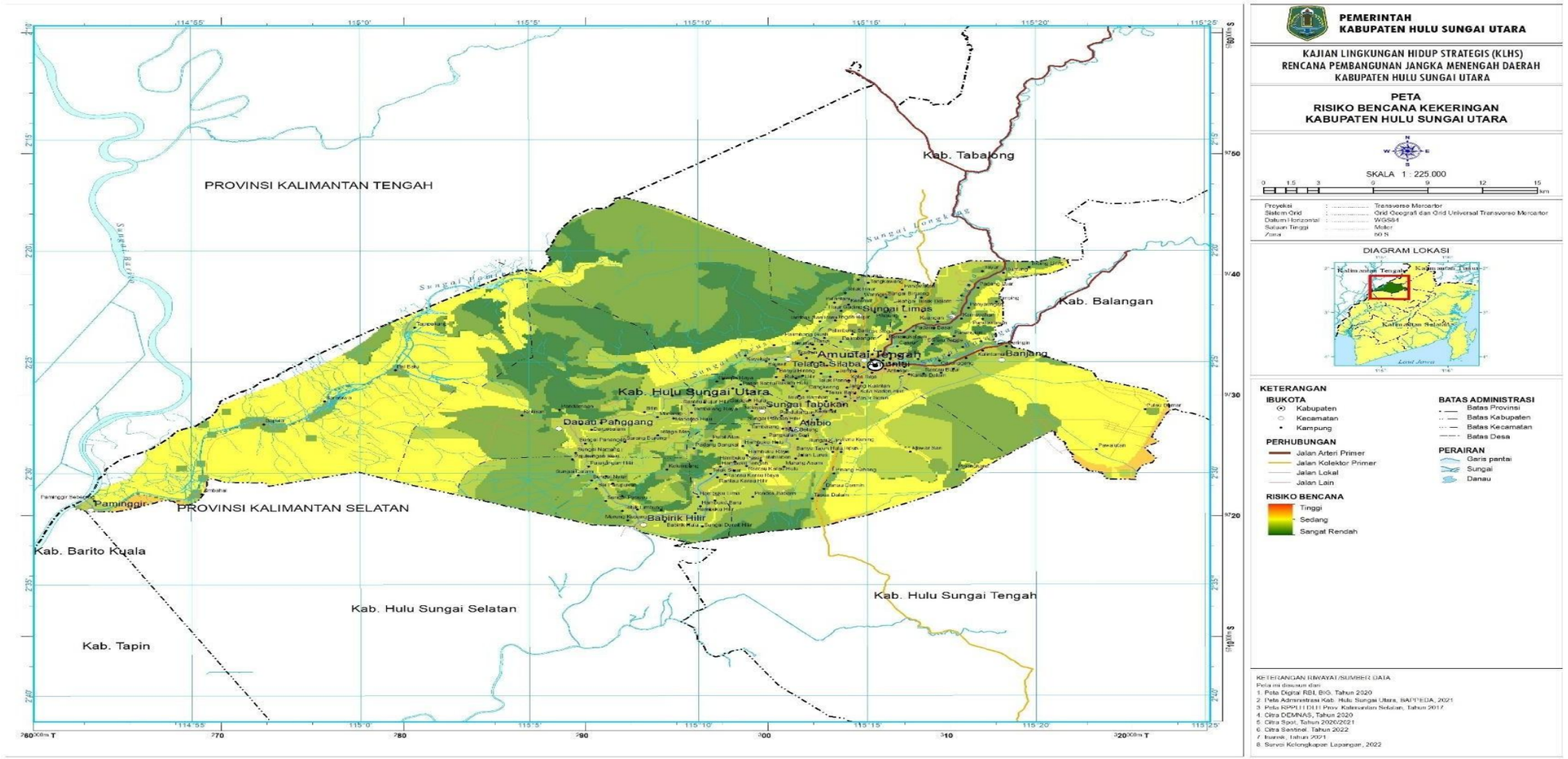

e. Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan salah satu bentuk dari lahan terdegradasi (Dariah et al. 2004). Menurut Nugroho dan Prayogo (2008), degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap yang dicirikan oleh penurunan sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Kondisi biofisik lahan yang cenderung menurun menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, lingkungan, dan ketersediaan pangan. Secara umum lahan kritis merupakan salah satu indikator terjadinya degradasi lingkungan sebagai dampak dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang bijaksana. Pengertian lahan kritis cukup bervariasi antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Adanya perbedaan sudut pandang dari masing-masing lembaga tersebut karena setiap Lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Lembaga pertanian memandang lahan kritis dikaitkan dengan produksinya, sedangkan Lembaga kehutanan memandang lahan kritis dikaitkan dengan fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, media produksi hasil hutan, dan sebagai media proteksi banjir dan/atau sedimentasi di wilayah hilir (Didu 2001).

Berdasarkan hasil analisis data dari BPDAS Barito lahan kritis di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami perubahan menjadi agak kritis. Tahun 2018 luas lahan kritis sebesar 70,19 Ha (0,08%) untuk kondisi kritis, potensial kritis sebesar 42.053,30 Ha (46,23%), dan tidak kritis sebesar 48.834,38 (53,69%) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.16. Pada tahun 2022, tidak ada wilayah kategori kritis dan sangat kritis, agak kritis sebesar 45,51 Ha (0,05%), potensial kritis sebesar 41.989,69 Ha (46,23%) dan tidak kritis 48.786,29 Ha (53,72%).

Tabel 2.17.
Kondisi Lahan Kritis Tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kondisi Lahan (Ha)				
	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis
Amuntai Selatan	-	70,19	-	11.207,70	4.148,85
Amuntai Tengah	-	-	-	3.970,43	4.538,42
Amuntai Utara	-	-	-	1.314,15	2.718,63
Babirik	-	-	-	4.027,11	3.206,16
Banjang	-	-	-	2.995,10	6.898,96
Danau Panggang	-	-	-	10.567,28	4.196,23
Haur Gading	-	-	-	1.470,02	2.338,45
Paminggir	-	-	-	6.029,71	13.268,03
Sungai Pandan	-	-	-	319,30	5.819,47

Kecamatan	Kondisi Lahan (Ha)				
	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis
Sungai Tabukan	-	-	-	152,49	1.701,17
Hulu Sungai Utara	-	70,19	-	42.053,30	48.834,38
Persentase (%)	-	0,08	-	46,23	53,69

Sumber: Analisis data KLHK, Tahun 2018.

Tabel 2.18.
Kondisi Lahan Kritis Tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kondisi Lahan (Ha)				
	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis
Amuntai Selatan	-	-	2,15	10.941,48	4.465,58
Amuntai Tengah	-	-	-	3.990,09	4.527,73
Amuntai Utara	-	-	17,14	1.295,92	2.680,83
Babirik	-	-	-	4.621,63	2.584,92
Banjang	-	-	2,81	2.991,57	6.855,34
Danau Panggang	-	-	5,72	10.440,86	4.328,27
Haur Gading	-	-	-	1.470,68	2.326,66
Paminggir	-	-	-	5.733,13	13.572,05
Sungai Pandan	-	-	17,68	352,37	5.744,08
Sungai Tabukan	-	-	-	151,95	1.700,83
Hulu Sungai Utara	-	-	45,51	41.989,69	48.786,29
Persentase (%)	**-**	**-**	**0,05**	**46,23**	**53,72**

Sumber: Analisis data KLHK, Tahun 2022.

Gambar 2.14.
Lahan Kritis Kabupaten Hulu Sungai Utara

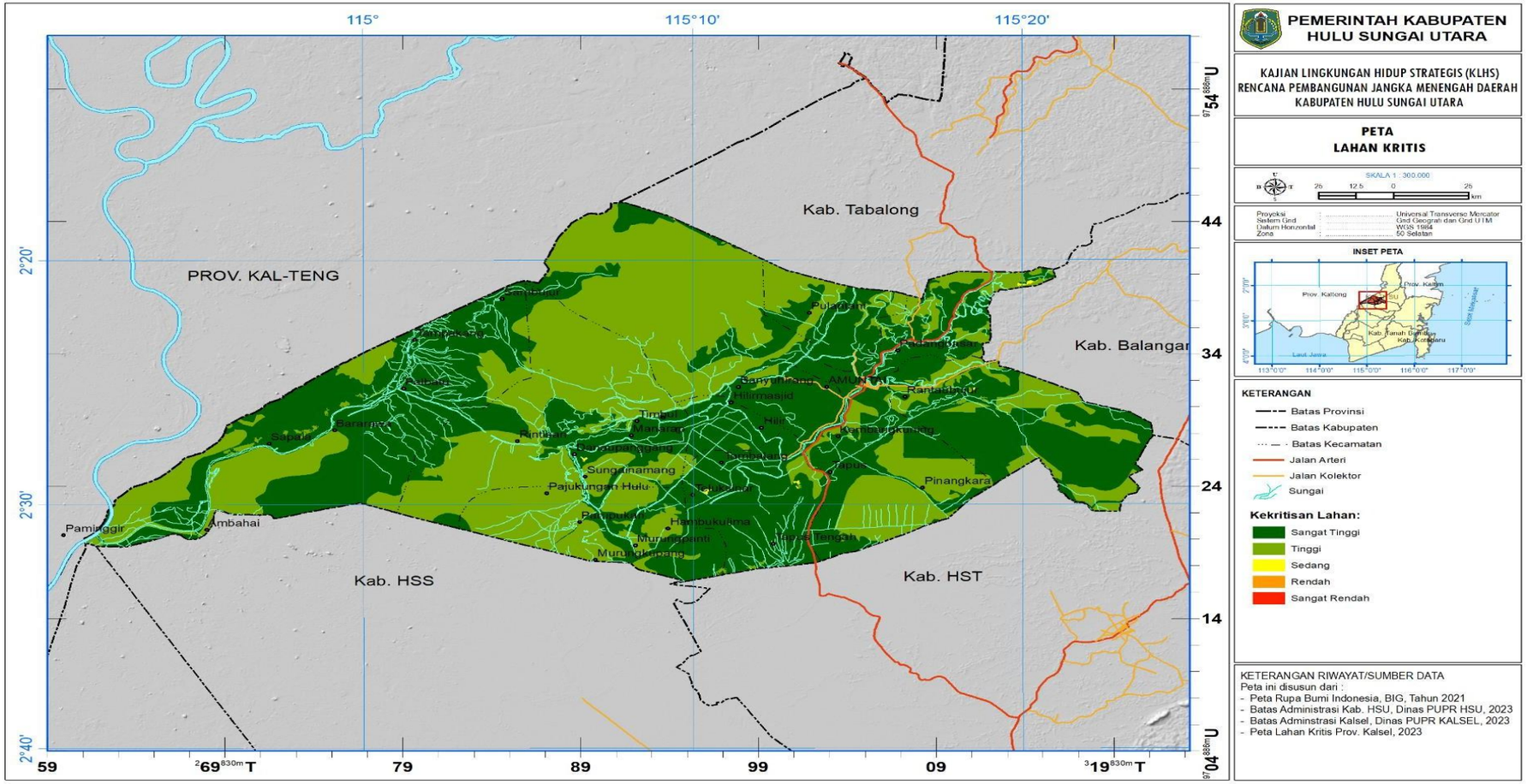

f. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Tabel 2.19.
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	128,40	126,00	126,00	114,97	127,77

Sumber: BNBP (publish buku IRBI), 2024

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan pada tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 114,97. Selanjutnya pada tahun 2024 indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) meningkat menjadi hanya 127,77 dengan kelas risiko sedang.

g. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan 49 sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

.

2.1.1.7. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 sebanyak 238.250 jiwa dengan proporsi laki-laki 49,87% dan perempuan 50,13% dengan persebaran masing-masing kecamatan seperti pada tabel di bawah. Dilihat dari distribusi penduduk per kecamatan, diketahui bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Amuntai Tengah dan yang paling sedikit di Kecamatan Haur Gading.

Tabel 2.20.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Danau Panggang	10.867	10.669	21.536	100,40
2	Paminggir	4.291	4.179	8.470	101,85
3	Babirik	10.396	10.160	20.556	102,20
4	Sungai Pandan	14.647	14.650	29.297	99,78
5	Sungai Tabukan	7.786	7.723	15.509	101,67
6	Amuntai Selatan	16.172	15.903	32.075	99,56
7	Amuntai Tengah	26.181	26.296	52.477	98,72
8	Banjang	9.672	9.455	19.127	102,20
9	Amuntai Utara	10.837	10.951	21.788	96,73
10	Haur Gading	4.254	4.151	8.405	102,48
	Jumlah	**119.428**	**118.822**	**238.250**	**100,78**

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2025

Adapun perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.15.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

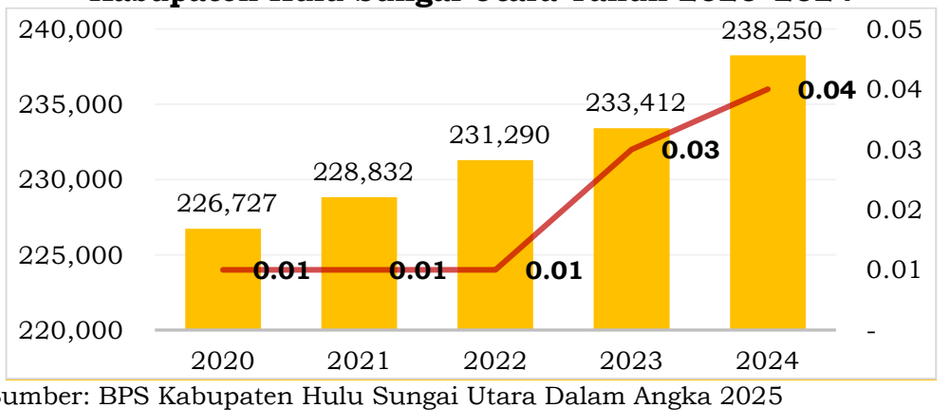

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 11.523 jiwa, dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebanyak 226.727 jiwa dan

meningkat hingga tahun 2024 menjadi 238.250 jiwa. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 sampai 2022 relatif sama di angka 0,01 dan pada tahun 2023 serta 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,03 dan 0,04.

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 memperlihatkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang angka laju pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Kecamatan Paminggir, Amuntai Selatan dan Haur Gading. Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Sungai Tabukan.

Tabel 2.213.
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020 ke 2024)
1	Danau Panggang	21.536	0,03
2	Paminggir	8.470	0,05
3	Babirik	20.556	0,03
4	Sungai Pandan	29.297	0,03
5	Sungai Tabukan	15.509	0,02
6	Amuntai Selatan	32.075	0,06
7	Amuntai Tengah	52.477	0,04
8	Banjang	19.127	0,04
9	Amuntai Utara	21.788	0,04
10	Haur Gading	17.415	0,05
	Hulu Sungai Utara	**238.250**	**0,04**

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2025

Untuk kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 sebesar 262,47 jiwa/km^2, dimana kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sungai Tabukan dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Paminggir seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.224.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km^2
1	Danau Panggang	16	136,24	21.536	158,07
2	Paminggir	7	192,77	8.470	43,94
3	Babirik	23	82,01	20.556	250,65
4	Sungai Pandan	33	59,92	29.297	488,94
5	Sungai Tabukan	17	22,25	15.509	697,03

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²
6	Amuntai Selatan	30	149,99	32.075	213,85
7	Amuntai Tengah	29	77,09	52.477	680,72
8	Banjang	20	110,64	19.127	172,88
9	Amuntai Utara	26	37,85	21.788	575,64
10	Haur Gading	18	38,96	17.415	447,00
	Jumlah	**219**	**907,72**	**238.250**	**262,47**

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2025

Dilihat dari struktur penduduk sebagaimana dimuat pada tabel di bawah, penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat digolongkan kedalam "penduduk muda". Hal ini terlihat dari jumlah penduduk pada umur 0-39 jumlahnya cukup banyak. Sementara untuk penduduk lanjut usia cukup kecil jumlahnya.

Tabel 2.23.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	9.444	10.370	19.814	8,32
5-9	9.584	10.355	19.939	8,37
10-14	10.104	10.798	20.902	8,77
15-19	9.825	10.459	20.284	8,51
20-24	9.951	10.782	20.733	8,70
25-29	8.020	9.231	17.251	7,24
30-34	8.985	9.468	18.453	7,75
35-39	9.068	9.213	18.281	7,67
40-44	8.743	8.764	17.507	7,35
45-49	8.286	7.846	16.132	6,77
50-54	7.515	7.108	14.623	6,14
55-59	6.224	5.485	11.709	4,91
60-64	5.007	4.216	9.223	3,87
65-69	3.392	2.689	6.081	2,55
70-74	2.186	1.482	3.668	1,54
75 +	2.488	1.162	3.650	1,53
Jumlah	**118.822**	**119.428**	**238.250**	**100,00**

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2025

Pada bagian ini, selain menyajikan kondisi eksisting demografi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, juga dimuat proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Proyeksi penduduk tahun 2030 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 251,09 ribu orang yang terdiri atas 25,9 ribu orang laki-laki dan 25,9 ribu orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut meningkat bila dibandingkan penduduk pada tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar 239,64 ribu orang.

Tabel 2.24.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2025-2030 (dalam ribu)

Proyeksi Umur	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	20,72	20,94	20,82	20,71	20,61	20,5	20,41
5-9	21,1	20,57	20,59	20,7	20,85	20,91	20,8
10-14	18,82	21,15	21,28	21,16	20,89	20,65	20,6
15-19	19,62	18,72	19,02	19,52	20,12	20,67	21,03
20-24	19,08	19,23	19,04	18,75	18,46	18,3	18,35
25-29	18,83	18,57	18,6	18,68	18,77	18,79	18,73
30-34	18,51	18,46	18,38	18,31	18,25	18,22	18,21
35-39	16,51	18,35	18,5	18,53	18,48	18,39	18,31
40-44	15,69	16,33	16,67	17,08	17,51	17,89	18,16
45-49	14,52	15,36	15,45	15,53	15,61	15,76	15,99
50-54	12,52	14,05	14,27	14,46	14,62	14,76	14,87
55-59	10,6	11,96	12,26	12,57	12,89	13,19	13,45
60-64	8,13	9,9	10,19	10,45	10,69	10,93	11,19
65-69	5,94	7,32	7,63	7,97	8,31	8,64	8,94
70-74	3,01	5	5,29	5,53	5,74	5,96	6,2
75+	2,72	3,72	4,09	4,51	4,95	5,41	5,87
TOTAL	**226,32**	**239,64**	**242,09**	**244,46**	**246,75**	**248,97**	**251,09**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Dari penduduk yang diproyeksikan pada tahun 2030, komposisi penduduk usia produktif yakni 15-64 tahun mencapai 67,02 persen, berarti mengalami penurunan bila dibandingkan kondisi tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar 67,16 persen. Penurunan juga terjadi pada penduduk belum produktif (0-14 tahun). Sebaliknya, penduduk tidak produktif yaitu 65 tahun keatas mengalami peningkatan dari 6,7 persen pada tahun 2020 diproyeksikan meningkat menjadi 8,37 persen pada tahun 2030.

Karakteristik penduduk hasil proyeksi sampai 2035 dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Tingkat kelahiran di Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 2,38 persen dan menurun menjadi 2,33 persen pada tahun 2030. Selanjutnya, tingkat kematian pada tahun 2025 diproyeksikan 23,45 persen menurun menjadi 21,62 persen di tahun 2030.

Adapun parameter hasil proyeksi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode Tahun 2025-2030 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.25.
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2025-2030

Parameter	2020	2025	2030
PENDUDUK			
Laki-Laki (000)	112,99	119,98	125,9
Perempuan (000)	113,33	119,66	125,19
Total (000)	226,32	239,64	251,09
Sex Ratio (%)	99,71	100,27	100,57
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (ribu orang):			
0-14	60,64	62,66	61,81
15-64	154,01	160,93	168,29
65+	11,67	16,04	21,01
Komposisi Umur (%):			
0-14	26,8	26,15	24,62
15-64	68,05	67,16	67,02
65+	5,16	6,7	8,37
Dependency Ratio (%)	46,95	48,91	49,22
FERTILITAS			
Total Fertility Rate (TFR)[1]	2,45	2,38	2,33
MORTALITAS			
Infont Mortality Rate (IMR)[1]	24,53	23,45	21,62

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beberapa indikator makro menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan data capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir, dapat diketahui indikasi kesejahteraan masyarakat abupaten Hulu Sungai Utara.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regionla Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

Nilai PDRB Kabupaten HSU atas dasar harga berlaku selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai PDRB ADHB tahun 2020 yaitu sebesar 4.968,81 miliar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp. 6.612,42 miliar. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh adanya inflasi.

Tabel 2.56.
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		PDRB (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	838,38	864,36	907,00	998,92	1.047,71
B	Pertambangan dan Penggalian	10,67	11,06	11,92	12,41	12,89
C	Industri Pengolahan	467,79	498,05	522,16	508,66	536,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,79	6,21	6,75	7,41	8,22
E	Pengadaan Air	41,31	43,83	47,03	50,45	55,05
F	Konstruksi	498,80	534,15	614,64	656,78	671,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	725,95	784,13	883,00	997,92	1.088,20
H	Transportasi dan pergudangan	359,34	372,10	413,93	469,96	534,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131,61	139,82	154,50	167,24	182,62
J	Informasi dan Komunikasi	200,46	217,64	236,84	254,38	272,19
K	Jasa Keuangan	158,78	168,71	175,19	196,28	212,40
L	Real Estate	173,83	184,43	200,16	213,64	229,96
M,N	Jasa Perusahaan	19,78	20,90	23,57	25,93	27,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	624,80	648,33	656,50	698,32	780,55
P	Jasa Pendidikan	482,21	505,97	537,50	563,77	620,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,36	137,25	150,04	161,99	171,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	109,95	116,50	130,05	144,24	160,62
PDRB ADHB		**4.968,81**	**5.253,45**	**5.670,77**	**6.128,32**	**6.612,42**

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2025

Tahun 2024 struktur perekonomian HSU didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi dan Jasa Pendidikan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB HSU pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,46 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 15,84 persen, disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,80 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,15 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,38 persen.

Tabel 2.67.
Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,87	16,45	15,99	16,30	15,84
B	Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,21	0,21	0,20	0,19
C	Industri Pengolahan	9,41	9,48	9,21	8,30	8,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
E	Pengadaan Air	0,83	0,83	0,83	0,82	0,83
F	Konstruksi	10,04	10,17	10,84	10,72	10,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	14,61	14,93	15,57	16,28	16,46
H	Transportasi dan pergudangan	7,23	7,08	7,30	7,67	8,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,65	2,66	2,72	2,73	2,76
J	Informasi dan Komunikasi	4,03	4,14	4,18	4,15	4,12
K	Jasa Keuangan	3,20	3,21	3,09	3,20	3,21
L	Real Estate	3,50	3,51	3,53	3,49	3,48
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,57	12,34	11,58	11,40	11,80
P	Jasa Pendidikan	9,70	9,63	9,48	9,20	9,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,40	2,61	2,65	2,64	2,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,21	2,22	2,29	2,35	2,43
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB HSU selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 juga menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan PDRB ini sangat dipengaruhi oleh adanya kenaikan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan oleh maraknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Nilai PDRB HSU tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3.872,62 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya sebesar 3.708,42 miliar rupiah.

Tabel 2.28.
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		PDRB (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	547,26	555,71	555,53	686,81	605,40
B	Pertambangan dan Penggalian	7,33	7,55	7,88	7,97	8,03
C	Industri Pengolahan	316,24	324,67	334,47	336,88	343,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,46	3,62	3,89	4,23	4,56
E	Pengadaan Air	29,43	30,90	32,82	34,50	36,25
F	Konstruksi	342,72	353,65	381,55	398,81	407,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	464,20	485,54	522,33	552,09	578,90
H	Transportasi dan pergudangan	245,45	250,68	265,33	277,12	290,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91,09	94,14	100,94	108,06	117,09
J	Informasi dan Komunikasi	156,77	169,12	179,33	189,24	197,51
K	Jasa Keuangan	102,18	103,09	101,34	111,45	118,44
L	Real Estate	125,37	130,16	138,53	146,30	153,01
M,N	Jasa Perusahaan	12,20	12,69	13,55	14,46	15,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	385,57	394,81	392,12	401,26	427,22
P	Jasa Pendidikan	325,96	335,04	350,03	360,79	382,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,77	86,27	92,27	97,11	101,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	70,33	71,87	76,61	81,35	87,03
PDRB ADHK		**3.303,34**	**3.409,50**	**3.548,52**	**3.708,42**	**3.872,62**

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terlihat pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi yaitu -0.66%. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua kab/kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua sektor. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali tumbuh hingga menjadi 3,21% dan 4,08% di tahun 2022 serta pada tahun 2023 kembali tumbuh sebesar 4,51%. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga berada pada kisaran 4,43%. Secara keseluruhan trend ini hampir sama dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.29.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,15	1,55	-0,03	5,63	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,35	3,00	4,36	1,09	0,83
C	Industri Pengolahan	-2,89	2,67	3,02	0,72	1,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,98	4,62	7,49	8,74	7,78
E	Pengadaan Air	8,07	5,00	6,21	5,12	5,06
F	Konstruksi	-2,79	3,19	7,89	4,52	2,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	-4,75	4,60	7,58	5,70	4,86
H	Transportasi dan pergudangan	-4,23	2,13	5,84	4,44	4,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,16	3,35	7,22	7,05	8,36
J	Informasi dan Komunikasi	8,11	7,87	6,04	5,52	4,37
K	Jasa Keuangan	0,83	0,89	-1,69	9,97	6,27
L	Real Estate	3,13	3,82	6,43	5,61	4,59
M,N	Jasa Perusahaan	-2,00	3,99	6,79	6,68	4,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,92	2,40	-0,68	2,33	6,47
P	Jasa Pendidikan	1,91	2,79	4,47	3,07	5,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,42	10,93	6,96	5,25	4,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,56	2,18	6,60	6,19	6,98
PDRB		**-0,66**	**3,21**	**4,08**	**4,51**	**4,43**

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU setelah pandemi COVID-19 tahun 2020 berada pada posisi yang lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU sebesar 4,43% sementara Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 5,23% dan nasional sebesar 4,95%.

Gambar 2.16.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024

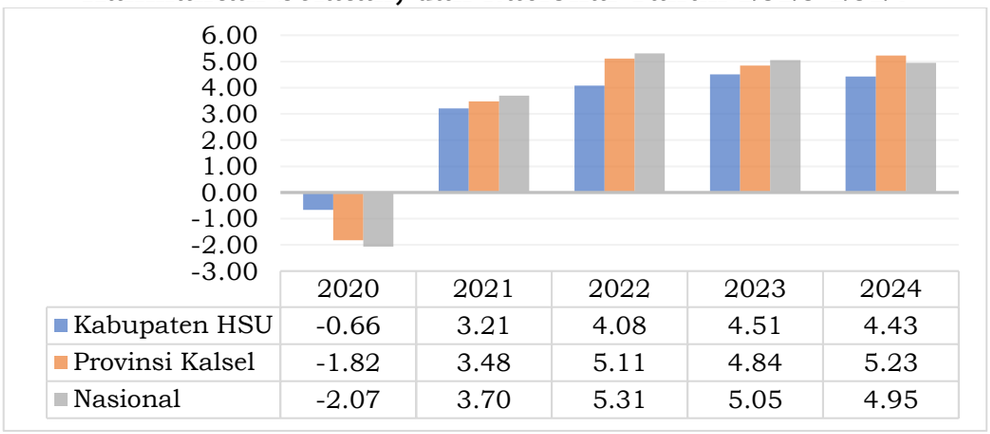

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten HSU	-0.66	3.21	4.08	4.51	4.43
Provinsi Kalsel	-1.82	3.48	5.11	4.84	5.23
Nasional	-2.07	3.70	5.31	5.05	4.95

Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2025

b. PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tren yang meningkat dari 2019 sampai tahun 2023. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan oleh membaiknya perekonomian setelah pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada tahun 2023, PDRB ADHB per Kapita HSU mencapai 26,06 juta rupiah. Peningkatan nilai dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perekonomian Hulu Sungai Utara berjalan dengan cukup baik walaupun masih dalam proses pemulihan pasca pandemi. Konsistensi ini perlu dijaga terus agar selalu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.30.
PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai PDRB (Milliar Rp)					
	ADHB	4.573,84	4.968,80	5.253,44	5.670,77	6.111,83
	ADHK 2010	3.151,54	3.303,33	3.409,50	3.548,52	3.708,42
2	PDRB perkapita *(Ribu Rp)*					
	ADHB	21.111,90	21.954,50	22.930,71	24.459,09	26.061,67
	ADHK 2010	14.210,21	14.595,67	14.882,10	15.305,46	15.813,23
3	Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,47	5,78	1,96	2,84	3,32
4	Jumlah penduduk (ribu orang)	234.004	226.323	229.101	231.847	234.514
5	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	-0,26	-3,28	1,22	1,19	1,15

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024

c. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (persentase Konsumsi RT untuk non makan) dipakai untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar makanan.

Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita didapatkan dari proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non makanan terhadap pengeluaran. Data BPS sebagaimana dimuat pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, porsi persentase Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan lebih tinggi dibandingkan persentase konsumsi makanan per kapita. Namun sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan per kapita per bulan selalu lebih tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat di kabupaten ini lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk pemenuhan konsumsi.

Tabel 2.31.
Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita Per bulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Pengeluaran konsumsi per Kapita perbulan (Rp)	1.018.951	1.198.578	1.143.666	1.141.092	1.225.868
2	Rata-rata Pengeluaran konsumsi Makanan per Kapita per bulan (Rp)	504.460	572 633	611 333,97	603.257	661.378
3	Rata-rata Pengeluaran konsumsi Non Makanan per Kapita per bulan (Rp)	514.491	625.945	532.322	537.834	564.490
4	Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan per kapita per bulan	49,47	47,78	53,45	52,87	53,95
5	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan	50,53	52,22	46,55	47,13	46,05

Sumber: BPS Kabupaten HSU, 2025

d. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Semakin besar rasio/angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Total Konsumsi Rumah Tangga selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024 konsisten meningkat setiap tahun. Di tahun 2020 Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp3.036,94 milyar dan meningkat sampai Rp3.559,45 miliar pada tahun 2024. Hal yang sama terjadi pada persentase Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita yang dalam periode tersebut, mengalami peningkatan dan mencapai 5,45 persen di tahun 2024.

Adapun uraian Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Hulu Sungau Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 202 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.72.
Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Konsumsi RumahTangga (Milyar)	3.036,94	3.068,14	3.217,84	3.375,63	3.559,45
2	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (%)	-0,36	1,03	4,88	4,90	5,45

Sumber: BPS Kab.HSU, 2025

e. Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk, yang nilainya berkisar antara 0 s/d 1, jika nilai indeks gini sama dengan Nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna, dan jika nilai indeks gini sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,319, kemudian mengalami penurunan serta peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 0,271. Angka terendah di tahun 2023, sedangkan angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 0,378. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.17.
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

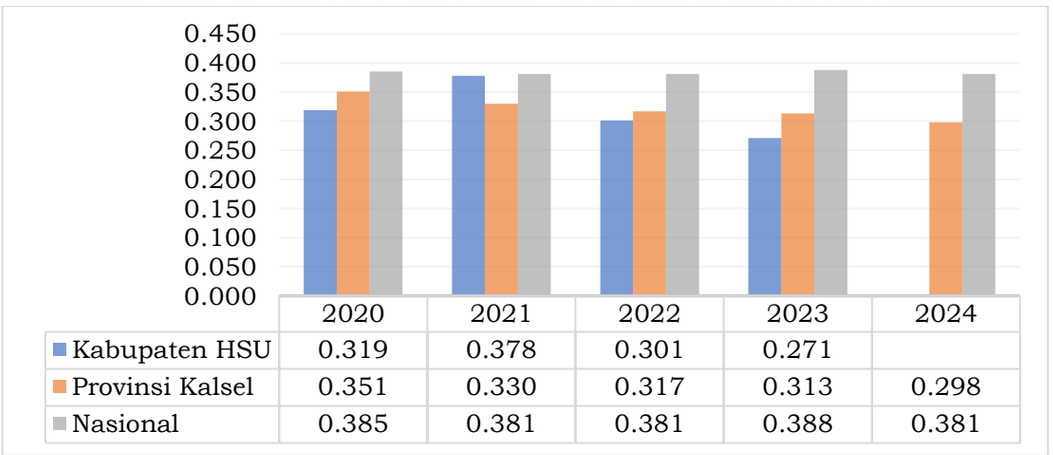

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten HSU	0.319	0.378	0.301	0.271	
Provinsi Kalsel	0.351	0.330	0.317	0.313	0.298
Nasional	0.385	0.381	0.381	0.388	0.381

Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 apabila dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional selalu lebih rendah. Hanya pada tahun tahun 2021 nilai

indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan.

f. Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan *(poverty line).*

Selama periode 2020–2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase berfluktuasi. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2024 (5,75 persen) sementara capaian tertinggi pada tahun 2021 (6,83 persen). Adapun tingginya tingkat kemiskinan pada tahun 2021 banyak disebabkan dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19. Kondisi kemiskinan tahun 2022 menurun pada September 2022, hal ini ditunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten HSU yang turun ke 6,49 persen dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kembali mengalami penurunan hingga menjadi 6,25 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan periode 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.33.
Profil Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rupiah)	488.237	501.994	526.919	561.429	597.894
2	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	14.718	16.186	15.497	15.018	13.929
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,14	6,83	6,49	6,25	5,75
4	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	0,85	0,76	0,86	0,62	0,539
5	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,20	0,12	0,15	0,13	0,083

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024

Garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 sebesar Rp 597.894 perkapita sebulan. Dengan garis kemiskinan sejumlah ini, persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurun menjadi 5,75. Sementara itu, untuk indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan masing-masing menurun dari tahun sebelumnya menjadi 0,539 dan 0,083.

Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar di bawah. Data pada gambar menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional menunjukkan kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Nasional mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.18.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional Tahun 2020–2024

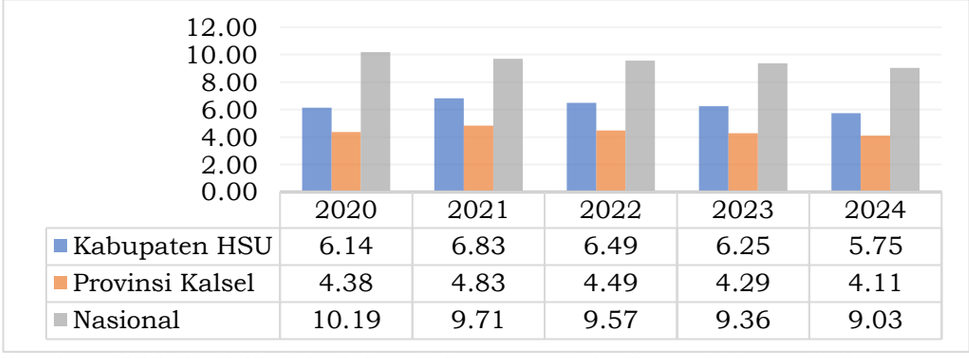

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten HSU	6.14	6.83	6.49	6.25	5.75
Provinsi Kalsel	4.38	4.83	4.49	4.29	4.11
Nasional	10.19	9.71	9.57	9.36	9.03

Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

Pada Tahun 2021 berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% (nol persen) pada tahun 2024. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara persentase Kemiskinan Ekstrem Pada Tahun 2022 sebesar 0,35% dimana untuk penghapusan kemiskinan ekstrem ini daerah diwajibkan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimana di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan data P3KE untuk data individu

ada sebanyak 79.554 individu dan berdasarkan data keluarga sebanyak 19.567 keluarga, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34.
Keluarga dan Individu Miskin Berdasarkan data P3KE pada Desil 1, 2 dan 3 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Data Keluarga				Data Per Individu			
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah
1	Amuntai Selatan	454	859	1,102	2,415	2,170	3,695	4,134	9,999
2	Amuntai Tengah	631	1,096	1,301	3,028	3,107	4,539	4,938	12,584
3	Amuntai Utara	195	470	708	1,373	915	2,034	2,803	5,752
4	Babirik	435	720	854	2,009	2,127	3,044	3,072	8,243
5	Banjang	349	537	744	1,630	1,646	2,062	2,744	6,452
6	Danau Panggang	641	908	1,076	2,625	2,981	3,698	3,941	10,620
7	Haurgading	243	423	517	1,183	1,150	1,708	1,907	4,765
8	Paminggir	242	395	440	1,077	1,144	1,532	1,507	4,183
9	Sungai Pandan	631	877	1,220	2,728	2,966	3,480	4,322	10,768
10	Sungai Tabukan	280	535	684	1,499	1,333	2,290	2,565	6,188
Jumlah		**4,101**	**6,820**	**8,646**	**19,567**	**19,539**	**28,082**	**31,933**	**79,554**

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.19.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2020–2024

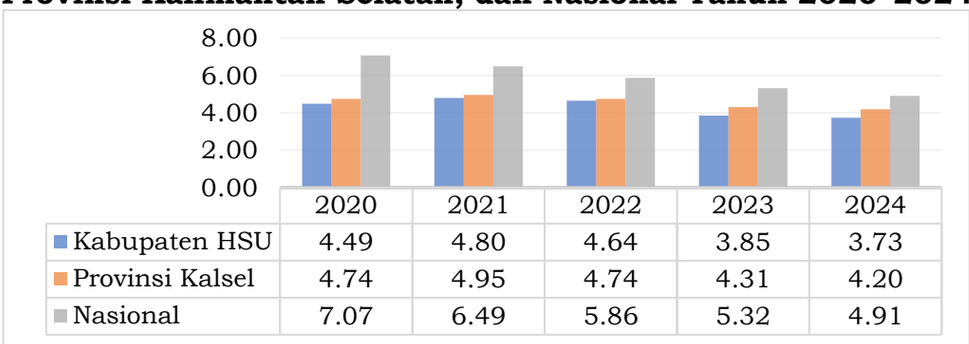

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten HSU	4.49	4.80	4.64	3.85	3.73
Provinsi Kalsel	4.74	4.95	4.74	4.31	4.20
Nasional	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 TPT sebesar 4,49% dan mengalami penurunan serta peningkatan ditahun berikutnya menjadi 3,73% pada

tahun 2024. Besaran TPT Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2020-2024 selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada dokumen ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perbaikan angka, Dimana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu hanya sebesar 69,09 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 71,74. Meskipun IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu mengalami peningkatan, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.20.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2020–2024

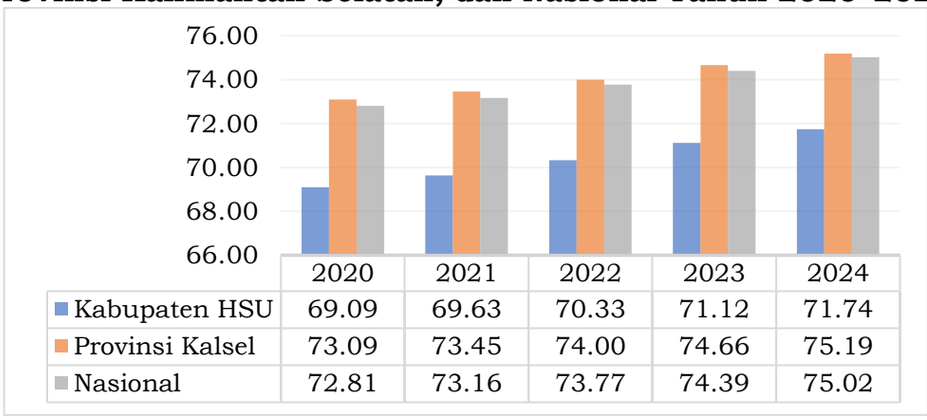

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten HSU	69.09	69.63	70.33	71.12	71.74
Provinsi Kalsel	73.09	73.45	74.00	74.66	75.19
Nasional	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02

Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

Dari gambar tersebut diatas menunjukan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun dari tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.85.
Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya
Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Usia Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (000)	IPM
2020	71,22	12,91	7,53	9.527	69,09
2021	71,50	12,92	7,75	9.644	69,63
2022	71,89	12,93	7,76	10.132	70,33
2023	72,21	13,19	7,77	10.491	71,12
2024	72,49	13,21	7,78	10.981	71,74

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

i. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi, dimana pada tahun tahun 2020 menjadi 9.527 ribu rupiah, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024 dengan angka 10.981 ribu rupiah. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.36.
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2020-2024

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)
2020	9.527
2021	9.644
2022	10.132
2023	10.491
2024	10.981

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

a. Angka Usia Harapan Hidup

Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dipengaruhi beberapa faktor seperti semakin baik dan mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, telah lebih baiknya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan serta semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan, namun selalu lebih rendah dibandingkan dengan Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.21.
Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2020–2024

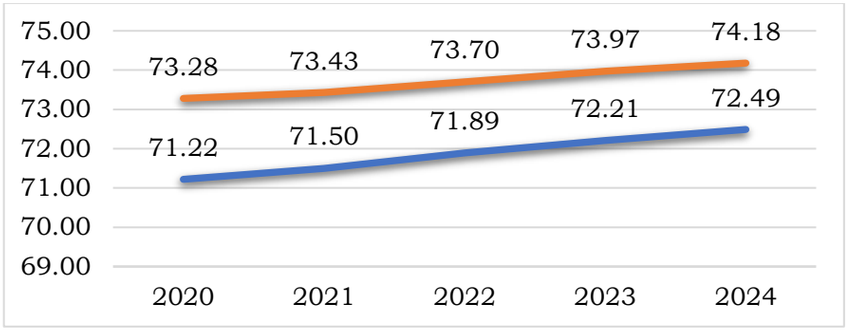

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

b. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Definisi Stunting menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 10,02 dan di tahun 2023 menjadi 10,30 dan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.22.
Perkembangan Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023

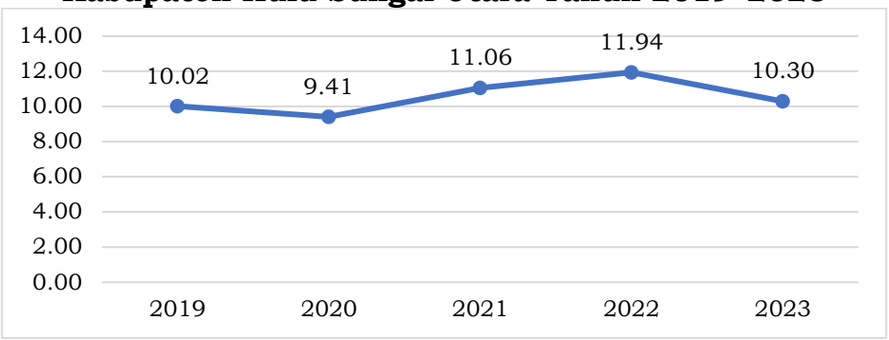

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan data diatas prevalensi Balita Stunting cenderung mengalami penurunan. Trend penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara didukung oleh berbagai kebijakan dan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait. Intervensi spesifik merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh jajaran kesehatan, sedangkan intervensi sensitif merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan secara lintas sektor atau konvergensi melalui kelembagaan aksi terintegrasi konvergensi percepatan penurunan stunting.

Dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk mencapai target nasional sesuai target RPJMN yaitu percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14% pada akhir tahun 2024, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, untuk mencapai target di perlukan kerja keras dan saling bahu- membahu dari semua pihak baik pemerintah maupun swasta.

c. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

d. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage)* dan Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) adalah Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Sementara Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) adalah Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap.

e. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Pada prinsipnya angkaini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariatif. Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan seperti menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang. Angka rata-rata lama sekolah 7,78 tahun bermakna bahwa rata-rata lama sekolah

penduduk usia dua puluh lima tahun keatas adalah masih kelas 2 SMP/MTS atau kelas 8.

Berdasarkan gambar di bawah, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu dibawah angka Provinsi Kalimantan Selatan, namun dari tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan. Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2020-2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.23.
Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2020-2024

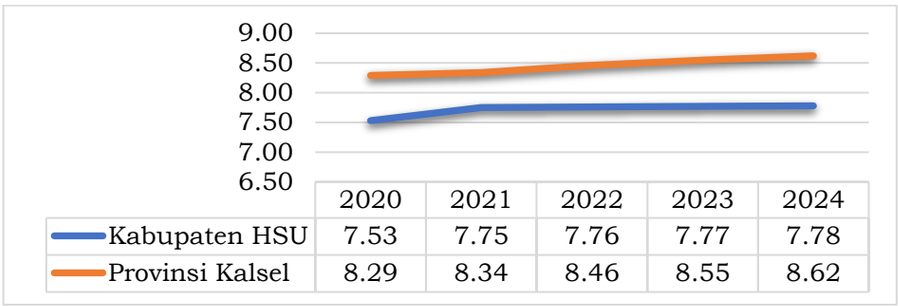

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten HSU	7.53	7.75	7.76	7.77	7.78
Provinsi Kalsel	8.29	8.34	8.46	8.55	8.62

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Pada tahun 2024, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaen Hulu Sungai Utara mencapai 13,21 tahun, naik 0,02 tahun dari tahun 2023 yang sebesar 13,19 Ini berarti, pada tahun 2024 penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat bersekolah selama 13,21 tahun.

Gambar 2.24.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. HSU Tahun 2020–2024

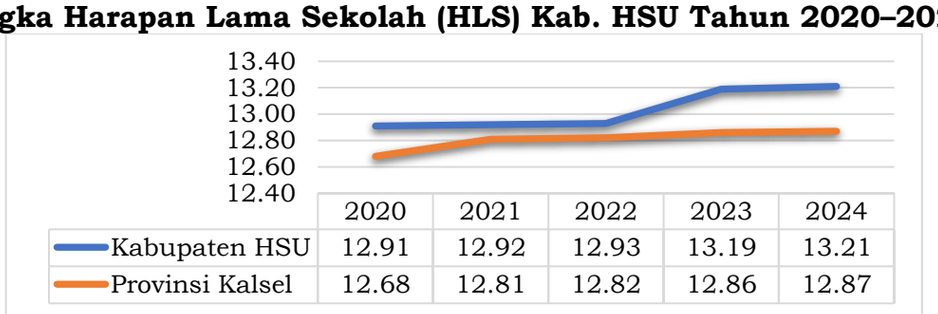

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten HSU	12.91	12.92	12.93	13.19	13.21
Provinsi Kalsel	12.68	12.81	12.82	12.86	12.87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi ketiga di Kalimantan Selatan setelah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin (14,86 dam 14,01).

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Data menunjukkan IPLM Kabupatan HSU tahun 2023 mencapai 82,34, yang berarti meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,43.

Gambar 2.25.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2023

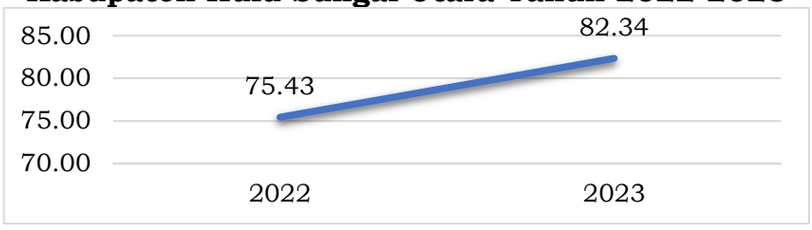

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024 dan Perpustakaan Nasional RI, 2024

d. Tingkat Kegemaran Membaca

Tingkat Kegemaran Membaca adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Data menunjukkan terjadi fluktuasi capaian Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat HSU selama 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2023 Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat HSU mencapai 49,77, berarti meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.26.
Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2022-2023

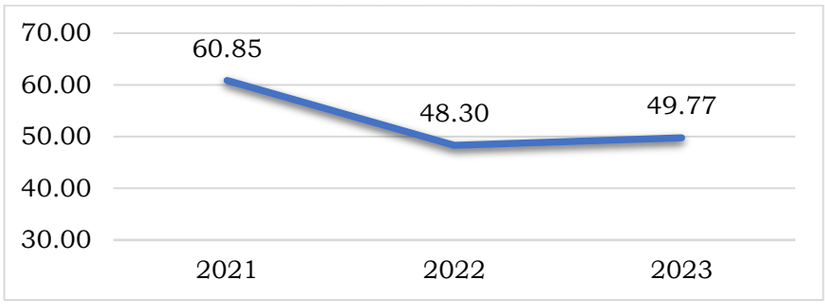

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024 dan Perpustakaan Nasional RI, 2024

e. Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi, dan Numerasi

Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

f. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi, dan Numerasi

Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran

hasil asesmen peserta didik 57 secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".

g. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3.

h. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan

sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kab (%)

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

b. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan anak, hak anak, dan perlindungan khusus anak, yang digunakan sebagai tolok ukur capaian pemerintah dalam melindungi anak. Indeks Perlindungan Anak di

Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 yaitu 58,20 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 59,63.

Tabel 2.97.
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

No	Indeks Perlindungan Anak	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Hulu Sungai Utara	n/a	n/a	58,20	59,63
2	Provinsi Kalsel	67,04	61,23	63,12	62,46

Sumber: Buku Indeks Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2022 sampai 2023 masih berada dibawah Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan, Dimana kondisi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,531 dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,445. Namun di Tahun 2023 meningkat menjadi 0,458. Capaian Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 0,507 dan lebih tinggi dari Indeks Ketimpangan Gender Nasional yang sebesar 0,447. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.27.
Indeks Ketimpangan Gerder (IKG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023

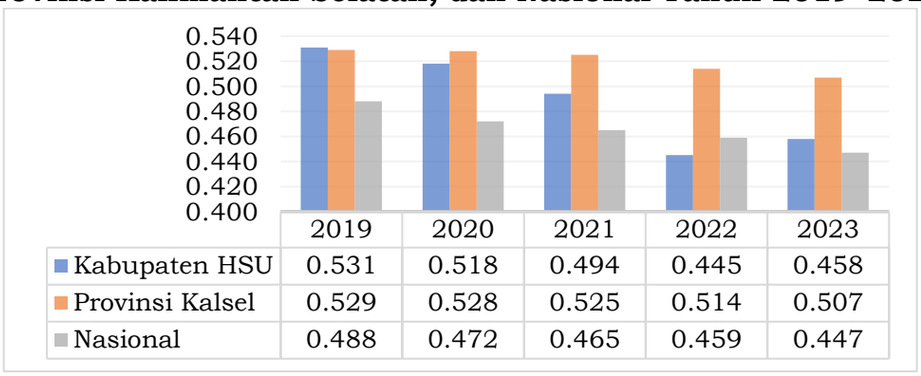

	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten HSU	0.531	0.518	0.494	0.445	0.458
Provinsi Kalsel	0.529	0.528	0.525	0.514	0.507
Nasional	0.488	0.472	0.465	0.459	0.447

Sumber: BPS RI, 2024

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur untuk mengevaluasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia berbasis gender. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG menjadi penting dalam pembangunan manusia karena indikatornya berpengaruh terhadap isu kesetaraan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 yaitu 91,59 dan menurun di tahun 2020 menjadi 91,52. Meskipun pada tahun berikutnya meningkat menjadi 92,01 di tahun 2022, namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi hanya 91,69.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2019 sampai 2023 lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, hanya pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Hulu Sungai Utara nilainya dibawah capaian nasional yang mencapai 91,85, sedangkan IPG Kabupaten HSU yaitu hanya 91,69.

Gambar 2.28.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023

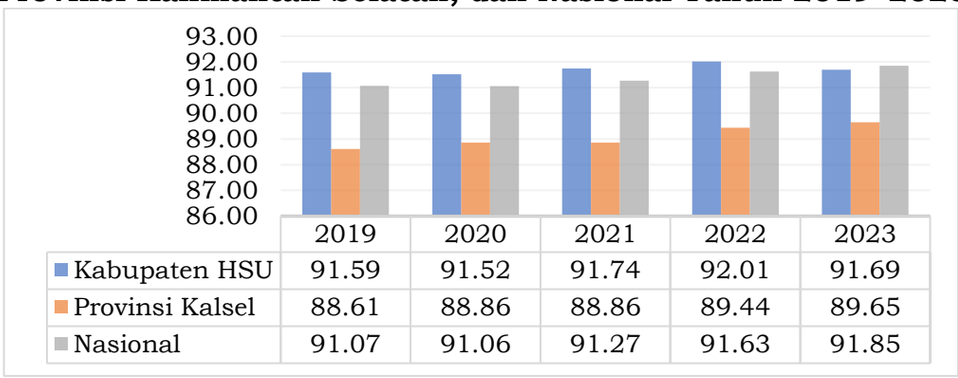

	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten HSU	91.59	91.52	91.74	92.01	91.69
Provinsi Kalsel	88.61	88.86	88.86	89.44	89.65
Nasional	91.07	91.06	91.27	91.63	91.85

Sumber: BPS RI, 2024

Berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, nilai capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Data pada gambar di bawah menunjukkan pada tahun 2019 IDG sebesar 70,36 dan pada tahun 2024 menjadi 70,65.

Gambar 2.29.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023

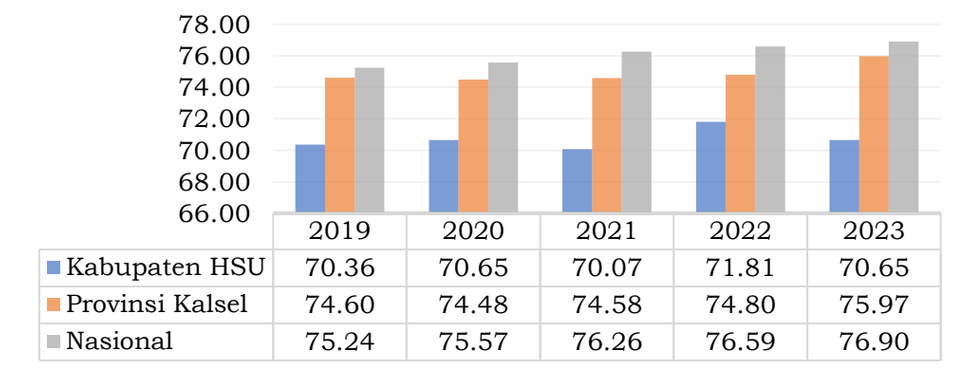

	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten HSU	70.36	70.65	70.07	71.81	70.65
Provinsi Kalsel	74.60	74.48	74.58	74.80	75.97
Nasional	75.24	75.57	76.26	76.59	76.90

Sumber: BPS RI, 2024

d. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga

untuk semua wilayah Indonesia. Indikator ini mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan. Adapun nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 adalah 64,42.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Data rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 yakni 47,37 sementara terendah mencapai 43,31 di tahun 2023. Rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 sebesar 45,10, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 45,10 memiliki makna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menganggung 45 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk Hulu Sungai Utara 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.38.
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	60.761	60.833	61.027	58.036	60,655
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	11.659	12.463	13.310	12.500	13,399
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)&(2)	72.420	73.296	74.337	70.536	74,054
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	154.307	155.535	156.953	162.876	164,196
5.	**Rasio ketergantungan (3)/(4)**	**46,93**	**47,13**	**47,37**	**43,31**	**45,10**

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Distribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 2022 sampai 2024 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 9,41 persen dan kondisi pada tahun 2024

hanya sebesar 8,32 persen. Perkembangan kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39.
Distribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi PDRB Industri Pengolahan	9,41	9,48	9,21	8,30	8,12

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2025

Selanjutnya, untuk Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 pada sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Kondisi terendah terjadi pada tahun 2020 dimana pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 meningkat mencapai 3,02 persen (2022) seiring dengan membaiknya perekonomian. Namun pada tahun 2023 kembali pertumbuhan sektor ini melambat menjadi 0,72 persen dan meningkat kembali menjadi 1,90 pada tahun 2024. Walau kembali meningkat di tahun 2024, namun laju PDRB sektor Industri Pengolahan belum dapat menyamai kondisi tahun 2022.

Tabel 2.40.
Laju PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju PDRB Industri Pengolahan	-2,89	2,67	3,20	0,72	1,90

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2025

b. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara . Data 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan berfluktuasinya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada 2020 kontribusi sektor ini mencapai 16,87 persen dan mengalami penurunan menjadi 15,84 persen di tahun 2024.

Tabel 2.41.
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16,87	16,45	15,99	16,3	15,84

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2025

c. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Distribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sektor ini berkontribusi sebesar 2,64 persen dan di tahun 2024 mencapai 2,7 persen. Meningkatnya kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengindikasikan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.102.
Distribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,65	2,66	2,72	2,73	2,76

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2025

Bila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, sejak tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Capaian tertinggi pada tahun 2024 yakni mencapai 8,36 persen dan terendah yaitu pada tahun 2020 yang terkontraksi hingga -0,16 persen. Sektor ini bertumbuhlebih tinggi dibandingkan tahun 2023, ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata bertumbuh dengan baik dan memiliki prospek yang besar untuk dikembangkan di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.43.
Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,16	3,35	7,22	7,05	8,36

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2025

d. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Data menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2024, rasio kewirausahaan mencapai 2,49 yang berarti meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha di wilayah ini.

Gambar 2.30.
Perkembagan Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

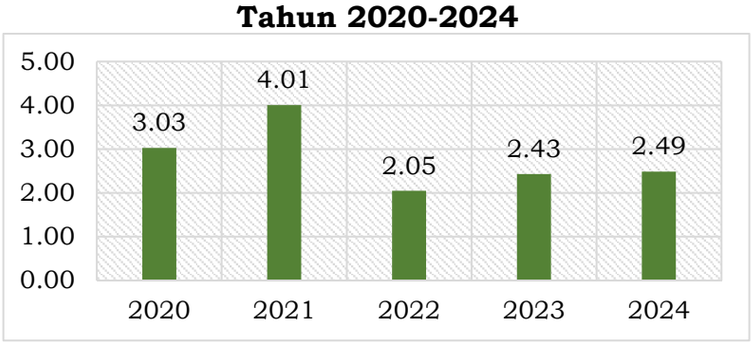

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2025

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan seluruh penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh adalah struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu TPAK yang baik adalah jika penduduk usia kerja yang sedikit, tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Korelasinya dengan TPAK adalah jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja. Sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan

angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.

Tabel 2.44.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,49	4,80	4,64	3,85	3,73
2	Jumlah Pengangguran	5.451	5.999	5,688	5.021	4.816
3	Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,08	71,41	69,35	75,34	73,89
4	Persentase Penduduk Yang Bekerja	95,51	95,20	95,36	96,15	96,27

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran dalam periode tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2024 jumlah pengangguran menunjukkan angka terendah, sedangkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 5.999.

Persentase penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Pada tabel diatas menunjukkan Persentase Penduduk yang Bekerja mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2020 sebesar 95,51 persen dan mengalami penurunan serta peningkatan sampai tahun 2024 menjadi 96,27 persen.

Sementara itu, TPAK di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup tinggi, dengan tren yang fluktuatif dari tahun 2020-2024, dimana tahun 2020 TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar 70,08 dan mengalami kenaikan serta peningkatan di tahun berikutnya hingga menjadi 73,89 pada tahun 2024. Selanjutnya, TPAK di Kabupaten Hulu Sungai berdasarkan jenis kelamin selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.115.
TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019–2023

No	TPAK	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laki-Laki	80,88	82,10	82,72	81,68	85,31
2	Perempuan	56,84	58,90	60,90	57,92	65,53

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024

f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus menunjukan perbaikan, dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 39 dengan kategori kurang inovatif dan skor nya terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 70,98 dengan kategori sangat inovatif. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 dan 2021 lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, namun sejak tahun 2022 sampai 2024 skor nya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.126.
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

No	Indeks Inovasi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Hulu Sungai Utara	39 (Kurang Inovatif)	27,28 (Kurang Inovatif)	58,91 (Inovatif)	60,48 (Sangat Inovatif)	70,98 (Sangat Inovatif)
2	Provinsi Kalsel	1.006 (Sangat Inovatif)	36,72 (Inovatif)	45,62 (Inovatif)	47,50 (Inovatif)	51,71 (Inovatif)

Sumber: Kepmendagri Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020-2024

g. Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.

h. Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.

i. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB 69 masing-masing daerah1. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap Tahun.

j. Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana di Tahun 2020 sebesar 99,79 persen dan meningkat sampai Tahun 2024 menjadi 99,81 persen.

Tabel 2.47.
Kontribusi Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	99,79	99,79	99,79	99,80	99,81

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2025

2.1.3.3. Transformasi Digital

a. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Indeks Pembangunan TIK menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk:

1. Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antar waktu;
2. Mengukur kesenjangan digital antarwilayah; dan
3. Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.

Hasil penghitungan Bdan Pusat Statistik Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 dan 2023 menunjukkan adanya peningkatan nilai. Nilai Indeks Pembangunan TIK tahun 2019 mencapai 4,65, meningkat menjadi 5,84 di tahun 2023. Walau mengalami peningkatan, namun secara rating mengalami penurunan dari posisi 8 menjadi posisi 2 terendah se Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini menunjukkan perkembangan pembangunan TIK di Hulu Sungai Utara relatif masih lambat dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital).

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di atas menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019 – 2023 berfluktuasi dari 6,27 persen (2019) menjadi -1,49 persen (2020), sementara di tahun lainnya masing-masing - 2,78 persen (2021); 6,77 persen (2022), dan 5,13 persen (2023).

Tabel 2.138.
Perkembangan dan Struktur PMTB di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019–2024

Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL PMTB						
a. ADHB (Miliar Rp)	1.346,11	1.342,57	1.418,40	1.595,15	1.744,62	1.861,92
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	901,49	888,10	912,80	974,58	1.024,54	1.067,28
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	27,25	27,02	27,00	28,13	28,55	28,16
Struktur PMTB						
a. Bangunan (Miliar Rp)	934,44	933,40	989,24	1.104,76	1.193,89	1.268,63
Bangunan (%)	69,42	69,52	69,74	69,26	68,43	68,14
b. Nonbangunan (Miliar Rp)	411,67	409,17	429,16	490,39	550,74	593,29
Nonbangunan (%)	30,58	30,48	30,26	30,74	31,57	31,86
Total PMTB (Miliar Rp)	1.346,11	1.342,57	1.418,40	1.595,15	1.744,62	1.861,92
Total PMTB (%)	100	100	100	100	100	100
Pertumbuhan[5] (%)						
a. Bangunan	6,50	-1,20	4,21	6,74	4,42	4,40

Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
b. Nonbangunan	5,70	-2,20	-0,82	6,85	7,01	3,59
Total PMTB	6,27	-1,49	2,78	6,77	5,13	4,17

Sumber: BPS Kab. HSU, 2025

b. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Di sisi lain, aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Hulu Sungai Utara Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (direct purchase) oleh penduduk (resident) Kabupaten Hulu Sungai Utara di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Hasil dari pengurangan nilai impor terhadap nilai ekspor disebut dengan Ekspor Neto atau Net Ekspor. Tanda dari nilai Net Ekspor menunjukkan posisi neraca perdagangan antar wilayah suatu perekonomian

apakah surplus atau defisit. Nilai Net Ekspor yang bertanda positif mengindikasikan bahwa neraca perdagangan mengalami surplus karena nilai ekspor lebih tinggi dibandingkn nilai impor. Sementara defisit neraca perdagangan terjadi ketika nilai impor lebih besar dibandingkan nilai ekspor, yang mengakibatkan nilai Net Ekpor bertanda negatif.

Tabel 2.149.
Perkembangan Ekspor Neto di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total Nilai Ekspor Neto						
a. ADHB (Miliar Rp)	-2.017,90	-2.004,31	-2.033,68	-2.400,64	-2.705,34	-3.002,35
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-1.454,42	-1.428,04	-1.412,40	-1.474,27	-1.554,68	-1.654,85
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-40,85	-40,34	-38,71	-42,33	-44,26	-45,40

Sumber: BPS Kab. HSU, 2025

Dalam kurun waktu 2019-2023, nilai ekspor neto Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanda negatif yang berarti terjadi defisit neraca perdagangan. Hal ini diakibatkan oleh tingginya nilai impor dibandingkan nilai ekspor Kabupaten Hulu Sungai Utara. Defisit neraca perdagangan mengindikasikan bahwa aktivitas pengeluaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sangat bergantung pada komoditas yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.1.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Akses hunian layak terpenuhi jika memenuhi seluruh kriteria kelayakan akses air minum layak, sanitasi layak, ketahanan struktur bangunan (yang dilihat dari jenis material atap, lantai, dan dinding), serta luas lantai per kapita. Akses rumah layak huni merupakan nilai komposit dari 4 (empat) kriteria. Perkembangan capaian rumah layak huni terpenuhi di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Namn pada tahun 2023, capaian rumah layak huni mencapai 69,08 persen, yang berarti lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,21 persen. Penurunan ini perlu mendapatkan perhatian agar tidak terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Gambar 2.31.
Perkembangan Rumah Layak Huni (RLH)
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 (%)

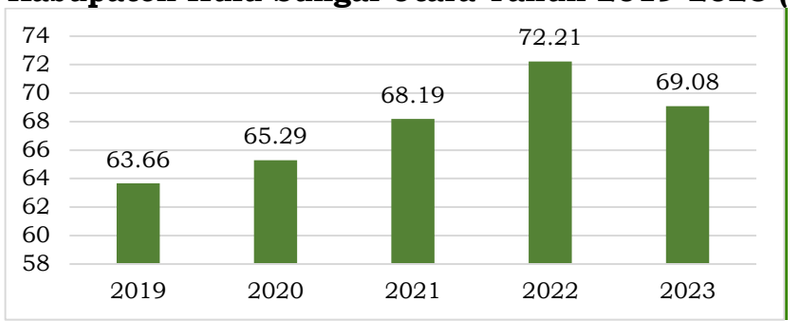

Sumber: Susenas 2023 yang dikelola dalam SIPD

b. Persentase Desa Mandiri

Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Persentase desa mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 24,30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak desa di wilayah ini yang perlu dikembangkan sehingga dapat mencapai status desa mandiri.

c. Indeks Desa

Indeks Desa diharapkan dapat menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan Desa di Indonesia. Indeks Desa dipergunakan dalam RPJPN 2025 -2045 untuk mengukur kemandirian desa melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Adapun nilai Indeks Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 adalah 427,034.

2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Hulu Sungai Utara menggunakan data tingkat inflasi Tanjung, Kabupaten Tabalong. Berdasarkan data pada grafik di bawah, diketahui bahwa inflasi di Tanjung selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang mirip dengan inflasi provinsi. Terjadi peningkatan inflasi pada tahun 2022 baik di Tanjung maupun provinsi. Posisi inflasi di Tanjung pada tahun 2024 mencapai 2,24, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat inflasi provinsi.

Pada Desember 2024 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 1,95 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,14. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 2,90 persen dengan IHK sebesar 106,63 dan terendah terjadi di Kabupaten Kotabaru sebesar 0,26 persen dengan IHK sebesar 106,82.

Gambar 2.32.
Tingkat Inflasi di Tanjung dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

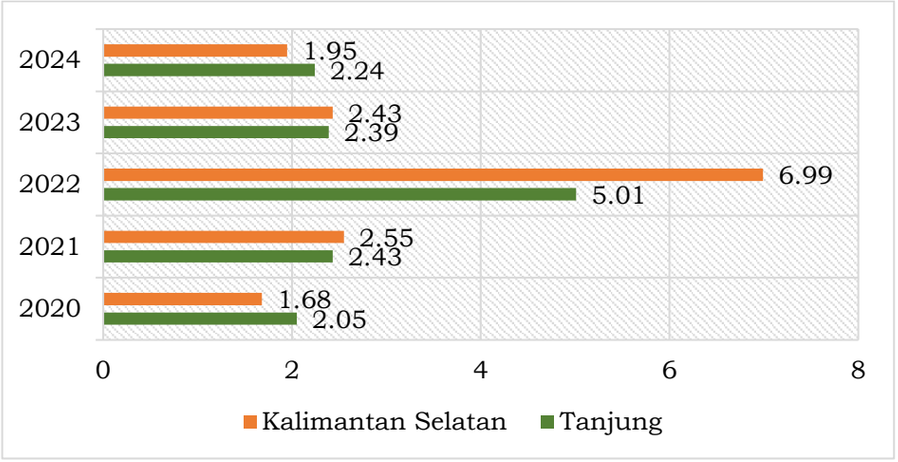

Sumber: BPS Kalinantan Selatan, 2025

Inflasi y-on-y di Kalimantan Selatan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,63 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,91 persen; kelompok transportasi sebesar 1,83 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,62 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,73 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,48 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Nilai SAKIP dan LPPD

Nilai SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan hasil yang baik dengan kategori B. Di mana di tahun 2018 bernilai kinerja 62,53 sedangkan di tahun 2022 bernilai 64,20. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada 06 Desember tahun 2022, sedangkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021 merupakan hasil evaluasi tahun 2022.

Kunci dalam membangun SAKIP yang baik demi mewujudkan tujuan/sasaran yang berorientasi pada hasil adalah terletak pada pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Dengan pengukuran kinerja yang baik, maka nantinya akan dapat diwujudkan Organisasi yang berbasis pada kinerja, Manajemen ASN yang berbasis pada Kinerja, Anggaran yang berbasis pada kinerja, serta Reward and Recognition yang berbasis pada kinerja. Penilaian tersebut juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menunjukkan hasil yang baik. Adapun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memperoleh nilai 64,82 atau kategori B di tahun 2024, meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 2.50.
Nilai SAKIP dan LPPD di Kab. HSU Tahun 2020-2024

Tahun	SAKIP	LPPD
2020	65,32 (B)	3,1220 (Sangat Tinggi)
2021	63,34 (B)	3.1220 (sangat Tinggi)
2022	64,20 (B)	3,1220 (Sangat Tinggi)
2023	64,40 (B)	3,0138 (Sedang)
2024	64,82 (B)	Belum rilis

Sumber: Lakip Sekretariat Daerah Kab. HSU Tahun 2019-2024

Selain SAKIP, penyelenggaran urusan pemerintahan daerah diukur dengan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Data pada tabel di atas menunjukkan perkembangan nilai LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang secara umum mengalami peningkatan. Nilai LPPD tahun 2023 terealisir sebesar 3,0138 dengan kategori Sedang, sementara data tahun 2024 belum rilis dari Kementerian Dalam Negeri.

b. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi adalah nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB. Unsur yang dinilai meliputi: 1. Manajemen perubahaan; 2. Penataan peraturan perundang-undangan; 3. Penataan dan penguatan organisasi; 4. Penataan tata laksana; 5. Penataan sistem manajemen sdm; 6. Penguatan akuntabilitas; 7. Penguatan pengawasan; dan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar 2.33.
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

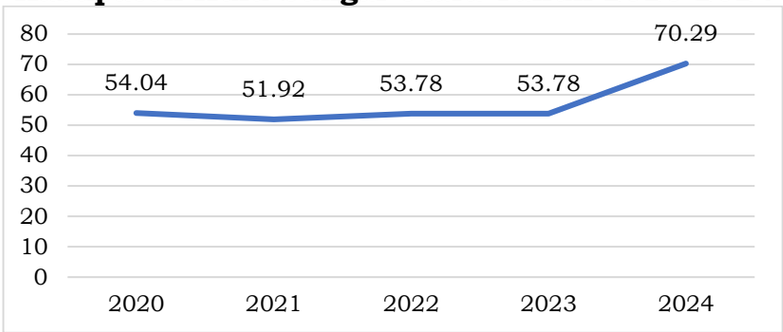

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. HSU, 2025

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2021 sempat turun dari 54,04 menjadi 51,92. Namun pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 53,78 dan meningkat menjadi 70,29 pada

tahun 2024. Peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadikan Indeks Reformasi Birokrasi Hulu Sungai Utara masuk kriteria BB, yang semula CC selama beberapa tahun sebelumnya.

c. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik (IPP) merupakan salah satu komponen yang dihitung dalam penentuan nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Nilai indeks pelayanan publik memberikan gambaran kinerja pelayanan publik di sebuah organisasi.

Sebagai indikator baru, penilaian IPP di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimulai tahun 2022. Hasil penilaian IPP sejak tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai IPP pada tahun 2024 mencapai 3,69 dengan kategori B. Kategori IPP meningkat dari yang sebelumnya B- pada tahun 2022 dan 2023.

Gambar 2.34.
Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2022-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. HSU, 2025

d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB, IKM Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 adalah 85,06 atau predikat Baik.

e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. Indeks ini diukur dalam poin dan merupakan data

tahunan. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 yaitu 1,88 dan menurun di tahun 2022 menjadi 1,76. Namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 2,51 pada tahun 2024.

Tabel 2.51.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,88	n/a	1,76	2,18	2,51

Sumber: BPS Kab. HSU, 2025

f. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD). Indeks Integritas Nasional adalah nilai atau skor yang dihasilkan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas dan potensi risiko korupsi di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) serta sektor pendidikan di Indonesia. SPI bertujuan menjadi alat deteksi dini dan memberikan gambaran tentang efektivitas upaya pencegahan korupsi serta mendorong perbaikan tata kelola yang lebih baik. Nilai Indeks Integritas Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2024 menurun dari 73,17 menjadi 71,03.

Gambar 2.355.
Indeks Integritas Nasional/SPI Tahun 2021-2024

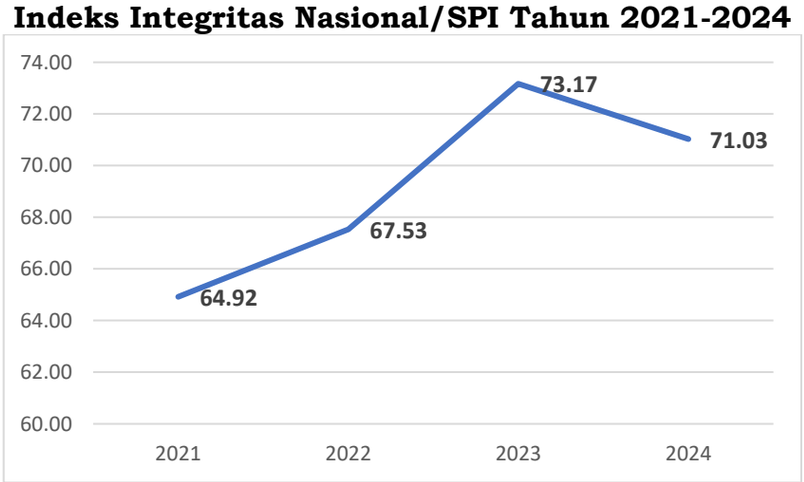

Sumber: Inspektorat, 2025

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, maka diketahui nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 mencapai 98,14. Kondisi ini menunjukkan prestasi yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Indikator Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah memberikan gambaran daerah dalam mengupayakan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sealu meningkat, dimana di Tahun 2020 sebesar 71,429 persen dan terus meningkat sampai Tahun 2024 menjadi 100 persen.

Tabel 2.152.
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	71,429	70	80	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten HSU, 2025

c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui IDSD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 adalah 2,87 dan pada tahun 2024 IDSD Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan menjadi 3,61.

Tabel 2.53.
Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Daya Saing Daerah	n/a	n/a	2,87	3,09	3,61

Sumber: BRIN, 2025

Capaian IDSD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 berada diatas capaian IDSD Provinsi Kalimantan Selatan (3,56) dan nasional (3,43). Pilar yang memiliki skor lebih tinggi dari nasional adalah Pilar 7: Pasar produk dan Pilar 8: Pasar tenaga kerja. Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan skor pada Pilar 1: Institusi, Pilar 2: Infrastruktur, Pilar 3: Adopsi TIK Pilar, 4: Stabilitas ekonomi makro, Pilar 5: Kesehatan Pilar, 6: Keterampilan, Pilar 9: Sistem keuangan Pilar, 10: Ukuran pasar, dan Pilar 12: Kapabilitas inovasi.

2.1.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.5.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, sertarelevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan disetiap wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro lain yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka

Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) maupun AngkaPartisipasi Sekolah (APS).

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 108,64%, kemudian menurun sampai tahun 2023 pada angka 92,22% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada penurunan 16,42%. Akan tetapi pada tahun 2024 naik kembali menjadi 104.41%. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019–2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.366.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Tahun 2019-2024

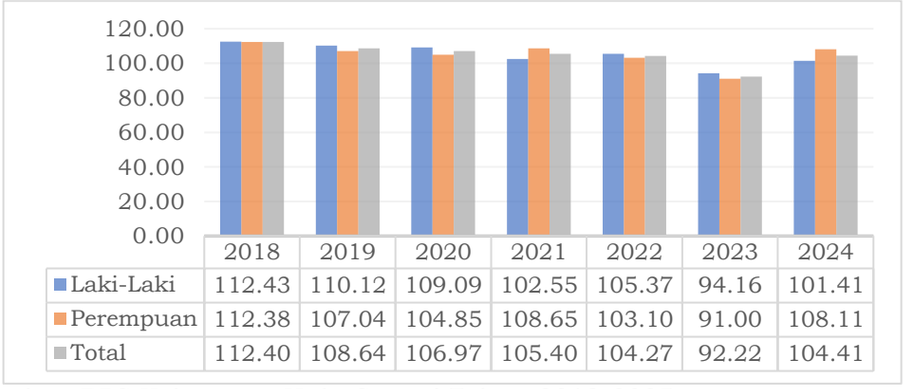

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	112.43	110.12	109.09	102.55	105.37	94.16	101.41
Perempuan	112.38	107.04	104.85	108.65	103.10	91.00	108.11
Total	112.40	108.64	106.97	105.40	104.27	92.22	104.41

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2019-2025

Ke depannya diharapkan APK mendekati atau sama dengan APM sehingga dikatakan ideal. Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. Adanya angka partisipasi kasar melebihi 100 persen dapat diduga penyebabnya adalah banyaknya anak usia SD yang sekolah tidak sesuai umurnya (terlalu muda/tua).

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/sederajat (13 – 15 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan tingkat SLTP di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 84,31%, dan berfluktuasi sampai tahun 2024 pada angka 92,59% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan 35,58%.

Angka ini sungguh sangat tidak ideal, karena tidak terjadi konsistensi penurunan APK. Hal ini terjadi dikarenakan aksesibilitas menuju ke sekolah yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, atau faktor ekonomi keluarga. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019–2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.377.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2019-2024

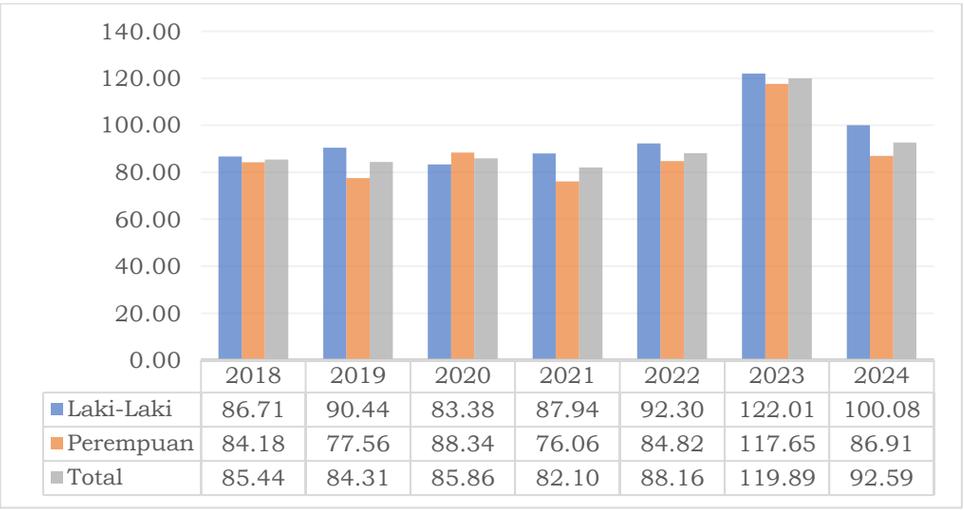

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	86.71	90.44	83.38	87.94	92.30	122.01	100.08
Perempuan	84.18	77.56	88.34	76.06	84.82	117.65	86.91
Total	85.44	84.31	85.86	82.10	88.16	119.89	92.59

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2025

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/sederajat (16–18 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SLTA/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 sebesar 76,39%, dan meningkat sampai tahun 2024 pada angka 81,59%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019–2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA hampir sama dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP, yaitu fluktuatif. Permasalahannya juga

hampir sama dengan APK tingkat SLTP, yaitu aksesibilitas menuju ke sekolah yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, atau faktor ekonomi keluarga.

Gambar 2.38.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2024

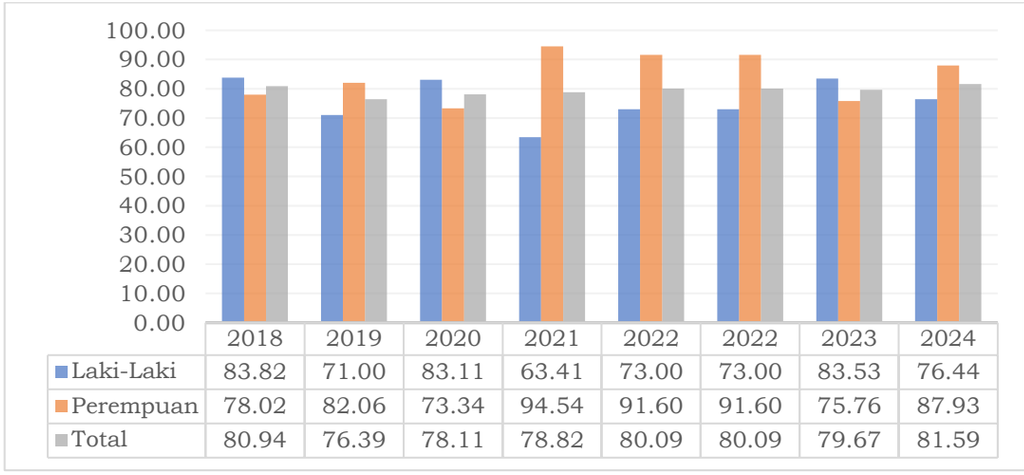

	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
Laki-Laki	83.82	71.00	83.11	63.41	73.00	73.00	83.53	76.44
Perempuan	78.02	82.06	73.34	94.54	91.60	91.60	75.76	87.93
Total	80.94	76.39	78.11	78.82	80.09	80.09	79.67	81.59

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2025

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan daya tampung dan dalam rangka mencapai jangkauan pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikan secara umum mengalami perbaikan.

1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 99,51%, dan berfluktuasi sampai tahun 2024 pada angka 99,30%.

Perkembangan angka partisipasi murni (APM) Tingkat SD/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019–2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.389.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI
Tahun 2019-2024

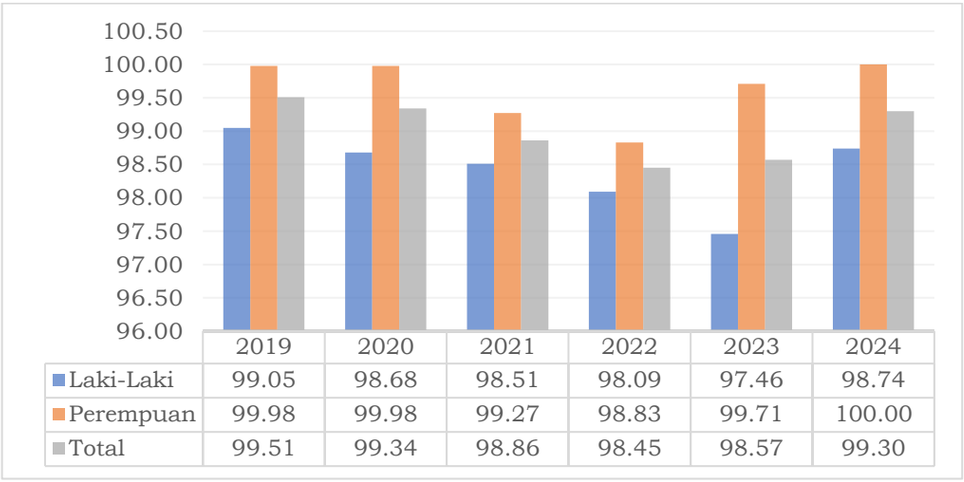

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	99.05	98.68	98.51	98.09	97.46	98.74
Perempuan	99.98	99.98	99.27	98.83	99.71	100.00
Total	99.51	99.34	98.86	98.45	98.57	99.30

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2025

2) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/sederajat (13–15 Tahun)

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SLTP/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 75,66%, dan berfluktuasi sampai tahun 2024 pada angka 80,47% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan 4,82%.

Berdasarkan data, diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat dari Tahun 2019-2024 baik laki-laki ataupun Perempuan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 APM Tingkat SLTP/sederajat untuk perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sedangkan pada tahun 2024 berkebalikan, dimana perempuan libih besar daripada laki-laki

Gambar 2.40.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat
Tahun 2019-2024

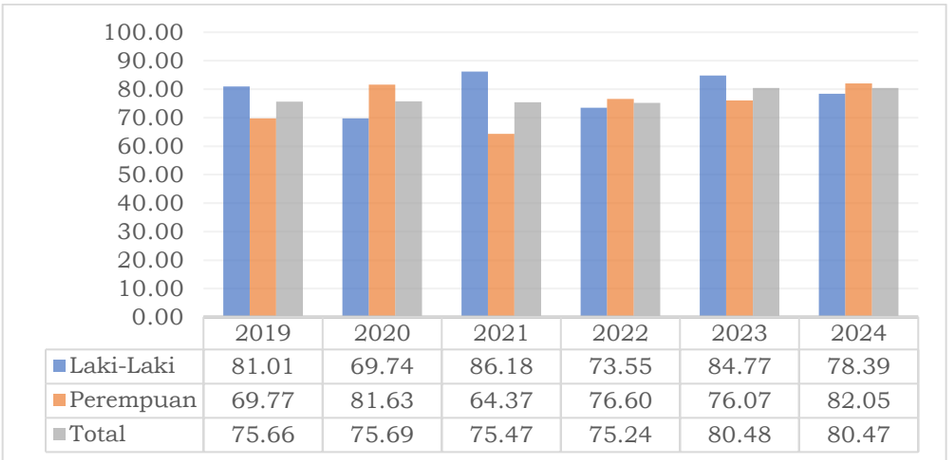

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	81.01	69.74	86.18	73.55	84.77	78.39
Perempuan	69.77	81.63	64.37	76.60	76.07	82.05
Total	75.66	75.69	75.47	75.24	80.48	80.47

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2025

3) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/sederajat (16–18 Tahun)

Berdasarkan data, diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SLTA/Sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 56,10%, dan berfluktuasi sampai tahun 2024 pada angka 61,45% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada penurunan 0,19%.

Gambar 2.391.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2019-2024

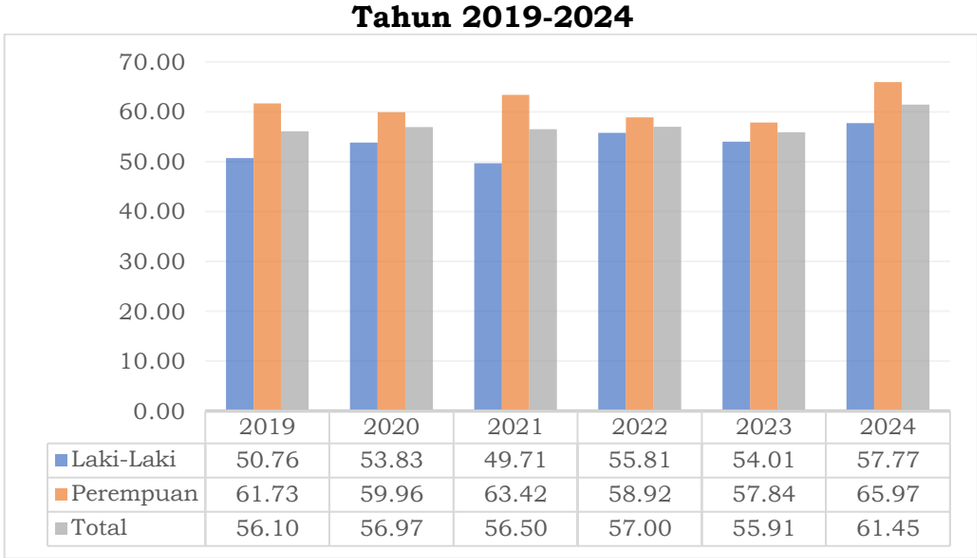

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	50.76	53.83	49.71	55.81	54.01	57.77
Perempuan	61.73	59.96	63.42	58.92	57.84	65.97
Total	56.10	56.97	56.50	57.00	55.91	61.45

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2025

Rendahnya APM SLTA/sederajat ini diduga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kendala masih kurangnya jumlah sekolah tingkat SLTA/sederajat yang menyebabkan jarak rumah dengan sekolah jauh serta adanya faktor kemiskinan.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama.

1) APS SD/sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019

sebesar 99,51%, dan berfluktuasi sampai tahun 2024 pada angka 99,30% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada penurunan 0,88%.

Gambar 2.402.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat Tahun 2019-2024

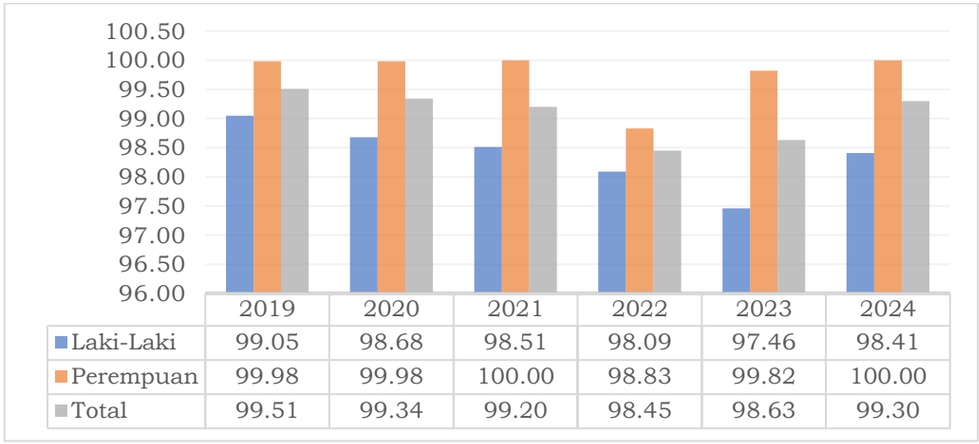

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	99.05	98.68	98.51	98.09	97.46	98.41
Perempuan	99.98	99.98	100.00	98.83	99.82	100.00
Total	99.51	99.34	99.20	98.45	98.63	99.30

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2025

2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/sederajat (13–15 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SLTP/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 75,66% sampai tahun 2023 atau jika dilihat dalam periode 5 tahun ada kenaikan 20,09% akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2024 pada angka 92,97%.

Gambar 2.413.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2019-2024

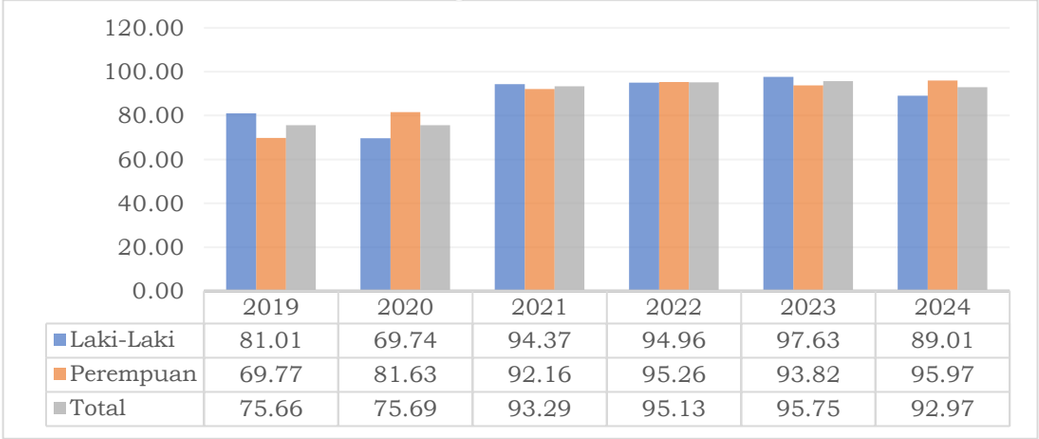

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	81.01	69.74	94.37	94.96	97.63	89.01
Perempuan	69.77	81.63	92.16	95.26	93.82	95.97
Total	75.66	75.69	93.29	95.13	95.75	92.97

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2025

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/sederajat (16–18 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SLTA/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2024

mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 65,49%, sampai tahun 2024 pada angka 72,67%.

Dari data tersebut dapat diinterprestasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun masih sebesar 32,10% yang belum bersekolah sampai dengan SMA/MA/SMK. Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indek pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka IPM karena variable untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula.

Gambar 2.424.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2019-2024

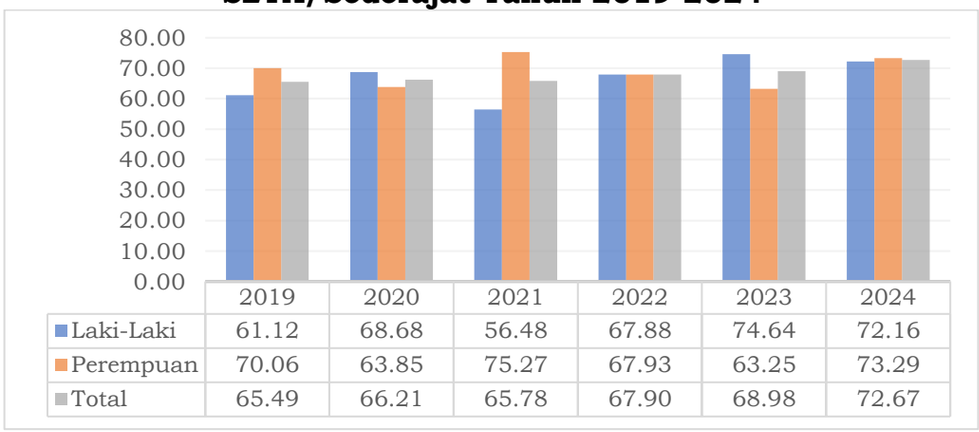

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	61.12	68.68	56.48	67.88	74.64	72.16
Perempuan	70.06	63.85	75.27	67.93	63.25	73.29
Total	65.49	66.21	65.78	67.90	68.98	72.67

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2025

d. Rasio sekolah/penduduk usia sekolah dan rasio guru/murid

Rasio Ketersediaan Sekolah dipergunakan untuk mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah merupakan jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.16.
Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid, Sekolah Tahun 2019–2022

Tahun	Sekolah (unit)	Murid (orang)	Guru (orang)	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid
Tingkat Sekolah Dasar					
2019	267	24.692	2.945	8,38	92,48
2020	267	24.269	2.882	8,42	90,89

Tahun	Sekolah (unit)	Murid (orang)	Guru (orang)	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid
2021	267	23.390	2.853	8,20	87,6
2022	267	23.391	2.864	8,17	87,6
Tingkat Sekolah Menengah Pertama					
2019	65	10.408	1.033	10,78	160,12
2020	65	10.300	954	10,8	158,46
2021	66	10.082	1.050	10,41	152,76
2022	66	9.870	1.072	10,86	149,55
Tingkat Sekolah Menengah Atas					
2019	32	9.545	761	12,54	298,28
2020	34	9.643	770	12,52	137,76
2021	34	9.386	794	11,82	276,06
2022	34	8.892	861	10,33	261,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara, 2023

Berdasarkan tabel terlihat bahwa rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar 92,48% dan mengalami penurunan sampai tahun 2022 menjadi 87,6%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sedangkan jumlah gedung sekolah tidak terjadi peningkatan/tetap.

Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs dari tahun 2019-2022 terjadi penurunan. Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK terjadi fluktuasi, hal ini terjadi karena jumlah sekolah mengalami peningkatan/penurunan sedangkan jumlah penduduk usia sekolah menengah mengalami penurunan.

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayaniatau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di atas.

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan dari Gambar 2.43, diketahui bahwa AKB Kab. Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2019 sampai 2023 berfluktuasi dan mengalami penurunan, dengan angka AKB tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 20,5 persen, sedangkan terendah pada tahun 2020 sebanyak 13,00 persen. Adapun untuk periode 2019-2023 disebabkan karena banyaknya kelahiran BBLR 32 kasus, asfiksia 7 kasus (komplikasi pada saat persalinan seperti kala II lama, karena ketuban pecah dini) kelainan kongenital 6 kasus, pnemonia 2 kasus, diare 7 kasus, dan yang lain-lain sebanyak 13 kasus.

Gambar 2.43.
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

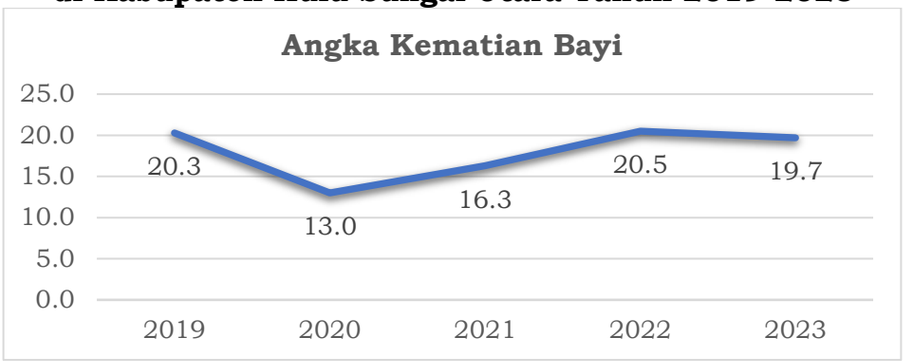

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

b. Sarana Kesehatan

Agar tujuan dapat dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan mutlak dibutuhkan, agar dapat mencapai tujuan Pembangunan kesehatan yaitu dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.17.
Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
3	Jumlah Pustu	29	30	30	30	30
4	Jumlah Poskesdes	128	136	135	135	137
5	Jumlah Polindes	2	2	2	2	2
6	Jumlah Posyandu	329	329	317	322	336
7	Jumlah Penduduk	237.573	226.727	228.832	231.290	233.412
8	Rasio Rumah Sakit terhadap Penduduk	0,0084	0,0088	0,0087	0,0086	0,0086
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18
10	Rasio Poskesdes terhadap penduduk	0,54	0,60	0,59	0,58	0,59
11	Rasio Polindes terhadap penduduk	0,0084	0,0088	0,0087	0,0086	0,0086
12	Rasio Posyandu thd Balita	15,01	19,66	21,58	22,61	23,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2019-2023 berjumlah 2 (dua) buah, 1 buah Rumah Sakit Pemerintah dan 1 (satu) buah rumah sakit milik swasta. Saat ini telah dibangun 1 buah rumah sakit baru yang masih dalam proses pembangunan dan perlengkapan sarana serta prasarana. Secara administrasi sarana Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2019–2023 sebanyak 13 buah yang terdiri dari 2 (dua) buah Puskesmas Rawat Inap yang terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Sungai Pandan serta 9 (buah) Puskesmas Rawat Jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jumlah Puskesmas Pembantu dan polindes dari tahun 2019-2023 cenderung tetap sebanyak 30 puskesmas. Sedangkan fungsi polindes ditingkatkan menjadi poskesdes sehingga jumlah poskesdes meningkat dari 128 buah tahun 2019 menjadi 137 buah tahun 2023. Untuk selanjutnya dalam rangka pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa diharapkan setiap desa harus memiliki Poskesdes.

c. Tenaga Kesehatan

Secara Standar Kebutuhan Minimal di fasilitas kesehatan sudah sebagian faskes terpenuhi, namun pendistribusian tenaga masih belum sesuai. Dengan kondisi minimal di harapkan agar Puskesmas dapat

terselenggara dengan baik. Namun sesuai ABK (Analisa Beban Kerja) kita Faskes masih membutuhkan tenaga kesehatan, apalagi dengan Indikator rasio per jumlah penduduk.

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Adapun perkembangan Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.18.
Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter Umum	30	37	37	31	42
2	Jumlah Tenaga Medis	49	61	82	116	125
3	Jumlah Tenaga Paramedis	591	613	649	638	628
4	Jumlah Penduduk	237.573	226.727	228.832	231.290	233.412
5	Rasio Dokter persatuan Penduduk	0,126	0,163	0,162	0,134	0,180
6	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	0,21	0,27	0,36	0,50	0,54
7	Rasio Tenaga Paramedis Persatuan Penduduk	2,49	2,70	2,84	2,76	2,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024

d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada periode tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi, dengan angka terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 96,56%. Pada Tahun 2022 sasaran ibu hamil sebanyak 4.115 orang. Jadi sasaran ibu hamil dengan komplikasi kebidanan sebanyak 825 orang. Pada Tahun 2021 capaian realisasi sebesar 185,10%, Tahun 2022 dicapai realisasi 162,30%, ada beberapa penyebab diantaranya yaitu pertama karena jumlah ibu hamil yang didapatkan pada tahun 2022 (3.559) lebih sedikit daripada jumlah ibu hamil pada tahun 2021 (3.896), yang kedua Jumlah ibu hamil dengan anemia mengalami penurunan tahun 2021 (20,08%) tahun 2022 (13,95%) Artinya penanganan

komplikasi obstetri sudah dilaksanakan dengan baik, tapi harus diwaspadai karena tingginya kasus komplikasi akan lebih rentan terjadinya kematian. Sehingga diharapkan deteksi secara dini bisa dilaksanakan dan ditangani sehingga tidak terjadi kasus komplikasi.

Jika dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang ada didapatkan 1.339 ibu hamil yang mengalami komplikasi artinya hal ini menggambarkan jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan lebih tinggi daripada sasaran yang ditargetkan oleh Kemenkes. Dari segi pelayanan komplikasi kebidanan sudah tertangani namun perlu perhatian khusus untuk jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang cukup tinggi agar tidak menimbulkan kematian ibu.

Gambar 2.44.
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2019–2023

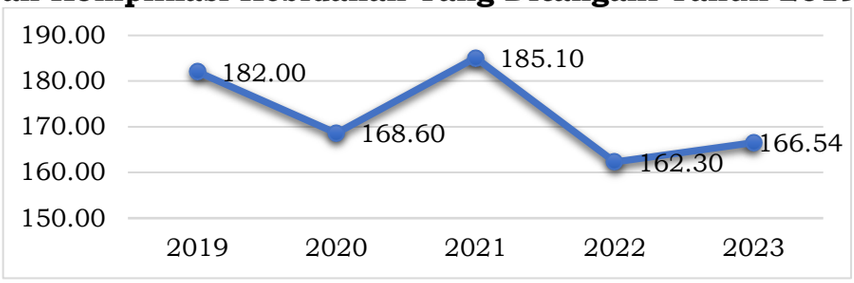

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

e. Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Di beberapa Puskesmas masih ada persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini oleh dukun kampung (2 Puskesmas yakni Puskesmas Haur Gading dan Pasar Sabtu). Berbagai upaya untuk meningkatkan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten antara lain program kemitraan antara Bidan dengan Dukun, pemberian uang jasa untuk dukun kampung yang merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan, program UHC, pemantapan Puskesmas PONED dan pelaksanaan IGD Bersalin Puskesmas, Peningkatan Kapasitas tenaga bidan dalam penanganan persalinan melalui pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) kerjasama dengan P2KS Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di RSUD Ulin Banjarmasin, Kunjungan Obgyn ke Puskesmas guna meningkatkan pelayanan dan rujukan dini persalinan terencana. Pada periode tahun 2019 sampai 2023 pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami fluktuasi dan

cenderung meningkat, dengan angka terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 79,40%, sedangkan tertinggi pada tahun 2023 dengan angka 99,87%.

Gambar 2.45.
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2019-2023

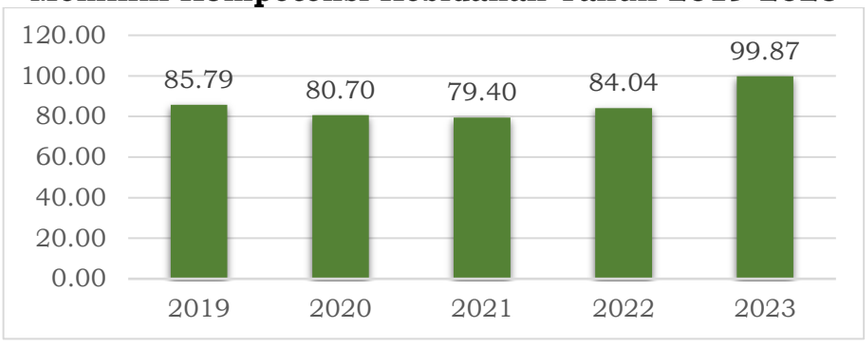

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

Tahun 2022 sasaran ibu bersalin berdasarkan data Pusdatin sebanyak 3.936 ibu bersalin, sedangkan jumlah ibu bersalin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 sebanyak 3.317. Ada perbedaan atau selisih jumlah sasaran ibu bersalin proyeksi Pusdatin dengan kondisi riil di lapangan yaitu sebanyak 619 ibu bersalin, hal ini yang menyebabkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di bawah target yang ditetapkan (Target SPM =100 %) Sebanyak 3.300 di fasilitas kesehatan (di Rumah Sakit, Puskesmas,Klinik Bersalin, Poskesdes sebanyak 1.522 kasus dan sebanyak 17 ibu bersalin di Non Fasilitas Kesehatan (di Rumah Pasien 13 kasus, di Perjalanan 2 kasus, dan oleh Dukun Kampung 2 kasus).

f. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Desa UCI yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata di Desa/Kelurahan. Diperlukan optimalisasi promosi kesehatan, masih adanya sebagian kecil reaksi penolakan di masyarakat terhadap imunisasi, pelaksanaan imunisasi dalam gedung yang masih belum optimal di beberapa Puskesmas dan pelembagaan PWS serta adanya kendala pandemi COVID19.

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI) di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 91,80%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023, dengan angka

terendah 52,10% di tahun 2022 dan tertinggi di tahun 2019 sebesar 91,80%. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.46.
Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Imunization* (UCI)
Tahun 2019-2023

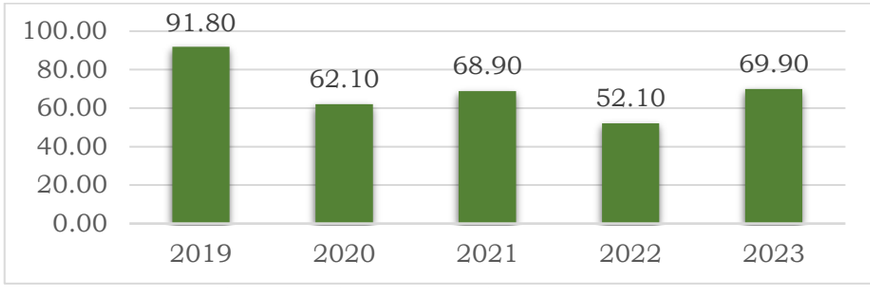

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan jaringannya serta di RSU Pambalah Batung Amuntai merupakan pelayanan rujukan ke Provinsi, kerjasama dengan RSU Ulin Banjarmasin dan RSJ Sambang Lihum Banjarmasin serta RSU Anshari Saleh Banjarmasin dengan tempat tidur kelas III. Setiap Peserta rujukan yang terdaftar akan dilayani, setiap tahunnya 100% pasien rujukan terlayani.

h. Cakupan kunjungan bayi

Kunjungan bayi di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 73,40%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 dengan angka tertinggi 98,13%.

Kunjungan bayi pada tahun 2023 sebesar 98,13%, terjadi kenaikan dibandingkan cakupan kunjungan bayi di tahun 2021 sebesar 65,59%. Kenaikan cakupan pelaksanaan kunjungan bayi adalah pada pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) yang harus dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun. Oleh sebab itu Seksi Kesehatan Keluarga masih terus melaksanakan Pelatihan DDTK agar semua petugas terutama bidan dan gizi mampu melaksanakan skrining DDTK. Peningkatan kapasitas guru PAUD dalam rangka pelaksanaan DDTK. Kunjungan Rumah oleh Bidan Desa. Adapun cakupan kunjungan bayi Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Gambar 2.47.
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2019-2023

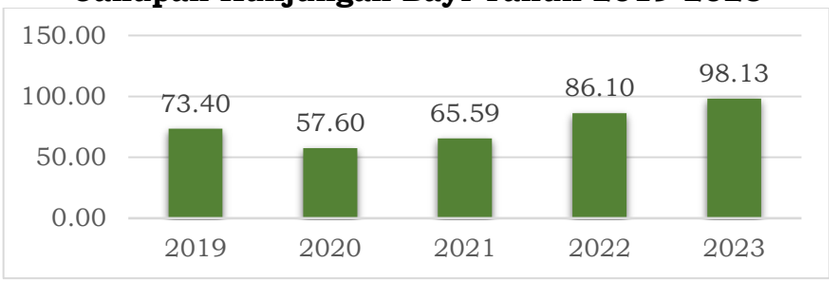

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

i. Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 75,40%, dan terus mengalami fluktuasi sampai tahun 2023 menjadi 91,19%.

Gambar 2.48.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2019-2023

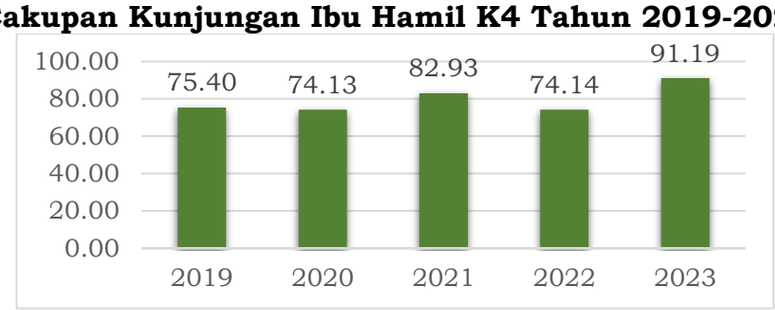

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

Tahun 2023 capaian K4 sebesar 91,19% terjadi kenaikan dari tahun 2022 dimana capaian K4 sebesar 74,14%, namun masih di bawah target SPM yaitu sebesar 100%. Penurunan ini terjadi karena masih ada ibu hamil yang kontak dengan tenaga kesehatan diatas usia kehamilan 12 minggu (303 kasus), kejadian abortus sebanyak 183 kasus (4,45 %).

j. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 83,02%, dan terus mengalami fluktuasi cenderung meningkat sampai tahun 2023 menjadi 97,50%. Adapun Pencapaian cakupan pelayanan nifas Tahun 2018–2023 dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.49.
Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU Tahun 2019-2023

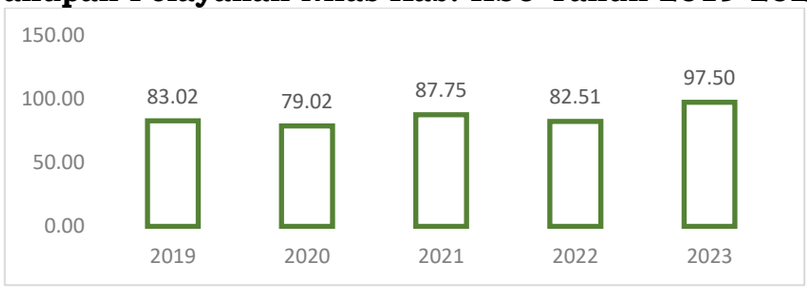

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

k. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari) dimana pada periode ini adalah paling rentan bagi bayi untuk menyempurnakan penyesuian fisiologis. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 68,01%, dan mengalami fluktuasi sampai tahun 2023 menjadi 68,26%. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2019–2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.50.
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU Tahun 2019-2023

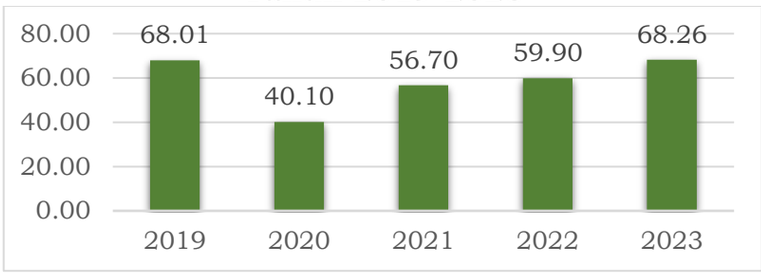

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

Capaian neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2023 ini adalah 68,26%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 adalah 59,90%. Sebenarnya penanganan kasus ini sudah tertangani 100%, namun memang jumlah kasus dilapangan sedikit.

l. Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 20,60%, kemudian meningkat terus sampai tahun 2023. Pada Tahun 2022 cakupan pelayanan balita cukup banyak

mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,95% dibandingkan dengan cakupan pelayanan balita tahun 2022 yang hanya sebesar 43,47%, juga mengalami peningkatan dari capaian tahun tahun sebelumnya. Beberapa faktor penyebab kenaikan persentase cakupan pelayanan anak balita antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pemeriksaan dan penimbangan anak balita. Seperti kita ketahui bersama bahwa lima tahun pertama kehidupan pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak. Cakupan pelayanan anak balita pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.51.
Cakupan pelayanan anak balita Kab. HSU Tahun 2019-2023

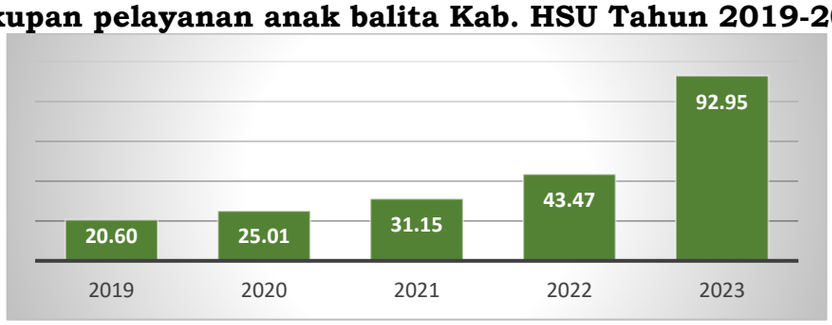

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

m. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak. Prevalensi gizi buruk (wasting) adalah gabungan dari balita gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Berikut prevalensi gizi buruk (BB/TB) untuk tahun 2019-2023.

Gambar 2.52.
Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023

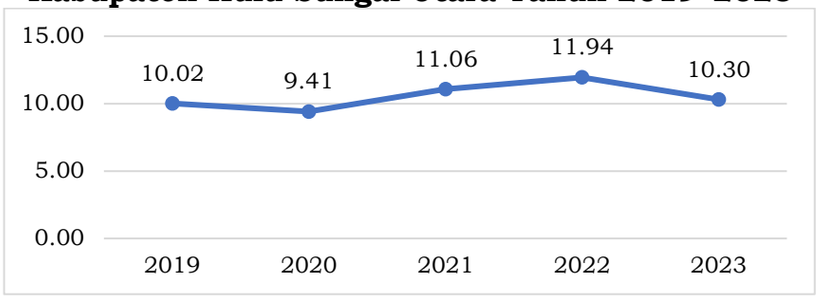

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan data e-PPGBM (elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat) maka untuk prevalensi wasting (BB/TB) pada tahun 2021 sebesar 11,06% mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 11,94% hal ini disebabkan meningkatnya kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 0,86% (9,03% menjadi 9,89%). Selanjutnya pada tahun 2023 Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali menurun menjadi hanya 10,30%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi gizi anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi masyarakat, perilaku dan pola asuh orang tua, oleh karena itu perlu upaya keras untuk penurunan indikator ini dengan melibatkan lintas sektor terkait.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana terdiri dari jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, air bersih dan sanitasi serta penataan ruang.

a. Jalan

Untuk memudahkan aksebilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain diperlukan peningkatan pembangunan jalan. Adapun panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2020 hingga tahun 2023 sepanjang 328,82 km dan pada tahun 2024 sebesar 379,627 km, ada peningkatan status jalan maupun pembangunan jalan.

Tabel 2.19.
Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

No	STATUSJALAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	KABUPATEN	328,82	328,82	328,82	328,82	379,627
2	PROVINSI	34,268	34,268	34,268	24,360	24,360
3	NEGARA	28,450	28,450	28,450	29,150	29,150
	Jumlah	**391,541**	**391,541**	**391,541**	**382,330**	**433,137**

Sumber: Dinas PUPRP 2022 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024

Pada tabel dibawah dapat dilihat perkembangan panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kondisi baik sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi yaitu pada tahun 2022 sepanjang 210,286 km. Adapun kondisi jaringan jalan yang baik dan rusak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20.
Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024

No	Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	155,47	168,597	210,286	174,125	189,82
2	Sedang	44,55	90,389	55,053	34,693	24,07
3	Rusak	21,89	15,737	19,972	28,45	12,16
4	Rusak Berat	106,91	54,200	106,232	91,55	153,57
	Total	**328,82**	**328,823**	**328,828**	**328,82**	**379,62**

Sumber: Dinas PUPRP 2024

Pada tabel berikut memperlihatkan panjang jalan Kabupaten yang dapat dilalui roda 4 (empat) atau persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam). Persentase jalan dalam kondisi baik paling rendah pada tahun 2020.

Tabel 2.21.
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2020-2024

STATUS JALAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan Kabupaten Kondisi Baik	155,47	168,497	207,059	174,125	189,82
Panjang Jalan Kabupaten	328,823	328,823	328,823	328,82	379,627
Persentase	**47,28**	**51,24**	**62,97**	**52,95**	**50,00**

Sumber: Dinas PUPRP 2024

b. Jembatan

Jembatan sebagai penghubung antar daerah sangat penting, apalagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelilingi oleh aliran

sungai, baik sungai kecil maupun besar. Jumlah total jembatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya selalu mengalami penambahan, baik itu jenis jembatan ulin bentang panjang, jembatan baja atau besi bentang panjang maupun jenis jembatan beton/*box curved* seperti tabel berikut.

Tabel 2.22.
Jumlah dan Jenis Jembatan Tahun 2019-2023

	JENIS JEMBATAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ulin Bentang Panjang	184	184	185	185	179
2.	Baja/Besi Bentang Panjang	24	24	24	25	25
3.	Beton/Box Curved	151	151	152	152	158
	Total	**359**	**359**	**361**	**362**	**362**

Sumber: Dinas PUPRP 2024

c. Jaringan Irigasi

Infrastruktur Sumber Daya Air yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain jaringan irigasi dan polder. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dimana di tahun 2019 sepanjang 438.859 m, meningkat menjadi 446,359 m di tahun 2022 dan 2023. Perkembangan panjang jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2019-2023

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (meter)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jaringan Primer	206.340	206.340	206.340	210.140	210.140
2	Jaringan Sekunder	232.519	232.519	232.519	236.219	236.219
	Jumlah	**438.859**	**438.859**	**438.859**	**446.359**	**446.359**

Sumber: Dinas PUPRP 2024

Kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi/Rawa berdasarkan kesepakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:

1) Daerah Irigasi/Rawa Pemerintah : 6.000 Ha
2) Daerah Irigasi/Rawa Provinsi : 10.381 Ha
3) Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten : 14.127 Ha (tersebar di Kab)

Tabel berikut menunjukan luasan daerah irigasi rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.24.
Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara

DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL/SAWAH (Ha)
Kewenangan Pusat		6.000	3.199
Polder Alabio	Sungai Pandan/Hambuku Hulu, Hambuku Pasar, Hambuku Raya, Hambuku Tengah, Padang Bangkal, Pandulangan, Putat Atas/Tatau, Tambalang, Tambalang Kecil, Tambalang Tengah, Teluk Betung, Teluk Sinar; Sungai Tabukan/Banua Hanyar, Galagah, Galagah Hulu, Nelayan, Sungai Haji, Sungai Tabukan, Teluk Cati; Babirik/Hambuku Baru, Hambuku Hilir, Hambuku Lima, Kalumpang Dalam, Kalumpang Luar, Murung Panti Hilir, Murung Panti Hulu, Sungai Luang Hilir, Sungai Luang Hulu; Danau Panggang/Sarang Burung, Telaga Mas	6.000	3.199
Kewenangan Provinsi		10.381	6.250
Polder Kaludan	Banjang/Kaludan Kecil, Karias Dalam, Kaludan Besar, Sungai Bahadangan, Rantau Bujur, Pawalutan, Pulau Damar; Amuntai Tengah/Pasar Senin, Sungai Karias, Antasari, Kambang Kuning, Kota Raden	2.400	1.440
Polder Bakar	Babirik/Durait Hulu, Durait Tengah, Durait Hilir, Babirik Hulu, Babirk Hilir, Sungai Zam-Zam; Sungai Pandan/Banyu Tajun Dalam, Banyu Tajun Hilir, Banyu Tajun Hulu, Banyu Tajun Pangkalan, Jalan lurus, Murung Asam, Pangkalan Sari, Pondok Babaris, Rantau Karau Hilir, Rantau Karau Hulu, Rantau Karau Raya, Rantau Karau Tengah, Tatah Laban, Teluk Mesjid, Tapus Dalam	2.400	1.560
Rawa Pinang Habang	Amuntai Tengah/Danau Cermin, Pinang Habang, Datu Kuning, Rantawan, Muara Tapus, Tapus	2.000	1.100
Polder Pakacangan	Amuntai Utara/Pakacangan, Cakru, Murung Karangan, Padang Besar Hilir, Padang Besar Hulu; Banjang/Danau Terate, Patarikan, Teluk Buluh	1.831	1.100
Polder Muara Bayur	Amuntai Utara/Panangkalaan, Panangkalaan Hulu, Pamintangan, Pakapuran, Tabalong Mati, Telaga Bamban; Haur Gading/Sungai Limas, Bayur, Lok Suga	1.750	1.050
Kabupaten	Tersebar	14.127	9.126
	TOTAL	30.508	18.575

Sumber: Dinas PUPRP 2024

Total seluruh daerah irigasi rawa potensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai seluas 30.508 Ha, berdasarkan data Daerah Irigasi Rawa (DIR) ini menggambarkan potensi sumberdaya air yang dapat dikembangkan, untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Sedangkan luas Daerah Irigasi Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 18.575 Ha dapat dilihat pada tabel berikut. Daerah Irigasi Rawa terluas berada di DIR. Polder Padang Gusti di Kecamatan Haur Gading yaitu seluas 471 Ha dan luas DIR yang paling kecil terdapat di DIR Lok Bangkai Kecamatan Banjang yaitu seluas 3 Ha.

d. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil dari perencanaan tata ruang adalah rencana tata ruang. Penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032, sebagai arahan pengembangan wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Perda RTRW ini telah memasuki masa periode 5 (lima) tahun kedua, selama kurun waktu 10 tahun dengan adanya kebijakan nasional dan daerah telah mewarnai pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah mewujudkan tata ruang dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai agrominapolitan yang maju, berbasis ekosistem rawa yang berkelanjutan, untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan 4 (empat) kebijakan, yakni Kebijakan I Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Kebijakan II Pengembangan Pola Ruanng Wilayah Kabupaten; Kebijakan III Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Strategis dan Kebijakan IV Pengelolaan, Pengendalian Dan Perlindungan Wilayah Kabupaten Yang Tangguh, Berketahanan Dan Berkelanjutan.

Tabel 2.25.
Capaian Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Dokumen	2012	2013	2014	2015	2016 - 2017	2018	2019 - 2020	STATUS	Keterangan
1	RTRW	1 buah							PERDA No 12 TH 2012	
2	RDTR Kota Amuntai	1 buah							Belum Perda	Terkendala PetaDasar Skala Minimal 1:5.000
3	RDTRK/Kec. Sungai Pandan		1 buah						Belum Perda	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
4	RTBL Kec. Amuntai Tengah		1 buah						Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
5	RTBL Kerajinan Tikar Purun Kec. Haur Gading				1 buah				PERBUP No.4 Th 2015	
6	RTBL Bantaran Sungai Negara						1buah		Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2022

e. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk Rasio RTH Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 tidak ada peningkatan yaitu sebesar 0,30.

Tabel 2.26.
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Tahun 2019-2023

No.	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Luas RTH	1.711	1.711	1.711	-	-
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	5.692	5.692	5.692	-	-
	Rasio	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**-**	**-**

Sumber: Dinas Perkim LH, 2024

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dimana di tahun 2019 sebanyak 2.495 unit, meningkat menjadi 4.423 unit di tahun 2022, namun pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi hanya 4.413 unit. Rumah tidak layak huni kalau tidak ditangani akan menjadi masalah sosial, sehingga Pemerintah telah membuat Program Bedah Rumah dalam bentuk memberikan bantuan rehabilitasi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Bantuan peningkatan kualitas rumah terhadap Rumah Tidak Layak Huni telah dilakukan oleh beberapa pihak baik dari Provinsi (Reses Dewan), Baznas dan Sosial serta lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023, sehingga berdasarkan data terbaru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sebanyak 4.413 unit, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni terbanyak terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah yakni sebanyak 799 unit sedangkan terkecil di Kecamatan Paminggir sebanyak 148 unit. Penanganan dan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.27.
Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Amuntai Tengah	184	166	151	841	799
2.	Amuntai Selatan	250	205	160	593	597
3.	Amuntai Utara	205	205	205	390	372
4.	Banjang	224	364	329	278	393
5.	Babirik	364	189	189	350	350
6.	Danau Panggang	257	257	257	272	258
7.	Haur Gading	164	164	164	422	384
8.	Paminggir	42	42	42	148	148
9.	Sungai Pandan	591	368	256	786	774
10.	Sungai Tabukan	214	214	214	343	338
	Jumlah (unit)	**2.495**	**2.174**	**1.967**	**4.423**	**4.413**

Sumber: Dinas Perkim LH, 2023

b. Kawasan Kumuh Perkotaan

Berdasarkah SK Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Kumuh dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat kawasan kumuh seluas 96,87 Ha. Ada beberapa Kelurahan atau Desa yang pada tahun 2020 termasuk Kawasan Kumuh pada tahun 2021 tidak lagi termasuk kawasan kumuh dan ada dua desa yang berdekatan wilayahnya dimasukkan kedalam satu Kawasan, sehingga didapat kawasan yang paling tinggi kumuhnya adalah kawasan Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir seluas 32,79 Ha sedangkan yang paling kecil berada di Hulu Pasar yakni seluas 0,77 Ha. Selanjutnya Pada Tahun 2022 dan 2023 tidak ada penanganan kawasan permukiman kumuh <10 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara biasa dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang mana melalui program tersebut Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan alokasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) untuk menyelesaikan wilayah kumuh perkotaan. Sejak tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak lagi mendapatkan dana alokasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) tersebut sehingga tidak ada penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Jadi data tetap memakai data pada SK Bupati HSU Nomor 146 tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Kumuh.

Perkembangan wilayah kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2020 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.28.
Deliniasi Luas Kumuh di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2023

No	Kelurahan/Desa	Luas Kumuh (Ha)			
		2020	2021	2022	2023
1	Antasari	-	7,15	7,15	7,15
2	Hulu Pasar	-	0,77	0,77	0,77
3	Kandang Halang	9,26	-	-	-
4	Kebun Sari		12,43	12,43	12,43
5	Jumba	6,61	-	-	-
6	Teluk Paring	3,06	-	-	-
7	Muara Tapus	2,69	-	2,81	2,81
8	Palampitan Hilir	7,30	32,79	32,79	32,79
9	Palampitan Hulu	14,96			

No	Kelurahan/Desa	Luas Kumuh (Ha)			
		2020	2021	2022	2023
10	Paliwara	15,01	12,68	12,68	12,68
11	Pasar Senin	2,10	3,53	3,53	3,53
12	Rantawan	12,46	1,42	1,42	1,42
13	Kandang Halang	9,26	-	-	-
14	Karias	6,14	13,63	13,63	13,63
15	Tangga Ulin Hilir	5,68	12,47	12,47	12,47
16	Tangga Ulin Hulu	3,12			
	Total	**97,65**	**96,87**	**99,68**	**99,68**

Sumber: Dinas Perkim LH, 2024

c. Air Bersih

Ketersedian air bersih sebagai sumber air minum masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sebagian besar bersumber dari PDAM dan ada pula sebagian menggunakan sumber air tanah dalam atau sumur bor dalam.

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah masuk di seluruh kecamatan, Kecamatan Amuntai Tengah merupakan cakupan tertinggi mencapai 73,78% sedangkan cakupan terendah di Kecamatan Babirik yakni baru mencapai 8,31%, sedangkan Cakupan Layanan PDAM keseluruhan pada Tahun 2023 mencapai 45,59 % hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Cakupan Layanan PDAM Tahun 2023

NO	Wilayah Layanan (Kecamatan)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Sambungan	Aktif	Non Aktif	Domestik	Non Domestik	Jiwa	Unit (%)	HSU %
1	Amuntai Selatan	31.724	4.749	4.691	58	4.049	642	18.764	59,15	8
2	Amuntai Tengah	51.842	12.462	12.175	287	9.562	2.613	38.248	73,78	16,31
3	Amuntai Utara	20.312	3.515	3.459	56	3.031	428	12.124	59,69	5,17
4	Babirik	20.312	700	532	168	422	110	1.688	8,31	0,72
5	Banjang	18.975	1.764	1.725	39	1.527	198	6.108	32,19	2,6
6	Danau Panggang	21.272	784	704	80	512	192	2.048	9,63	0,87
7	Haur Gading	17.183	3.231	3.214	17	2.998	216	11.992	69,79	5,11
8	Paminggir	8.352	515	447	68	400	47	1.600	19,16	0,68
9	Sungai Pandan	29.180	2.605	2.560	45	2.152	408	8.608	29,5	3,67
10	Sungai Tabukan	15.407	1.666	1.635	31	1.436	199	5.744	37,28	2,45
	JUMLAH	**234.559**	**31.991**	**31.142**	**849**	**26.089**	**5.053**	**106.924**	45,59	

Sumber: PDAM Tahun 2023

Sedangkan capaian akses masyarakat terhadap air minum berdasarkan beberapa sumber air minum yang terdiri dari PDAM, Sumur Bor Pribadi, Pamsimas, Sumur Gali dan Sungai pada tahun 2022 mencapai 91,97 %, capaian paling rendah di Kecamatan Babirik yang baru mencapai 80,61 % dan tertinggi di Kecamatan Sungai Tabukan yang sudah mencapai 99,10 %. Penggunaan air sungai/rawa juga masih digunakan oleh masyarakat, sedangkan sumber air dari sungai yang diyakini sudah dalam kondisi cemar E. Coli yakni sebanyak 4.893 KK, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.
Cakupan Akses Terhadap Air Minum Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Sumber Air Minum							CAK AKSES SAM (KK)	CAK AKSES SAM (%)
				PDAM		Sumur Bor pribadi	Sumur Bor/tong umum non pamsimas	PAMSI MAS	Sumur Gali	Depot Air minum	Sungai/ Rawa	
				SR	HU							
1	Sungai Tabukan	4.350	14.376	1.742	13	549	1.215	761	0	16	39	4.311	99,10
2	Haur Gading	4.741	15.528	2.876	3	47	44	809	7	713	242	4.499	94,90
3	Paminggir	2.572	8.444	675	0	0	97	1.634	0	0	159	2.407	93,58
4	Amuntai Tengah	12.383	43.048	9.518	30	1.166	176	639	0	28	826	11.557	93,33
5	Amuntai Utara	5.996	20.303	3.821	127	230	172	420	40	732	460	5.542	92,43
6	Danau Panggang	5.723	19.501	413	43	714	976	2.943	0	196	81	5.287	92,38
7	Amuntai Selatan	9.806	30.337	4.398	452	418	935	2.225	0	505	800	8.957	91,34
8	Sungai Pandan	7.553	26.126	2.213	6	1.028	1.215	1.606	13	798	673	6.879	91,08
9	Banjang	4.920	17.761	1.355	192	320	764	1.502	28	313	443	4.474	90,93
10	Babirik	4.653	18.818	396	2	295	1.225	1.646	0	185	1.170	3.751	80,61
JUMLAH		**62.697**	**214.242**	**27.407**	**868**	**4.767**	**6.819**	**14.185**	**88**	**3.486**	**4.893**	**57.664**	**91,97**

Sumber: DINKES KAB. HSU 2023

Berdasar Akses Aman Air Minum Masyarakat untuk jaringan perpipaan Tahun 2023 untuk akses aman perkotaan mencapai 21,38% dan akses aman perdesaan terlayani sebanyak 25,69% sehingga total penduduk akses baru mencapai total 91,94% dengan total terlayani sebanyak 187.895 jiwa.

Tabel 2.31.
Capaian Akses Penduduk Terhadap Air Bersih/Air Minum
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Penduduk Perdesaan (Jiwa)	Jaringan Perpipaan (%)				Total Penduduk Terlayani Akses Layak Air Minum(%)	Total Jiwa Terlayani Akses Layak Air Minum	Total Penduduk Akses Aman Air Minum (%)	Total Jiwa Terlayani Akses Aman Air Minum
				Perkotaan		Perdesaan					
				Layak	Aman	Layak	Aman				
2021	204362	45193	159169	0,00	21,38	0,00	25,69	42,51	86.872	47,07	96194
2022	204362	45193	159169	0,00	21,38	0,00	25,69	43,85	89.612	47,07	96194
2023	204362	45193	159169	0,00	21,38	0,00	25,69	91,94	187895	0	0

Sumber: Dinas PUPR, 2023

Akses air bersih merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang harus bisa didapatkan oleh masyarakat. Berikut capaian akses air bersih yang bisa didapatkan penduduk Kab. Hulu Sungai Utara. Air bersih diakses masyarakat melalui pelayanan PDAM dan Non PDAM yang biasanya adalah Program PAMSIMAS. Wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 11 (sebelas) unit bangunan IPAM yang tersebar di setiap kecamatan, sedangkan program Pamsimas biasanya dilaksanakan di wilayah-wilayah yang tidak dapat dilayani oleh PDAM. Adapun persentase capaian akses penduduk terhadap air bersih atau air minum secara time series, baik yang berasal dari layanan PDAM maupun Non PDAM terlihat pada gambar berikut. Setiap tahun terlihat mengalami kenaikan.

Gambar 2.53.
Penduduk yang Mengakses Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019–2023

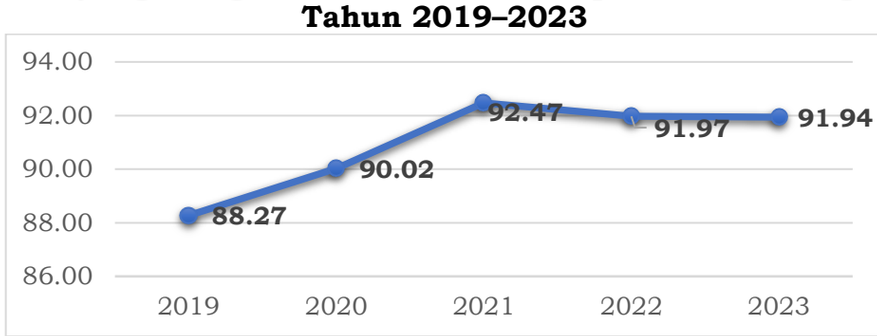

Sumber: Dinas PUPR, 2024

d. Sanitasi

Layanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan akan tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Rangkaian kegiatan dari layanan sanitasi dan air limbah domestik terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik Terpusat (SPALD-T). Untuk akses Air Limbah Domestik Aman Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2022 baru mencapai 5,48%, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.32.
Cakupan Akses Aman Sanitasi Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Akses SPALD-S (KK)					AKSES SPALD-T (KK)			Total Penduduk Terakses Air Limbah Domestik (%)		
		Cubluk (Perdesaan)	Tangki Septik Individual		Tangki Septik Komunal	MCK	IPALD PermuKiman	IPALD Kawasan Khusus	IPALD Perkotaan	Layak (%)	Jiwa Akses Layak	Aman (%)
		Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman	Akses Aman	Akses Aman	Akses AMAN					
2021	63742	1040	55141	0	1723	1405	0	0	0	88,14	180121	4,91
2022	63742	1040	54882	267	1819	1405	0	0	0	87,73	179291	5,48
2023	63742	941	57587	0	0	1330	0	0	0	93,91	191909	0

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) juga termasuk dalam layanan sanitasi yakni salah satu indikator dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

Jumlah Desa yang Stop Buang Air Besar Sembarangan baru 114 atau 25,05 % untuk desa ODF terbanyak terdapat di Kecamatan Amuntai Selatan yakni sebanyak 22 Desa dan terkecil terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir yang masing-masing baru 2 Desa, sedangkan akses WC sudah mencapai 93,01 %.

Tabel 2.33.
Akses WC dan ODF Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	KECAMATAN	Jml Desa ODF	Jml KK	Memiliki WC		Kepemilikan WC					CAK AKSES WC (KK)	CAK AKSES WC (%)
				Ya	Tidak	Pribadi	WC Umum	WC Komunal	Numpang Tetangga	Ke Sungai/ rawa		
1	AmuntaiUtara	18	5.996	5.831	152	5.698	73	67	82	68	5.920	98,73
2	Amuntai Tengah	15	12.383	11.998	334	11.699	71	251	102	229	12.123	97,90
3	Amuntai Selatan	22	9.806	9.301	505	9.187	47	113	236	223	9.583	97,73
4	Banjang	12	4.920	4.566	354	4.491	70	75	90	194	4.726	96,06
5	Haur Gading	10	4.741	4.327	414	4.181	91	146	151	172	4.569	96,37
6	Sungai Tabukan	12	4.350	3.795	555	3.699	169	96	184	202	4.148	95,36
7	Sungai Pandan	16	7.553	6.959	593	6.853	59	104	184	259	7.200	95,33
8	Babirik	5	4.653	3.700	953	3.399	89	301	137	955	3.926	84,38
9	Danau Panggang	2	5.723	4.044	1.298	3.655	157	197	304	1.002	4.313	75,36
10	Paminggir	2	2.572	1.313	1.258	1.155	43	142	466	756	1.806	70,22
JUMLAH		**114**	**62.697**	**55.834**	**6.416**	**54.017**	**869**	**1.492**	**1.936**	**4.060**	**58.314**	**93,01**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023

Peningkatan layanan terhadap akses sanitasi sudah menjadi prioritas nasional bahkan merupakan universal akses (SDG'S) dengan target akses sanitasi 100% pada tahun 2019. Secara target, Kabupaten Hulu Sungai Utara turut menargetkan 100% seperti halnya yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Penggunaan Sanitasi Layak Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 yaitu sebesar 88,96% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 93,91%. Pada gambar di bawah terlihat capaian target penggunaan sanitasi layak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambar 2.54.
Penggunaan Sanitasi Layak
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023

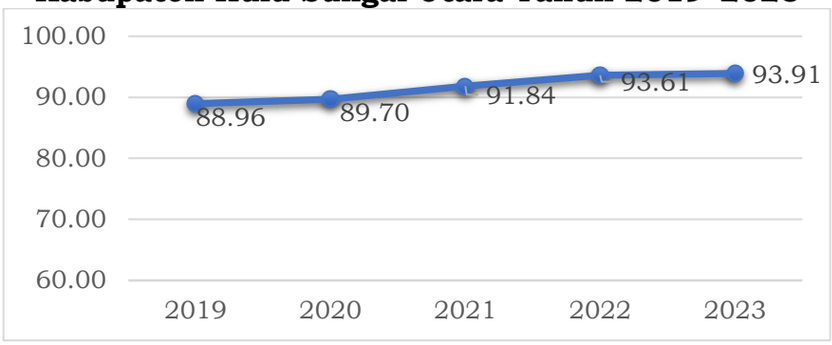

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh adanya peran program dana desa yang besar dalam melaksanakan kegiatan sanitasi di perdesaan. Selain itu juga didukung oleh dana APBN yang disalurkan melalui dana DAK Fisik bidang sanitasi. Hal-hal tersebut ikut berkontribusi untuk pencapaian target sanitasi layak bagi penduduk Kab. Hulu Sungai Utara dengan pendanaan di luar APBD Kab. HSU yang memang sangat terbatas. Sosialisasi pemahaman tentang koordinasi, kerjasama, sharing cost tentang pembangunan desa dengan aparat pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sehingga kedepan akan lebih dimantapkan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dari data kinerja trantibumlinmas beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa rasio polisi pamong praja dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan, dimana di tahun 2019 sebesar 1,79% dan menurun di tahun 2022 sebesar 1,64%, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 1,69%. Dengan kondisi ini berarti kapasitas pemda dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah perlu ditingkatkan.

Rasio Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengalami penurunan. Semakin meningkatnya/menurunnya rasio jumlah linmas maka akan semakin besar/kecil ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.34.
Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	42	42	40	38	40
2.	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,79	1,78	1,75	1,64	1,69
3.	Jumlah Petugas Perlindungan masyarakat	1.428	1.428	1428	1428	1229
4.	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2
5.	Jumlah Penduduk	234.604	235.841	228.831	231.290	235.785

Sumber: Kantor Satpol PP, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

6. Sosial

Berbagai jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selama tiga (3) tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebanyak 17.762 naik menjadi 82.691 di tahun 2023 dan untuk penyebutan PMKS menjadi PPKS yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Adapun rincian secara jelas untuk data PMKS tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. HSU Tahun 2018 dan 2023

NO	Uraian	Tahun		
		2018	2022	2023
1.	Balita Terlantar (0-4 th)	33	40	0
2.	Anak Terlantar(5-18 th)	133	115	141
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum		9	0
4.	Anak Jalanan	4	64	0
5.	Anak dengan kedisabilitasan		161	212

NO	Uraian	Tahun		
		2018	2022	2023
6.	Anak yang menjadi korban kekerasan/ diperlakukan salah	2	9	0
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)		10	4
8.	Lanjut Usia Terlantar	1.191	1.190	1.033
9.	Penyandang Disabilitas		959	1.448
10.	Tuna Susila		0	0
11.	Gelandangan		5	1
12.	Pengemis	35	35	0
13.	Pemulung		20	0
14.	Kelompok Minoritas		2	4
15.	Berkas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	77	97	21
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	66	270	13
18.	Korban Trafficking	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	0	9	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	1
21.	Bencana Alam		9	0
22.	Bencana Sosial		9	18
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)		2.137	2.274
24.	Fakir Miskin	16.221	26.192	77.511
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis		89	10
26.	Komunitas Adat Terpencil		0	0
	Jumlah	**17.762**	**31.431**	**82.691**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

2.1.5.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dijalankan Pemerintah Daerah. Salah satu yang bisa dilaksanakan adalah mendata jumlah pencari kerja dan membatu penempatannya untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut jumlah pencari kerja yang terdata oleh SKPD yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Tabel 2.36.
Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. HSU
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan (%)	21,7	16,9	1,36	1,87	2,4

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa para pencari kerja yang terdaftar di instansi terkait masih banyak yang belum diterima di perusahaan/entitas bisnis karena masih tidak sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh perusahaan/entitas bisnis selain itu juga tingkat Pendidikan para pencari kerja masih rendah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas–luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender, untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 terendah terjadi pada tahun 2020 dengan 3 kasus, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 14 kasus.

Tabel 2.37.
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kekerasan terhadap Perempuan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	2	1	6	4	5
2	Psikis	7	1	3	0	6
3	Seksual	1	1	1	0	1
4	Penelantaran	0	0	0	0	2
5	Trafficking	0	0	0	0	0
6	Eksploitasi	0	0	0	0	0
7	Dan lain-lain	0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 terendah terjadi pada tahun 2019 dengan 7 kasus, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 33 kasus.

Tabel 2.38.
Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Hulu Sungai Utara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kekerasan terhadap Anak				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	1	1	2	1	9
2	Psikis	0	7	11	2	15
3	Seksual	1	1	2	2	2
4	Penelantaran	5	0	0	1	1
5	Trafficking	0	0	0	0	0
6	Eksploitasi	0	0	0	0	0
7	Dan lain-lain	0	0	1	6	6

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka

3. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehat, aktif, dan berproduktif secara berkelanjutan. Capaian Kinerja urusan Pangan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kap/hari)	4.280	3.386	3,496	1.676	2.950
2.	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kap/hari)	119,77	99,39	103,04	62,09	95,79
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81,20	81,80	82,30	83,20	83,7
4.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	3,83	3,87	4,23	5,68	5,63

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSU, 2024 dan Badan Ketahanan Pangan RI, 2024

Indikator Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein diambil dari hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Capaian kinerja dari Indikator Ketersediaan Energi Perkapita sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 terus

mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 2.950 kkal/kap/hari. Ketersediaan Protein Perkapita sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan angka terendah pada tahun 2022 sebesar 62,09 gram/kap/hari.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH Konsumsi menggambarkan tingkat keanekaragaman pangan yang dikonsumsi dan merupakan indikator mutu gizi sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan, skor PPH Konsumsi maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Skor PPH Konsumsi Kab. HSU mengalami trend yang positif, dimana terjadi kenaikan setiap tahunnya. Hal ini memperlihatkan bahwa secara keseluruhan konsumsi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup beragam dan berkualitas.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Data pada tabel di atas menunjukkan adanya tren peningkatan dari Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Hulu Sungai Utara. Hal ini mengindikasikan adanya kondisi makin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan tapi kurang dari kebutuhan energinya.

4. Lingkungan Hidup

a. Persampahan

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Persentase penanganan persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 38,00% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 72,28%, namun pada tahun berikutnya kembali menurun hingga menjadi 48,02% di tahun 2023.

Sebagai tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Tebing Liring yang direncanakan sebagai TPA Regional, namun secara teknis belum beroperasi secara maksimal.

Tabel 2.40.
Volume Sampah Yang Dapat Diangkut Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Sampah Yang Ditangani (m3)	66.500	67.500	25.501,02	25.402,45	16.280,73
2.	Jumlah Volume Produksi Sampah (m3)	175.000,00	178.000,00	35.280,75	35.280,75	33.905,00
	Persentase	**38,00**	**37,92**	**72,28**	**72,00**	**48,02**

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2023

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yaitu jumlah pendudukusia >17 yang ber KTP dibagi jumlah penduduk yang berusia >17 atau telah menikah. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2019 yaitu sebesar 96,74% dan meningkat hingga tahun 2021 menjadi 99,82%. Pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 97,15% dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 97,39%. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2019– 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.55.
Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023

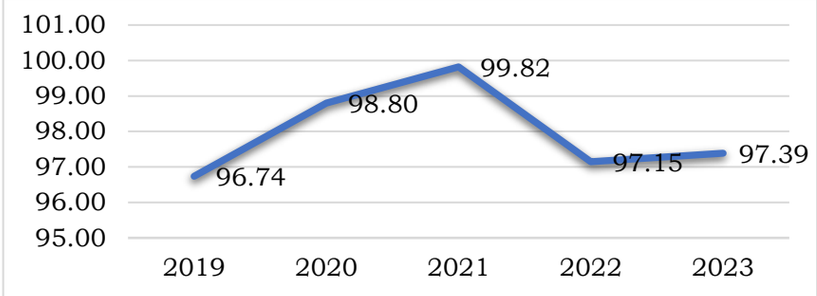

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

a. Rasio bayi berakte kelahiran

Untuk rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran dan bayi yang mempunyai akte kelahiran. Jumlah Akta Kelahiran yang dimiliki Penduduk sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 115.412 akta dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 144.303 akta. Data rasio bayi berakta kelahiran tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.41.
Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bayi Lahir	3.838	3.545	1.478	3.315	4.487
2	Jumlah Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	6.951	6.834	7.142	6.703	7.132
3	Rasio bayi Berakta Kelahiran	0,806	0,869	0,942	0,98	0,99
4	Jumlah Akta Kelahiran yang dimiliki Penduduk	115.412	122.246	129.388	136.091	144.303

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat sudah semakin banyak tumbuh dan berkembang di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Jumlah LPM Aktif pada tahun 2019-2022 sebanyak 38 LPM, namun menurun di tahun 2023 menjadi hanya 30 LPM. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	211	211	211	211	211
2	Rata-rata jumlah binaan PKK	10	10	10	10	10
3	Jumlah LPM Aktif	38	38	38	38	30
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100
5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain adalah PKK. Pemberdayaandan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera, maju dan mandiri.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka akseptor KB menunjukan adanya pengendalian jumlah penduduk. Angka rata-rata akseptor KB di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebesar 77,59%, angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 73,80% (tahun 2022).

Tabel 2.43.
Jumlah dan Rasio Akseptor KB
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah akseptor KB	32.072	36.552	39.032	26.717	27.434
2	Jumlah pasanganusia subur	40.291	45.049	47.850	36.204	35.357
3	Rata-rata akseptorKB	79,60	81,14	81,57	73,80	77,59

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,2023

8. Perhubungan

a. Angkutan Darat

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek. Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat terminal tipe B dan tipe C, terminal tipe B yaitu Terminal Banua Lima pengelolaannya saat ini adalah wewenang Provinsi, sarana terminal di kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44.
Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum Tahun 2023

No	Nama Terminal	Tipe Terminal	Lokasi	Luas Kawasan (m)	Ket.
1	Terminal Banua Lima	B	Kecamatan Amuntai Tengah	75 x 400	Prov
2	Terminal Palampitan	C	Kecamatan Amuntai Tengah	85 x 85	Kab
3	Terminal Pasir mas	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
4	Terminal Hulu Pasar	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
5	Terminal Babirik	C	Kecamatan Babirik	55 x 100	Kab
6	Terminal Sungai Pandan (Alabio)	C	Kecamatan Sungai Pandan	65 x 65	kab

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini terdapat terminal tipe B dan tipe C.

b. Angkutan Sungai

Prasarana lainnya yang sangat vital sebagai angkutan umum pada sungai dan rawa adalah dermaga dan tambatan perahu. Dermaga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.45.
Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Lokasi/Desa	Kecamatan	Kondisi	Tahun Dibangun
1	Banua Lima	Amuntai Tengah	Baik	1969
2	Pasar Babirik	Babirik	Baik	1970
3	Pasar Amuntai	Amuntai Tengah	Baik	1994
4	Sungai Sandung	Sungai Pandan	Baik	2000
5	Danau Panggang	Danau Panggang	Baik	2010
6	Keramat	Haur Gading	Rusak Ringan	2011
7	Pondok Babaris	Sungai Pandan	Baik	2012
8	Telaga Selaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
9	Telaga Selaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
10	Banyu Tajun Pangkalan	Sungai Pandan	Baik	1970/2014
11	Kalumpang Dalam	Babirik	Baik	2015
12	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2015
13	Tampakang	Paminggir	Baik	2015

No	Lokasi/Desa	Kecamatan	Kondisi	Tahun Dibangun
14	Sapala	Paminggir	Baik	2015
15	Paminggir	Paminggir	Baik	2013-2015
16	Keramat	Haur Gading	Baik	2015
17	Sungai Dalam	Babirik	Baik	2016
18	Hambuku Pasar	Sungai Pandan	Baik	2016
19	Baru	Danau Panggang	Baik	2017
20	Kalumpang Luar	Babirik	Baik	2017
21	Parupukan	Babirik	Baik	2017
22	Paminggir	Paminggir	Baik	2017
23	Kamayahan	Amuntai Utara	Baik	2017
24	Sungai Durait Hilir	Babirik	Baik	2017
25	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2018
26	Bararawa	Paminggir	Sangat Baik	2019
27	Paminggir	Paminggir	Sangat Baik	2019
28	Kebun Sari	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2019
29	Pal Batu	Paminggir	Sangat Baik	2021
30	Paminggir Seberang	Paminggir	Sangat Baik	2022
31	Baru	Danau Panggang	Sangat Baik	2023
32	Pasar Senin	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2023
33	Keramat	Haur Gading	Sangat Baik	2023
34	Paminggir	Paminggir	Sangat Baik	2023
35	Pasar Senin	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2023

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Capaian kinerja urusan Perhubungan selama tahun 2019 sampai 2023 mengalami trent yang positif dengan capaian 100%, indikator Tingkat pemanfaatan terminal meningkat dari 86,32 menjadi 89,86 dan pada tahun 2023 menurun menjadi 89,31, indikator Tingkat pemanfaatan dermaga meningkat dari 97,37 menjadi 98,39 di tahun 2022 dan pada tahun 2023 menurun menjadi hanya 96,3, sedangkan indikator Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan juga mengalami trent yang positif dari 97,03 menurun menjadi 41,6 di tahun 2023.

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa yang terhubung dengan moda transportasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat pemanfaatan terminal	%	86,32	88,74	89,72	89,86	89,31
3	Tingkat pemanfaatan dermaga	%	97,37	97,52	97,64	98,39	96,3
4	Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan	%	97,03	66,30	41,51	76,26	41,6

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

9. Komunikasi dan Informatika

Dalam bidang telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi di daerah telah dibangun jaringan telekomunikasi PT Telkom di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping jaringan telepon rumah yang telah ada, penggunaan telepon selular juga telah dapat digunakan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena di Hulu Sungai Utara khususnya Kota Amuntai telah memiliki jaringan-jaringan selular sepertiTELKOMSEL, INDOSAT, TELKOM, 3, FLEXI, XL. Untuk TV lokal, Amuntai telah memiliki AM TV yang merupakan Stasiun TV milik Pemerintah Daerah dan sebaran menara BTS (*Base Transceiver Station*) yang merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator mengalami peningkatan.

Dari tabel di bawah, diketahui jumlah sebaran terbanyak di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 20 buah, dan di Kecamatan Haur Gading tidak ada berdiri menara telekomunikasi/BTS. Melihat perkembangan komunikasi selular di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya, diprediksi kedepannya akan lebih banyak provider telekomunikasi yang masuk, sehingga perlu perencanaan dan antisipasi terhadap jaringan nirkabel tersebut. Perencanaan dimaksud yaitu dengan melakukan kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan provider melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi.

Tabel 2.47.
Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Amuntai Tengah	20	20	20	20	20
2	Amuntai Selatan	8	8	8	8	8
3	Amuntai Utara	8	8	8	8	8
4	Banjang	4	4	4	4	4
5	Babirik	5	5	5	5	5
6	Danau Panggang	4	4	4	4	4
7	Haur Gading	3	3	3	3	3
8	Paminggir	2	2	2	2	2
9	Sungai Pandan	9	9	9	9	9
10	Sungai Tabukan	2	2	2	2	2
	JUMLAH (unit)	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**

Sumber: Dinas Kominfosandi, 2024

Pelayanan komunikasi dan penggunaan internet hingga saat ini masih dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan akses internet agar

dirasakan seluruh masyarakat dapat tercover atau terlayani, hal ini perlu terubusan Pemerintah daerah untuk menggandeng operator seluler untuk membangun jaringan terutama 4G. Daerah atau desa yang belum mendapatkan jangkauan layanan 4G atau blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada sebanyak 18 Desa. Daerah terbanyak di Kecamatan Paminggir yang belum tercover jaringan 4G yakni ada 4 Desa dan Kecamatan Banjang dan Kecamatan Amuntai Tengahmasing-masing ada 2 Desa, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.48.
Desa Blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	KEC	DESA	COVERAGE 4G (KM2)	LUASWILAYAH (KM2)	PERSENTASE 4G TERHADAP WILAYAH (%)	STATUS 3T	JUMLAH PENDUDUK	Elektrifitas	Aksesibilitas Jalan	sarana Pendidikan	sarana kesehatan	objek Wisata	Sinyal Telekomunikasi 2G/3G/4G	Ketersediaan Jaringan Fiber Optik
1	PAMINGGIR	DESA TAMPAKANG	0 KM2	40,46	0	Eks. 3T	1.287	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	2G	Tidak Ada
2	PAMINGGIR	DESA PAL BATU	0 KM2	23,59	0	Eks. 3T	778	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
3	PAMINGGIR	DESA BARARAWA	0 KM2	48,4	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	2G	Tidak Ada
4	PAMINGGIR	DESA SAPALA	0 KM2	23,6	0	Eks. 3T	1.599	Ada	Sungai	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
5	PAMINGGIR	DESA AMBAHAI	0 KM2	13,59	0	Eks. 3T	1.045	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
6	AMUNTAI TENGAH	DESA MAWAR SARI	0 KM2	7,2	0	Eks. 3T	1.674	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
7	AMUNTAI TENGAH	DESA PINANGKARA	0 KM2	6,59	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Titian	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
8	BANJANG	DESA PAWALUTAN	0 KM2	5.90	0	Eks. 3T	8.25	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
9	BANJANG	DESA PULAU DAMAR	0 KM2	2.10	0	Eks. 3T	1.357	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
10	DANAU PANGGANG	DESA RINTISAN	0 KM2	3.60	0	Eks. 3T	1.254	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
11	BABIRIK	DESA PAJUKUNGAN HULU	0 KM2	1.90	0	Eks. 3T	1..965	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	TidakAda
12	AMUNTAI SELATAN	DESA KAYAKAH	0 KM2	6.78	0	Eks. 3T	1.423	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
13	AMUNTAISELATAN	DESA MURUNG PANGGANG	0 KM2	5.65	0	Eks. 3T	1.243	Ada	Urukan tanah	Ada	Tidak Ada	-	2G	TidakAda
14	AMUNTAI UTARA	DESA TEBING LIRING	0 KM2	4.78	0	Eks. 3T	876	Ada	Aspal	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada

Sumber: Diskominfosandi, 2024

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2019 sekitar 70,63%. Kemudian tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Koperasi Aktif di Kabupaten Hulu Sungai Utara di bawah 50% dari jumlah Koperasi yang ada. Hal ini menunjukkan perlu kerja keras lagi dalam memberdayakan koperasi agar koperasi tetap bertahan dan tumbuh usaha ekonominya.

Tabel 2.49.
Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Koperasi yang Aktif (Unit)	Persentase
2019	126	89	70,63
2020	127	56	44,09
2021	127	57	44,88
2022	128	57	44,53
2023	128	59	46,09

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kab.HSU dan Kab. HSU Dalam Angka 2024

Tabel 2.50.
Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2019-2023

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Laki-Laki	70.031	70.031	70.031	17.652	17.129
2	Perempuan	43.469	43.469	43.469	18.013	17.250
	Jumlah	**113.500**	**113.500**	**113.500**	**35.665**	**34.379**

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kab.HSU, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah jumlah penduduk (Laki-laki dan Perempuan) yang bekerja di sektor UMKM pada tahun 2019 sampai dengan 2021 berjumlah 113.500 orang kemudian tahun 2022 jumlahnya turun menjadi 35.665 orang dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi hanya 34.379 orang. Hal ini disebabkan sebagian UMKM naik kelas dan adanya bias dengan adanya pendataan real yang dilakukan *by name by addres*.

11. Penanaman Modal

Dari tahun 2019-2021 besarnya SIUP yang diterbitkan tidak diikuti dengan besarnya TDP yang diterbitkan, hal ini menunjukkan masih kurang sadarnya masyarakat untuk membuat ijin tersebut. Sedangkan di tahun 2022 jumlah SIUP dan TDP yang diterbitkan turun lebih dari 50 persen dari pencapaian tahun sebelumnya, hal ini menunjukkannya perlunya upaya

untuk terus memberikan sosialisasi kesadaran masyarakat/pengusaha untuk mengurus perizinannya dan iklim berinvestasi juga mesti terus dibenahi.

Tabel 2.51.
Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2019-2023

No	Jenis Perijinan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SIUP	335	320	534	82	0
2	TDP	194	209	259	1093	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 menurun menjadi hanya 12,519 miliar. Penurunan ini, karena masih belum banyak Investor yang menanamkan modal usahanya.

Tabel 2.52.
Nilai Investasi berskala nasional (PMDN) Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) (miliar)	370,9	956,9	158,38	12,519

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

12. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga sebanyak 3 (tiga) buah yakni Komite Olahraga Nasional (KONI), *National Paralymic Comite* (NPC) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Adapun perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	Jenis Perijinan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	67	70	65	83,3	83,3
2	Cakupan pembinaan olahraga	30	30	25	30	64
3	Jumlah prestasi olahraga	129	102	86	430	256

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2024

13. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Utara. Output yang dihasilkan setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB). Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

14. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampakpada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi. Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan e-Goverment, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasidi lingkungan Pemerintah Daerah. Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta indungi sistem elektronik dan dokumen elektronik. Persentase Peningkatan SKPD yang menerapkan keamanan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 yaitu sebanyak 20% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 90%.

Tabel 2.54.
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi di Kabupaten HSU Tahun 2019-2023

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	20	50	60	80	90

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kab.HSU

15. Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah yang biasanya mempunyai kegiatan rutin setiap tahun, seperti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Kearsipan. Adapun perkembangan urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55.
Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	43,21%	43,48%	90,25%	90,89%	90,46%
2.	Hasil Pengawasan Kearsipan	90,10 (AA)	90,10 (AA)	69,08 (B)	57,68 (CC)	69,81 (B)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024

16. Perpustakaan

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah di tahun 2019 sampai dengan 2023 sebanyak 3 buah. Jumlah Perpustakaan Desa di tahun 2019 berjumlah 64 buah, meningkat sampai tahun 2022 menjadi 86 buah, namun pada tahun 2023 menurun menjadi hanya 67 buah. Sedangkan jika dilihat dari pengunjung perpustakaan daerah maupun desa pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayananperpustakaan di daerah.

Perkembangan kinerja perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.
Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah	3	3	3	3	3
2.	Jumlah Perpustakaan Desa	64	64	86	86	67
3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	58.786	17.853	4.152	35.315	40.541
4.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa	856	351	5.308	18.720	13.285

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024 dan Perpustakaan Nasional RI, 2024

2.1.5.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata adadan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada. Urusan pilihan yang dominan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pertanian, perikanan, kehutanan dan perindustrian, meskipun urusan pilihan lainnya juga dilaksanakan, namun tidak menonjol.

1. Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lahan rawa dan sungai. Lahan rawa ini merupakan lahan rawa yang tergenang secara periodik dan monoton. Luas lahan potensi perikanan Kab. Hulu Sungai Utara mencapai 355 km². Produksi perikanan pada tahun 2023 mencapai 21.847,90 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 12.325,93 ton dan budidaya sebesar 9.521,97 ton. Adapun jumlah produksi perikanan Kab. Hulu sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2019-2023

No	Sub Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perikanan Tangkap (Ton)	12.438,85	12.316,34	12.319,67	12.323,77	12.325,93
2	Perikanan Budidaya (Ton)	8.829,18	9.082,03	9.362,39	9.520,22	9.521,97

Sumber: Dinas Perikanan Kab.HSU dan Kab. HSU Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa Produksi Sektor Perikanan Sub Sektor Perikanan Tangkap selama sebelas tahun terakhir dari tahun 2019-2023 cenderung tetap pada kisaran 12 ribu ton. Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi dengan penggunaan alat tangkap ikan, dimana perlu pengawasan untuk alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan setrum. Adapun Sub Sektor Perikanan budidaya perkembangan produksinya selama sebelas tahun terakhir fluktuatif, dimana terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019. Sub sektor perikanan budidaya ini banyak dipengaruhi oleh ketersediaan benih ikan, harga pakan dan kondisi perairan.

Tabel 2.58.
Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan
Tahun 2019–2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nelayan Perairan Umum (Orang)	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545
2.	Petani Ikan (Orang)	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
3.	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/th)	44,06	44,08	44,08	67,56	67,68

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah nelayan perairan umum dan Petani/Pembudidaya Ikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tetap dikarenakan Potensi Desa Nelayan terbaru tidak ada dan dilihat dari data produksi per tahun tidak ada peningkatan significant. Berdasarkan survey data statistik perikanan jumlah orang yang bermata pencaharian nelayan penangkap ikan sebanyak 18.545 akan tetapi ini bukan mata pencaharian utama bagi mereka tetapi merupakan mata pencaharian sambilan dan sambilan utama. Terlepas dari hal tersebut ini menujukkan bahwa masyarakat Hulu Sungai Utara sangat bergantung pada kemakmuran rawa secara langsung, apabila ekosistem rawa terganggu akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Adapun untuk konsumsi ikan perkapita ada peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan semakin membaiknya kesadaran untuk mencukupi kebutuhan protein terutama ikan. Meningkatnya angka konsumsi ikan Kab. HSU ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait seperti Gemarikan (Gerakan gemar makan ikan) yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah.

2. Pariwisata

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarian seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatandan tempat hiburan/rekreasi budaya.

Obyek-obyek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai berkembang dengan adanya wisata-wisata lokal yang memanfaatkan

kearifan budaya lokal yang dikelola oleh masyarkat setempat/desa. Ditinjau dari sarana dan prasarananya, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.59.
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	99.603	62.288	74.154	103.400	120.002

Sumber data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berfluktuatif. Dengan merebaknya virus COVID19 membawa pengaruh terhadap jumlahkunjungan wisatawan lokal pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mulai menggeliat kembali akibat munculnya objek-objek wisata lokal yang memanfaatkan kearifan lokal seperti kolam pemancingan ikan, susur rawa/sungai dan lain-lain.

3. Pertanian

a. Tanaman Pangan

Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di kabupaten Hulu Sungai Utara sektor Pertanian memegang peranan penting karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Luas panen komoditas pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.60.
Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Tanaman Pangan						
	Padi	Ton	143.403	105.066	86.020	33.096	69.473
	Jagung	Ton	563	1.901	451	243	457
	Kacang Tanah	Ton	655	209	354	26	43
2	Produksi Tanaman						

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Hortikultura						
	Cabe Besar	ton	219	184	134	170	216
	Cabe Rawit	ton	105	123	111	136	153
3	Produksi Tanaman Perkebunan						
	Karet	ton	405	409	402	403	409
	Kelapa Sawit	ton	30.180	28.995	29.811	26.707	26.940
	Kelapa Dalam	ton	640	645	661	685	696
	Purun	ton	137	137	119	125	101

Sumber: Dinas Pertanian Kab.HSU Tahun 2024

Produksi tanaman pangan padi tahun 2019-2022 cenderung menurun, terlihat di tahun 2019 sebanyak 143.403 ton dan terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 33.096 ton. Namun pada tahun 2023, produksi padi kembali mengalami peningkatan menjadi 69.473 ton. Keberhasilan pencapaian produksi padi ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman padi. Luas tanam dan luas panen padi tidak mencapai taget yang telah ditetapkankarena curah hujan yang cukup tinggi merata sepanjang tahun sehingga kondisi lahan sawah banyak tergenang air yang menyebabkan petani tidak dapat secara maksimal melakukan penanaman padi.

b. Peternakan

Populasi ternak merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan peternakan, karena dari populasi akan terlihat jumlah ternak pada suatu wilayah, sekaligus merupakan gambaran keberhasilan wilayah tersebut dalam melakukan kegiatan peternakan. Bila dilihat tren perkembangannya, populasi ternak besar sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2023 yaitu sebesar 10.073. Untuk ternak kecil pada tahun 2019 yaitu sebesar 516 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 685.

Tabel 2.61.
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perkembangan Populasi Ternak					
Ternak Besar	9.809	9.747	9.851	9.668	10.073
Ternak Kecil	516	592	616	646	685
Ternak Unggas	5.057.160	3.451.969	3.476.128	3.553.815	3.592.592

Sumber: Dinas Pertanian Kab.HSU dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2023

Perkembangan produksi daging ternak besar sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 428.173 Kg dan pada tahun 2023 menurun menjadi hanya 381.968 Kg. Adapun Produksi Ternak Kabupaten HSU 2019-2023 di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.62.
Produksi Ternak Kabupaten HSU 2019-2023

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Daging Ternak Besar (Kg)	428.173	338.534	346.021	380.445	381.968
2.	Daging Ternak Unggas (Kg)	2.961.570	2.184.552	2.183.928	2.348.871	2.559.560
3.	Telur Unggas (Kg)	11.146.525	6.719.807	6.830.606	7.090.123	7.199.517

Sumber: Dinas Pertanian Kab.HSU dan Kabupaten HSU Dalam Angka 2023

4. Perdagangan

Dari banyaknya sarana perdagangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menunjukkan kondisi ideal. Kabupaten Hulu Sungai hanya memiliki 1 Pasar Induk dengan menjual berbagai macam komoditas. Selain itu terdapat juga pasar desa dan pasar rakyat yang tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Berikut perkembangannya.

Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara pada tahun 2019 yaitu sebesar 80% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dan 2023 menjadi 100%.

Tabel 2.63.
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara
Tahun 2019-2023

Indikator	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara (%)	80	80	80	100	100

Sumber: Dinas Perindag, Kop & UKM Kab.HSU

Tabel 2.64.
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal/ Kaki Lima (PKL)
Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Bina kelompok pedagang/usaha informal/PKL	2.980	3.000	3.100	3,4	3,5

Sumber: Dinas Perindag, Kop & UKM Kab.HSU

5. Perindustrian

Sektor Industri yang tumbuh di wilayah Kabupaten HSU adalah Industri Kecil dan Menengah. Dari tabel di bawah ini, terlihat jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 yaitu sebanyak 35.279 IKM dan meningkat hingga tahun 2021 menjadi 38.327 IKM, namun pada tahun berikutnya menurun menjadi hanya 7.018 IKM di tahun 2023.

Gambar 2.56.
Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

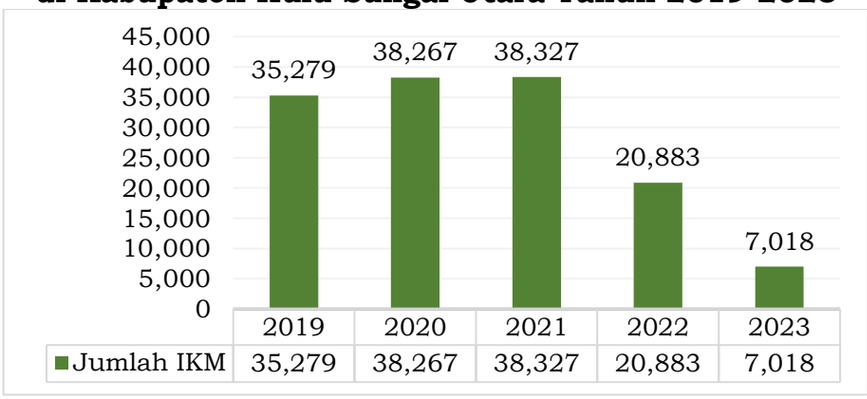

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM

Bila dilihat dari unit usaha formal dan non formal menurut kelompok industri, maka industri kerajinan merupakan kelompok industri terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah industri kerajinan yang bersifat home industry. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

2.1.5.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat DPRD

Data menunjukkan hasil capaian Kinerja Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2020 yaitu sebesar 83,3 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 85,6 dan bertahan hingga tahun 2023.

Tabel 2.65.
Survey Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Dukungan terhadap sumber daya manusia (Sekretariat DPRD)	90	90,3	90,3	90,3
Indeks Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas	85,93	85,93	85,93	85,93
Indeks Penyediaan sarana dan Prasarana	73,99	80,7	80,5	80,5
Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	83,3	85,6	85,6	85,6

Sumber: Lakip Setwan Kab. HSU Tahun 2020-2023

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi Legislasi dimana bersama-sama dengan eksekutif membahas dan menetapkan Peraturan Daerah. Untuk Tahun 2024 Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah yaitu sebanyak 3 buah atau terjadi penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang sebanyak 11 buah.

Tabel 2.66.
Produk Hukum Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	4	4	4	4	0
Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah	8	11	8	11	3

Sumber: Lakip Setwan Kab. HSU Tahun 2020-2024

2.1.5.5. Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari dengan perencanaan yang matang, bersinergi dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan. Setiap daerah harus memiliki 3 Dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 5 tahun dan rencana pembangunan tahunanyang biasa disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tiga dokumen perencanaan tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan daerah. Adapun untuk setiap SKPD harus memiliki perencanaan selama limatahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tiap tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022, dan RPD 2023-2026. Adapun RKPD setiap tahun telah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjadi dasar untuk penyusunan KUA-PPAS, yang selanjutnya menjadi RAPBD dan APBD. Kedepannya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan akan terus dibenahi untuk menjadilebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagaimana dimuat pada tabel di bawah. Selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat kinerja keuangan dapat dipertahankan dan dengan realisasi umumnya diatas 90%.

Tabel 2.67.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD di Kab. HSU
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase SKPD yang Perencanaan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel	92	92	92	92	94
2	Persentase SKPD yang Pelaporan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel	100	100	100	85	86
3	Persentase SKPD yang Pengelolaan Aset Daerahnya Tertib dan Akuntabel	75	95	95	77	80
4	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Kas Daerah yang Tertib dan Akuntabel	90	90	90	90	90

Sumber: Lakip BPKAD Kab. HSU Tahun 2020-2023

Selain capaian indikator kinerja yang dimuat pada tabel di atas, salah satu indikator yang penting adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.68.
Opini BPK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPAKD Kab. HSU, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2019 sampai 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP), yaitu opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

3. Kepegawaian

Indeks Profesionalitas pada tahun 2019 yaitu sebesar 40 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 61,5. Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terisi berdasarkan hasil evaluasi dan lelang jabatan juga demikian dari 43 di tahun 2019 meningkat menjadi 84 pada tahun 2023. Sedangkan untuk Capaian Indikator Utama (IKU) lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.
Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian di Kab. HSU Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Profesionalitas	40	40,02	47,56	56,6	61,5
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan hasil pemetaan jabatan	85	82	78	73	68
3	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terisi berdasarkan hasil evaluasi dan lelang jabatan	43	40	35	64	84
4	Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas yang terisi dan memenuhi syarat jabatan	86	84	78	82	84
5	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	85	86	86	87	87
6	Persentasi Aparatur yang disiplin	93,75	75	80	85	86
7	Persentase data pegawai yang akurat dan update	75	75	75	76	77

Sumber: BKPSDM Kab. HSU

4. Pendidikan dan Pelatihan

Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi pada tahun 2019 yaitu sebesar 9 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 12,03 persen. Hal tersebut sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.70.
Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi di Kab. HSU Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi	9	9,06	10,03	11,26	12,03

Sumber: BKPSDM Kab. HSU

5. Penelitian dan Pengembangan

Indikator Indeks Inovasi Daerah merupakan parameter yang mengukur tingkat inovasi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, nilai Indeks Inovasi Daerah HSU dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten HSU mendapat nilai 60,48 dengan kriteria Sangat Inovatif.

Indikator Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mendapat nilai 100 persen.

Tabel 2.71.
Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan Kab. HSU Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Inovasi Daerah	-	-	27,28 Kurang Inovatif	58,91 Inovatif	60,48 Sangat Inovatif
2	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan	100	100	100	100	100

Sumber: Lakip Bappelitbang Kab. HSU Tahun 2020-2023 dan Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.1.5.6. Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD Minimal BB dalam periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, dimana di tahun 2019 sebesar 79 persen sedangkan di tahun 2023 sebesar 92 persen. Sedangkan Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) selalu berada dalam Level 3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.72.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kab. HSU
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD Minimal BB	79	87	92	92	92
2	Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori SAKIPA					51,28%
3	Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)	12 Temuan	14 Temuan	19 Temuan	34 Temuan	10 Temuan
4	Indeks/Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2
5	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Lakip Inspektorat Kab. HSU Tahun 2020-2023

2.1.5.7. Fokus Layanan Pemerintahan Umum

Persentasi Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dalam keadaan stabil pada angka 100 persen, namun menurun di tahun 2023 menjadi 99 persen. Persentase Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan mengalami peningkatan, dimana di tahun 2019 sebesar 85 persen, di tahun 2022 menjadi 100 persen, namun menurun di tahun 2023 turun menjadi 65 persen. Sedangkan Persentase Masyarakat dalam Berpolitik selama periode tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan penyebab utama adalah pandemi. Namun pada tahun 2023 naik menjadi 100 persen, sementara tahun 2021 dan 2022 tidak ada data sebab tidak ada pilkada.

Tabel 2.73.
Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. HSU Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentasi Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan	100	100	100	100	99
Persentasi Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan	85	86	90	100	65
Persentasi Masyarakat dalam Berpolitik	80	58	0	0	100

Sumber: Lakip Kesbangpol Kab. HSU Tahun 2020-2023

2.1.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) urusan pemerintah terkait pelayanan dasar telah dilaksanakan oleh Pemrintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelaksanaan SPM dilakukan oleh perangkat daerah pengampu dengan menggunakan peraturan dan standar teknis dari kementerian terkait. Pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 menunjukkan masih perlunya upaya pemenuhan target setiap jenis layanan. Adapun pencapaian secara rinci disajikan pada tabel di bawah.

2.1.6.1. Urusan Pendidikan

Realisasi pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupeten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagai berikut di bawah ini:

Tabel 2.74.
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
I.	**Pendidikan**			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs) (35,631)	100%	96,60%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (317)	100%	97,48%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (6,266)	100%	80,38%

Sumber: LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Berdasarkan tabel perhitungan pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2024 tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa:

a) Pencapaian tertinggi dari 3 jenis pelayanan dasar di bidang pendidikan yaitu terdapat pada Bidang Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 97,48% dari target yang seharusnya yaitu 100% setiap Tahun. Berdasarkan data Jumlah Penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yaitu sebanyak 317 Orang dan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan

keseteraan sebanyak 309 orang sehingga didapat angka capaian sebesar 97,48%.

b) Pencapaian terendah dari 3 jenis pelayanan dasar di bidang pendidikan yaitu terdapat pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 80,38% yaitu dari jumlah penduduk usia 5-6 sebesar 7.795 orang dan siswa usia 5-6 Tahun yang bersekolah di PAUD berjumlah 6.266 orang sehingga di dapat angka 80,38%.

c) Capaian Pelayanan dasar di Bidang Pendidikan Dasar yaitu sebesar 96,60% dari target yang seharusnya yaitu 100% setiap Tahun. Jumlah penduduk usia 7-15 Tahun yaitu sebanyak 36.884 Orang dimana telah bersekolah di SD/MI, SMP/MTs sebanyak 35.631 orang sehingga didapat angka capaian sebesar 96,60%.

2.1.6.2. Urusan Kesehatan

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Adapun realisasi pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75.
Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian SPM dan Realisasi Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Perhitungan Kinerja	Target / Sasaran	Realisasi Capaian	%
II	**Kesehatan**					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Ibu Hamil	3.272	2.576	78,73
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Ibu Bersalin	3.185	2.736	85,90
3	Pelayanan Kesehatan Bati Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir (0-28 Hari) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Bayi Baru Lahir	3.178	2.679	84,30
4	Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persentase Balita (Anak Usia 0-59 Bulan) yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi	14.904	13.730	92,12

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Perhitungan Kinerja	Target / Sasaran	Realisasi Capaian	%
		Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Seluruh Balita			
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Anak Usia Pendidikan Dasar	34.935	34.113	99,51
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Penduduk Usia Produkstif	144.942	97.906	67,55
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas	23.324	19.848	85,10
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita HIpertensi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Penderita Hipertensi	22.626	22.557	99,70
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Penderita DM	3.928	4.423	112,60
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh ODGJ Berat	370	370	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkolosis	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Orang Terduga TBC	2.743	3.137	114,36
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dibagi Jumlah Seluruh Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	5.531	5.944	107,47

Sumber: LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

2.1.6.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan data, capaian/realisasi SPM indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari sebesar 92,45%, capaian SPM terhadap target menurun sebesar 2,55%. Indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik memperoleh target sebesar 94,24%. Terhadap target maka realisasi mengalami peningkatan dibandingkan target sebesar 2,24%.

Adapun target, indikator dan realisasi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76.
Target, Indikator dan Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2024	Realisasi
III.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	95%	92,45%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	92%	94,24%

Sumber: LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Penurunan capaian SPM dikarenakan adanya penyesuaian jumlah rumah tangga yang dilayani, keterbatasan anggaran dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan terdapatnya kerusakan pada sarana prasarana yang telah terbangun di tahun–tahun sebelumnya

2.1.6.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77.
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian	Keterangan
IV.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh layak huni	0%	Hanya mendata 171 rumah sepanjang aliran sungai Negara (Desa Tangga Ulin Hulu, Desa Tangga Ulin Hilir, Desa Pamintangan, , Palampitan Hulu, Desa Palampitan Hilir, Kelurahan Paliwara dan Kelurahan Kebun Sari)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperolah fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	Tidak ada program pemerintah daerah kabupaten yang berdampak terhadap relokasi pemukiman masyarakat

Sumber: LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

2.1.6.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk bidang trantibumlinmas yang dilaksanakan Satpol PP dan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78.
Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian	Keterangan
V.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat**			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	Tidak ada klaim dari orang yang dirugikan akibat dari penegakan perda
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500 Orang	500 Orang
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	540 Orang	540 Orang
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 Orang	500 Orang
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan	229 Orang	229 Orang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian	Keterangan
	kebakaran	evakuasi korban kebakaran		

Sumber: LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

2.1.6.6. Urusan Sosial

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk bidang sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79.
Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM	%
VI.	**Sosial**				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.015 Orang	1.015 Orang	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	994 Orang	994 Orang	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	487 Orang	487 Orang	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah warga Negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	149 Orang	149 Orang	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100

Sumber: LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat diukur dengan uang, serta segala jenis kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah mencakup semua kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan daerah mencakup target, alokasi, dan realisasi anggaran yang menunjukkan pertumbuhan tahunan berdasarkan data tahun sebelumnya. Hal ini menjadi acuan untuk perhitungan dan perencanaan anggaran lima tahun kedepan.

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Analisis Kinerja Keuangan masa lalu dilakukan dengan mengevaluasi penerimaan dan Pengeluaran daerah. Penerimaan mencakup pendapatan dan pembiayaan, sementara Pengeluaran mencakup belanja daerah dan Pengeluaran pembiayaan. kapasitas keuangan daerah dinilai berdasarkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan. Berbagai sumber penerimaan dianalisis untuk memahami karakteristik dan tren yang ada.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh Gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun selanjutnya, yang akan menjadi dasar dalam perhitungan kerangka pendanaan Pembangunan daerah. Dengan memahami kapasitas ini, dapat ditetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan untuk memberikan Gambaran mengenai

kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan Pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek Tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahun, yang mencakup kinerja pendapatan daerah, belanja, daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut ini merupakan Gambaran umum kinerja pelaksanaan APBD.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mencakup semua hak yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Setiap tahun, pendapatan daerah yang dilaporkan memberikan informasi tentang rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2020–2024 seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.80.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	URAIAN	Jumlah Realisasi					Rata -Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.209.504.014.011	1.062.442.492.586	1.367.155.152.842	1.407.165.120.155	1.802.002.670.782	11,9%
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	126.983.048.244	105.591.017.599	114.338.254.564	153.400.781.918	153.645.369.640	6,4%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	10.809.171.242	11.117.739.817	12.567.326.920	13.132.125.548	14.345.904.294,00	7,4%
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8.312.560.749	7.219.170.732	6.253.747.324	5.177.315.250	5.972.298.975	-7,1%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.391.345.344	9.166.983.360	10.096.647.022	10.774.141.834	11.502.427.299	11,9%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.469.970.910	78.087.123.690	85.420.533.298	124.317.199.286	121.824.739.072	7,7%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	803.011.058.896	956.196.508.987	1.252.752.398.278	1.253.688.531.237	1.647.749.822.530	20,4%
4.2.01	**Transfer Pusat**	713.131.856.228	994.246.835.610	953.558.204.943	1.143.991.646.049	1.528.073.303.188	22,2%
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	-	61.202.743.159	101.343.521.668	109.696.885.188	119.676.519.342	
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	61.202.743.159	101.343.521.668	109.696.885.188	119.676.519.342	
-	Bantuan Keuangan	-	-	-	-		0,0%
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	279.509.906.871	654.966.000	64.500.000	75.807.000	607.478.612	132,2%
4.3.01	Hibah (Dana BOS)	-	654.966.000	64.500.000			
-	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
-	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	75.807.000	607.478.612	
-	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.643.347.871	-	-	-	-	
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	172.389.277.000	-	-	-	-	
-	Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Pemerintah Daerah lainnya	44.477.282.000	-	-	-	-	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

Secara umum, dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki besaran yang fluktuatif dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,9 persen per tahun. Berdasarkan data, pada tahun 2020 besaran jumlah pendapatan sebesar Rp1.209.504.014.011, lalu terjadi peningkatan di tahun 2024 menjadi Rp1.802.002.670.782.

Selanjutnya, berdasarkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhitung dari tahun 2020 hingga 2024 memiliki besaran yang cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,4 persen persen per tahun dengan sebaran PAD di tahun 2020 yaitu sebesar Rp126.983.048.244 dan di tahun 2024 mencapai Rp153.645.369.640. Pendapatan Transfer mengalami peningkatan juga dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,4 persen per tahun. Nilai Pendapatan Transfer di tahun 2020 sebesar Rp803.011.058.896 dan di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp1.647.749.822.530. Lalu pada bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai yang dicapai pada tahun 2020 dan 2024. Pada tahun 2020 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp279.509.906.871 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp607.478.612.

B. Belanja Daerah

Analisis belanja daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah efisien dalam mengelola anggaran, menghindari Pengeluaran yang tidak perlu, dan memastikan Pengeluaran tepat sasaran. Pada bagian ini juga membahas tentang pertumbuhan belanja daerah, dengan menganalisis perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun.

Tabel 2.81.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Jumlah Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
5	**BELANJA**	**1.220.504.971.063**	**1.188.411.447.466**	**1.221.626.142.905**	**1.396.634.174.944**	**1.505.683.272.792**	**5,57%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**700.671.804.575**	**741.628.513.776**	**754.420.103.475**	**883.808.040.901**	**960.653.757.822**	**8,35%**
5.1.01	Belanja Pegawai	395.565.751.165	429.170.211.169	405.606.133.897	466.554.341.280	521.993.590.380	7,48%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.309.703.410	284.096.755.212	317.726.943.991	351.823.567.256	380.089.969.334	7,29%
5.1.03	Belanja Bunga	-	1.889.997.898	3.217.979.687	8.787.910.338	3.759.667.603	
5.1.04	Belanja Hibah	9.745.300.000	18.064.549.497	11.729.695.900	45.516.318.829	47.759.850.505	85,82%
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	4.930.050.000	8.407.000.000	16.139.350.000	11.125.903.198	7.050.680.000	87,36%
5.1.06	Belanja Bagi Hasil	2.121.000.000	-	-	-	-	
5.2	**BELANJA MODAL**	**255.771.403.875**	**194.904.401.374**	**242.461.271.680**	**275.667.259.194**	**286.894.600.370**	**4,59%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-		89.750.000		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	37.804.436.742	26.161.302.152	75.288.010.489	73.977.890.928	51,75%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	66.202.226.093	153.578.269.683	83.274.525.423	69.238.433.506	23,12%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	90.672.657.539	62.479.630.645	114.346.233.582	142.022.430.936	25,37%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	225.081.000	242.069.200	2.650.358.000	1.402.145.000	318,44%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	18.381.700	253.700.000	
5.2.07	Belanja Modal Dana BOS	-	-	-	-	-	0,00%
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**19.737.568.082**	**3.146.283.815**	**1.039.483.750**	**534.572.564**	**373.500.000**	**-57,43%**
5.3.01	**Belanja Tak Terduga**	**19.737.568.082**	**3.146.283.815**	**1.039.483.750**	**534.572.564**	**257.761.414.600**	**1,61%**
5.4	**TRANSFER**	**244.324.194.531**	**248.732.248.500**	**223.705.284.000**	**236.624.302.285**	**255.636.414.600**	**1,41%**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	244.324.194.531	246.596.248.500	221.645.284.000	234.499.302.285	257.761.414.600	1,61%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	2.136.000.000	2.060.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2020 hingga 2024, total Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan peningkatan pada sebaran belanjanya. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan belanja daerahnya sebesar 5,57 persen per tahun, pada tahun 2020 jumlah besaran belanja daerahnya sebesar Rp 1.220.504.971.063 lalu di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp1.505.683.272.792. Selanjutnya dapat dilihat juga bahwa dalam komponen-komponen belanja operasi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan juga dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasinya sebesar 8,35 persen per tahun, dibuktikan dari tahun 2020 sebesar Rp700.671.804.575 lalu di tahun 2024 meningkat menjadi Rp960.653.757.822. Sama dengan komponen belanja operasi, komponen-komponen dalam belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja modalnya yaitu sebesar 4,59 persen per tahun.

Dari tabel rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2020–2024 dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan keuangan daerah diukur dari jumlah pendapatan umum daerah dibandingkan dengan belanja untuk pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun 2020 apabila dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional termasuk ke dalam kelompok sedang, selanjutnya terjadi peningkatan di tahun 2021 hingga tahun 2024 nilai kemampuan daerah pada tahun tersebut masuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi karena diatas Rp550.000.000.000 (Lima Ratus Milyar Rupiah).

Tabel 2.82.
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Pendapatan Umum Daerah**	**929.994.107.140**	**1.061.787.526.586**	**1.367.090.652.842**	**1.407.089.313.155**	**1.801.395.192.170**
1	Pendapatan Asli Daerah	126.983.048.244	105.591.017.599	114.338.254.564	153.400.781.918	153.645.369.640
2	Dana Bagi Hasil	348.291.253.896	508.498.699.987	806.369.421.373	790.169.142.680	1.149.168.358.979
3	Dana Alokasi Umum	454.719.805.000	447.697.809.000	446.382.976.905	463.519.388.557	498.581.463.551
B	**Belanja Pegawai**	**395.565.751.165**	**429.170.211.169**	**405.606.133.897**	**466.554.341.280**	**521.993.590.380**
Kemampuan Keuangan Daerah		**534.428.355.975**	**632.617.315.417**	**961.484.518.945**	**940.534.971.875**	**1.279.401.601.790**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terbagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup semua dana yang masuk ke kas umum negara yang harus dikembalikan. Sementara Pengeluaran Pembiayaan mencakup semua Pengeluaran dari kas umum negara yang nantinya akan diterima kembali.

Berdasarkan data realisasi APBD, pada tahun 2020 sampai dengan 2024 realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan realisasi anggaran defisit. Hanya di tahun 2022 realisasi anggarannya mengalami surplus sebesar Rp145.529.009.937 mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang cukup besar yaitu Rp 347.211.080.705. Walaupun demikian, secara keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2023, total Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah Pembiayaan Neto sebesar Rp 197.335.129.559 lalu terjadi peningkatan tiap tahunnya hingga di tahun 2023 jumlah pembiayaan neto mencapai Rp245.163.859.594,34 lalu turun kembali tahun 2024 menjadi Rp141.489.383.151.

Tabel 2.83.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Jumlah Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
6	**PEMBIAYAAN**	_					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**197.335.129.559**	**208.255.861.917**	**213.432.070.768**	**352.972.757.939**	**255.694.804.806**	**11,46%**
6.1.01	Penggunaan SiLPA	197.335.029.559	182.095.131.561	89.334.317.815	320.442.330.243	255.694.804.806	44,96%
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	26.154.908.496	124.084.545.306	32.524.866.198	-	
6.1.03	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	100.000	5.821.860	13.207.647	5.561.498	-	1422,71%
6.1.04	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00%
	Jumlah Penerimaan	**197.335.129.559**	**208.255.861.917**	**213.432.070.768**	**352.972.757.939**	**255.694.804.806**	**11,46%**
6.1	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**11.750.000.000**	**107.808.898.345**	**114.205.421.655**	
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	11.750.000.000	18.749.944.474	20.500.055.526	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	89.058.953.871	93.705.366.129	
	Jumlah Pengeluaran	**-**	**-**	**11.750.000.000**	**107.808.898.345**	**114.205.421.655**	
	PEMBIAYAAN NETTO	**197.335.129.559**	**208.255.861.917**	**201.682.070.768**	**245.163.859.594**	**141.489.383.151**	**-4,59%**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**186.334.172.508**	**82.286.907.037**	**347.211.080.705**	**255.715.173.883**	**145.227.440.003**	**49,14%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mencerminkan kondisi keuangan serta kemampuan asset daerah dalam mendukung pembangunan. Analisis neraca bertujuan untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, rata-rata pertumbuhan neraca sebesar 7,85 persen serta nilai terendahnya berada di tahun 2020 sedangkan nilai tertinggi neraca daerah berada di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan. Lebih rinci mengenai neraca daerah dari tahun 2020 hingga 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.84.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
1	**ASET**						
2	**ASET LANCAR**						
3	Kas di Kas Daerah	159.119.127.953	59.923.960.708	308.388.986.644	237.021.961.113	420.749.540.318	101,67%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	592.500	-	-	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	105.009.532	-	450.000	-	-	
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	18.158.742.011	25.788.975.562	11.890.510.362	16.240.928.802	13.858.535.989	2,51%
7	Kas Dana BOS	552.230.394	945.428.051	158.655.407	-	-	
8	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	4.160.021.671	2.675.953.494	3.135.330	23.502.790	56.048.056	163,13%
	Kas Dana BOSP				138.286.331	139.060.995	
	Kas Dana BOK Puskesmas				2.270.125.770	1.986.267.472	
9	Kas Lainnya	-	-				
10	Setara Kas		-				
11	Piutang Pajak	6.093.883.183	6.729.253.159	7.412.216.986	8.146.592.419	8.725.035.882	9,40%
12	Penyisihan Piutang Pajak						
13	Piutang Retribusi	867.829.250	907.319.125	1.197.552.320	1.506.858.870	1.862.905.870	21,50%
15	Penyisihan Piutang Retribusi						
14	Piutang lain-lain PAD yang sah	121.562.250	1.066.098.534	5.794.854.462	471.990.298	2.469.941.372	388,00%
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah						
16	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi						
17	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi						

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
18	Piutang transfer pemerintah pusat - dana perimbangan	10.565.475.746	-	16.612.722.016	4.878	196.352.406.000	
	piutang transfer antar daerah	29.016.349.763	29.100.774.475	31.167.251.496	31.158.562.789	33.007.008.286	
19	belanja dibayar dimuka	-					
20	bagian lancar tuntutan perbendaharaan						
21	penyisihan bagian lancar tuntutan perbendaharaan						
22	bagian lancar tuntutan ganti rugi						
	Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi						
	Piutang Lainnya	1.610.230.385	27.282.271.467	1.127.362.971	1.127.362.971	1.127.362.971	374,61%
	Penyisihan Piutang Lainnya	- 4.046.404.921	- 4.593.794.283	- 5.236.295.284	- 6.124.155.349	-7.019.882.894	14,77%
	Persediaan	15.113.870.290	31.050.379.077	28.351.975.836	42.916.508.432	16.728.333.915	21,78%
23	**Jumlah Aset Lancar**	**241.437.927.506**	**180.876.619.369**	**406.869.971.045**	**334.898.530.113**	**690.042.564.232**	**47,05%**
25	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
26	Investasi Non Permanen	-					
27	Investasi dalam Dana Bergulir						
28	Investasi Non Permanen Lainnya						
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya						
29	Investasi Permanen						
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	138.109.369.606	125.008.301.936	130.926.307.428	154.485.556.580	184.867.657.509	8,23%
31	Investasi Permanen Lainnya	-					
32	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**	**138.109.369.606**	**125.008.301.936**	**130.926.307.428**	**154.485.556.580**	**184.867.657.509**	**8,23%**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
33	**ASET TETAP**						
34	Tanah	349.021.555.428	349.021.555.428	342.703.707.344	362.148.292.744	371.994.017.744	1,65%
35	Peralatan dan Mesin	438.856.477.361	476.785.098.931	510.928.687.301	640.961.531.545	715.426.151.662	13,22%
36	Gedung dan Bangunan	825.078.927.469	868.632.384.959	900.791.508.569	1.078.770.390.143	1.154.007.957.249	8,93%
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.590.223.357.355	1.649.584.811.266	1.727.693.227.520	1.855.341.140.111	1.998.516.059.147	5,89%
38	Aset Tetap Lainnya	13.614.934.497	13.709.668.682	13.856.780.272	16.314.412.472	17.354.156.132	6,47%
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	23.989.820.380	42.093.692.766	173.985.178.612	4.310.813.636	4.693.749.036	75,04%
40	Akumulasi Penyusutan	- 1.087.961.927.493	- 1.238.217.802.276	- 1.397.456.847.942	- 1.566.909.564.220	-1.754.040.552.150	12,68%
41	**Jumlah Aset Tetap**	**2.152.823.144.997**	**2.161.609.409.756**	**2.272.502.241.676**	**2.390.937.016.430**	**2.507.951.538.819**	**3,91%**
42	**DANA CADANGAN**						
43	Dana Cadangan						
44	**Jumlah Dana Cadangan**				-	-	
45	**ASET LAINNYA**						
46	Tagihan Penjualan Angsuran						
47	Tagihan Jangka Panjang						
48	Tuntutan Ganti Rugi						
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
50	Kas yang dibatasi Penggunaannya						
51	Aset Tak Berwujud	745.540.000	1.173.321.800	1.244.271.800	1.418.771.800	1.672.471.800	23,83%
52	Amortisasi Aset Tak Berwujud						
53	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 37.853.273.629	- 41.035.216.461	- 41.226.247.514	- 41.347.632.909	-34.910.197.392	
54	Aset Lain-Lain	201.287.565.393	238.607.649.290	245.246.528.428	248.030.933.407	208.714.245.034	1,65%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			26.762.259.800	231.704.614.000	70.480.699.000	
55	**Jumlah Aset Lainnya**	**164.179.831.764**	**198.745.754.630**	**232.026.812.514**	**439.806.686.298**	**245.957.218.442**	**20,82%**
56	**JUMLAH ASET**	**2.696.550.273.873**	**2.666.240.085.690**	**3.042.325.332.662**	**3.320.127.789.422**	**3.628.818.979.002**	**7,85%**
57	**KEWAJIBAN**						
58	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				93.705.366.129	0	
59	Pendapatan Diterima dimuka	53.642.484	42.765.805	25.290.266	24.257.975	33.526.488	-6,75%
60	Utang Belanja	1.113.884.449	6.370.848.416	3.132.097.744	7.374.060.718	3.637.464.186	
61	Utang Pegawai						
62	Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal						
63	Utang Jangka Pendek kpd Pihak Ketiga						
64	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Ketiga						
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	36.360.675.834	46.734.757.801	39.020.217.010	7.937.286.735	8.150.000	
66	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**37.528.202.767**	**53.148.372.022**	**42.177.605.020**	**109.040.971.557**	**3.679.140.674**	**20,72%**
67	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
68	Utang Jangka Panjang Lainnya						
69	Utang Kepada Masyarakat						
	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	26.154.908.496	150.239.453.802			

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
70	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**	-	**26.154.908.496**	**150.239.453.802**	-	0	
71	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**37.528.202.767**	**79.303.280.518**	**192.417.058.822**	**109.040.971.557**	**3.679.140.674**	**46,07%**
72	**EKUITAS DANA**						
73	EKUITAS	2.659.022.071.106	2.586.936.805.172	2.849.908.273.841	3.211.086.817.865	3.625.139.838.328	8,26%
74	**JUMLAH EKUITAS DANA**	**2.659.022.071.106**	**2.586.936.805.172**	**2.849.908.273.841**	**3.211.086.817.865**	**3.625.139.838.328**	**8,26%**
75	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**2.696.550.273.873**	**2.666.240.085.690**	**3.042.325.332.662**	**3.320.127.789.422**	**3.628.818.979.002**	**7,85%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

2.2.1.3. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan daerah adalah metode untuk membandingkan nilai atau besaran yang terdapat dalam laporan keuangan daerah. Tujuannya untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam periode tertentu.

Tabel 2.85.
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2020–2024
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (*current ratio*)	6,434	2,281	2,115	3,071	0,005
2	Rasio Cepat (*quick ratio*)	6,434	3,403	9,647	3,071	0,005
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Asset	0,014	0,030	0,063	0,033	0,001
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,014	0,031	0,068	0,034	0,001

Sumber: Neraca Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024, diolah

Hasil perhitungan keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kondisi sehat. Hal ini dapat dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah telah menyusun anggaran kas, analisis likuiditas diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki aset yang cukup likuid untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ini mencakup aset lancar yang jumlahnya lebih besar dari kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*).

1. Rasio Lancar (*Current Rasio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aktiva lancar dengan utang lancar yang tercatat dalam neraca. Semakin besar perbandingan aktiva lancar terhadap utang lancar, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi keuangan daerah dapat dianggap sehat jika rasio lancar berada di atas 1, yang berarti jumlah aktiva lancar lebih besar dari jumlah utang lancar.

Berdasarkan Tabel 2.110 dapat diketahui bahwa rasio lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2024 memiliki nilai rasio yang lebih besar dari ukuran yang di tetapkan. Hal ini mengartikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki asset yang cukup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Kondisi keuangan pemerintah daerah akan dikatakan sehat apabila memiliki nilai *quick ratio* lebih dari sama dengan 1 (satu). Nilai *quick ratio* lebih dari satu ini menunjukkan bahwa adanya kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya menggunakan asset lancar tanpa memperhitungkan stock. Sebaliknya, jika angka quick rasio kurang dari 1 (satu), maka keuangan Perusahaan dinilai tidak sehat.

Berdasarkan Tabel 2.110, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kondisi keuangan yang sehat karena memiliki besaran nilai *quick ratio* > 1 (lebih dari satu). Hal tersebut menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya menggunakan asset lancar tanpa memperhitungkan *stock*.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang berfungsi untuk menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang dengan jaminan aktiva. Jika semakin kecil rasionya maka semakin aman (*solvable*), sementara itu, apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil.

Terlihat dalam Tabel 2.110 kemampuan keuangan berdasarkan rasio solvabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2020 hingga 2024 memiliki nilai utang daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan

aktivanya. Hal ini mengindikasikan bahwa utang pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditutupi oleh aktiva (*solvable*). Artinya, pengaruh utang terhadap aktiva di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sangat kecil.

1. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio Total Utang terhadap Total Aset digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva pemerintah daerah dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Apabila dilihat dari Tabel 2.110, rasio total utang terhadap total asset pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki pengaruh utang sangat kecil terhadap aktivanya.

2. Rasio Utang terhadap Modal

Rasio utang terhadap modal mengukur besaran penggunaan utang oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan penggunaan ekuitas (modal). Rasio yang lebih tinggi bisa lebih berisiko bagi pemerintah daerah, sedangkan rasio yang lebih rendah bisa lebih sedikit risikonya karena semakin mandiri dan tidak kebergantungan pembiayaan dari pihak lain. berdasarkan Tabel 2.110, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 jumlah rasio utang terhadap modal memiliki nilai kurang dari 1, hal ini menunjukkan bahwa nilai total utang pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih jauh di bawah nilai modalnya sehingga pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin mandiri serta tidak kebergantungan pada utang.

2.2.1.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah umumnya mencakup kebijakan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk memahami realisasi dari kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam periode tahun anggaran sebelumnya.

2.2.1.4.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis Proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari realisasi kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan di masa depan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta menetapkan kebijakan belanja untuk masa mendatang.

1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran dari tahun 2020 hingga tahun 2024 memberikan informasi tentang angka realisasi belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.86.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2020-2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)	2023		(%)	2024		(%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
2	**BELANJA**	**1.467.201**	**1.246.905**	**85%**	**1.589.010**	**1.188.411**	**75%**	**1.456.540**	**1.221.626**	**84%**	**1.605.663**	**1.396.634**	**87%**	**1.743.734**	**1.505.683**	**86%**	**83,4%**
02.01	**BELANJA OPERASI**	**851.663**	**714.435**	**84%**	**903.333**	**741.629**	**82%**	**896.575**	**754.420**	**84%**	**1.022.976**	**867.702**	**85%**	**1.142.990**	**960.654**	**84%**	**83,8%**
02.01.01	Belanja Pegawai	477.932	401.565	84%	475.237	429.170	90%	483.429	405.606	84%	538.291	466.554	87%	602.615	521.994	87%	86,3%
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	352.218	295.437	84%	377.117	284.097	75%	367.160	317.727	87%	417.859	351.824	84%	473.744	380.090	80%	82,0%
05.01.03	Belanja Bunga				3.600	1.890	52%	10.000	3.218	32%	8.788	8.788	100%	3.760	3.760	100%	56,9%
02.01.03	Belanja Hibah	14.812	12.503	84%	36.987	18.065	49%	19.421	11.730	60%	46.534	43.334	93%	55.117	47.760	87%	74,7%
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	6.702	4.930	74%	10.391	8.407	81%	16.565	16.139	97%	11.504	11.126	97%	7.753	7.051	91%	87,9%
02.01.06	Belanja Bagi Hasil	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
02.02	**BELANJA MODAL**	**285.081**	**266.287**	**93%**	**421.158**	**194.904**	**46%**	**328.624**	**242.461**	**74%**	**321.779**	**273.954**	**85%**	**335.330**	**286.895**	**86%**	**76,8%**
02.02.01	Belanja Modal Tanah	0			450			0	0		630	90	14%	800	0	0%	2,8%
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.732	65.365	91%	85.890	37.804	44%	65.030	26.161	40%	84.120	73.575	87%	81.395	73.978	91%	70,7%
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.946	29.487	82%	223.465	66.202	30%	189.609	153.578	81%	93.426	83.275	89%	93.571	69.238	74%	71,2%
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.138	171.172	97%	111.123	90.673	82%	73.020	62.480	86%	140.923	114.346	81%	157.894	142.022	90%	87,0%
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	171	170	100%	229	225	98%	965	242	25%	2.660	2.650	100%	1.411	1.402	99%	84,4%
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	94	93	100%	0	0		0	0		20	18	92%	259	254	98%	58,0%
		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**84.012**	**19.738**	**23%**	**15.621**	**3.146**	**20%**	**7.437**	**1.039**	**14%**	**30.000**	**535**	**2%**	**7.653**	**374**	**5%**	**12,9%**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	84.012	19.738	23%	15.621	3.146	20%	7.437	1.039	14%	30.000	535	2%	7.653	374	5%	12,9%
		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
02.04	**TRANSFER**	**246.445**	**246.445**	**100%**	**248.899**	**248.732**	**100%**	**223.904**	**223.705**	**100%**	**230.907**	**236.624**	**102%**	**257.761**	**257.761**	**100%**	**100,5%**
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.121	2.121	100%	0	0		0	0		0	2.125		2.125	2.125	100%	40,0%

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)	2023		(%)	2024		(%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
05.04.01	Transfer Bantuan Keuangan ke desa	243.426	243.426	100%	2.136	2.136	100%	2.060	2.060	100%	2.125	2.125	100%	252.108	252.108	100%	100,0%
05.04.02	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	898	898	100%	246.763	246.596	100%	221.844	221.645	100%	228.782	234.499	102%	3.528	3.528	100%	100,5%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

2.2.1.4.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan efisien anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Adapun gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.87.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	346.208.077.228	429.170.211.169	405.606.133.897	258.294.193.150	292.272.548.131
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	44.529.697.826	30.186.665.600	31.567.607.520	118.239.251.066	132.022.354.917
3	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0	
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	409.950.755	0	0	0	
5	Insentif Pemungutan Retribusi	239.660.156	0	0	0	
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	4.178.365.200	0	12.000.000	0	
7	Belanja Pegawai BLUD	5.999.245.000	25.800.761.158	8.386.576.500	7.286.257.500	5.847.680.828
8	Belanja Honorarium PNS	16.359.085.500	0	0	0	
9	Honorarium Non PNS	3.000.051.000	0	0	0	
10	Belanja Uang Lembur		0	0	0	
11	Uang Jahit Pakaian		0	0	0	
12	Belanja Premi Asuransi	516.090.472	0	0	0	
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	890.614.903	0	0	0	
14	Belanja Pakaian Kerja	776.414.500	0	0	0	
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	950.677.181	0	0	0	
16	Belanja Perjalanan Dinas	39.907.187.474	18.271.319.374	39.184.315.935	51.039.621.677	64.451.964.415
17	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	424.154.000	107.600.000	107.600.000	53.800.000	54.000.000
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.952.913.800	2.254.342.500	64.536.735.557	5.453.673.557	6.523.028.706
TOTAL		**520.724.378.068**	**466.342.184.995**	**505.790.899.801**	**440.366.796.950**	**501.171.576.997**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024, nilai besaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan nilai yang berfluktuasi namun relatif meningkat. Untuk lebih jelas terkait rata-rata pertumbuhan proporsi belanjanya, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.88.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1	2020	520.724.378.068	976.180.776.532	53,3%
2	2021	466.342.184.995	939.679.198.966	49,6%
3	2022	505.790.899.801	1.009.670.858.905	50,1%
4	2023	440.366.796.950	1.267.818.771.004	34,7%
5	2024	501.171.576.997	1.362.127.279.847	36,8%

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas, persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total Pengeluaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berfluktuasi namun cenderung semakin menurun. Adapun proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur terendah berada di tahun 2023 dengan persentase sebesar 34,7 persen dan proporsi tertinggi berada di tahun 2020 dengan persentase sebesar 53,3 persen. Hal ini menunjukkan bawah besaran belanja daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki proporsi yang semakin lebih besar dari tahun ke tahun apabila dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparaturnya.

2.2.1.4.3. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah ini menggunakan beberapa pendekatan, seperti analisis sumber penutup defisit anggaran yang sebenarnya, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), analisis data lebih pembiayaan dari anggaran tahun tersebut, dan analisis proyeksi pembiayaan daerah.

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill

Analisis sumber penutup defisit rill dilakukan untuk memberikan Gambaran mengenai kebijakan anggaran masa lalu dalam menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Adapun rincian defisit rill anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020–2024 sebagai berikut:

Tabel 2.89.
Defisit Rill Anggaran Tahun 2020–2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.209.504.014.011	1.062.442.492.586	1.367.155.152.842	1.407.165.120.155	1.802.002.670.782
2	Belanja Daerah	1.220.504.971.063	1.188.411.447.466	1.221.626.142.905	1.396.634.174.944	1.505.683.272.792
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	11.750.000.000	107.808.898.345	114.205.421.655
A.	**Defisit Riil**	**-11.000.957.052**	**-125.968.954.880**	**133.779.009.937**	**-97.277.953.133**	**182.113.976.335**
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	197.335.029.559	182.095.131.561	89.334.317.815	320.442.330.243	255.694.804.806
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	26.154.908.496	124.084.545.306	32.524.866.198	-
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	100.000	5.821.860	13.207.647	5.561.498	-
B.	**Total Realisasi Penerimaan**	**197.335.129.559**	**208.255.861.917**	**213.432.070.768**	**352.972.757.939**	**255.694.804.806**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**186.334.172.508**	**82.286.907.037**	**347.211.080.705**	**255.694.804.806**	**437.808.781.141**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020–2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 defisit anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berfluktuasi cenderung meningkat. Tahun 2020 defisit sebesar minus Rp11.000.957.052 dan tahun 2023 defisit sebesar Rp97.277.953.133, Adapun terjadi surplus di tahun 2022 dengan nilai surplus anggaran sebesar Rp133.779.009.937 dan terjadi surplus kembali di tahun 2024 dengan nilai surplus anggaran sebesar Rp182.113.976.335.

Penutup defisit rill anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk mengestimasi kapasitas keuangan total daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik yang wajib, serta prioritas utama dan program-program Pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun ke depan. Analisis ini juga mencakup alokasi untuk belanja daerah dan Pengeluaran lainnya. Kapasitas keuangan daerah merujuk pada total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangi kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Rincian Proyeksi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.90.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2026–2030 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	URAIAN		PROYEKSI					Rata -Rata Pertumbuhan
		APBD TA 2025 (PENYESUAIAN)	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.356.074.151.653**	**1.348.498.440.426**	**1.361.401.871.032**	**1.381.031.347.584**	**1.400.521.448.112**	**1.419.878.610.345**	**1,30%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**184.427.191.653**	**151.851.480.426**	**156.277.362.172**	**160.861.204.161**	**165.609.637.727**	**170.529.600.438**	**2,94%**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	42.391.152.822	46.295.071.277	48.609.824.841	51.040.316.083	53.592.331.887	56.271.948.481	**5,00%**
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	7.513.211.682	14.545.400.000	14.836.308.000	15.133.034.160	15.435.694.843	15.744.408.740	**2,00%**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000	12.240.000.000	12.484.800.000	12.734.496.000	12.989.185.920	13.248.969.638	**2,00%**
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.522.827.149	78.771.009.149	80.346.429.332	81.953.357.918	83.592.425.077	85.264.273.578	**2,00%**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.171.646.960.000**	**1.171.646.960.000**	**1.180.124.508.860**	**1.195.170.143.423**	**1.209.911.810.385**	**1.224.349.009.907**	**1,11%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.060.411.960.000	1.060.411.960.000	1.068.889.508.860	1.083.935.143.423	1.098.676.810.385	1.113.114.009.907	1,22%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	111.235.000.000	111.235.000.000	111.235.000.000	111.235.000.000	111.235.000.000	111.235.000.000	0,00%
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**-**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	

Sumber: APBD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hasil Proyeksi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 menjadi acuan dalam melakukan proyeksi pendapatan tahun 2026-2030. Pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 hingga 2030 ditargetkan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,30 persen, dengan rincian komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,94 persen, komponen Pendapatan Transfer sebesar 1,11 persen serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua Pengeluaran dari rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengurangi ekuitas dana lancar, Dimana merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Adapun proyeksi belanja pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.91.
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	URAIAN		PROYEKSI					Rata -Rata Pertumbuhan
		APBD TA 2025 (PENYESUAIAN)	2026	2027	2028	2029	2030	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.594.914.929.587**	**1.720.067.459.891**	**1.723.681.665.011**	**1.734.254.146.713**	**1.744.913.677.263**	**1.755.661.033.768**	**0,51%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.055.716.208.046**	**1.170.952.234.251**	**1.173.132.775.898**	**1.182.264.425.810**	**1.191.475.920.409**	**1.200.768.000.785**	**0,63%**
5.1.01	Belanja Pegawai	589.903.877.658	681.909.676.646	683.728.773.413	690.566.061.147	697.471.721.758	704.446.438.976	0,82%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.551.365.866	458.510.990.600	458.872.435.480	461.166.797.658	463.472.631.646	465.789.994.804	0,39%
5.1.05	Belanja Hibah	26.049.664.522	15.576.467.005	15.576.467.005	15.576.467.005	15.576.467.005	15.576.467.005	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.211.300.000	14.955.100.000	14.955.100.000	14.955.100.000	14.955.100.000	14.955.100.000	0,00%
5.2	**BELANJA MODAL**	**276.816.190.541**	**286.732.694.640**	**288.166.358.113**	**289.607.189.904**	**291.055.225.853**	**292.510.501.983**	**0,50%**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0,00%**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**0,00%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.273.000.000	5.273.000.000	5.273.000.000	5.273.000.000	5.273.000.000	5.273.000.000	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	247.109.531.000	247.109.531.000	247.109.531.000	247.109.531.000	247.109.531.000	247.109.531.000	0,00%

Sumber: APBD Tahun 2025, Hasil Proyeksi

Dalam tabel diatas, dapat kita lihat bahwa proyeksi belanja pada tahun 2026 hingga tahun 2030 mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan memiliki persentase sebesar 0,51 persen. Adapun rincian komponen belanja operasi memiliki rata-rata pertumbuhan positif dengan presentase sebesar 0,63 persen, lalu belanja modal sebesar 0,50 persen, dan belanja transfer 0 persen. Sedangkan untuk belanja tak terduga tidak diproyeksikan.

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau Pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah/obligasi daerah yang berada di bagian penerimaan pembiayaan. Pos Pengeluaran daerah juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemerintah daerah yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang. proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.92.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	URAIAN		PROYEKSI					Rata -Rata Pertumbuhan
		APBD TA 2025 (PENYESUAIAN)	2026	2027	2028	2029	2030	
6	**PEMBIAYAAN**							
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**238.840.777.934**	**371.569.019.465**	**362.279.793.979**	**353.222.799.129**	**344.392.229.151**	**335.782.423.422**	**-2,50%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.840.777.934	371.569.019.465	362.279.793.979	353.222.799.129	344.392.229.151	335.782.423.422	**-2,50%**
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-					-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**238.840.777.934**	**371.569.019.465**	**362.279.793.979**	**353.222.799.129**	**344.392.229.151**	**335.782.423.422**	**-2,50%**

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

Berdasarkan hasil analisis dari realisasi penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan daerah dalam periode tahun 2020 hingga 2024, maka dapat dihasilkan proyeksi tahun rencana pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2026 hingga 2030 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar minus 2,5 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan negatif ditunjukkan oleh komponen Penerimaan Pembiayaan yaitu sebesar minus 2,5 persen, sedangkan untuk Pengeluaran penerimaan tidak diproyeksikan.

2.2.2.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, konsep kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tidak lagi relevan karena perubahan dalam belanja daerah. Oleh karena itu, proyeksi belanja untuk tahun 2026 hingga 2030 disusun sesuai dengan konsep dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019. Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2026 hingga 2030 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.93.
Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024-2029 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	APBD TA 2025 (PENYESUAIAN)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.356.074.151.653**	**1.348.498.440.426**	**1.361.401.871.032**	**1.381.031.347.584**	**1.400.521.448.112**	**1.419.878.610.345**	**1,30%**
a	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**184.427.191.653**	**151.851.480.426**	**156.277.362.172**	**160.861.204.161**	**165.609.637.727**	**170.529.600.438**	**2,94%**
1	Pajak Daerah	42.391.152.822	46.295.071.277	48.609.824.841	51.040.316.083	53.592.331.887	56.271.948.481	5,00%
2	Retribusi Daerah	7.513.211.682	14.545.400.000	14.836.308.000	15.133.034.160	15.435.694.843	15.744.408.740	2,00%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000	12.240.000.000	12.484.800.000	12.734.496.000	12.989.185.920	13.248.969.638	2,00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	122.522.827.149	78.771.009.149	80.346.429.332	81.953.357.918	83.592.425.077	85.264.273.578	2,00%
b	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.171.646.960.000**	**1.171.646.960.000**	**1.180.124.508.860**	**1.195.170.143.423**	**1.209.911.810.385**	**1.224.349.009.907**	**1,11%**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.060.411.960.000	1.060.411.960.000	1.068.889.508.860	1.083.935.143.423	1.098.676.810.385	1.113.114.009.907	1,22%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.235.000.000	111.235.000.000	111.235.000.000	111.235.000.000	111.235.000.000	111.235.000.000	0,00%
c	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	
C1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**238.840.777.934**	**371.569.019.465**	**362.279.793.979**	**353.222.799.129**	**344.392.229.151**	**335.782.423.422**	**-2,50%**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.840.777.934	371.569.019.465	362.279.793.979	353.222.799.129	344.392.229.151	335.782.423.422	-2,50%
	TOTAL PENERIMAAN	**1.594.914.929.587**	**1.720.067.459.891**	**1.723.681.665.011**	**1.734.254.146.713**	**1.744.913.677.263**	**1.755.661.033.768**	**0,51%**
B	**BELANJA DAERAH**	**1.594.914.929.587**	**1.720.067.459.891**	**1.723.681.665.011**	**1.734.254.146.713**	**1.744.913.677.263**	**1.755.661.033.768**	**0,51%**
a	**BELANJA OPERASI**	**1.055.716.208.046**	**1.170.952.234.251**	**1.173.132.775.898**	**1.182.264.425.810**	**1.191.475.920.409**	**1.200.768.000.785**	**0,63%**
1	Belanja Pegawai	589.903.877.658	681.909.676.646	683.728.773.413	690.566.061.147	697.471.721.758	704.446.438.976	0,82%
2	Belanja Barang dan Jasa	431.551.365.866	458.510.990.600	458.872.435.480	461.166.797.658	463.472.631.646	465.789.994.804	0,39%

No	Uraian	APBD TA 2025 (PENYESUAIAN)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
3	Belanja Hibah	26.049.664.522	15.576.467.005	15.576.467.005	15.576.467.005	15.576.467.005	15.576.467.005	0,00%
4	Belanja Bantuan Sosial	8.211.300.000	14.955.100.000	14.955.100.000	14.955.100.000	14.955.100.000	14.955.100.000	0,00%
b	**BELANJA MODAL**	**276.816.190.541**	**286.732.694.640**	**288.166.358.113**	**289.607.189.904**	**291.055.225.853**	**292.510.501.983**	**0,50%**
c	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0,00%**
1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00%
d	**BELANJA TRANSFER**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**252.382.531.000**	**0,00%**
1	Belanja Bagi Hasil	5.273.000.000	5.273.000.000	5.273.000.000	5.273.000.000	5.273.000.000	5.273.000.000	0,00%
2	Belanja Bantuan Keuangan	247.109.531.000	247.109.531.000	247.109.531.000	247.109.531.000	247.109.531.000	247.109.531.000	0,00%
C2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENGELUARAN	**1.594.914.929.587**	**1.720.067.459.891**	**1.723.681.665.011**	**1.734.254.146.713**	**1.744.913.677.263**	**1.755.661.033.768**	**0,51%**

Sumber: Hasil proyeksi, 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutkan akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah.

Gambaran capaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah disajikan pada subbab 2.1 menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pembangunan beberapa tahun terakhir, maka dapat diindetifikasi permaalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyajian permasalahan pembangunan daerah pada bab ini dapat dibagi berdasarkan aspek, sebagai berikut:

2.3.1.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Subbab ini memuat permasalahan pada aspek geografi dan demografi yang diidentifikasi berdasarkan hasil pencapaian pembangunan pada aspek geografi dan demografi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Menurunnya Indeks Ketahanan Pangan
   Indeks Ketahanan Pangan mengalami peningkatan sejak 2019 sampai 2022, namun mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi hanya 74,23.
2. Cenderung menurunnya Indeks Kualitas Air
   Indeks Kualitas Air fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 50,67, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 65.
3. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan masih terjadinya bencana alam.

2.3.1.2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Subbab ini memuat permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Utara. Hasil identifikasi kinerja pembangunan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir terlihat mengalami perkembangan yang positif, dimana pada tahun 2020 hanya -0,66 persen akibat pandemi COVID-29 dan terus meningkat hingga menjadi 4,43 persen di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, namun pada periode tersebut capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan yakni 5,15 persen.

Disamping itu, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 hanya menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada posisi ke-8 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Adapun pertumbuhan ekonomi paling tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yaitu Kota Banjar Baru sebesar 6,81 persen, Kota Banjarmasin sebesar 5,62 persen dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 5,27 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi yang paling rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91 persen.

Struktur perekonomian HSU Pada Tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Jasa Keuangan dan Asuransi (9,97 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (8,74 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,05 persen), Jasa Perusahaan (6,68 persen) dan Jasa Lainnya (6,19 persen).

Adapun untuk peranan terbesar dalam pembentukan PDRB HSU pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,33 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 16,07 persen, disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,43 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,75 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,22 persen.

Belum optimalnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara disebabkan karena terjadinya kelesuan ekonomi akibat menurunnya harga-harga komoditas utama yang diproduksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan melakukan diversifikasi pada sektor industri pengolahan dan sektor tersier.

2. Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 yang relatif rendah

Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 yang relatif rendah, dimana pada tahun 2023 hanya sebesar 3,32 atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020 yang mencapai 5,78, kondisi ini mencerminkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dan sektor sekunder dan tersier yang dapat menyerap tenaga kerja relatif tinggi.

3. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan posisi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,271. Selama periode tersebut juga rata-rata nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu berada dibawah nilai Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Namun demikian, Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 hanya menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada posisi ke-4 Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Selatan dengan tingkat ketimpangan terendah. Adapun nilai Indeks Gini yang paling rendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 0,225, Kabupaten Tanah Laut sebesar 0,259 dan Kabupaten Balangan sebesar 0,258.

4. Masih tingginya kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,14 persen dan mengalami kenaikan serta penurunan di tahun berikutnya hingga menjadi 5,75 persen pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan tertinggi pada periode dimaksud yaitu pada tahun 2021 yang mencapai 6,83 persen dan terendah yaitu pada tahun 2024 yang hanya sebesar 5,75 persen. Meskipun Tingkat kemiskinan mengalami penurunan di tahun terakhir (2024), namun selama periode tahun 2020 hingga tahun

2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, indikator yang juga dapat memberikan gambaran kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi standar hidup layak yakni pengeluaran per kapita disesuaikan. Meskipun angka pengeluaran per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai 2024, yang semula 9.527.000 pada tahun 2020 menjadi 10.981.000 di tahun 2024. Namun demikian angka pengeluaran per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 merupakan yang terendah apabila dibandingkan dengan 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun angka pengeluaran per kapita tertinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Banjarmasin yang mencapai 15.714.000 dan Kota Banjar Baru yang mencapai 14.927.000.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menekan angka kemiskinan yaitu mensinergikan berbagai program dan kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan disemua SKPD agar efektif dan efesien, melakukan berbagai upaya Perlindungan Sosial, diantaranya pemberian stimulan bantuan sosial menyasar kepada keluarga miskin, Meningkatkan pendapatan warga miskin, melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), melakukan kolaborasi dengan bantuan Pemerintah Pusat berupa pemberian BLT APBD Perubahan menyasar KPM yang terdampak kenaikan BBM dan sebagai antisipasi dampak inflasi dengan menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tidak mendapatkan Bansos PKH, BPNT dan BLT Dana Desa.

5. Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Meski kualitas sumber daya manusia di Hulu Sungai Utara yang ditunjukkan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif meningkat dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari 69,09 di tahun 2020 meningkat menjadi 71,74 pada tahun 2024. Namun capaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode dimaksud masih lebih rendah di bandingkan dengan capaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan capaian IPM Nasional. Dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka produktivitas angkatan kerja juga belum begitu maksimal dan sehingga peluang untuk

melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan masih terbatas.

Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki angka IPM paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya. Pada Tahun 2024 Angka IPM tertinggi yaitu Kota Banjarbaru dengan nilai 81,65, disusul Kota Banjarmasin dengan nilai 80,53 dan Kabupaten Tabalong dengan nilai 75,97. Adapun IPM terendah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala sebesar 71,40, Kabupaten HSU sebesar 71,74 dan Kabupaten Kotabaru dengan nilai 72,42.

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten HSU telah berkomitmen dan melaksanakan program-program yang berhubungan dengan dimensi pembentuk IPM. Meskipun beberapa indikator dimensi IPM telah menampakkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi masih belum bisa merubah peringkat Kabupaten HSU sebagai pemilik IPM terendah di Kalimantan Selatan. Faktor utama rendahnya IPM Kabupaten HSU ada di sektor ekonomi, yaitu pengeluaran per kapita yang rendah. Adapun program dan daya dukung SKPD terkait sudah cukup baik dalam usaha meningkatkan angka IPM, hanya saja perlu difokuskan kepada peningkatan HLS dan RLS di sektor pendidikan, penurunan kasus gizi buruk dan pernikahan usia dini di sektor kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita di sektor ekonomi.

B. Kesehatan untuk Semua

1. Masih rendahnya Angka Usia Harapan Hidup (AHH)

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) sejak tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan dengan posisi terakhir pada tahun 2024 yaitu mencapai 72,49 tahun. Meski terjadi peningkatan, namun capaian Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode dimaksud masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, Angka Usia Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 merupakan yang terendah apabila dibandingkan dengan 12 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun Angka Usia Harapan Hidup (AHH) tertinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Banjar Baru yang mencapai 75,11 tahun dan Kota Banjarmasin yang mencapai 75,07 tahun.

2. Cenderung meningkatnya Prevalensi Balita Stunting

Prevalensi Balita Stunting fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi 10,30. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, namun capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 9,41.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah sejak tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan dengan posisi terakhir pada tahun 2024 yaitu mencapai 7,78 tahun. Meski terjadi peningkatan, namun capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode dimaksud masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 merupakan yang terendah ke-2 setelah Kabupaten Kotabaru apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun Angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Banjar Baru yang mencapai 11,00 tahun dan terendah yaitu Kabupaten Kotabaru yang hanya 7,56 tahun.

2. Angka Harapan Lama Sekolah masih perlu ditingkatkan

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan dan pada periode tersebut capaiannya lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 yang mencapai 13,21 tahun, masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Banjar Baru yang mencapai 14,86 tahun dan Kota Banjarmasin yang mencapai 14,01 tahun.

D. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Cenderung meningkatnya Indeks Ketimpangan Gerder (IKG)

Indeks Ketimpangan Gerder (IKG) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 sampai 2022 terus menurun, namun pada tahun 2023 Indeks Ketimpangan Gerder (IKG) di Kabupaten Hulu Sungai Utara

mengalami peningkatan menjadi 0,458. Disamping itu, Indeks Ketimpangan Gerder (IKG) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gerder (IKG) Nasional pada tahun yang sama yang hanya sebesar 0,447.

2.3.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini memuat permasalahan hasil identifikasi pencapaian pembangunan pada aspek daya saing daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun rumusan permasalahan terkait daya saing daerah, antara lain:

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Menurunnya Tingkat Kegemaran Membaca

Tingkat Kegemaran Membaca pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih jauh dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 60,85 persen.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Menurunnya Distribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan

Distribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2019 sampai 2023 terus mengalami penurunan, dengan kondisi terakhir pada tahun 2023 yaitu hanya sebesar 8,32 persen. Selain itu, Laju PDRB Industri Pengolahan juga turut mengalami penurunan dengan posisi terakhir pada tahun 2023 hanya 0,72 persen atau turun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 3,02 persen.

Adapun penyebab menurunnya PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, Disrupsi rantai pasokan, keterbatasan teknologi dan kualitas sumber daya manusia.

2. Cenderung menurunnya Laju Pertumbuhan PDRB sektor Akomodasi Makan dan Minum

Laju Pertumbuhan PDRB sektor Akomodasi Makan dan Minum fluktuasi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi hanya 7,05. Capaian tertinggi pada

periode dimaksud yaitu pada tahun 2019 yang mencapai 9,34 dan terendah pada tahun 2020 yang terkontraksi hingga -0,16.

3. Menurunnya Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sampai 2024 dan mengalami penurunan pada tahun terakhir (2024) menjadi hanya 73,89.

C. Transformasi Digital

1. Rendahnya Indeks Pembangunan TIK

Meskipun nilai Indeks Pembangunan TIK ada peningkatan sejak tahun 2019 sampai 2023, namun secara rating mengalami penurunan dari posisi 8 menjadi posisi 2 terendah se Provinsi Kalimantan Selatan.

2.3.1.4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini memuat permasalahan hasil identifikasi pencapaian pembangunan pada Aspek Pelayanan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun rumusan permasalahan terkait Aspek Pelayanan Umum, antara lain:

1. Cenderung menurunnya Nilai SAKIP

Nilai SAKIP fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 64,40, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 65,32.

2. Menurunnya nilai LPPD

Nilai LPPD sejak tahun 2019 sampai 2022 tetap dengan nilai 3,1220 dengan kategori sangat tinggi, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai LPPD menjadi hanya 3,0138 dengan kategori sedang.

3. Cenderung menurunnya Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang mencapai 54,04.

4. Rendahnya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2022 hanya mencapai 2,87. Capaian dimaksud masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 3,14 dan nasional yang mencapai 3,26.

5. Permasalahan Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan daerah yang dimuat pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten dan tercermin dalam bentuk tata kelola pemerintahan. Permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahanan daerah dan tata kelola pemerintahan dirumuskan berdasarkan capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut akan menjadi input bagi pengambilan kebijakan untuk pembangunan jangka menengah. Rumusan masalah juga sebagian merupakan gambaran belum optimalnya pelayanan yang diberikan ke masyarakat, walaupun kecenderungannya membaik dari tahun ke tahun.

Secara rinci mengenai permasalahan di masing-masing sektor, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.94.
Permasalahan Pembangunan
Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
1.	Pendidikan	a. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat sejak 2019 sampai 2023 terus mengalami penurunan, dari 108,64 di tahun 2019 menurun menjadi hanya 92,22 di tahun 2023. b. Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 98,57, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 99,51. c. Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 55,91 d. Cenderung menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 98,63. Atau lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 99,51 di tahun 2019

No	Urusan	Permasalahan
		e. Menurunnya Rasio Guru terhadap Murid untuk tingkat sekolah dasar Rasio Guru terhadap Murid untuk tingkat sekolah dasar sejak 2019 sampai 2022 terus mengalami penurunam, dari 8,38 di tahun 2019 menurun menjadi hanya 8,17 pada tahun 2022. f. Cenderung menurunnya Rasio Guru terhadap Murid untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas Rasio Guru terhadap Murid untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas fluktuatif sejak 2019 sampai 2022 dan cenderung turun di 2022 menjadi hanya 10,33 g. Menurunnya Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah dasar Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah dasar fluktuatif sejak 2019 sampai 2022 dan cenderung turun di 2022 menjadi hanya 87,6. h. Menurunnya Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah pertama Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah pertama fluktuatif sejak 2019 sampai 2022 dan cenderung turun di 2022 menjadi hanya 149,55 i. Menurunnya Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah atas Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah atas fluktuatif sejak 2019 sampai 2022 dan cenderung turun di 2022 menjadi hanya 261,53
2.	Kesehatan	a. Cenderung Meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 19,7. Namun demikian, capaian pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 13,0 b. Menurunnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 166,54, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 185,10 c. Menurunnya Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Imunization* (UCI) Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Imunization* (UCI) fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 69,90, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 91,80 d. Cenderung meningkatnya Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) Cenderung meningkatnya Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 10,30. Namun demikian, capaian pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya 9,41. e. Perlunya peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan dan kualitas layanan Kesehatan.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Cenderung menurunnya jalan dalam kondisi baik Jalan dalam kondisi baik fluktuatif sejak 2019 sampai 2024 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 189,82 km, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 210,286 km b. Meningkatnya jalan dalam kondisi rusak berat

No	Urusan	Permasalahan
		Jalan dalam kondisi rusak berat fluktuatif sejak 2019 sampai 2024 dan meningkat di 2024 menjadi 153,57 km. c. Menurunnya persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2019 sampai 2024 dan menurun di tahun 2024 menjadi hanya 50,00 persen.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi 4.413 rumah, namun capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya mencapai 1.967 rumah b. Cenderung menurunnya Penduduk yang Mengakses Air Bersih Penduduk yang Mengakses Air Bersih fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 91,94 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 92,47
5.	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	a. Menurunnya Jumlah Polisi Pamong Praja Jumlah Polisi Pamong Praja fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 40 orang, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 42 orang b. Menurunnya Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 1,69, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 1,79. c. Menurunnya Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat sejak 2019 sampai 2022 tetap, namun menurun di 2023 menjadi hanya 1.229 orang. d. Menurunnya Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk sejak 2019 sampai 2022 tetap, namun menurun di 2023 menjadi hanya 1,2
6.	Sosial	a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami peningkatan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejak 2018 sampai 2023 terus mengalami peningkatan dari yang semula 17.762 di tahun 2018 meningkat menjadi 82.691 pada tahun 2023
7.	Tenaga Kerja	a. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 21,7 pada tahun 2019.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	a. Meningkatnya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan untuk jenis Fisik, Psikis, Seksual, dan Penelantaran. b. Meningkatnya Tindak Kekerasan Terhadap Anak untuk jenis Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran dan lain-lain.
9.	Pangan	a. Menurunnya Ketersediaan Energi Perkapita Ketersediaan Energi Perkapita fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 2.950 kkal/kap/hari, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 4.280 kkal/kap/hari. b. Menurunnya Ketersediaan Protein Perkapita

No	Urusan	Permasalahan
		Ketersediaan Protein Perkapita fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 95,79 gram/kap/hari, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 119,77 gram/kap/hari. c. Cenderung menurunnya Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan meningkat sejak 2019 sampai 2022, namun menurun di 2023 menjadi hanya 5,63
10.	Lingkungan Hidup	a. Menurunnya Volume Sampah Yang Dapat Diangkut yang semula 72,28 pada tahun 2021 menjadi 48,02 di tahun 2023. b. Belum maksimalnya penanganan sampah.
11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Menurunnya Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 97,39, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 99,82.
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Tidak adanya penambahan Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik yaitu hanya 210 di tahun 2019 hingga tahun 2023. b. Tidak adanya penambahan rata-rata jumlah binaan PKK yaitu hanya 10 di tahun 2019 hingga tahun 2023. c. Menurunnya Jumlah LPM Aktif Jumlah LPM Aktif meningkat sejak 2019 sampai 2022, namun menurun di 2023 menjadi hanya 30 LPM
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Menurunnya Rata-rata akseptor KB Rata-rata akseptor KB fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 77,59, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 81,57.
14.	Perhubungan	a. Menurunnya Tingkat pemanfaatan terminal Tingkat pemanfaatan terminal fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 89,31 b. Menurunnya Tingkat pemanfaatan dermaga Tingkat pemanfaatan dermaga fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 96,3
15.	Komunikasi dan Informatika	Belum meratanya akses internet yang menyebabkan masih terdapat beberapa daerah yang *blank spot*.
16.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	a. Menurunnya Persentase Koperasi Yang Aktif Persentase Koperasi Yang Aktif pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2019 yang mencapai 70,63 persen b. Menurunnya Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 34.379 orang c. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah.
17.	Penanaman Modal	a. Rekap Perijinan SIUP mengalami penurunan. Rekap Perijinan SIUP fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 0 b. Rekap Perijinan TDP mengalami penurunan. Rekap Perijinan TDP fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 0 c. Menurunnya Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN)

No	Urusan	Permasalahan
		Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) fluktuatif sejak 2020 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 12,519
18.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Belum optimalnya Cakupan pembinaan olahraga Cakupan pembinaan olahraga fluktuatif sejak 2019 sampai 2023, dengan capaian pada tahun 2023 yaitu hanya 64. b. Menurunnya Jumlah prestasi olahraga Jumlah prestasi olahraga fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 256
19.	Statistik	Belum optimalnya pengelolaan data sektoral pemerintah daerah, khususnya yang mendukung perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
20.	Persandian	Belum optimalnya Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi yaitu baru mencapai 90% di tahun 2023
21.	Kearsipan	a. Menurunnya Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip meningkat sejak 2019 sampai 2022. namun menurun di tahun 2023 menjadi hanya 90,46 persen b. Menurunnya Hasil Pengawasan Kearsipan Hasil Pengawasan Kearsipan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 90,10
22.	Perpustakaan	a. Menurunnya Jumlah Perpustakaan Desa Jumlah Perpustakaan Desa meningkat sejak 2019 sampai 2022, namun menurun di tahun 2023 menjadi hanya 67 perpustakaan b. Cenderung menurunnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2019 yang mencapai 58.786 orang c. Menurunnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 13.285 orang.
23.	Kelautan dan Perikanan	a. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 12.438,85 ton pada tahun 2019 b. Tidak adanya penambahan Nelayan Perairan Umum yaitu hanya 18.545 orang dari tahun 2019 hingga tahun 2023 c. Tidak adanya penambahan Petani Ikan yaitu hanya 2.322 orang dari tahun 2019 hingga tahun 2023
24.	Pariwisata	a. Pengembangan pariwisata masih perlu ditngkatkan, walaupun jumlah kunjungan wisatawan mulai meningkat kembali setelah pandemi COVID-19.
25.	Pertanian	a. Menurunnya Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 69.473 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 143.403 ton. b. Menurunnya Produksi Sektor Tanaman Pangan Jagung Produksi Sektor Tanaman Pangan Jagung fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 457 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 1.901 ton.

No	Urusan	Permasalahan
		c. Menurunnya Produksi Sektor Tanaman Pangan Kacang Tanah Produksi Sektor Tanaman Pangan Kacang Tanah fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 43 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 655 ton. d. Menurunnya Produksi Tanaman Hortikultura untuk jenis Cabe Besar Produksi Tanaman Hortikultura untuk jenis Cabe Besar fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 216 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 219 ton e. Menurunnya Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Kelapa Sawit Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Kelapa Sawit fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 26.940 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 30.180 ton f. Menurunnya Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Purun Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Purun fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 101 ton. g. Populasi Ternak unggas mengalami cenderung mengalami penurunan Populasi Ternak unggas fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 3.592.592, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 5.057.160. h. Cenderung menurunnya Produksi Daging Ternak Besar Produksi Daging Ternak Besar fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 381.968 Kg, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 428.173 Kg. i. Cenderung menurunnya Produksi Daging Ternak Unggas Produksi Daging Ternak Unggas fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 2.559.560 Kg, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 2.961.570 Kg. j. Cenderung menurunnya Produksi Telur Unggas Produksi Telur Unggas fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 7.199.517 Kg, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 11.146.525 Kg. k. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya pertanian dan perikanan.
26.	Perdagangan	Kinerja sektor perdagangan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk pembinaan kepada usaha mikro dan upaya untuk memformalkan usaha informal.
27.	Perindustrian	a. Menurunnya Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 7.018 Unit
28.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	a. Cenderung menurunnya Indeks Penyediaan sarana dan Prasarana Indeks Penyediaan sarana dan Prasarana fluktuatif sejak 2020 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 80,5

No	Urusan	Permasalahan
		b. Menurunnya Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Peraturan Daerah Prakarsa DPRD sejak 2020 sampai 2024 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0 di tahun 2024 c. Menurunnya Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah fluktuatif sejak 2020 sampai 2024 dan menurun di tahun 2024 menjadi hanya 3 d. Pelayanan terhadap DPRD masih perlu ditingkatkan mengingat capaian tingkat kepuasan pelayanan yang masih belum optimal.
29.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan adanya berbagai dokumen rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan. Namun perencanaan pembangunan maish perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadi pedoman pembangunan yang dapat dilaksanana secara konsisten dan memberi hasil capaian yang memuaskan. b. Pengelolaan keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pelaksanaan yang baik, namun untuk penganggaran dan penatausahaan masih perlu ditata dan dioptimalkan lagi. c. Cenderung menurunnya Persentase SKPD yang Pelaporan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel Persentase SKPD yang Pelaporan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 86, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang mencapai 100. d. Cenderung menurunnya Persentase SKPD yang Pengelolaan Aset Daerahnya Tertib dan Akuntabel Persentase SKPD yang Pengelolaan Aset Daerahnya Tertib dan Akuntabel fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 80, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang mencapai 95. e. Menurunnya Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan hasil pemetaan jabatan Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan hasil pemetaan jabatan fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 68 persen. e. Cenderung menurunnya Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas yang terisi dan memenuhi syarat jabatan Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas yang terisi dan memenuhi syarat jabatan fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 84 persen, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 86 persen. f. Cenderung menurunnya Persentasi Aparatur yang disiplin Persentasi Aparatur yang disiplin fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 86 persen, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 93,75 persen. g. Belum optimalnya Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi, yaitu baru mencapai 12,03 persen di tahun 2023 h. Pengelolaan kepegawaian masih perlu dilakukan lebih baik dan berbasis merit sistem. i. Pengembangan kompetensi pegawai belum dilakukan secara baik.

No	Urusan	Permasalahan
30.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	a. Belum optimalnya Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori SAKIPA, yaitu baru mencapai 51,28 persen di tahun 2023 b. Pengaawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah cukup baik dilakukan, namun masih perlu dioptimalkan.
31.	Pemerintahan Umum	a. Menurunnya Persentasi Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan Persentasi Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan sejak 2019 sampai 2022 yaitu 100 persen, namun menurun di tahun 2023 menjadi hanya 99 persen b. Menurunnya Persentasi Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan Persentasi Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 65 persen

Sumber: hasil analisis, 2025

2.3.2. Isu Strategis

2.3.2.1. Telaahan Isu Internasional

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah diidentifikasi 10 (sepuluh) megatren global yang akan dihadapi menuju tahun 2045. Kesepuluh megatren global meliputi:

1. **Perkembangan demografi global.** Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkay (Asia 55 persen).
2. **Geopolitik dan geoekonomi.** Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen.
3. **Perkembangan teknologi.** Teknologi akan mengantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.
4. **Peningkatan urbanisasi dunia.** Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.
5. **Konstelasi perdagangan global.** Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.
6. **Tata kelola keuangan global.** Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDB), dan Fintech.
7. **Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*).** Jumlah *middle* dan *upper class* lebih dari 90 persen (8,8 miliar).
8. **Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam.** Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
9. **Perubahan iklim**. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan

bencana.

10. **Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).** Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

2.3.2.2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menjadi pedoman pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka sinergi pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan telaahan terhadao RPJMN.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Gambar 2.57.
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional, sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.95.
Sasaran Pembangunan Nasional

1	**Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju**
	a) Penumbuhan ekonomi dan 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029) b) GNI per kapita meningkat dari 4.879 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029) c) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029) d) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) meniadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)
2	**Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional Meningkat**
	Global Power Index meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan perangkat 29 (2029)
3	**Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang**
	Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5 (2026)
4	**Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**
	Indeks Modal Manusia (lMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)
5	**Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission**
	Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029) Indeks Kualitas Lingkunqan Hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mcncapai kebcrhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Dengan demikian Prioritas Nasional (PN) tahun 2026-2029, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Ccpat (*Ouick Wins*). Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Program hasil terbaik cepat (*quick wins*). 8 *quick wins* nasional, termuat dalam gambar di bawah.

Gambar 2.58.
8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

2.3.2.3. Telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan bersamaan dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan hampir seluruh kabupaten/kota di provinsi ini. Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap visi dan misi, serta isu strategis sebagaimana yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Isu-isu strategis yang penting dan berdaya ungkit untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2025-2029, yaitu:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah
2. Infrastruktur Dasar, Layanan Sosial, dan Teknologi yang Belum Merata dan Berkualitas
3. Ketergantungan Ekonomi pada SDA Tak Terbarukan dan Minimnya Hilirisasi
4. Kesenjangan Pembangunan dan Keterhubungan Antarwilayah Belum Merata
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang Belum Optimal
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Efektif dan Akuntabel

Keselarasan visi gubernur dan wakil gubernur dengan visi RPJPD dan tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Selatan menghasilkan rumusan visi RPJMD. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah: KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN.

Pokok-pokok pernyataan Visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

a. BEKERJA; Ikhtiar melakukan sesuatu yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya.
b. BERKELANJUTAN; 1). melanjutkan pembangunan periode sebelumnya; dan 2). pembangunan yang seimbang antara sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.
c. BERBUDAYA; masyarakat yang memiliki warisan budaya, norma, dan nilai-nilai yang membentuk identitas dan memiliki pikiran dan akal yang maju.

d. RELIGI; masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada adanya Tuhan dan memiliki nilai moral serta etika.
e. SEJAHTERA; kebutuhan jasmaniah, rohani, dan rasa aman yang terpenuhi bagi masyarakat.
f. GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN; pintu keluar masuk untuk distribusi barang dan jasa keseluruh Kalimantan, mulai dari pusat produksi, pengolahan, pergudangan, dan pengiriman ke konsumen.

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA
2. MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL
3. MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH
4. MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
5. MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT

2.3.2.4. Telaahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2022-2052 Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA dan Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kebijakan dimaksud dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan arah kebijakan dalam RTRW, RPJMD atau perencanaan lainnya.

A. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pembangunan yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya perlu dilakukan berbagai langkah dan

tindakan strategis yang tercakup dalam pembangunan berbasis sumber daya alam dan lingkungan.

Tujuan dari rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam adalah: 1) Menjaga keberlanjutan ketersediaan dan penggunaan sumber daya alam; 2) Mencegah penyusutan/penurunan jumlah dan mutu cadangan modal sumber daya alam; dan 3) Memastikan pemanfaatan sumber daya alam akan meningkatkan mutu lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Sasaran yang ingin dicapai adalah harmonisasi rencana pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, adapun rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.96.
Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

No	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Waktu Pelaksanaan					
	Jenis SDA	Lokasi			2022-2027	2027–2032	2032–2037	2037–2042	2042–2047	2047–2052
1	Energi: Tenaga Air, Tenaga Angin, Surya, Biomassa, Micro Hydro	Semua kecamatan,	1. Pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan 2. Mengembangkan produk energi alternatif (biodiesel, bioethanol, dan biogas) untuk sektor transportasi, rumah tangga, dan industri kecil 3. Mengembangkan desa mandiri energi 4. Mewajibkan semua bangunan perkantoran dan areal parkirnya, tiang listrik PJU yang mendapat sinar matahari langsung agar dipasang panel surya 5. Mewajibkan penerangan jalan dan jembatan menggunakan panel surya 6. Mewajibkan tempat pemotongan hewan dan TPA, limbah pemotongan hewan, dan TPA memanfaatkan sampah dan kotoran menjadi biogas. 7. Mewajibkan pengembang perumahan menggunakan septic bio septic tank 8. Pemakaian septic tank yang sesuai kondisi (rawa)	1. Kajian energi terbarukan	X					
				2. Penyusunan grand design atau kerangka konseptual yang terintegrasi	X					
				3. Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan sesuai dengan kemampuan daerah	X	X				
				4. Meningkatkan jumlah daya listrik yang dihasilkan			X	X	X	X
				5. Meningkatkan jumlah energi terbarukan dari panel surya yang dihasilkan			X	X		
				6. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pembangunan instalasi biogas		X		X		X
				7. Pembuatan WC model gentong mas santun (Gerakan Tolong Masyarakat Sanitasi Tuntas)				X		
2	Pertanian	Semua kecamatan	1. Perlindungan Kawasan Hutan Lindung 2. Optimalisasi perhutanan sosial 3. Pengelolaan kawasan Budidaya dan/atau lindung 4. Pemanfaatan lahan berkelanjutan 5. Melakukan reformasi sektor terkait 6. Intensifikasi Lahan Pertanian 7. Penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan 8. Penggembalaan yang ramah lingkungan 9. Pendanaan yang berkelanjutan	1. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	X	X				
3	Pariwisata	Semua kecamatan		2. Peningkatan kapasitas pengelola	X	X				
				3. Pengadaan, peningkatan sarana prasarana pariwisata			X			
4	Perikanan dan Peternakan	Semua kecamatan		4. Penetapan instrumen ekonomi lingkungan hidup	X					
				5. Pembangunan sentra industri terpadu sesuai DDDT	X	X				
5	Penggembalaa n Ternak Kerbau	Kec. Paminggir dan Danau Panggang		6. Peningkatan infrastruktur kawasan			X			
6	Kehutanan dan Perkebunan	Semua kecamatan		7. Pengembalaan yang ramah lingkungan				X		

No	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Waktu Pelaksanaan					
	Jenis SDA	Lokasi			2022-2027	2027–2032	2032–2037	2037–2042	2042–2047	2047–2052
			10. Kesesuaian Pola Ruang dengan DDDT 11. Pemanfaatan limbah peternakan 12. Penyediaan hijauan pakan ternak unggul 13. Pemanfaatan limbah pertanian 14. Peningkatan kapasitas SDM 15. Peningkatan upaya efisiensi penggunaan SDA 16. Peningkatan upaya pengembangan SDA 17.Pengendalian kegiatan pengusaahan SDA 18.Membangun kawasan dan membina masyarakat mengembangkan urban farming · Aeroponik dan hidroponik, · Bioflok budidaya ikan, · Keramba jala apung · Tabulampot · Peternakan unggas (itik, ayam) 19.Peningkatan upaya pemulihan SDA pada semua jenis SDA 20.Membatasi alih fungsi kawasan LP2B dan menjaga luasannya agar tidak berubah 21.Pelestarian kawasan gambut 22.Pencegahan kebakaran hutan dan illegal logging 23.Perlindungan terhadap kawasan konservasi perikanan 24.Reboisasi terhadap kawasan hutan yang gundul yang merupakan kawasan orang utan	8. Pengembangan organisasi kemitraan/kelembaga an masyarakat			X		
				9. Pengembangan program kerjasama	X	X	X	X	X	X
				10. Peningkatan DDDT	X	X	X	X	X	X
				11. Penurunan kebakaran lahan dan lahan serta lahan kritis	X	X	X	X	X	X
				12. Pemanfaatan potensi sesuai DDDT	X	X	X	X	X	X
				13. Upaya pembinaan masyarakat dan implementasi kegiatan yang mendukung upaya Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	X	X	X	X		
				14. Pengelolaan kawasan konservasi	X	X	X			
				15. Penghijauan di destinasi/objek- objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	X	X	X			
				16. Pengembangan destinasi/objek- objek wisata sesuai dengan RTRW dan Dokumen RIPPDA	X	X	X	X	X	X
				17. Reuse, Reduce, Recyle sampah yang ada di destinasi/objek- objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	X	X	X	X	X	X
				18. Pembentukan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik)	X					
				19. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM	X	X	X	X	X	X
				20. Penyediaan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan SDA	X	X	X	X	X	X
				21. Penyusunan Norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dalam pengelolaan dan pengusahaan SDA	X					
				22. Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan	X	X	X	X	X	X
				23. Membatasi alih fungsi kawasan LP2B dan menjaga luasannya agar tidak berubah						
				24. Pelestarian kawasan gambut						
				25. Patroli dan penindakan hukum terhadap kebakaran hutan						
				26. Perlindungan terhadap kawasan konservasi perikanan						

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052

B. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, pemukiman atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan tingkat erosi atau aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS) Hulu Sungai Utara.

Upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya kerja sama antara semua pihak baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat umum yang bersifat kolektif atau secara sendiri-sendiri dengan melibatkan ketiga komponen tersebut. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan perencanaan pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup adalah: 1) Mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup; 2) Mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup; 3) Menjaga dan meningkatkan kinerja layanan ekosistem; dan Sasaran yang ingin dicapai adalah mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.97.
Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

No	Kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Waktu Pelaksanaan		
	Jenis SDA	Lokasi			2022 - 2032	2032 – 2042	2042 – 2052
1	Hayati	Semua kecamatan	1. Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumberdaya genetik dan habitat spesies tinggi 2. Memperbaiki sistem pengelolaan dan pemulihan ekosistem bernilai penting	1. Identifikasi dan penetapan sumberdaya hayati terancam	X		
				2. Perlindungan dan Konservasi SDH	X	X	X
				3. Identifikasi kawasan ekosistem esensial Orang Utan	X		
				4. Pengelolaan kawasan ekosistem esensial	X	X	X
2	Terestrial	Semua kecamatan	1. Mempertahankan daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung 2. Mempertahankan fungsi hutan, rawa dan pemulihan DAS kritis di wilayah hulu sub sub DAS Hulu Sungai Utara (Halong dan Pitap) 3. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan proper 4. Pembatasan perijinan kegiatan / usaha di DAS prioritas 5. Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup 6. Menetapkan kawasan RTH secara poroporsional	1. Rehabiltasi & Pemulihan Cadangan SDA dan LH	X	X	X
				2. Penetapan instrumen ekonomi lingkungan hidup	X		
				3. Penetapan kawasan lindung	X		
				4. Rehabilitasi lahan kritis	X	X	X
				5. Penetapan pola ruang sesuai DDDT	X		X
				6. Penurunan jumlah dan kualitas pelanggaran hukum bidang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan	X	X	X
				7. Peningkatan kemampuan institusi dan aparatur penegak hukum bidang pengelolaan kawasan hutan	X	X	X
				8. Pemberdayaan masyarakat dan keterbukaan informasi terhadap batas kawasan	X	X	X
3	Akuatik	Sungai, Danau, Rawa, Air tanah	1. Memperbaiki kualitas dan kuantitas air sungai 2. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan dan air tanah 3. Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3 4. Meningkatkan dan atau memperbaiki infrastruktur distribusi air untuk keperluan industri, rumah tangga, dan pertanian 5. Pembatasan ijin pembuatan sumur bor untuk kegiatan industri dan pertambangan yang berpotensi memotong dan mengurangi air tanah 6. Meningkatkan upaya-upaya pemanenan dan pemanfaatan air hujan dalam skala rumah tangga	1. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar	X	X	X
				2. Penetapan DDDT Air	X	X	
				3. Penetapan baku mutu air permukaan dan air tanah	X		
				4. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air	X	X	X
				5. Penetapan prioritas dan target perizinan lingkungan yang berkaitan dengan beban pencemaran pembuangan air limbah ke sumber air	X	X	X
				6. Pengawasan pengendalian pencemaran air	X	X	X
				7. Pengelolaan sampah, limbah dan B3 8. Pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur jaringan air untuk rumah tangga, industri, perikanan dan pertanian	X	X	X

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052

C. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Tujuan perencanaan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam adalah: 1) Memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kriteria pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam. 2) Mendorong pelaksanaan tindakan-tindakan efisiensi, diversifikasi, dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti upaya penyempurnaan terus menerus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup, adapun rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.98.
Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA

No	Kebijakan Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 – 2042	2042 - 2052
1	Pengembangan sistem pemantauan IKLH Kabupaten yang terintegrasi dengan Provinsi dan Pusat	1. Menyusun sistem pemantauan kualitas air sungai-sungai 2. Menyusun sistem pemantauan kualitas udara 3. Menyusun sistem perhitungan tutupan hutan/lahan yang akuntabel	1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	X	X	X
			2. Dokumen IKPLHD sesuai Nirwasita Tantra	X	X	X
			3. Pencapaian IKLH sesuai target	X	X	X
2	Pengembangan sistem perijinan lingkungan hidup	1. Menyusun kajian sebelum pemberian ijin lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Pembatasan pemberian ijin kegiatan / usaha berdasarkan rencana tata ruang dan kondisi DDDT	1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	X	X	X
			2. Pelaksananaan AMDAL-UKL-UPL sesuai kewenangan	X	X	X
			3. Pemantauan sesuai RKL-RPL	X	X	X
3	Penyusunan peraturan dan sistem penganggaran berbasis lingkungan hidup.	Memberikan anggaran lingkungan hidup yang memadai bagi PPLH dari APBD	Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	X	X	X
4	Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Insentif dan diinsentif bagi pelaku usaha/kegiatan yang mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan	1. Kajian instrumen ekonomi lingkungan	X	X	
			2. Adanya pengelola jasa lingkungan	X	X	
			3. Penyusunan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup	X	X	
			1. Kajian KLHS RTRW	X		X
			2. Kajian KLHS RDTR	X		X
			3. Kesesuaian pola ruang dengan RDTR	X		X
			4. KLHS RPJMD	X		X
			Koordinasi antar SKPD lingkungan hidup	X	X	X
			1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur	X	X	X
			2. Pembentukan POKMASWAS	X		
			3. Pembentukan LSM Lingkungan	X		
			1. Pembangunan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak	X		
			2. Pengembangan sistem jaringan SISDA berbasis WEB	X		

No	Kebijakan Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 – 2042	2042 - 2052
			3. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan teknologi informasi SDA	X	X	X
			4. Peningkatan anggaran pengembangan teknologi dan jaringan informasi SDA	X	X	X
			1. Program Kalpataru,	X	X	X
			2. Program Adiwiyata	X	X	X
			3. Saka Kalpataru	X	X	X
			4. Abdi Persada Lingkungan	X	X	X
			5. Penyusunan aturan dan SOP pelibatan masyarakat dan dunia usaha	X		
			1. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	X	X	X
			2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	X	X	X
			3. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R	X	X	X
			4. Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	X		X
			1. Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kabupaten, Kawasan dan Komunal	X	X	X
			2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	X		X

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052

D. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan rangka mitigasi.

1. Perubahan iklim mikro di suatu lokasi dikaitkan dengan keberadaan manusia (permukiman) di sekitar hutan, akan berpengaruh terhadap perasaan nyaman dan tidak nyaman bagi penghuninya. Masyarakat, sebagai tingkat kenyamanan sebenarnya berhubungan dengan kondisi nyata iklim mikro pada kurun waktu tertentu. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfir. Efek gas rumah kaca merupakan akumulasi gas rumah kaca hasil emisi yang memantulkan panas/ energi di atmosfir bumi dengan pantulan tersebut, sehingga bumi mengalami peningkatan temperatur. Pemanasan global dapat memberikan dampak terjadinya perubahan iklim global yaitu pada proses penguapan, pembentukan awan, pola hujan dan kecepatan angin.
2. Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, pemukiman, atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro, yang lebih mengarah kepada kondisi kurang nyaman. Perubahan-perubahan yang telah terjadi, juga nampak jelas ketika melakukan survei lapangan dengan membandingkan tutupan bervegetasi hutan dengan tutupan vegetasi bukan hutan apalagi tutupan semak belukar. Usaha-usaha yang dapat dilakukan misalnya dengan program penghijauan dan reboisasi, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penanaman tanaman buah-buahan di pekarangan rumah penduduk, dan sebagainya. Perubahan iklim mikro yang dipicu oleh kegiatan konversi hutan, juga dapat berdampak terhadap karakteristik aliran sungai dan pembentukan lahan kritis.
3. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan di Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan erosi dan aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS). Semua ini berdampak terhadap wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bagian hulu DAS Barito.
4. Pengelolaan lahan secara tradisional dan belum adanya penerapan tindakan konservasi tanah dan air yang dilakukan petani perambah hutan, menyebabkan terjadinya peningkatan erosi dan aliran

permukaan yang sangat drastis pada gilirannya membawa dampak merugikan yang sangat besar bagi petani (*on site effect*) dan masyarakat lain yang dipengaruhinya *(off site effect*).

5. Perubahan pola pemanfaatan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, tegalan, dan permukiman akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu DAS atau sub DAS di Kalimantan Selatan. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pertanian, dan perkebunan, akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai.
6. Proses pembukaan lahan telah menyebabkan hilangnya tegakan vegetasi yang menutupi permukaan tanah, sehingga terjadi kehilangan bahan organik lebih cepat dan kerusakan terhadap struktur tanah. Peluang terjadinya degradasi lahan oleh aliran permukaan (run off) dan erosi akan semakin besar bila terjadi curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng yang curam, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kerusakan utama yang dialami pada tanah tempat erosi terjadi adalah kemunduran kualitas sifat-sifat biologi, kimia, dan fisik tanah. Kemunduran kualitas tanah tersebut dapat berupa kehilangan keanekaragaman hayati, unsur hara dan bahan organik yang terbawa oleh erosi, tersingkapnya lapisan tanah yang miskin hara dan sifat-sifat fisik yang menghambat pertumbuhan tanaman, menurunnya kapasitas infiltrasi dan kapasitas tanah menahan air, meningkatnya kepadatan tanah dan ketahanan penetrasi, serta berkurangnya kemantapan struktur tanah. Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada memburuknya pertumbuhan tanaman, menurunnya produktivitas tanah atau meningkatnya pasokan yang dibutuhkan untuk mempertahankan produksi.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sangat berbahaya bila terkontaminasi dengan lingkungan, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan untuk mengelola Limbah B3 nya dengan baik dan benar. Perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan, pembangkit listrik dan industri besar lainnya dalam mengelola limbah B3 diatur dengan peraturan khusus, sehingga dalam mengelola, mendistribusikan dan pemusnahannya memerlukan tatacara dan Standar Operasional Prosedur tersendiri.
8. Pengelolaan sampah skala rumah tangga perlu dterapkan dengan melakukan kegiatan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) adalah kegiatan

memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

Tujuan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim adalah tersusunnya rencana pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi penyebab perubahan iklim (Gas Rumah Kaca), adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.99.
Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

No	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 – 2042	2042 - 2052
1,	**Kehutanan dan Lahan Gambut:** · Menurunkan emisi GRK dengan sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, · mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan masyarakat dan negara. · Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa. · Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada). · Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal.	1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK. 2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK. 3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan Sustainable Forest Management. 4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi. 5. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan. 6. Optimalisiasi sumberdaya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi. 7. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan 8. Mengabsorbsi CO2 secara optimal.	1. Rehabilitasi lahan kritis dan DAS	X	X	X
			2. Kajian GRK	X	X	X
			3. Penanaman pohon sesuai target IKLH	X	X	X
			4. Pengamanan Kawasan dari karhutla	X	X	X
			5. Pemantauan emisi GRK	X	X	X
			6. Perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan dari pelanggaran	X	X	X
			7. Perlindungan dan pengamanan Hasil Hutan dari pelanggaran dan pencurian	X	X	X
2,	**Industri** Meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi	1. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau 2. Pengembangan industri rumah tangga	1. Melaksanakan audit energi khususnya pada industri- industri yang boros energi	X	X	X
			2. Pemberian insentif pada program efisiensi energi	X	X	X
3,	**Pengelolaan Limbah** Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah domestik	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda) 2. Peningkatan pengelolaan air limbah perkabupaten 3. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle) 4. Perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA 5. Pemanfaatan limbah/ sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan	1. Peningkatan/pembangunan / rehabilitasi TPA	X	X	X
			2. Pembangunan IPAL	X	X	X
4,	**Permukiman** Mengembangkan green cities untuk tiap kabupaten dan Kabupaten tangguh untuk Kabupaten -Kabupaten yang rentan terhadap bencana	1. Meningkatkan alokasi lahan peruntukan ruang terbuka hijau; 2. merevitalisasi setiap ruang terbuka yang ada untuk dijadikan ruang terbuka hijau (public greening) baik pada lahan swasta maupun pemerintah; dan 3. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya green cities.	1. Menyusun Master Plan Kabupaten Hijau yang memuat target pencapaian 8 atribut Kabupaten hijau (green planning & design, green open space, green waste, green transportation, green energy, green water, green building, and green community);	X		X

No	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 – 2042	2042 - 2052
			2. Pembangunan RTRH	X	X	X
5,	**Infrastruktur Pembangunan** Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah	1. Mengembangkan teknologi infrastruktur ramah lingkungan; 2. Mengembangkan konsep pembangunan dengan konservasi (development conservation) pada wilayah yang masih didominasi oleh jasa lingkungan tinggi; dan 3. Menyusun sistem rekayasa infrastruktur yang memperhatikan siklus harmonis alam.	1. Pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	X X X	X X X	X X X
			2. Pengembangan RTH Kabupaten	X	X	X
			3. Pembangunan sarana dan prasarana sesuai DDDT dan tipologi bencana	X	X	X
			4. Pembangunan dan perbaikan drainase	X	X	X
6,	Adaptasi sektor kesehatan	1. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana di masyarakat 2. Memperkuat kajian kerentanan bencana dan penilaian resiko akibat adanya perubahan iklim 3. Mengembangkan kerangka kebijakan 4. Meningkatkan kerjasama sektor dan juga partisipasi masyarakat	1. Manajemen Data, Informasi dan Pengetahuan	X	X	X
			2. Perencanaan dan Kebijakan, Peraturan dan Pengembangan Institusi	X	X	X
			3. Perencanaan dan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Program	X	X	X
			4. Penetapan Tim Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana melalui SK Bupati	X	X	X
			5. Pengkajian lokasi bencana dan kebutuhan sarana Kesehatan di lokasi bencana	X	X	X
			6. Pembentukan Posko Kesehatan disetiap Lokasi	X	X	X
			7. Bencana Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak	X	X	X
7,	Adaptasi Kebencanaan	1. Mengurangi resiko bencana dengan cara mengurangi hazard dan vulnerability 2. Meningkatkan capacity yang ada baik di lembaga terkait maupun masyarakat 3. Integrasi muatan tanggap bencana dalam kurikulum di sekolah-sekolah 4. Simulasi tanggap bencana di daerah-daerah rawan bencana secara berkala 5. Menyusun peta rawan bencana di seluruh jenjang	1. Penguatan peraturan daerah dan kapasitas kelembagaan	X	X	X
			2. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu	X	X	X
			3. Penelitian, pendidikan dan Pelatihan	X	X	X
			4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengurangan resiko bencana	X	X	X

No	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 – 2042	2042 - 2052
		pemerintahan dan desa tangguh 6. Rehabilitasi ekosistem mangrove di sempadan Sungai yang melintasi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pelindung daratan dari abrasi	5. Penyusunan peta rawan bencana	X	X	X
			6. Pembangunan sarana dan prasarana baik lunak dan keras pada daerah rawan bencana dan desa tangguh	X	X	X
			7. Rehabilitasi dan penanaman vegetasi sesuai tipologi	X	X	X

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052

2.3.2.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan hasil Konsultasi Publik (KP), diskusi dengan Tim POKJA, dan OPD terkait, disepakati dan ditetapkan tujuh (7) isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) paling strategis di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Air bersih dan sanitasi;
2. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
3. Kota dan permukiman berkelanjutan;
4. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
5. Perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana;
6. Kebutuhan hidup sehat; dan
7. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 secara ringkas disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.100.
Ringkasan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target Nasional sd Tahun 2030	Target Daerah & Nasional	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis TPB	Proyeksi 5 Tahunan					Proyeksi Status Capaian	OPD	Skenario Alternatif	Rekomendasi	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			Saaran	Arah Kebijakan
1	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang orang dalam situasi rentan.	Menurun menjadi 30%	114,97	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	156,76	165,56	174,35	183,14	191,92	SS	BPBD	Proyek sidgn upaya tambahan	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	eningkata n program pendidikan dan pelatihan kepada masyaraka t tentang bahaya bencana, tindakan mitigasi, dan rencana tanggap darurat. - Peningkata n kebijakan dan rencana aksi yang berorientas i pada pengurang an risiko bencana, termasuk regulasi yang mengatur pembangu nan dan penataan ruang yang berkelanjut an. - Meningkat kan standar bangunan dan infrastrukt ur untuk meminimal kan kerentanan terhadap bencana, termasuk melalui pemilihan lokasi yang aman dan desain yang tangguh terhadap bencana. - Peningkata n pengemban gan sistem peringatan dini. - Peningkata n peran masyarakat dalam penyelengg araan penataan ruang terkait Kebencana an, memperku at sistem pemantaua n dan evaluasi pengawasa n penataan ruang, dan pengenaan Sanksi terhadap pelanggar peraturan penataan ruang.
2	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga	Pada tahun 2030, mencapai akses universal	Meningkat 100	91,49	Air Bersih dan	03,73	107,12	110,51	113,91	117,29	SS	PUPR, PDAM	Proyek sidenga n upaya	Meningkatnya persentase	Peningkatan perluasan jaringan pipa air minum ke daerah yang belum

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target Nasional sd Tahun 2030	Target Daerah & Nasional	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis TPB	Proyeksi 5 Tahunan					Proyeksi Status Capaian	OPD	Skenario Alternatif	Rekomendasi	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			Saaran	Arah Kebijakan
		yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.			Sanitasi Layak								tambahan	rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak menjadi 100%.	terlayani. - Meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya air minum layak dan kebersihan air. - Peningkatan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan infrastruktur air. - Peningkatan penggunaan teknologi inovatif seperti desalinasi, pengolahan air limbah, atau teknologi sumber air alternatif untuk menyediakan akses air minum yang lebih baik di daerah yang sulit dijangkau. - Peningkatan perlindungan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan sumber air bersih
3	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup	Meningkat menjadi 5	5,63	Tanpa Kelaparan	6,75	7,27	7,79	8,31	8,84	SS	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian	Proyek sidengan upaya tambahan	Menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment) dan meningkatkannya ketersediaan pangan yang memadai.	Peningkatan produksi pangan lokal melalui pendekatan pertanian berkelanjutan. - Peningkatan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap lahan pertanian bagi petani kecil dan masyarakat pedesaan. - Meningkatkan kapasitas petani kecil melalui pelatihan, akses terhadap teknologi pertanian yang tepat, dan dukungan keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan produksi pangan. - Meningkatkan

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target Nasional sd Tahun 2030	Target Daerah & Nasional	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis TPB	Proyeksi 5 Tahunan					Proyeksi Status Capaian	OPD	Skenario Alternatif	Rekomendasi	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			Saaran	Arah Kebijakan
			sepanjang tahun.													infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jaringan jalan, dan pusat-pusat distribusi, untuk memfasilitasi akses ke meningkatka n efisiensi distribusi hasil pertanian. - Meningkatka n akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang berkualitas melalui program program pemberian bantuan pangan, subsidi pangan, atau insentif bagi produsen pangan lokal. - Penurunan Prevalensi Malnutrisi dan Kekurangan Energi Kronis
4	6.3.2. (b)	Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangka n pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta	Meningka t menjadi 55,5	50,67	Air Bersih dan Sanitasi Layak	51, 14	51, 02	50, 91	50, 79	50, 67	SB	DISPERKIML H	Proyek si dengan upaya tamba han	Meningkatnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku menjadi 55,5%.	Peningkatan pengendalia n sumber sumber pencemaran yang masuk ke sungai, termasuk limbah industri, domestik, dan pertanian. - Peningkatan program restorasi ekosistem sungai untuk meningkatka n kemampuan alami sungai dalam menyaring polutan dan memperbaiki kualitas air. - Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak kualitas air sungai dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. - meningkatka n kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai dan dampak negatif

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target Nasional sd Tahun 2030	Target Daerah & Nasional	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis TPB	Proyeksi 5 Tahunan					Proyeksi Status Capaian	OPD	Skenario Alternatif	Rekomendasi	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			Saaran	Arah Kebijakan
			penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.													pencemaran. - Meningkatkan sistem pemantauan kualitas air sungai secara terus menerus untuk memantau perubahan dalam kualitas air dan merespons secara cepat terhadap potensi masalah.
5	2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Meningkat menjadi 95,2	83,7	Tanpa Kelapara n	85, 23	85, 94	86, 65	87, 36	88, 07	SB	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian	Proyek si dengan upaya tambahan	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan ikan oleh Masyarakat menjadi 95,2%.	Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Gizi dan Pola Pangan Sehat. - Peningkatan Akses yang Lebih Baik terhadap Sumber Pangan Berkualitas. - Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat. - Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan di Masyarakat.
6	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap	Menurun 0,2	17,295	Tanpa Kemiskina n	30, 91	33, 88	36, 85	39, 81	42, 78	SB	BPBD	Proyek si dengan upaya tambahan	Menurunnya risiko korban meninggal, hilang, terluka dan mengungsi akibat bencana menjadi 0,2%.	Meningkatkan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi bencana dengan cepat dan memberikan peringatan kepada masyarakat yang terkena dampak. - Menurunkan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak - Meningkatkan upaya

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target Nasional sd Tahun 2030	Target Daerah & Nasional	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis TPB	Proyeksi 5 Tahunan					Proyeksi Status Capaian	OPD	Skenario Alternatif	Rekomendasi	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			Saaran	Arah Kebijakan
			kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.													pencegahan bencana serta kesiapsiagaan penanganan bencana dan pasca bencana oleh semua pihak yang terlibat - Meningkatkan kapasitas dan koordinasi antara badan badan penanggulangan bencana, serta memperbaiki infrastruktur dan fasilitas tanggap darurat. - Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana.
7	1.4.1. (d)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Meningkat menjadi 100%	91,94	Tanpa Kemiskinan	95, 28	96, 44	97, 61	98, 77	99, 94		Dinas Kesehatan	Proyek sidengan upaya tambahan	Tercapainya pemerataan pemenuhan kebutuhan air minum yang layak bagi semua masyarakat menjadi 100%.	- Peningkatan cakupan pelayanan air minum. - Peningkatan sumber air baku secara berkesinambungan. - Peningkatan pemeliharaan instalasi pengolahan air minum sesuai perkembangan penduduk dan ekonomi. - Peningkatan terjaminnya Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target Nasional sd Tahun 2030	Target Daerah & Nasional	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis TPB	Proyeksi 5 Tahunan					Proyeksi Status Capaian	OPD	Skenario Alternatif	Rekomendasi	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			Saaran	Arah Kebijakan
8	11.6.1.(a)	Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk	Meningkat menjadi 80%	21,88	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	15,27	10, 90	6,54	2,17	-2,19	SB	DISPERKIMLH	Proyeksi dengan upaya tambahan	Menigkatkan kapasitas sampah perkotaan yang tertangani	- Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. - Meningkatkan koordinasi, komitmen, dan kerjasama pihak-pihak terkait, memperkuat regulasi lokal atau landasan hukum serta meningkatkan dukungan dari masyarakat.
9	11.5.2.(a)	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang orang dalam situasi rentan.	Menurun 0,1	2580000 00	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	-958 457 309,9	-208 354 798,4	-320 808 346,9	-433 206 431,3	-545 549 106,2	SS	BPBD	Proyeksi dengan upaya tambahan	- Mengurangi jumlah kerugian ekonomi akibat bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara. - Memperkuat perlindungan masyarakat miskin dan rentan terhadap dampak bencana. - Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerin	- Optimalisasi penyediaan sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap bencana. - Peningkatan alokasi anggaran untuk mitigasi dan penanganan dampak bencana. - Pembangunan permukiman berbasis tata ruang yang aman dari risiko bencana. - Kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung penanggulangan bencana.

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target Nasional sd Tahun 2030	Target Daerah & Nasional	Capaian Tahun 2023	Isu Strategis TPB	Proyeksi 5 Tahunan					Proyeksi Status Capaian	OPD	Skenario Alternatif	Rekomendasi	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			Saaran	Arah Kebijakan
															tah daerah dalam mengha dapi bencan a	
10	2.1.2*	Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup	Menurun menjadi 4%	NA	Tanpa Kelaparan	5,48	7,36	9,23	11,11	12,98	SB	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian	Proyek si dengan upaya tambahan	- Menurunkan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. - Meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. - Mendorong ketahanan pangan berbasis pertanian berkelanjutan.	- Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan bantuan teknologi pertanian. - Penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil panen. - Pengembangan pasar lokal untuk distribusi pangan. - Penyediaan program subsidi atau bantuan pangan bagi masyarakat rentan.

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

2.3.2.6. Telaahan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2025-2045

Rencana pembangunan jangka panjang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Beberapa isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk perencanaan pembangunan jangka panjang sampai tahun 2045 meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
3. Penanggulangan Pengangguran
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Penguatan Sosial Budaya Masyarakat
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Perdesaan
7. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Merata
8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Secara Berkelanjutan
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Lestari, Berkelanjutan, dan Resiliensi Bencana

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 adalah: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN.

Makna dari kata kunci visi yakni Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agrominapolitan dijelaskan sebagai berikut:

MAJU: mencerminkan harapan semua lapisan masyarakat untuk menjadi daerah yang berkembang dari berbagai aspek kehidupan antara lain sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dukungan infrastruktur ekonomi dan sosial yang cukup, serta tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dalam 20 tahun mendatang, diharapkan kondisi masyarakat HSU akan menjadi lebih baik dapat sejajar dengan daerah sekitar dan mempunyai daya saing yang tinggi sekaligus dapat mendukung gerbang IKN.

SEJAHTERA: bermakna bahwa harapan yang ingin dicapai masyarakat dalam dua puluh tahun yang akan datang adalah menjadi daerah yang makmur dari berbagai aspek kehidupan, antara lain sumber daya manusia, perekonomian, kehidupan sosial budaya dan didukung tata pemerintahan yang baik dan kondisi daerah yang kondusif. Masyarakat HSU harmonis, dan demokratis, serta menjunjung etika, moralitas, dan toleransi.

BERKELANJUTAN: bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan

daerah tetap dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu dengan cara menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan serta tetap menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup sehingga kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai diberbagai bidang generasi mendatang akan tetap dapat menikmati keberadaan lingkungan yang asri dan lestari.

AGROMINAPOLITAN: memiliki makna Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi daerah yang maju dan sejahtera dengan penggerak utama ekonomi di sektor pertanian dan perikanan. Hilirisasi potensi unggulan daerah dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kemajuan ekonomi daerah dan masyarakat. Sumber daya manusia lokal dipersiapkan dan diberdayakan untuk menjadi bagian dalam pengembangan agrominapolitan. Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi produsen hasil-hasil pertanian dan perikanan yang unggul dan menjadi pemasok pangan di Kalimantan Selatan dan IKN. Hal ini mendukung posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan.

Delapan Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban untuk mendukung Stabilitas Daerah
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.59.
Tema/Fokus Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

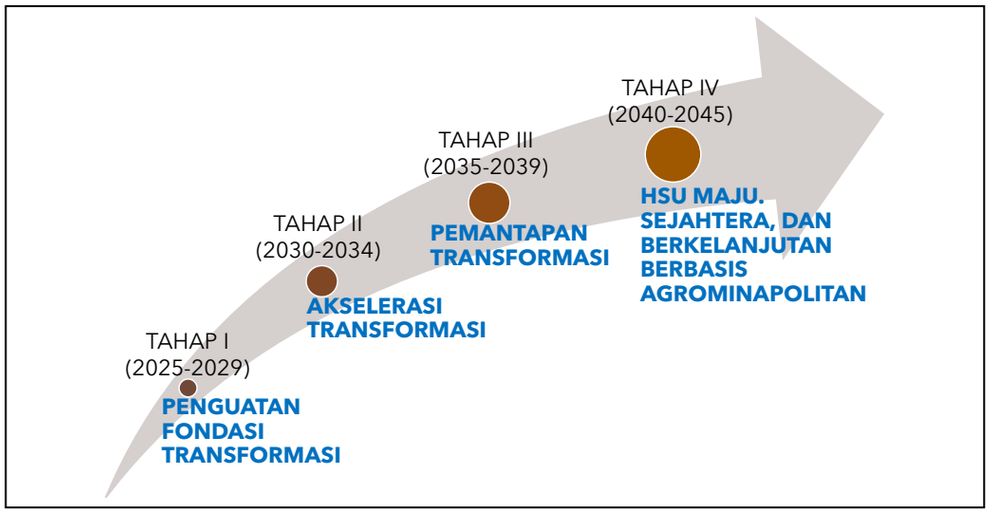

Sumber: RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

2.3.2.7. Penetapan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2025-2029

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan, isu international, isu/kebijakan nasional maupun regional di tingkat provinsi, serta isu/kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk KLHS RPJMD.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, meliputi:

1. **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

   Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi tantangan utama dalam hal struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor primer, terutama pertanian dan perikanan tradisional. Produktivitas sektor ini masih rendah, kurang inovatif, dan belum terhubung secara kuat dengan pasar serta hilirisasi industri. Di sisi lain, potensi pertanian lahan rawa pasang surut dan kekayaan perikanan air tawar menjadi keunggulan khas Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi daerah. Isu ini menjadi sangat strategis karena Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mampu

menjadi lumbung pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan serta penyangga ketahanan pangan regional. Oleh karena itu, transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal, peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan, serta penguatan ekonomi desa menjadi prioritas daerah.

2. **Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan**

Kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki karakter multidimensi dan multisektor yang saling berkaitan. Secara ekonomi, struktur wilayah yang didominasi pertanian rawa dan perikanan masih dihadapkan dengan kondisi produktivitas yang rendah, risiko iklim tinggi, serta akses pasar terbatas, sehingga pendapatan rumah tangga tani dan nelayan fluktuatif dan cenderung rendah. Secara sosial, masih ditemui kondisi belum seluruh masyarakat mendapatkan layanan dasar—terutama air minum layak, sanitasi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan—secara minimal, terutama di daerah terpencil yang terisolasi oleh kondisi geografis. Hal ini memperkuat kemiskinan multidimensi meski sebagian masyarakat sudah mengalami kenaikan pendapatan. Ketimpangan pendapatan juga muncul akibat perbedaan akses modal, keterampilan, dan infrastruktur antara desa dekat pusat layanan dan wilayah rawan banjir atau jauh dari pasar. Tingkat pengangguran khususnya penduduk lulusan SMA/SMK, dipicu oleh ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja serta terbatasnya lapangan kerja formal di luar sektor musiman.

3. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menjadi persoalan mendasar, tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di bawah rata-rata provinsi. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, rendahnya cakupan layanan kesehatan terutama di wilayah terpencil, serta kurangnya keterampilan kerja pada penduduk usia produktif. Bertolak dari permasalahan-permasalahan tersebut, perlu penguatan pembangunan SDM antara lain melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga medis, serta pengembangan pendidikan vokasi yang

sesuai dengan potensi ekonomi daerah. Di saat yang sama, persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial juga harus ditangani dengan strategi perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.

4. **Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah**

   Ketimpangan infrastruktur dasar antarwilayah menjadi hambatan utama pemerataan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masih terdapat desa dan permukiman yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan, air bersih, sanitasi layak, listrik, dan jaringan internet. Kondisi geografis berupa dataran rendah dan rawa memperparah tantangan distribusi layanan dasar dan logistik antarwilayah. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang merata, penguatan konektivitas antarkawasan, serta pengembangan pusat pelayanan publik desa menjadi sangat penting agar semua warga dapat menikmati manfaat pembangunan.

   Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan antarwilayah (desa–kota–kecamatan) secara baik menjadi salah satu akar masalah belum optimalnya pelayanan infrastruktur. Untuk itu perencanaan wilayah perlu diarahkan agar mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di luar ibu kota kabupaten, guna mengurangi beban ketimpangan desa dan kota.

   Lebih lanjut, penyusunan dan penegakan rencana tata ruang harus diperkuat, kawasan strategis seperti pertanian lestari, koridor ekonomi, dan kawasan konservasi harus ditata secara konsisten. Dukungan teknologi geospasial dan kebijakan Satu Peta perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(Good Governance*) dan Pelayanan Publik prima**

   Pembangunan masih dihadapkan pada tantangan tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Masih ditemukan persoalan dalam hal efektivitas birokrasi, koordinasi antarsektor, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, serta rendahnya kapasitas fiskal

daerah dan ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Isu strategis ini semakin relevan dalam konteks nasional yang menekankan pada reformasi birokrasi, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik yang akuntabel dan adaptif. Pemerintah daerah perlu melakukan transformasi digital dalam pelayanan, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur, serta memperkuat sistem akuntabilitas publik. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan melalui mekanisme musyawarah dan transparansi informasi.

6. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari, Berkelanjutan, dan Resiliensi Bencana**

   Kabupaten Hulu Sungaiu Utara dikenal sebagai wilayah dataran rendah yang sangat rawan terhadap bencana banjir musiman dan dampak perubahan iklim. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan basah dan kawasan pasang surut yang jika tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan degradasi lingkungan dan ancaman terhadap keselamatan serta produktivitas warga. Kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai, alih fungsi lahan pertanian, dan kurangnya upaya konservasi juga turut memperburuk daya dukung lingkungan. Isu ini menjadi strategis karena bencana dan krisis lingkungan berdampak langsung terhadap ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan adaptasi dan mitigasi bencana berbasis ekosistem, konservasi rawa, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pembangunan permukiman tahan bencana harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

Teknik perumusan isu strategis jangka menengah untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara dimuat pada tabel di bawah.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.

3.1.1. Visi

A. Telahaan Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu:

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2O29 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional, sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.1.
Sasaran Pembangunan Nasional

1	**Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju**
	a) Penumbuhan ekonomi dan 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029) b) GNI per kapita meningkat dari 4.879 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029) c) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029) d) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) meniadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)
2	**Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional Meningkat**
	Global Power Index meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan perangkat 29 (2029)
3	**Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang**
	Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5 (2026)
4	**Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**
	Indeks Modal Manusia (lMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)
5	**Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission**
	Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029) Indeks Kualitas Lingkunqan Hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

B. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

KALSEL BEKERJA

(BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA)

MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN

Pokok-pokok pernyataan Visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

a. BEKERJA; Ikhtiar melakukan sesuatu yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya.

b. BERKELANJUTAN; 1). melanjutkan pembangunan periode sebelumnya; dan 2). pembangunan yang seimbang antara sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.
c. BERBUDAYA; masyarakat yang memiliki warisan budaya, norma, dan nilai-nilai yang membentuk identitas dan memiliki pikiran dan akal yang maju.
d. RELIGI; masyarakat yang memiliki kepercapayaan kepada adanya Tuhan dan memiliki nilai moral serta etika.
e. SEJAHTERA; kebutuhan jasmaniah, rohani, dan rasa aman yang terpenuhi bagi masyarakat.
f. GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN; pintu keluar masuk untuk distribusi barang dan jasa keseluruh Kalimantan, mulai dari pusat produksi, pengolahan, pergudangan, dan pengiriman ke konsumen.

C. Tujuan Penataan Ruang dalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara

Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam RTRW adalah “mewujudkan tata ruang dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai agrominapolitan yang maju, berbasis ekosistem rawa yang berkelanjutan”. Tujuan ini menekankan dua aspek fundamental, yaitu pengembangan potensi agrominapolitan sebagai sektor unggulan daerah, serta pemanfaatan ekosistem rawa secara bijak agar tetap produktif sekaligus lestari.

Tujuan penataan ruang memiliki keterkaitan langsung dengan visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025–2029, yaitu “HSU BANGKIT (Hulu Sungai Utara Berkeadilan, Unggul dan Kreatif) sebagai Pusat Agrominapolitan Penopang Logistik Kalimantan Selatan”. Visi ini menegaskan bahwa tata ruang yang berkeadilan akan menjamin pemerataan akses dan pemanfaatan ruang bagi seluruh masyarakat,

tata ruang yang unggul akan mendorong efisiensi distribusi dan daya saing daerah, sementara tata ruang yang kreatif akan membuka peluang inovasi dalam pemanfaatan potensi rawa. Pada saat yang sama, posisi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai penopang logistik Kalimantan Selatan hanya dapat terwujud melalui struktur ruang yang terintegrasi, pola ruang yang berkelanjutan, pengembangan kawasan strategis yang produktif, serta perlindungan ekosistem rawa yang mendukung keberlangsungan fungsi agrominapolitan.

D. Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Rencana pembangunan jangka panjang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 adalah: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN.

Makna dari kata kunci visi yakni Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agrominapolitan dijelaskan sebagai berikut:

MAJU: mencerminkan harapan semua lapisan masyarakat untuk menjadi daerah yang berkembang dari berbagai aspek kehidupan antara lain sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dukungan infrastruktur ekonomi dan sosial yang cukup, serta tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dalam 20 tahun mendatang, diharapkan kondisi masyarakat HSU akan menjadi lebih baik dapat sejajar dengan daerah sekitar dan mempunyai daya saing yang tinggi sekaligus dapat mendukung gerbang IKN.

SEJAHTERA: bermakna bahwa harapan yang ingin dicapai masyarakat dalam dua puluh tahun yang akan datang adalah menjadi daerah yang makmur dari berbagai aspek kehidupan, antara lain sumber daya manusia, perekonomian, kehidupan sosial budaya dan didukung tata pemerintahan yang baik dan kondisi daerah yang kondusif. Masyarakat

HSU harmonis, dan demokratis, serta menjunjung etika, moralitas, dan toleransi.

BERKELANJUTAN: bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan daerah tetap dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu dengan cara menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan serta tetap menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup sehingga kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai diberbagai bidang generasi mendatang akan tetap dapat menikmati keberadaan lingkungan yang asri dan lestari.

AGROMINAPOLITAN: memiliki makna Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi daerah yang maju dan sejahtera dengan penggerak utama ekonomi di sektor pertanian dan perikanan. Hilirisasi potensi unggulan daerah dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kemajuan ekonomi daerah dan masyarakat. Sumber daya manusia lokal dipersiapkan dan diberdayakan untuk menjadi bagian dalam pengembangan agrominapolitan. Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi produsen hasil-hasil pertanian dan perikanan yang unggul dan menjadi pemasok pangan di Kalimantan Selatan dan IKN. Hal ini mendukung posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan.

E. Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2025-2029. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 adalah:

HSU BANGKIT

(Hulu Sungai Utara Berkeadilan, Unggul dan Kreatif)

sebagai Pusat Agrominapolitan Penopang Logistik Kalimantan Selatan

Pokok-pokok visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

a. **Berkeadilan** berarti adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat di HSU. Ini mencakup distribusi sumber daya yang adil, akses yang merata terhadap layanan publik, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga tanpa distriminasi.
b. **Unggul** berarti memiliki kualitas dan prestasi yang menonjol dibandingkan dengan daerah lain. Ini mencakup keberhasilan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
c. **Kreatif** berarti memiliki kemampuan untuk berinovasi dan menemukan solusi baru yang efektif untuk menghadapi berbagai tantangan. Ini mencakup kreativitas dalam pengembangan ekonomi, budaya, teknologi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
d. **Pusat Agrominapolitan** memiliki makna bahwa HSU akan menjadi pusat agrominapolitan yang terintegrasi dengan pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang efisien dan berkualitas tinggi. Fasilitas pengolahan akan dibangun untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
e. **Penopang logistik Kalimatan Selatan** memiliki makna bahwa HSU akan berperan penting dalam mendukung dan memperkuat sistem logistik di Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengoptimalkan distribusi hasil agrominapolitan melalui peningkatan konektivitas infrastruktur, implementasi manajemen rantai pasok yang efisien.

3.1.2. Misi

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam mewujdukan sinergi perencanaan, maka perumusan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 memerhatikan misi Provinsi Kalimantan Selatan dan Misi RPJMN pada periode yang sama.

A. Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. **Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia**

   Pembangunan sumber daya manusia (SDM) selain difokuskan pada penguatan pendidikan dan kesehatan, juga diarahkan pada aspek spiritual dan nilai-nilai hidup yang luhur, berbudaya, dan berakhlak mulia.

2. **Pembangunan Infrastruktur Yang Handal**

   Pembangunan di berbagai sektor didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendorong perekonomian daerah serta posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik. Penyediaan sarana dan prasarana diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah serta tekoneksi dengan wilayah lain.

3. **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah**

   Perekonomian daerah dikembangkan dengan mengelola sumber daya alam didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, dan infrastruktur yang handal. Penerapan inovasi serta teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Posisi strategis Kalimantan Selatan yang berdampingan dengan IKN menjadi peluang untuk mewujudkan gerbang logistik yang maju dan unggul.

4. **Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim**

   Pembangunan daerah dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, sehingga akan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana. Sumber daya alam dan potensi wilayah dikelola secara berimbang sehingga selain bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah, juga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

5. **Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah & Cepat**

   Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan prinsip profesional, bersih, dan melayani serta berbasis digital Pelayanan

publik yang mudah, cepat, dan transparan menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus daya tarik bagi peningkatan investasi daerah.

3.1.3. Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029, yaitu:

1. **Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing**

   Misi ini berorientasi pada penguatan fondasi ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor agrominapolitan yang terintegrasi dengan pertanian, perikanan, dan peternakan. Selaras dengan visi pembangunan jangka panjang, maka pada periode 2025-2029 dilakukan penguatan fondasi transformasi, termasuk transgormasi ekonomi. Upaya hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan UMKM dan koperasi menjadi prioritas. Tantangan utama adalah bagaimana mempercepat hilirisasi, memperluas pasar, mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, misi ini sejalan dengan tujuan RTRW untuk menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pusat agrominapolitan, serta memperkuat peran daerah sebagai penopang logistik Kalimantan Selatan.

2. **Mengembangkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berakhlak, dan Bebas Narkoba**

   Misi ini menekankan pentingnya pembangunan manusia sehingga SDM lokal mampu bersaing di tingkat regional. Upaya strategis mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita, serta pencegahan stunting. Pendekatan pembangunan menekankan keadilan gender serta keterlibatan kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat

adat, dll.) agar mereka memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara dalam proses pembangunan.

Selain itu, integrasi nilai-nilai religius, kebudayaan, dan pengendalian narkoba menjadi prioritas agar kualitas SDM tidak hanya unggul secara akademik dan keterampilan, tetapi juga berakhlak mulia. Tantangan kedepan adalah mengurangi kesenjangan layanan dasar terutama bagi daerah terpencil, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

3. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah

Misi ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, aksesibilitas layanan dasar, serta mendukung logistik regional. Infrastruktur yang dimaksud antara lain meliputi jalan, transportasi darat dan sungai, sistem air bersih, sanitasi, perumahan layak huni, serta infrastruktur pertanian dan perikanan. Pemenuhan Standar Pelayanan Dasar (SPM) menjadi hal yang diprioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur wilayah yang handal tidak hanya mendorong mobilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan pemerataan pembangunan. Dalam periode pembangunan tahun 2025-2029 akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur berkualitas yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

4. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

Misi ini menekankan pada reformasi birokrasi, profesionalitas aparatur sipil negara, serta modernisasi pelayanan publik berbasis digital. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diarahkan agar bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah masih adanya

kesenjangan kapasitas SDM aparatur dan keterbatasan adopsi teknologi digital. Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik berbasis digitalisasi dan penguatan budaya kerja profesional dengan sistem merit menjadi prioritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lebih lanjut, misi ini memastikan tata kelola pemerintahan yang mampu mendorong pembangunan lintas sektor.

5. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Risiko Bencana**

   Misi ini menegaskan komitmen daerah pada pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Kebijakan diarahkan pada pengendalian pencemaran, perlindungan kawasan lindung, pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah dengan karakteristik rawa, memiliki kerentanan terhadap banjir, degradasi lahan, dan perubahan iklim, sehingga pengelolaan lingkungan yang bijak dan berbasis kearifan lokal. Misi ini memperkuat dan menjamin komitmen untuk keberlanjutan ekosistem sekaligus melindungi masyarakat dari risiko lingkungan dan bencana.

Keterkaitan antara Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 3.1.
Keterkaitan Misi RPJMD HSU dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN Tahun 2025-2029

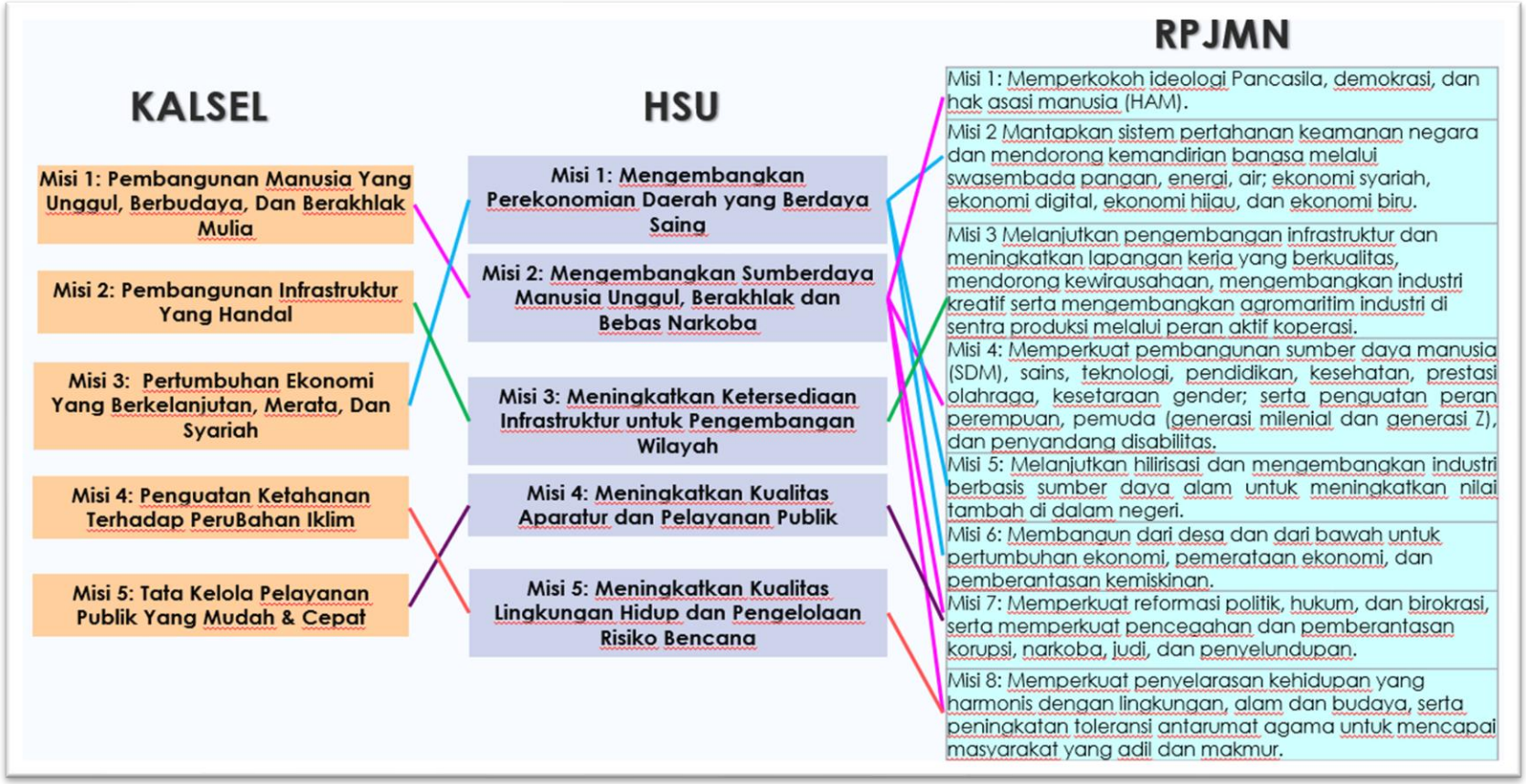

Sumber: hasil analisis, 2025

3.1.4. Tujuan dan Sasaran

Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan diturunkan dari visi dan misi bupati dan wakil bupati, yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya daerah tujuan, hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran merupakan hasil penurunan (*cascading*) kinerja. Kinerja ini akan diwujudkan melalui hasil penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama-sama oleh unsur pemerintah dan non pemerintah. Adapun pohon kinerja RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 dimuat pada Gambar 3.2.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dilengkapi dengan indikator dan target kinerja. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur secara bertahap per tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dan sasaran RPJMD dimuat pada Tabel 3.2.

Gambar 3.2.
Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

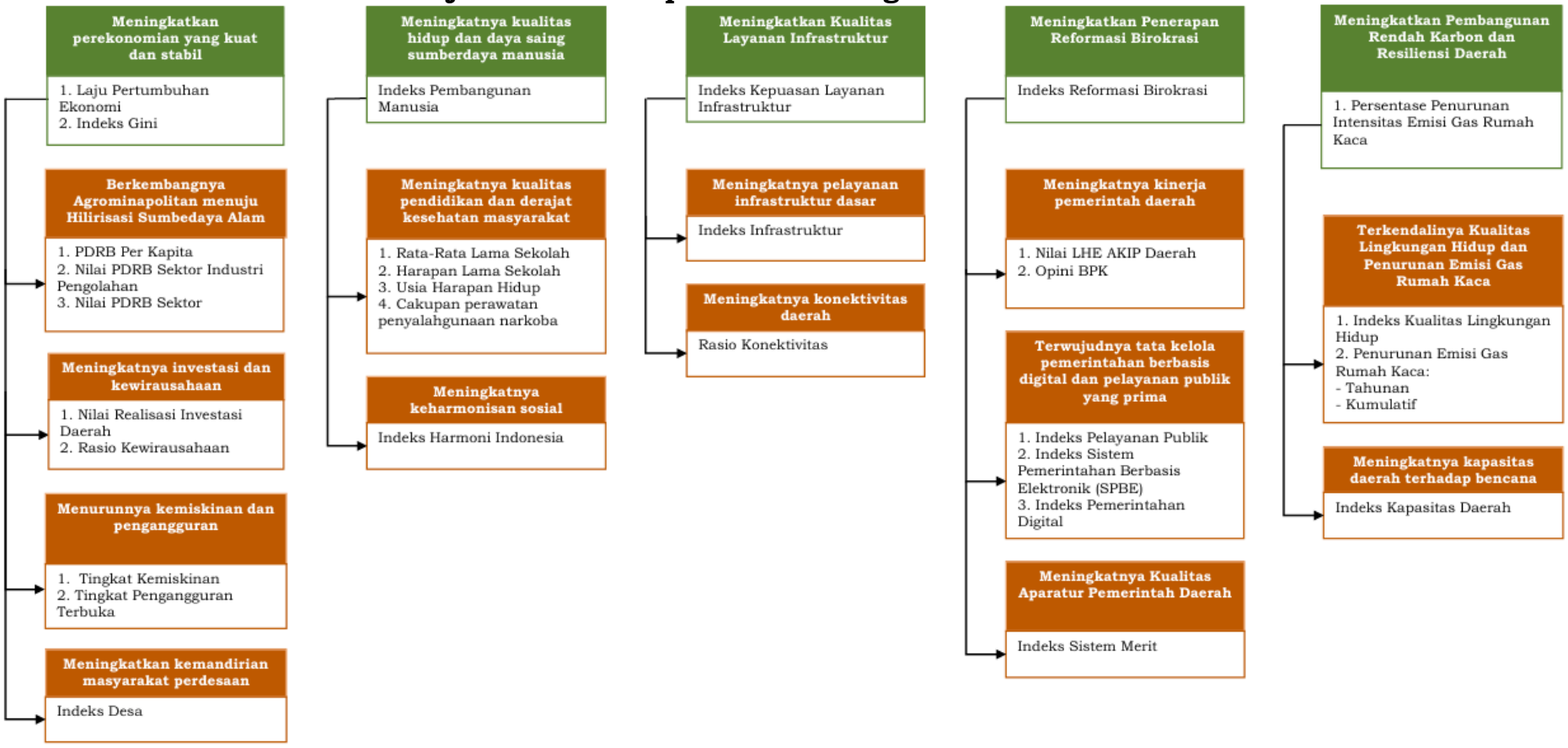

Sumber: hasil analisis, 2025

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

	TUJUAN & SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
						2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Visi: HSU BANGKIT **(Hulu Sungai Utara Berkeadilan, Unggul dan Kreatif) sebagai Pusat Agrominapolitan Penopang Logistik Kalimantan Selatan**											
	Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing											
UNGGUL & KREATIF	**1.1**	**Meningkatkan perekonomian yang kuat dan stabil**	**1**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**4,43**	**4,52**	**4,61**	**4,70**	**4,80**	**4,89**	**4,99**
			2	**Indeks Gini**	**Persen**	**0,266**	**0,260**	**0,255**	**0,250**	**0,245**	**0,240**	**0,235**
	1.1.1	Berkembangnya Agrominapolitan menuju Hilirisasi Sumbedaya Alam	1	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	26,06	28,42	37,83	47,25	56,66	66,07	73,59
			2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	536,61	544,42	552,34	560,37	568,52	576,79	585,18
			3	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar rupiah	1.047,71	1.126,39	1.210,99	1.301,93	1.399,71	1.504,82	1.617,84
	1.1.2	Meningkatnya investasi dan kewirausahaan	1	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Rupiah	24.120.000.000	24.361.000.000	24.848.000.000	25.594.000.000	26.618.000.000	27.950.000.000	28.118.000.000
			2	Rasio Kewirausahaan	Rasio	2,49	4,72	4,84	4,96	5,07	5,19	5,29
	1.1.3	Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,75	5,46	5,19	4,93	4,68	4,45	4,23
			2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,73	3,66	3,58	3,51	3,44	3,37	3,30
	1.1.4	Meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan		Indeks Desa	Indeks	427,034	487,50	490	493	496	499	502
	Misi 2: Mengembangkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berakhlak dan Bebas Narkoba											

	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
						2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
UNGGUL & KREATIF	**2.1**	**Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**71,74**	**72,79-73,87**	**73,48**	**74,17**	**74,87**	**75,58**	**76,30**
	2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	9,6	9,74	9,87	10,01	10,14	10,24
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,21	14,25	14,31	14,38	14,44	14,5	14,55
			3	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,49	72,5	72,73	72,97	73,20	73,43	73,62
			4	Prevalensi Stunting	Persen	27,6	28	27,02	26,04	25,06	24,08	23,10
			5	Cakupan perawatan penyalahgunaan narkoba	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2.1.2	Meningkatnya keharmonisan sosial		Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
	2.1.3	Meningkatnya kualitas keluarga dan pengarusutamaan gender	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,42	65,16	65,91	66,67	67,44	68,21	69,00
			2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,465	0,445	0,425	0,405	0,385	0,365	0,345
	Misi 3: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah											
UNGGUL	**3.1**	**Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur**		**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**3,61**	**3,63**	**3,65**	**3,66**	**3,68**	**3,70**	**3,72**

	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
						2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	3.1.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar		Indeks Infrastruktur	Indeks	0,834	0,851	0,867	0,887	0,905	0,921	0,933
	3.1.2	Meningkatnya konektivitas daerah		Rasio Konektivitas	Rasio	0,65	0,65	0,720	0,744	0,765	0,789	0,800
	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik											
KREATIF	**4.1**	**Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	70,29	70,34	70,40	70,45	70,50	70,56	70,61
	4.1.1	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	1	Nilai LHE AKIP Daerah	Nilai	64,82	66,12	67,44	68,79	70,16	71,57	73,00
			2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4.1.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,69	3,78	3,86	3,95	4,02	4,11	4,20
			2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,51	2,6	-	-	-	-	-
			3	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24
	4.1.3	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,41	0,61	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75

	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
						2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Risiko Bencana											
BERKEADILAN	**5.1**	**Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah**	**1**	**Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca**	**Persen**	**N/A**	**2,21**	**2,17**	**2,03**	**1,89**	**1,75**	**1,57**
			2	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**97,69**	**97,67**	**97,65**	**97,63**	**97,61**	**97,59**	**97,57**
	5.1.1	Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,33	69,16	69,47	69,78	70,10	70,41	70,73
			2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca:								
				- Tahunan	Ton CO2eq	N/A	41.054,95	75.421,17	134.746,12	130.592,70	108.225,78	162.503,65
				- Kumulatif	Ton CO2eq	N/A	1.422.849,92	1.498.267,84	1.633.010,73	1.763.600,45	1.871.823,41	2.034.323,15
	5.1.2	Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80

Sumber: hasil analisis, 2025

3.1.5. Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029

Dalam melaksanakan visi dan misi, bupati dan wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025-2029 memiliki program prioritas dengan tagline "RAWA MAKMUR". Rincian masing-masing program prioritas dimaksud, dijelaskan di bawah ini.

Gambar 3.3.
Prioritas Kepala Daerah "RAWA MAKMUR"

Sumber: hasil analisis, 2025

Penjelasan masing-masing program, yaitu:

HSU JUARA

Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui diversifikasi ekonomi, pemberdayaan UMKM dan pengembangan pariwisata.

1. Program OVOC (*One Village One Company*)
   Setiap desa di HSU memiliki satu Perusahaan atau usaha yang dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Perusahaan ini bisa bergerak di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, kerajinan atau pariwisata, sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal.
2. Program OPOP (*One Pesantren One Product*)
   Setiap pesantren di HSU memiliki satu produk unggulan yang diproduksi oleh santri dan dikelola oleh pesantren. Produk ini bisa

berupa kerajinan, makanan atau jasa sesuai dengan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh santri.

3. Program "PROLANDA" (Produk Unggulan Daerah) Naik Kelas
   Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk unggulan daerah sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
4. Program "Festival Budaya HSU"
   Menyelenggarakan festival tahunan yang menampilkan berbagai aspek budaya lokal, seperti tari-tarian tradisional, musik, kerajinan tangan, kuliner dan permainan rakyat. Festival ini bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal kepada masyarakat luas serta mengembangkan sektor pariwisata.

HSU SAJIWA

Mengembangkan masyarakat yang sajiwa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan menghargai perbedaan dan bebas narkoba.

1. Program "BERSULING" (Berjamaah Subuh Keliling)
   Program ini bertujuan untuk memperkuat kebersamaan dan keimanan masyarakat melalui kegiatan salat subuh berjamaah yang dilakukan secara bergiliran di berbagai masjid di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Program "HATI" (HSU Peduli Tanpa Narkoba)
   Program ini bertujuan untuk menangani dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di Hulu Sungai Utara (HSU) melalui pendekatan yang berbasis komunitas, partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.

HSU MADANI

Mewujudkan masyarakat madani dengan penegakan hukum yang adil, transparan dan partisipatif, serta mewujudkan aparatur yang berkualitas.

1. Program "FORUM WARGA"

Program ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagai pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu lokal dan pembangunan daerah.

2. Program "GEMA" (Generasi Maju Aparatur"

   Program yang menargetkan pengembangan kompetensi aparatur muda melalui merit sistem, di mana kinerja, potensi dan inovasi menjadi acuan utama untuk promosi dan penempatan di posisi strategis.

HSU KUAT

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi dan penggunaan teknologi dalam berbagai sektor.

1. Program "Sekolah Untuk Semua"

   Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu hingga sampai sarjana.

2. Program "Dokter Keliling"

   Penyediaan dokter dan kendaraan kesehatan keliling untuk melayani daerah yang sulit dijangkau

3. Program "CERIA" (Cegah Stunting Bersama)

   Program ini bertujuan untuk penanganan stunting, mulai dari edukasi, pemantauan gizi anak, hingga peningkatan akses air bersih dan sanitasi

4. Program "PERAK" (Pemuda Penggerak)

   Program ini bertujuan untuk memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fokus pada peningkatan kapasitas, keterampilan dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang.

5. Program "Revitalisasi Polder Alabio"

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, mempebaiki infrastruktur dan mengatasi tantangan lokal seperti perbedaan elevasi tanah dan banjir. Melalui pendekatan inovatif dan

penggunaan teknologi modern, PRPA berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat setempat.

6. Program "SITANI" (Sistem Pertanian Terintegrasi"
   Mengembangkan sistem pertanian yang mengintegrasikan berbagai jenis tanaman, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Program ini melibatkan pelatihan dan pendampingan petani, penggunaan teknologi modern dan dukungan infrastruktur pertanian.
7. Program "Konservasi Kerbau Rawa"
   Mengembangkan program konservasi dan pemuliaan kerbau rawa sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas peternakan. Program ini mencakup pelatihan peternak, peningkatan fasilitas pemeliharaan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas genetik kerbau rawa
8. Program "Close Loop Itik Alabio"
   Sistem pemeliharaan itik yang berkelanjutan dan terintegrasi di mana semua aspek dari siklus hidup itik, mulai dari pemeliharaan, produksi, hingga pengolahan limbah, dikelola dalam satu sistem tertutup. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi limbah dan memaksimalkan manfaat ekonomi dan lingkungan.
9. Program "Konservasi Perikanan Tangkap"
   Bertujuan untuk menjaga keberlanjutan stok ikan dan kesehatan ekosistem laut melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

HSU MAJU

Mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di HSU.

1. Program "KAYUH JUKUNG" (Konektivitas Wilayah Antar Kampung)

Meningkatkan konektivitas antar kampung di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat dan air, seperti di wilayah danau paminggir.

2. Program "Pasar Induk Regional"
   Membangun pusat distribusi regional yang berfungsi sebagai hub logistik untuk mendistribusikan barang-barang ke seluruh Banua Anam, perbatasan Kalsel-Kaltim dan Kalsel-Kalteng. Pusat ini akan dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan, pengolahan dan trasportasi yang memadai.

HSU LESTARI

Melestarikan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan bencana.

1. Program "KAPLINGAN" (Kampung Peduli Lingkungan)
   Memberikan penghargaan dan insentif bagi kelompok/desa yang berhasil menjaga dan memperindah lingkungan mereka.
2. Program "DESTANA" (Desa Tahan Bencana)
   Meningkatkan kapasitas dan ketahanan desa-desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menghadapi bencana alam.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025-2029 diperlukan strategi yang tepat, dan akan dijabarkan kedalam arah kebijakan. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan akan menjadi panduan dalam menentukan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program perangkat daerah yang terseleksi dan memberi dampak langsung untuk pencapaian sasaran RPJMD.

Program perangkat daerah yang diarahkan sub kegiatannya untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dimuat pada tabel di bawah. Program-progran tersebut akan menjadi bagian dari program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3.3.
Rencana Pelaksanaan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	HSU JUARA		
1	Program OVOC (*One Village One Company*)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Amuntai Utara
2	Program OPO (*One Pesantren One Product*)	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
3	Program "PROLANDA" (Produk Unggulan Daerah) Naik Kelas	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Diskuperindag
		Program Pengunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskuperindag
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	Program "Festival Budaya HSU"	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	HSU SAJIWA		
1	Program BERSULING (Berjamaah Subuh Keliling)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	Program "HATI" (HSU Peduli Tanpa Narkoba)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Amuntai Tengah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Amuntai Tengah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Amuntai Utara
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	HSU KUAT		
1	Program "Sekolah Untuk Semua"	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	Program "Dokter Keliling"	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan UKM UKP	RSUD Pambalah Batung
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
3	Program CERIA (Cegah Stunting Bersama)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan UKM UKP	RSUD Pambalah Batung

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Amuntai Tengah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Amuntai Utara
4	Program "PERAK" (Pemuda Penggerak)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Amuntai Tengah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Amuntai Utara
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Program "Revitalisasi Polder Alabia"	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
6	Program SITANI (Sistem Pengairan Terintegrasi)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
7	Program "Konservasi Kerbau Rawa"	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Pelayaran Sungai Dan Danau	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
8	Program "Close Loop Itik Alabio"	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9	Program "Konservasi Perikanan Tangkap"	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan sumber daya bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	HSU MADANI		
1	Program "Forum Warga"	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat DPRD
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Amuntai Tengah

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Amuntai Utara
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	Program "GEMA" (Generasi Maju Aparatur)	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Perhubungan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat DPRD
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Amuntai Tengah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Amuntai Utara
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	HSU MAJU		
1	Program "Kayuh Jukung"	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	(Konektivitas Wilayah Antar Kampung	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran Sungai Dan Danau	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Amuntai Tengah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	Program "Pasar Induk Regional"	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	HSU LESTARI		
1	Program "KAPLINGAN" (Kampung Peduli Lingkungan)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Pelayaran Sungai Dan Danau	Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Amuntai Tengah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	Program "DESTANA" (Desa Tahan Bencana)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Amuntai Tengah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Amuntai Tengah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Amuntai Utara
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Sumber: hasil analisis, 2025

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Sementara Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Keselarasan strategi dan arah kebijakan yang dipilih

dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025-2029 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.4.
Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatkan kesejahteraan petani	1	Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian
		2	Meningkatkan distribusi dan kualitas prasarana pertanian
		3	Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		4	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		5	Meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
		6	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	7	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
		8	Meningkatkan produksi perikanan budidaya
		9	Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat
	Meningkatkan nilai tambah perdagangan	10	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
	Meningkatkan daya saing industri	11	Meningkatkan pemanfaatan informasi industri
	Mengembangkan sektor unggulan potensial	12	Mengembangkan pariwisata termasuk kebudayaan lokal, serta ekonomi kreatif
	Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif	13	Meningkatkan kemudahan berinvestasi
		14	Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko
		15	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		16	Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal
	Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	17	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	18	Meningkatkan daya saing kepemudaan

MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	19	Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
		20	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi
		21	Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi
		22	Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian
	Meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	23	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial
		24	Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial
		25	Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial
		26	Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana
	Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	27	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	28	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	29	Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan
		30	Menguatkan pemerintahan desa
		31	Meningkatnya pembinaan kecamatan terhadap desa
Misi 2: Mengembangkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berakhlak dan Bebas Narkoba	Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	1	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah
		2	Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan
		3	Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan
	Meningkatkan literasi masyarakat	4	Meningkatkan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
		6	Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan
		7	Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman

MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		8	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	Meningkatkan kualitas keluarga	9	Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	10	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	11	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	12	Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba
	Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat	13	Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	14	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		15	Meningkatkan penempatan tenaga kerja
		16	Meningkatkan perlindungan pekerja
	Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	17	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi
		18	Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi
		19	Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian
		20	Meningkatkan produktivitas koperasi
		21	Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
	Meningkatkan kesetaraan gender	22	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
Misi 3: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
		2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
		3	Meningkatkan aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman

MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	4	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
		5	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
		6	Meningkatkan penyediaan PSU permukiman
	Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	7	Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat dan ASDP
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah daerah
		2	Meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan
	Meningkakan kualitas perencanaan pembangunan daerah	3	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	4	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan
		5	Meningkatkan tata kelola aset daerah
	Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	6	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
	Meningkatkan profesionalitas ASN	7	Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN
	Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan ASN	8	Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional serta teknis
	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis digital	9	Meningkatkan pengelolaan arsip sesuai standar dan berbentuk digital
		10	Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
		11	Meningkatnya penerapan pemerintahan berbasis digital
		12	Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika
	Meningkatnya kualitas layanan	13	Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk

MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	14	Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	15	Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terhadap masyarakat	16	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Risiko Bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
		3	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
		4	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
		5	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
		6	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		7	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup
		8	Meningkatnya tata kelola persampahan
	Meningkatkan kualitas layanan terhadap bencana	9	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penanganan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana
		10	Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana
		11	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir

Sumber: hasil analisis, 2025

Pelaksanaan strategi pembangunan dilakukan secara bertahap. Gambaran besar tahapan pembangunan dibuat dalam bentuk tema

tahunan. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Berdasarkan tema pembangunan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka ditetapkan tema pembangunan tahunan sebagaimana dimuat pada gambar di bawah. Penahapan ini akan dicapai secara berkesinambungan dan dievaluasi setiap tahunnya.

Gambar 3.4.
Penahapan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

Sumber: hasil analisis, 2025

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah dijelaskan sebagai berikut:

Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahap awal pembangunan yang berfokus pada **peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup serta penguatan ekonomi berbasis pertanian**. Perencanaan dan pemetaan potensi wilayah berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan (agrominapolitan) dimatangkan. Penyusunan kelembagaan dan regulasi pendukungnya juga dilakukan pada tahun ini. Pembangunan infrastruktur seperti jalan produksi, jembatan desa, jaringan irigasi, listrik pedesaan, dan konektivitas digital akan menjadi

prioritas, terutama di kawasan terpencil. Di saat yang sama, upaya peningkatan kualitas SDM secara luas akan dilaksanakan. Peningkatan kualitas SDM tidak hanya terbatas melalui pendidikan formal dan non formal, namun termasuk juga pelatihan bagi petani dan nelayan, serta pendampingan desa dalam perencanaan ekonomi berbasis potensi lokal.

Tahun 2027

Pada tahun 2027, pembangunan diarahkan pada **pengembangan sumber daya unggulan yang menopang perekonomian masyarakat dan daerah**. Pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha yang didukung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mulai mengembangkan klaster agrominapolitan secara nyata. Infrastruktur logistik dan transportasi akan diperluas untuk menunjang distribusi hasil pertanian dan perikanan. Jalur transportasi sungai sebagai moda rendah emisi juga mulai ditata ulang. Selain itu, desa-desa prioritas akan difasilitasi menjadi desa digital, dengan layanan publik dan pemasaran hasil produksi berbasis teknologi informasi.

Tahun 2028

Tahun 2028 menjadi fase **pemantapan pelayanan publik untuk percepatan investasi dan kewirausahaan dengan sumber daya manusia yang unggul dan kreatif**. Unit-unit pengolahan hasil pertanian dan perikanan seperti rumah pengasapan ikan, penggilingan padi modern, serta unit produksi olahan itik dan kerajinan lokal akan dikembangkan dan diperkuat. Kebijakan pengembangan wirausaha baik di wilayah perkotaan dan perdesaan akan diperkuat dengan pelibatan koperasi dan UMKM sebagai penggerak hilirisasi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset akan mendorong inovasi teknologi produksi. Desa wisata berbasis pertanian, budaya dan perairan (agrowisata dan minawisata) juga dikembangkan sebagai bentuk diversifikasi ekonomi kreatif masyarakat.

Peningkatan investasi daerah dilakukan secara terpadu termasuk dalam pemberian pelayanan publik yang prima dan berbasis digital. Penerapan e-government serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM ASN menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan pada tahun ini.

Tahun 2029

Pada tahun ini, fokus pembangunan diarahkan untuk **percepatan pengembangan agrominapolitan penopang sistem logistik di Kalimantan Selatan**. Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai memantapkan posisinya dalam jaringan logistik Kalimantan Selatan dengan menyambungkan hasil produksi ke pusat-pusat distribusi provinsi seperti Banjarmasin dan Batulicin. Sistem distribusi berbasis digital mulai diterapkan, sehingga efisiensi dan mutu produk dapat dijaga. Kerja sama antar-kabupaten untuk mendukung ekspor hasil pangan, ikan, dan produk olahan diperkuat. Wilayah-wilayah agrominapolitan akan difasilitasi sebagai koridor ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan rendah emisi.

Tahun 2030

Tahun 2030 menjadi puncak dan konsolidasi pembangunan daerah, dengan tujuan menjadikan Hulu Sungai Utara sebagai pusat agrominapolitan, penopang logistik Kalimantan Selatan. Sistem ekonomi terintegrasi dari hulu (produksi), tengah (pengolahan), hingga hilir (distribusi dan pemasaran) telah terbentuk. Infrastruktur logistik, energi, dan digitalisasi layanan publik telah menyatu secara efektif di seluruh kecamatan. Masyarakat desa menjadi bagian dari rantai pasok modern yang berbasis inovasi dan inklusi sosial. Selain itu, kualitas hidup masyarakat meningkat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih merata. Diharapkan pada tahap ini, Kabupaten Hulu Sungai Utara siap berkontribusi sebagai penopang ketahanan pangan dan logistik Provinsi Kalimantan Selatan.

Upaya transformasi super prioritas (*Game Changers)* pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 yang merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Perluasan upaya promotif-preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat dan berolahraga.
2. Perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan stunting dan masalah gizi lainnya.
3. Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan serta diversifikasi kesehatan medis.
4. Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
5. Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.
6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman.
7. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
8. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
9. Pelaksanaan pelatihan *reskilling* dan *upskilling* dan transisi *school-to-work.*
10. Pengembangan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai upaya menciptakan agrominapolitan yang berkelanjutan.
11. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
12. Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.

13. Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
14. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
15. Pengembangan sistem pengendali banjir yang memadai, termasuk solusi berbasis alam (*natural based solution*).
16. Peningkatan jaringan transportasi darat maupun sungai
17. Pengembangan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang memadai.

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan daerah, ditetapkan *highlight* intervensi kewilayahan. Terdapat beberapa *highlight* indikasi intervensi untuk mewujudkan target-traget pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2025-2029. Pemerintah dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 memberikan arahan indikasi intervensi tersebut. Adapun *highlight* indikasi intervensi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.5.
***Highlight* Indikasi Intervensi Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

***Highlight* Indikasi Intervensi**
Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui:
– Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan output: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk
– Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output: kawasan karet
– Penguatan pascapanen pangan nabati, dengan output: sarana pascapanen tanaman perkebunan
– Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul
– Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output: intervensi cetak sawah
Pengembangan ekowisata kelas dunia di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, melalui:
– Pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Meratus dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja

***Highlight* Indikasi Intervensi**
– Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Lebih lanjut, dalam mempercepat pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah provinsi akan mengembangkan 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu:

1. Klaster Banjarbakula, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
2. Klaster Banua Anam, meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin.
3. Klaster Saijaan Bersujud, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi bagian dalam Klaster Banua Anam. Dengan demikian, strategi pengembangan kewilayahan Kabupaten Hulu Sungai Utara akan dilakukan dengan memperhatikan arahan pengembangan Klaster Banua Anam. Adapun arahan pengembangan Kluster Banua Anam sebagaimana dimuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, diuraikan sebagai berikut:

a. Arah Pengembangan Kawasan

Klaster Banua Anam merupakan wilayah yang memiliki kondisi hamparan wilayah yang cukup heterogen yang terdiri dari hamparan pegunungan sampai dataran rawa dan memberikan nilai strategis yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Rawa Batang Banyu dan KSP Pegunungan Meratus. KSP Rawa Batang Banyu diarahkan untuk pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan. Adapun KSP Pegunungan Meratus bertujuan sebagai pusat keanekaragaman hayati

melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Arah pengembangan kawasan pada Klaster Banua Anam sebagai berikut:

1) Mendorong pengembangan "Sentra Pangan Lestari", dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.
2) Pengembangan hilirisasi industri hasil pertanian terutama komoditas padi, tanaman holtikultura, dan perkebunan karet serta pengolahan produk turunannya.
3) Pengembangan kawasan transit, simpul transportasi dan perdagangan dalam pengembangan sistem logistik untuk menunjang distribusi logistik dan angkutan penumpang dengan memperhatikan potensi interaksinya terhadap Ibukota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah, terutama pada kawasan perbatasan antar provinsi.
4) Sebagai salah satu kawasan bernilai konservasi tinggi dan memiliki kekayaan geologi bernilai internasional, Klaster Banua Anam berpotensi dikembangkan sebagai kawasan konservasi, kawasan pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif dengan skala global.
5) Pengembangan geosite dan kawasan sekitarnya dalam mendukung pengembangan UNESCO Global Geopark Meratus.
6) Perwujudan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Agrowisata Hortikultura di Kabupaten Tabalong.
7) Terkait pengelolaan sampah untuk dapat memaksimalkan penerapan Prinsip 5R (*Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Rot*).
8) Meminimalkan sampah hingga menjadi residu sekecil mungkin.

b. Arah Pengembangan Infrastruktur

1) Peningkatan layanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dalam mengintegrasikan pusat produksi dan pusat distribusi, salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan jalan lintas.
2) Pengembangan infrastruktur dalam mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian dan ketahanan pangan melalui pembangunan dan pengembangan daerah irigasi permukaan/rawa serta pembangunan tampungan air (bendung/bendungan).
3) Peningkatan layanan prasarana dan sarana yang mendukung UNESCO Global Geopark Meratus dan pariwisata unggulan, seperti pengembangan/penataan kawasan pariwisata dan sekitarnya, penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta peningkatan amenitas pariwisata seperti penyediaan akomodasi, tempat makan dan minum, tempat ibadah, toilet umum, tempat parkir dan area peristirahatan, dan fasilitas lainnya yang memudahkan aktivitas wisatawan.
4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, salah satunya pengembangan pemenuhan dan pelayanan air minum pada Klaster Banua Anam.
5) Pengembangan transportasi publik baik angkutan umum massal maupun non massal yang terintegrasi sampai ke pelosok.
6) Mendorong pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir.
7) Pengembangan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yaitu pembangunan lumbung pangan dan pembangunan sarana prasarana energi berkelanjutan.

Arahan dan indikasi intervensi pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dimuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, yaitu:

a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
   - Penguatan sistem pusat kegiatan perkotaan dan sistem logistik yang mengintegrasikan koridor ekonomi Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur.
   - Penguatan pertanian dan sistem tani terpadu dengan prioritas pengembangan rantai nilai produksi pertanian lahan rawa dengan komoditas padi.
   - Pengembangan peternakan itik alabio dengan prioritas pengembangan sentra pembibitan, pakan, dan pengolahan produk unggas lokal dengan komoditas unggulan telur asin, daging itik dan rendang itik. Promosi Itik Alabio sebagai ikon ekonomi dan *branding* daerah.
   - Penguatan perikanan air tawar dan hilirisasinya dengan prioritas pengembangan rantai nilai perikanan air tawar mulai dari unit pembenihan, pakan ikan lokal, pengolahan hasil perikanan (bakso ikan, abon, nugget, dendeng ikan), distribusi dan pemasaran.
   - Pengembangan pariwisata budaya dan ekowisata dengan prioritas penataan kawasan wisata budaya Candi Agung Amuntai, wisata kerbau rawa, fasilitasi wisata susur sungai dan wisata pertanian lahan basah.
   - Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dengan prioritas peningkatan kapasitas produk kerajinan purun dan makanan khas lokal untuk pasar nasional. Promosi melalui berbagai festival seni budaya dan ekonomi kreatif.
   - Pembangunan kawasan ekonomi terpadu berbasis desa agropolitan dan minapolitan didukung revitalisasi infrastruktur ekonomi dengan prioritas perbaikan jalan usaha tani, pasar produksi, dan fasilitas distribusi hasil pertanian dan perikanan.
   - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).

b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
   - Peningkatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi dengan prioritas: Pelatihan dan Pendidikan keterampilan petani, UMKM dan wirausaha pemula. Penguatan koperasi, BUMDes, dan kelompok ekonomi produktif desa.

c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
   - Adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lahan basah dengan prioritas penerapan pertanian adaptif terhadap banjir dan perubahan iklim, pengembangan program konservasi rawa/gambut dan pengendalian banjir berbasis masyarakat.
   - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
   - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
   - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan
   - Mendorong pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir

Terdapat beberapa program prioritas fisik yang dilengkapi dengan lokasi diusulkan dalam pembangunan sampai dengan 2030. Program fisik ini dilakukan dengan mempertimbangkan arahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai. Selain program prioritas tersebut, terdapat program-program lainnya yang juga perlu untuk dimasukkan dalam RPJMD, namun yang diusaulkan di bagian ini adalah yang paling penting dan sangat dibutuhkan.

Adapun rekomendasi program prioritas tersebut, yaitu:

1. Pembuatan Sodetan Sungai Balangan di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju Sungai Terasi di Desa Beringin Kecamatan Banjang dan terus menuju Kecamatan Daha Utara (Negara) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Normasilisasi Sungai Harus sampai dengan Sungai Danau Panggang Tembus ke Sungai Barito.

3. Pembuatan Embung/Waduk di Desa Mawar Sari Kecamatan Amuntai Tengah.
4. Pembuatan Aliran Sungai Baru (Sodetan)

Nilai Investasi/ Kebutuhan Pembiayaan	:	± Rp. 100 Milyar
Lokasi	:	Kec. Amuntai Utara - Kec. Paminggir, Kab. HSU
Spesifikasi Teknis	:	Panjang sungai ± 60 km, lebar ±20 meter, kedalaman ±10 meter
	:	
Kelengkapan RC	:	Sudah pernah dilakukan perencanaan https://drive.google.com/drive/folders/1K30THeYDKfRT--nleejfH1cxQYZzA7iw
Nilai Strategis	:	Pembuatan aliran sungai baru untuk memecah sungai balangan dan sungai tabalong, agar tidak banjir di Kab. HSU apabila debit air sama-sama tinggi pada kedua sungai Mendukung Kelancaran Ekonomi untuk penyangga IKN
Progress Fisik	:	Belum ada dilakukan
Tindak Lanjut	:	Masih tahap pengusulan ke Pemerintah Pusat

5. Normalisasi Sungai Negara

Nilai Investasi/ Kebutuhan Pembiayaan	:	± Rp. 100 Milyar
Lokasi	:	Kec. Amuntai Tengah - Kec. Babirik, Kab. HSU
Spesifikasi Teknis	:	Panjang sungai ± 38 km, lebar ±20 meter, kedalaman ±10 meter
	:	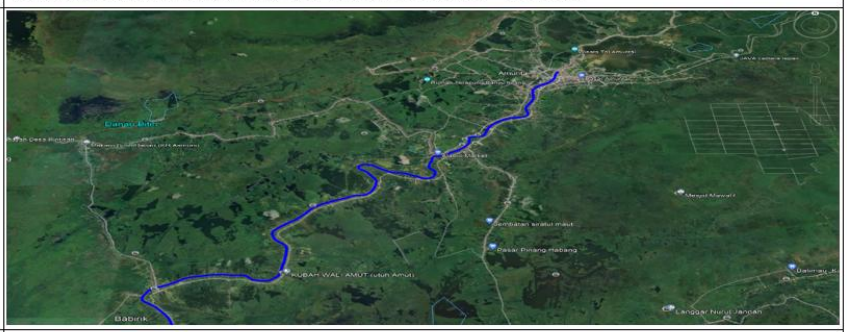
Kelengkapan RC	:	Belum ada dilakukan
Nilai Strategis	:	Pembuatan aliran sungai baru untuk memecah sungai balangan dan sungai tabalong, agar tidak banjir di Kab. HSU apabila debit air sama-sama tinggi pada kedua sungai Mendukung Kelancaran Ekonomi untuk penyangga IKN
Progress Fisik	:	Belum ada dilakukan
Tindak Lanjut	:	Masih tahap pengusulan ke Pemerintah Pusat

6. Perkuatan Tebing Sungai

Nilai Investasi/ Kebutuhan Pembiayaan	:	± Rp. 100 Milyar
Lokasi	:	Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang, Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah, Desa Beringin, Desa Banjang, Desa Kalintamui, Desa Pelanjungan Sari, Desa Kaludan Besar, Desa Klaudan Kecil, Desa Karias Dalam, Desa Pasar Senin, Desa Rantauwan, Desa Tapus, Desa Sungai Kuini Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjang, Kab. HSU
Spesifikasi Teknis	:	Pembuatan penahan tebing sungai agar tidak terjadi longsor
	:	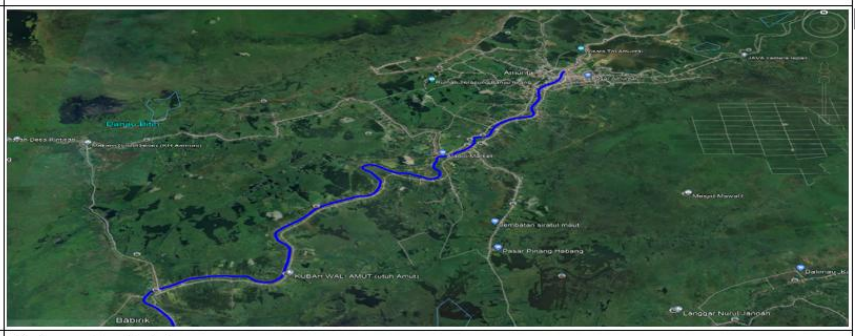
Kelengkapan RC	:	Belum ada dilakukan
Nilai Strategis	:	Mendukung Kelancaran Ekonomi untuk penyangga IKN
Progress Fisik	:	Belum ada dilakukan
Tindak Lanjut	:	Masih tahap pengusulan ke Pemerintah Pusat

3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci. Faktor-faktor tersebut merupakan hasil (outcome) yang akan dicapai oleh perangkat daerah dengan bersinergi dan kolaborasi baik dengan perangkat daerah lainnya maupun dengan pemangku kepentingan non pemerintah daerah kabupaten. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran. Berangkat dari outcome yang akan dicapai, maka dapat ditentukan program prioritas yang tepat.

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungau Utara Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.6.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Visi: HSU BANGKIT (Hulu Sungai Utara Berkeadilan, Unggul dan Kreatif) sebagai Pusat Agrominapolitan Penopang Logistik Kalimantan Selatan					
1	**Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing**				
1.1	**Meningkatkan perekonomian yang kuat dan stabil**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		
			Indeks Gini		
1.1.1	**Berkembangnya Agrominapolitan menuju Hilirisasi Sumber Daya Alam**		**PDRB Per Kapita**		
			Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan		
			Nilai PDRB Sektor Pertanian		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
			Produksi Tanaman Hortikultura		
			Produksi Tanaman Perkebunan		
			Produksi Komoditas Peternakan		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang aman dan layak dikonsumsi		
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		
		Meningkatnya kualitas dan kepemudaan perizinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelompok Tani Naik Kelas	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Peningkatan Pangan Segar yang Aman	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase kinerja realisasi pupuk		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		
		Meningkatnya Volume Perdagangan ProdukUnggulan di Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri	Persentase pertumbuhan volume perdagangan produk unggulan dalam dan luar negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Informasi Industri yang Disajikan secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1.1.2	**Meningkatnya investasi dan kewirausahaan**		**Nilai Realisasi Investasi Daerah**		
			Rasio Kewirausahaan		
		Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Promosi yang diikuti	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	jumlah pelayanan yang diberikan/dikeluarkan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan informasi yang dikelola	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjalin kemitraan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Cakupan promosi pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.1.3	**Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran**		**Tingkat Kemiskinan**		
			Tingkat Pengangguran Terbuka		
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
		Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
		Meningkatnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi		
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan layanan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
		Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatanya perlindungan terhadap pekerja	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.1.4	**Meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan**		**Indeks Desa**		
		Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Seluruh Kecamatan
		Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Seluruh Kecamatan
2	**Misi 2: Mengembangkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berakhlak dan Bebas Narkoba**				
2.1	**Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia**		**Indeks Pembangunan Manusia**		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.1.1	**Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat**		**Rata-Rata Lama Sekolah**		
			Harapan Lama Sekolah		
			Usia Harapan Hidup		
			Cakupan perawatan penyalahgunaan narkoba		
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas	Persentase Sekolah yang Memenuhi Standar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan berprestasi untuk mendapatkan layanan pendidikan	Persentase kesempatan peserta didik miskin dan berprestasi untuk mendapatkan layanan pendidikan		
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase kesempatan peserta didik miskin dan berprestasi untuk mendapatkan layanan pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal dalam mendukung pelaksanaan kurikulum nasional		
		Meningkatkan Pengelolaan pusat data dan informasi terkait cagar budaya di kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase Pengembangan Seni Budaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Terlestarikannya cagar budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		
			Rasio daya tampung rumah sakit rujukan		
			Status Akreditasi Rumah Sakit		
			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (SO)		
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup		
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap		
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)		
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis		
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
			Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV		
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
			Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Persentase Persalinan di Fasyankes		
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar		
			Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita		
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sedian farmasi, alat kesehatan, dan makan minum	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah		
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)*	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
			Skor PPH Ketersediaan		
			Skor PPH Konsumsi		
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO		
		Meningkatnya keterampilan pengembangan perempuan	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah Prestasi Olahraga Tk.Provinsi, Nasional dan Internasional	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan Kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.1.2	**Meningkatnya keharmonisan sosial**		**Indeks Harmoni Indonesia**		
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang difasilitasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat	Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah, Bagian Kesra
		Meningkatnya kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum		Sekretariat Daerah, Bagian Hukum
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah		Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.3	**Meningkatnya kualitas keluarga dan pengarusutamaan gender**		**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**		
			Indeks Ketimpangan Gender		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO		
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO		
		Meningkatnya keterampilan pengembangan perempuan	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
3	**Misi 3: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah**				
3.1	**Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur**		**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**		
3.1.1	**Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar**		**Indeks Infrastruktur**		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya penanganan dan pencegahan banjir Sub Daerah Aliran Sungai	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rata - rata penurunan ketinggian genangan banjir		
		Meningkatnya Kinerja Irigasi	Nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) Meningkat		
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
		Meningkatnya Layanan Air Bersih	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rumah tangga dengan akses air minum aman		
		Berkurangnya Pencemaran Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman		
		Meningkatnya Sistem Drainase yang berfungsi baik di Wilayah Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang berfungsi baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Bangunan Gedung yang sesuai dengan RTR	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		
		Meningkatnya Penataan Kawasan Strategis	Meningkatnya Penataan Kawasan Strategis	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		
		Meningkatnya Wilayah yang Telah Mempunyai Rencana Detail Tata Ruang	Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Mantap		
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Tersedianya tanah untuk masyarakat		
		Meningkatnya Penetapan Tanah dan Lokasi untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
			Persentase rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		
		Meningkatnya kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
3.1.2	**Meningkatnya konektivitas daerah**		**Rasio Konektivitas**		
		Meningkatnya Sarana Prasarana Lalu Lintas	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Terpenuhinya Mobilitas pada Angkutan Massal	V/C Rasio		
		Meningkatnya Kendaraan Umum Laik Jalan	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji		
		Meningkatnya Kesadaran Pengguna Jalan Raya	Persentase Pengguna Jalan yang Tertib Berlalu Lintas		
		Meningkatnya Kualitas Dermaga Pelabuhan	Persentase Dermaga/Pelabuhan dalam kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Pengguna Transportasi Sungai dan Danau	Persentase Pengguna Angkutan Sungai dan Danau Terlayani dengan baik		
4	**Misi 4: Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik**				
4.1	**Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi**		**Indeks Reformasi Birokrasi**		
4.1.1	**Meningkatnya kinerja pemerintah daerah**		**Nilai LHE AKIP Daerah**		
			Opini BPK		
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Seluruh SKPD
			Persentase kegiatan pimpinan yang di fasilitasi keprotokolan		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Persentase Penyelesaian Penyusunan LAKIP Kabupaten		
			Persentase Penyelesaian Penyusunan LAKIP Setda		
			Persentase PD dengan standar pelayanan publik yang sesuai		
		Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang termanfaatkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Bappedalitbang
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			Persentase Alokasi Belanja Infrastuktur Pelayanan Publik		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Persentasi Dokumen yang dipublikasi di website pemda		
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib pelayanan dasar		
			Persentase Penurunan SILPA		
			Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		
			Rasio PAD		
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)		
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		
			Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD		
			Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya		
			Persentase Informasi tentang Anggaran untuk Unit Pelayanan yang dapat diakses di website pemda		
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat waktu dan sesuai SAP		
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan nilai aset tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			Manajemen Aset		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
			Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP		
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
4.1.2	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima**		**Indeks Pelayanan Publik**		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
			Indeks Pemerintahan Digital		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kab/Kota		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Layanan TIK yang Sesuai Standar Pemerintah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan sesuai standar Pemerintah Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan olejh dinas kominfo		
			Persentase Dokumen Perencanaan terkait Pemerintah Digital yang dibuat		
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga		
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran yang dilaporkan		
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pelestarian Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Koleksi Budaya Etnis Nusantara / Naskah Kuno yang Dimiliki	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan
		Meningkatnya Ketersediaan Arsip Sesuai Standar Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan
		Meningkatnya Perlindungan Arsip Untuk Menjamin Keselamatan Sesuai Standar Kearsipan Nasional	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan SDA

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektifitas kebijakan administrasi pembangunan		Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan
		Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ		Sekretariat Daerah Bagian PBJ
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Amuntai Tengah
		Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Nilai IKM Kecamatan		Kec. Amuntai Utara
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan		Kec. Amuntai Selatan
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat		Kec. Sungai Pandan
		Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat		Kec. Babirik
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat		Kec. Danau Panggang
		Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat		Kec. Banjang

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Persentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat		Kec. Paminggir
		Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Persentase meningkatnya tertib administrasi pelayanan masyarakat		Kec. Sungai Tabukan
		Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat		Kec. Haur Gading
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah		**Indeks Sistem Merit**		
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi		
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai kompetensinya		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai BAIK		
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis		
5	**Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Risiko Bencana**				
5.1	**Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah**		**Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca**		
			Indeks Risiko Bencana		
5.1.1	**Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: **- Tahunan** **- Kumularif**		

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya keselarasan kebijakan lingkungan hidup dengan dokumen perencanaan lain	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau dalam kondisi baik	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap kebijakan lingkungan hidup	Persentase penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang aktif	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yang didapatkan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya penyelesaian terhadap sengketa/kasus lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Persentase sampah yang ditangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		
5.1.2	**Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana**		**Indeks Kapasitas Daerah**		
		Meningkatnya kualitas layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya layanan waktu tanggap penanganan kebakaran dan penyelamatan	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	MISI, TUJUAN, & SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial

Sumber: hasil analisis, 2025

3.2.3. Dukungan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional

Sinergi pembangunan pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Program Strategis Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka diharapkan semua pelaku pembangunan dapat terlibat aktif.

Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Program Strategis Nasional, meliputi:

a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
    1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan
    2) Kemiskinan Ekstrem;
    3) Sekolah Rakyat; dan
    4) Pembangunan 3 Juta Rumah.
b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
    1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
    2) Makan Bergizi Gratis.
d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:

1) Pengendalian Inflasi;
2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
3) Kemudahan perizinan di daerah.

f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mendukung dan akan melaksanakan Program Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Teknis pelaksanaan masing-masing program prioritas akan dimuat dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, sesuai arahan Pemerintah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Sub bab ini memuat program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Proses penentuan program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dilakukan dengan penjenjangan kinerja termasuk penentuan kinerja *outcome* yang akan dicapai.

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Dapat dikatakan bahwa kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi bupati dan wakil bupati serta mendukung target pembangunan provinsi dan nasional. Dalam pelaksanaan berbagai program perangkat daerah, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mendorong partisipasi dan kolaborasi pendanaan yang bersumber dari non APBD kabupaten.

Pencapaian outcome program perangkat daerah akan didukung oleh pencapaian output kegiatan dan sub kegiatan yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah. Rencana program perangkat daerah mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 dimuat dalam tabel di bawah.

Tabel 4.1.
Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	PENDIDIKAN						**300.173.825.903**		**324.201.367.836**		**325.669.822.636**		**327.620.202.486**		**329.804.423.696**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	270.958.265.453,00	100	276.326.335.364	100	276.366.456.805	100	276.271.438.037	100	276.176.459.409	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**															
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas	Persentase Sekolah yang Memenuhi Standar	Persen			88	10.429.139.250,00	90	23.564.705.983	92	24.033.081.342	93	25.945.011.267	94	28.096.806.787	
	Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan berprestasi untuk mendapatkan layanan pendidikan	Persentase kesempatan peserta didik miskin dan berprestasi untuk mendapatkan layanan pendidikan	Persen			90	296.250.000,00	91	179.102.200	92	179.102.200	93	179.702.200	94	179.702.200	
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen			92	5.701.834.800,00	93	9.733.479.400	94	10.423.712.400	95	10.398.797.082	96	10.306.201.400	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen			86		88		90		92		94		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen			91		92		93		94		95		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen			91		92		92		93		94		
	Meningkatnya Kualitas Siswa	Persentase siswa yang berprestasi	Persen			85	12.441.450.000,00	86	13.674.237.800	87	13.843.962.800	88	13.898.000.000	89	14.018.000.000	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**															
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	-	0,85	0,87		0,9		0,93		0,95		0,95		
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	60,27	60,27	64,81	346.886.400,00	67,08	623.507.089	69,35	623.507.089	71,62	627.253.900	73,89	627.253.900	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**															
	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Nasional	Persen					70	100.000.000	72	200.000.000	74	300.000.000	75	400.000.000	
	KESEHATAN						**493.769.138.937**		**485.589.412.593**		**488.479.817.360**		**491.393.496.708**		**494.330.655.234**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	83,85	90	90	248.312.411.693,00	90	255.417.289.309,00	90	258.237.783.295,00	90	259.809.807.255,00	90	261.215.626.269,00	
		Nilai Pendapatan Daerah BLUD	Rupiah		89.870.514.806	71.728.106.000,00		74.417.360.000		76.727.610.000		79.049.522.000		81.421.075.000		
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**															
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Persalinan di Fasyankes	Persen	147	88	89	62.607.208.187,00	90	63.844.239.852,00	91	65.040.470.900,00	92	65.812.258.303,00	93	65.792.899.937,00	
		Angka Kematian Neonatal	Per 1.000 KH	15,1	15	14.9		14.8		14.7		14.6		14.5		
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	18	18	16.34		15.51		14.68		13.85		13.50		
		Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (SR)	Persen	84	90	90		90		90		90		90		
		Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang	Persen	96.4	74	80		87		94		95		95		

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Mendapatkan Pengobatan ARV														
		Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita	Persen	23.5	23.2	23		22.8		22.6		22.4		22		
		Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	70	75	80		85		90		95		100		
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	72,5	80	88		90		95		95		95		
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	99.89	98	98		98.2		98.4		98.6		98.9		
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	-	20	20		25		30		35		40		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	78.73	100	100		100		100		100		100		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	85.9	100	100		100		100		100		100		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	84.3	100	100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	92.12	100	100		100		100		100		100		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	99.51	100	100		100		100		100		100		
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	67.55	100	100		100		100		100		100		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	Persen	85.1	100	100		100		100		100		100		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	99.7	100	100		100		100		100		100		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	112.6	100	100		100		100		100		100		

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	102.97	100	100		100		100		100		100		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	114.36	100	100		100		100		100		100		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	107.47	100	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persen	100	100	100	177.391.948.911,00	100	160.125.023.086,00	100	158.610.304.819,00	100	158.934.494.786,00	100	160.226.349.580,00	
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Indeks	84.88	85	85		85,5		85,5		86		86		
		Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
		Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Angka	Utama	Utama	Utama		Utama		Paripurna		Paripurna		Paripurna		
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1000 Penduduk	1.2	1.5	1.62		1.7		1.8		1.9		2		
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
4	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**															
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	Persen	75	80	80	4.330.370.146,00	100	5.256.018.346,00	100	5.556.018.346,00	100	5.704.982.014,00	100	5.859.393.863,00	
		Persentase RS Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	Persen													
5	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**															
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan	Persentase Cakupan Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	92,5	100	80	136.700.000,00	80	98.327.000,00	80	117.685.000,00	80	138.742.000,00	80	159.800.000,00	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	-	100	100		100		100		100		100		
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	-	100	100		100		100		100		100		
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**															
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas)	Persen	-	40	45	990.500.000,00	50	848.515.000,00	55	917.555.000,00	60	993.212.350,00	65	1.076.585.585,00	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**163.955.404.700**		**166.580.069.750**		**167.571.614.902**		**168.571.144.332**		**169.578.728.228**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	10.813.583.720	100	12.456.897.808	100	11.621.327.100	100	11.643.605.091	100	11.653.801.291	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**															
	Meningkatnya penanganan dan pencegahan banjir Sub Daerah Aliran Sungai	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	27,74	28,32	29,83	26.515.995.780	31,44	20.300.000.000	33,16	20.300.000.000	35,04	20.500.000.000	37	20.500.000.000	
		Persentase rata - rata penurunan ketinggian genangan banjir	Persen	9,83	10,82	11,9		13,09		14,4		15,84		17,42		
	Meningkatnya Kinerja Irigasi	Nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) Meningkat	Persen	32,69	33,67	34,34	15.573.970.000	35,03	19.000.000.000	35,73	20.000.000.000	36,45	20.200.000.000	37,17	20.220.000.000	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	60,09	60,13	60,15		60,18		60,22		60,27		60,33		
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya Layanan Air Bersih	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Persen	92,45	94	95	3.650.908.200	97	6.500.000.000	99	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.500.000.000	
		Rumah tangga dengan akses air minum aman	persen	0	0	0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**															
	Berkurangnya Pencemaran Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	93,95	95	96	9.676.190.200	98	10.900.000.000	99	11.100.000.000	100	11.100.000.000	100	11.100.000.000	
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	0	0,01	0,03		0,14		0,27		0,4		0,53		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**															
	Meningkatnya Sistem Drainase yang berfungsi baik di Wilayah Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	4,33	12,5	20,83	2.000.000.000	33,33	5.000.000.000	45,83	4.500.000.000	58,33	4.500.000.000	58,33	4.500.000.000	
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**															
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang berfungsi baik	Persen	78,11	80,91	83,69	29.651.028.000	86,48	30.913.171.942	89,27	31.140.287.802	92,06	31.717.539.241	92,06	31.694.926.937	
	Meningkatnya Bangunan Gedung yang sesuai dengan RTR	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	37,14	50	20,83	417.438.000	33,33	710.000.000	45,83	710.000.000	58,33	710.000.000	58,33	710.000.000	
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**															
	Meningkatnya Penataan Kawasan Strategis	Persentase Kawasan Strategis yang Memiliki PSU dalam Kondisi Baik	Persen	8	10	30	13.140.714.000	50	3.000.000.000	65	3.000.000.000	80	3.000.000.000	95	3.000.000.000	
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**															
	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	56,34	57,75	59,2	51.010.000.000	60,65	56.000.000.000	62,1	56.500.000.000	63,55	56.500.000.000	65	57.000.000.000	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	98,99	99	99,2		99,4		99,6		99,8		100		
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**															
	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	8,8	10	12,5	489.650.000	15	700.000.000	17,5	700.000.000	20	700.000.000	22,5	700.000.000	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100		100		100		100		100		100		
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**															
	Meningkatnya Wilayah yang Telah Mempunyai Rencana Detail Tata Ruang	Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR	Persen	0	0	10	1.015.926.800	15	1.100.000.000	40	1.000.000.000	55	1.000.000.000	60	1.000.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**21.083.092.193**		**11.825.766.494**		**11.896.157.756**		**11.967.115.835**		**12.038.645.712**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	94,22	100	100	7.703.709.493	100	7.855.681.200	100	7.904.555.330	100	7.954.045.391	100	8.004.158.557	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**															
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	185.735.500	100	185.926.102	100	186.081.632	100	186.238.094	100	186.395.496	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100		100		100		100		100		

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Persentase rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		100	100	100		100		100		100		100		
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**															
	Meningkatnya kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0,05	0	0,05	202.600.000	0,11	203.795.340	0,14	204.997.733	0,16	206.207.219	0,19	207.423.842	
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**															
	Meningkatnya kualitas kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,4	7,02	6,14	10.486.552.000	5,92	2.728.570.180	5,69	2.744.160.790	5,47	2.759.667.308	5,24	2.775.087.327	
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**															
	Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) permukiman	Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	2.504.495.200	100	851.793.672	100	856.362.271	100	860.957.823	100	865.580.490	
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**22.786.023.857**		**22.536.680.163**		**22.670.826.679**		**22.806.053.390**		**22.942.369.794**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	82,3	82,31	82,32	10.931.792.896	82,33	10.737.039.616	82,34	10.778.591.663	82,35	10.820.807.395	82,36	10.863.692.691	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	412.255.000	100	410.803.000	100	420.803.000	100	430.803.000	100	440.803.000	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	1.884.795.000	100	1.680.326.992	100	1.741.786.307	100	1.774.090.686	100	1.806.406.587	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**															
	Meningkatnya layanan waktu tanggap penanganan kebakaran dan penyelamatan	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	10,5	15	15	365.279.000	15	372.505.000	15	372.505.000	15	372.505.000	15	372.505.000	
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	897.132.200	100	885.319.900	100	856.153.500	100	856.153.500	100	856.153.500	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Nilai	82,10	82,15	82,16	Rp4.332.370.861	82,17	Rp4.501.265.136	82,18	Rp4.588.640.737	82,19	Rp4.594.023.215	82,20	Rp4.606.412.605	
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**															
	Meningkatnya kualitas layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	Rp175.202.400	100	Rp349.084.300	100	Rp175.198.400	100	Rp155.198.400	100	Rp165.198.401	
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	Rp1.137.453.000	100	Rp774.132.100	100	Rp867.317.100	100	Rp945.887.400	100	Rp895.317.100	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	Rp2.162.652.000	100	Rp2.202.722.870	100	Rp2.176.722.870	100	Rp2.161.722.870	100	Rp2.234.722.870	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	Rp487.091.500	100	Rp623.481.249	100	Rp693.108.102	100	Rp694.861.924	100	Rp701.158.040	
	SOSIAL						**15.982.886.565**		**15.102.245.194**		**15.192.139.249**		**15.282.757.164**		**15.374.105.301**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Sosial

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	80,6	80,8	81	6.501.681.065	81,15	6.637.855.594	81,18	6.412.371.292	81,2	6.450.632.361	81,25	6.489.201.857	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**															
	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	82,64	33,64	33,64	1.311.984.200	33,64	772.211.000	33,64	796.104.738	33,64	796.224.206	33,64	796.344.272	
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**															
	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	90,55	38,34	38,89	3.038.244.200	42,81	3.204.653.200	43,3	3.325.575.429	43,71	3.345.418.161	44,14	3.365.420.915	
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**															
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	94,35	100	100	4.120.463.400	100	3.473.109.880	100	3.601.311.978	100	3.623.796.124	100	3.646.461.237	
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	5,91	3,87	4,02		4,19		4,38		4,58		4,8		
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**															
	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	821.614.700	100	825.396.600	100	861.913.192	100	871.794.473	100	881.755.816	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**															
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan layanan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100	188.899.000	100	189.018.920	100	194.862.620	100	194.891.839	100	194.921.204	
	TENAGA KERJA						**2.389.700.275**		**1.345.358.472**		**1.353.366.535**		**1.361.439.081**		**1.369.576.679**	
1	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	1.364.233.375	100	750.000.000	100	753.000.000	100	757.000.000	100	762.000.000	Terpadu Satu Pintu
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
2	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**															
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	2.11	4	4	76.684.200	4	92.858.472	5	95.366.535	5	97.439.081	5	96.576.679	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah /orang	Na	31.540.000	32.000.000		32.500.000		33.500.000		34.000.000		35.000.000		
3	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**															
	Meningkatanya perlindungan terhadap pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	2.307	15	20	948.782.700	25	502.500.000	30	505.000.000	35	507.000.000	40	511.000.000	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**5.556.198.926**		**4.981.458.054**		**5.011.109.504**		**5.040.999.718**		**5.071.130.795**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	4.459.680.226	100	4.259.442.100	100	4.254.877.554	100	4.259.442.100	100	4.181.898.845	
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**															
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	Persen	8,71	15	20	482.070.750	25	227.681.569	30	240.073.650	35	251.073.650	40	256.073.650	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	94.048.100	100	81.256.500	100	86.256.500	100	91.256.500	100	95.256.500	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Rasio	15,09		11,61		11,61		12,27		12,27		13,93		
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**															
	Meningkatnya keterampilan pengembangan perempuan	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Layanan	744	550	800	119.323.600	900	109.532.200	920	114.532.200	940	114.857.868	980	204.532.200	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	Belum ada	-	Na		Na		Na		Na		Na		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**															
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	11.927.600	100	11.927.800	100	11.927.800	100	11.927.800	100	11.927.800	
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**															
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	Hasil BPS	60,00	60,14	250.470.350	60,24	185.739.200	60,34	194.739.200	Hasil BPS	200.739.200	Hasil BPS	206.739.200	
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**															
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	138.678.300	100	105.878.685	100	108.702.600	100	111.702.600	100	114.702.600	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	0,00034		0,022		0,022		0,024		0,024		0,025		
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	Hasil BPS	72,47	73,62		74,60		75,45		Hasil BPS		Hasil BPS		
	PANGAN						**7.229.166.983**		**6.260.024.673**		**6.297.286.616**		**6.334.848.606**		**6.372.713.280**	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	N/A	100	100	4.908.006.868	100	4.519.523.673	100	4.196.093.616	100	4.221.962.606	100	4.247.940.280	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**															
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	Persen	N/A	33,3	20	75.475.000	20	78.229.000	20	78.607.000	20	78.989.000	20	79.373.000	
3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**															
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Poin	87,6	91,5	91,7	1.594.359.715	91,8	1.121.755.000	92	1.404.820.000	92,5	1.412.885.000	93	1.421.016.000	
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Poin	62,5	64,5	66,6		68,9		71,3		73,8		76,4		
		Persentase Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persen	75,29	100	100		100		100		100		100		
4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**															
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	5,94	5,02	4,11	425.587.500	3,2	335.145.000	2,28	397.423.000	1,37	399.628.000	0,46	401.850.000	
5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**															
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	88,24	75	80	225.737.900	85	205.372.000	90	220.343.000	95	221.384.000	100	222.534.000	
	PERTANAHAN						**160.586.200**		**291.407.135**		**293.141.696**		**294.890.225**		**296.652.844**	
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**															Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	37.417.800	100	41.020.100	100	42.007.226	100	42.300.000	100	43.022.790	Penataan Ruang
2	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**															
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100	100	100	63.210.600	100	85.000.000	100	85.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
3	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**															
	Meningkatnya Penetapan Tanah dan Lokasi untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0	1,05	1,05	59.957.800	1,05	165.387.035	1,05	166.134.470	1,05	166.590.225	1,5	167.630.054	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		100	100	100		100		100		100		100		
	LINGKUNGAN HIDUP						**12.956.374.707**		**13.845.227.874**		**13.927.639.705**		**14.010.715.146**		**14.094.460.030**	
1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**															Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya keselarasan kebijakan lingkungan hidup dengan dokumen perencanaan lain	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	534.000.000	100	537.150.600	100	540.319.788	100	543.507.675	100	546.714.370	
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**															
	Ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase	100	100	100	1.303.644.000	100	1.472.341.749	100	1.481.091.188	100	1.489.892.626	100	1.498.746.369	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**															
	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau dalam kondisi baik	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau	Persen	100	100	100	2.224.909.177	100	1.417.908.924	100	1.426.274.587	100	1.434.689.607	100	1.443.154.276	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**															
	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	100	100	100	21.526.000	100	21.526.000	100	21.653.004	100	21.780.756	100	21.909.263	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**															
	Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap kebijakan lingkungan hidup	Persentase penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	0	0	0	136.184.000	0	136.987.484	0	137.795.711	0	138.608.705	0	139.426.497	
6	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**															
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang aktif	Persen	8,83	9	10	692.606.000	11	696.695.392	12	700.805.895	13	704.940.650	14	709.099.800	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
7	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**															
	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yang didapatkan	Persen	100	100	100	114.000.000	100	586.328.113	100	596.349.811	100	606.607.643	100	617.104.915	
8	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**															
	Meningkatnya penyelesaian terhadap sengketa/kasus lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus lingkungan hidup	Persen	100	100	100	44.730.000	100	44.993.907	100	45.259.371	100	45.526.401	100	45.795.007	
9	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**															
	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang ditangani	Persen	48,45	49	49,37		49,86		50,35		50,86		51,69		
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	28,5	37,5	40	7.884.775.530	42,5	8.931.295.705	45	8.978.090.350	47,5	9.025.161.083	50	9.072.509.533	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**6.292.324.073**		**6.227.548.392**		**6.264.617.024**		**6.301.984.147**		**6.339.652.384**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	76,70	79,30	80,10	5.035.163.422	82,50	5.005.726.658	82,75	5.022.934.382	82,90	5.040.280.670	84,10	5.057.766.738	
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**															
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Persen	98,52	99	99,02	509.746.000	99,03	495.733.625	99,04	503.791.855	99,05	511.914.972	99,06	520.103.548	
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	99,54	99	99		99		99		99		99		
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	60,82	62	63		64		65		66		67		
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**															
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	98	98,50	98,60	141.016.000	98,70	137.124.879	98,80	139.353.866	98,90	141.600.801	99	143.865.843	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**															
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Persen	0,05	0,13	0,13	587.166.651	0,13	570.212.302	0,13	579.481.194	0,13	588.824.723	5	598.243.545	
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	3,57	5	5,5		6		6,5		7		7,5		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**															
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen		100	100	19.232.000	100	18.750.928	100	19.055.727	100	19.362.981	100	19.672.710	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**11.177.016.784**		**11.845.305.301**		**11.915.812.866**		**11.986.888.183**		**12.058.536.243**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	80,15 (A)	90,00	90	5.636.545.984	90	5.772.236.025	90	5.747.582.525	90	5.798.055.025	90	5.844.865.525	
2	**PROGRAM PENATAAN DESA**															
	Meningkatnya Kualitas Penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	NA	4,67	4,67	70.000.000	4,67	82.000.000	6,07	130.000.000	7,01	124.000.000	7,01	140.000.000	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**															
	Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	100	0,98	1,03	74.445.800	1,10	133.546.000	1,20	138.321.000	1,23	147.321.000	1,24	167.251.590	
4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**															
	Meningkatnya kualitas Pembinaan dan	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	NA	8,19	8,51	4.075.292.400	8,98	4.532.415.676	9,61	4.529.344.591	9,77	4.556.868.378	9,92	4.530.868.378	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Pengawasan Pemerintahan Desa															
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**															
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100	19,57	29,57	1.320.732.600	29,67	1.325.107.600	29,57	1.370.564.750	29,57	1.360.643.780	27,17	1.375.550.750	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**6.601.577.217**		**6.784.879.704**		**6.825.265.776**		**6.865.977.050**		**6.907.016.387**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	5.105.911.427	100	5.104.829.704	100	5.138.715.776	100	5.177.507.050	100	5.218.546.387	
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**															
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,39	2,38	2,37	327.105.000	2,35	357.702.000	2,34	362.702.000	2,33	362.702.000	2,32	362.702.000	
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahu	27,90	26,17	24,55		23,02		21,60		20,26		19,00		
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**															
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	75,79	75,79	75,80	848.640.790	75,81	958.848.000	75,82	958.848.000	75,83	958.848.000	75,85	958.848.000	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	4,28	4,28	4,27		4,26		4,24		4,22		4,20		
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**															
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	41,79	41,79	42,75	319.920.000	43,50	363.500.000	44,58	365.000.000	45,67	366.920.000	46,67	366.920.000	
	PERHUBUNGAN						**13.017.207.040**		**12.391.312.120**		**12.465.069.716**		**12.539.421.235**		**12.614.371.897**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	82,10	80,80	80,87	7.106.514.687	80,90	7.138.494.687	81	7.138.494.687	81,50	7.138.494.687	81,60	7.138.494.687	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**															
	Meningkatnya Sarana Prasarana Lalu Lintas	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	Persen	93	100	100	4.515.045.453	100	4.170.094.533	100	4.243.852.129	100	4.328.203.648	100	4.364.054.310	
	Terpenuhinya Mobilitas pada Angkutan Massal	V/C Rasio	Rasio	0,86	0,86	0,89	517.150.000	0,9	470.900.000	0,91	470.900.000	0,92	470.900.000	0,95	510.000.000	
	Meningkatnya Kendaraan Umum Laik Jalan	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji	Persen	80	82	84	70.680.000	86	80.680.000	88	80.680.000	90	70.680.000	91	70.680.000	
	Meningkatnya Kesdaran Pengguna Jalan Raya	Persentase Pengguna Jalan yang Tertib Berlalu Lintas	Persen	-	-	87	110.000.000	89	140.000.000	90	140.000.000	92	140.000.000	93	140.000.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**															
	Meningkatnya Kualitas Dermaga Pelabuhan	Persentase Dermaga/Pelabuhan dalam kondisi Baik	Persen	85	87	89	438.766.900	90	239.117.900	92	239.117.900	95	239.117.900	96	239.117.900	
	Meningkatnya Pengguna Transportasi Sungai dan Danau	Persentase Pengguna Angkutan Sungai dan Danau Terlayani dengan baik	Persen	59	62	64	259.050.000	65	152.025.000	67	152.025.000	68	152.025.000	70	152.025.000	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**11.933.986.280**		**12.876.822.384**		**12.953.469.914**		**13.030.734.637**		**13.108.621.979**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	66.5	67	67.5	7.736.103.191	68	8.259.150.986	68.5	8.298.092.488	69	8.347.424.947	69.5	8.397.635.850	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**															
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	Na	72	74	2.366.777.969	76	2.603.455.766	78	2.624.076.500	80	2.639.820.959	82	2.655.236.465	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen		72	74		76		78		80		82		
3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**															
	Meningkatnya Layanan TIK yang Sesuai Standar Pemerintah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan sesuai standar Pemerintah Digital	Aplikasi	10	10	14	1.831.105.120	16	2.014.215.632	18	2.031.300.926	20	2.043.488.731	22	2.055.749.664	
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	42,86%	42,86%	57,14%		64,29%		71,43%		85,71%		100%		
		Persentase Dokumen Perencanaan terkait Pemerintah Digital yang dibuat	Dokumen	1	1	5		8		9		10		10		
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**8.837.830.174**		**Rp8.904.222.576,00**		**Rp8.957.223.747,00**		**Rp9.010.651.702,00**		**Rp9.064.510.194,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	BB	BB	BB	7.674.138.674	A	Rp7.549.222.576,00	A	Rp7.555.903.747,00	A	Rp7.609.331.702,00	A	Rp7.663.190.194,00	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**															
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	35,59	82,51	82,86	38.160.000	83,21	35.000.000	83,56	35.000.000	83,91	35.000.000	84,26	35.000.000	
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**															
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	45,38	83,91	83,91	25.450.000	84,26	25.000.000	84,26	25.000.000	84,61	25.000.000	,	25.000.000	
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**															
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	27,12	80,02	80,42	130.000.000	80,77	350.000.000	81,12	350.000.000	81,47	350.000.000	81,82	350.000.000	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**															
	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi	Persen	23,18	28,98	36,22	164.677.500	45,27	140.000.000	56,59	140.000.000	70,74	140.000.000	88,42	140.000.000	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**															
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	persen	2,24			735.459.000		740.000.000		790.000.000		790.000.000		790.000.000	
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**															
	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjalin kemitraan	Persen	9,01	10,04	10,97	69.945.000	12,02	65.000.000	12,97	61.320.000	14,01	61.320.000	14,97	61.320.000	
	PENANAMAN MODAL						**7.763.818.529**		**7.046.110.782**		**7.088.051.796**		**7.130.330.534**		**7.172.949.964**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	Na	100	100	7.131.543.379	100	6.564.026.782	100	6.595.817.796	100	6.627.896.534	100	6.658.215.964	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**															
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase peningkatan investasi	Persen	1	1	2	90.084.700	3	92.000.000	4	94.000.000	5	96.000.000	6	98.000.000	
3	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**															
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100%	284.804.500	100	205.934.000	100	210.934.000	100	215.934.000	100	222.934.000	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**															
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persen	Na	100%	100%	107.363.150	100%	45.800.000	100%	46.800.000	100%	47.000.000	100%	47.800.000	
5	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**															
	Meningkatnya Investasi	Persentase Kegiatan Promosi Investasi yang dapat diikuti	Persen	50%	100%	100%	60.022.800	100%	45.850.000	100%	46.500.000	100%	47.500.000	100%	48.000.000	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**															
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100%	90.000.000	100%	92.500.000	100%	94.000.000	100%	96.000.000	100%	98.000.000	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**29.809.701.554**		**16.528.588.233**		**16.587.781.893**		**16.697.854.820**		**16.749.749.742**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	82,55	82,07	82,60	7.424.944.554	83	7.083.831.148	83,40	7.091.024.808	83,80	7.098.097.735	84,20	7.101.992.657	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan pemuda	Persen	9,60%	10%	12%	950.000.000	15%	1.050.000.000	18%	1.072.000.000	22%	1.105.000.000	25%	1.148.000.000	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	37,48%	40%	44%		48%		52%		56%		60%		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	11%	15%	20%		25%		30%		35%		40%		
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**															
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah Prestasi Olahraga Tk.Provinsi, Nasional dan Internasional	Medali	112	140	150	21.234.757.000	160	8.144.757.085	170	8.174.757.085	180	8.244.757.085	190	8.249.757.085	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**															
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan Kepramukaan	Persen	12,24%	13%	13,50%	200.000.000	14%	250.000.000	14,50%	250.000.000	15%	250.000.000	15,50%	250.000.000	
	STATISTIK						**142.500.000**		**54.799.483**		**55.125.669**		**55.454.482**		**55.785.945**	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**															Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	60	65	70	142.500.000	75	54.799.483	80	55.125.669	85	55.454.482	90	55.785.945	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	60	65	70		75		80		85		90		
	PERSANDIAN						**261.899.756**		**507.645.445**		**510.667.135**		**513.713.157**		**516.783.725**	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**															Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	Nilai	540	580	620	261.899.756	660	507.645.445	700	510.667.135	740	513.713.157	780	Rp 516.783.725	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Lingkungan Pemerintah Daerah															
	KEBUDAYAAN						**1.257.141.600**		**6.500.000.000**		**7.000.000.000**		**7.033.925.658**		**6.850.000.000**	
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatkan Pengelolaan pusat data dan informasi terkait cagar budaya di kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase Pengembangan Seni Budaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persen	100	100	100	926.152.400	100	4.210.000.000	100	5.700.000.000	100	5.550.925.658	100	5.554.400.000	
2	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**															
	Meningkatnya Kualitas Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Telestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	330.989.200	100	2.290.000.000	100	1.300.000.000	100	1.483.000.000	100	1.295.600.000	
	PERPUSTAKAAN						**6.588.682.696**		**5.751.263.975**		**5.847.058.854**		**5.843.053.116**		**5.873.525.813**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Perpustakaan
	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	5.311.311.596	100	5.216.698.241	100	5.224.122.364	100	4.915.508.738	100	4.932.000.104	
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**															
	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	68,83	68,85	69,00	1.243.585.100	69,20	493.833.609	69,40	581.704.365	69,60	885.812.253	69,80	899.293.584	
3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**															
	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Koleksi Budaya Etnis Nusantara / Naskah Kuno Yang dimiliki	Persen	0,01	0,02	0,03	33.786.000	0,04	40.732.125	0,05	41.232.125	0,06	41.732.125	0,07	42.232.125	
	KEARSIPAN						**488.628.900**		**424.307.145**		**365.271.511**		**406.332.492**		**413.213.640**	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**															Dinas Perpustakaan

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya Ketersediaan Arsip Sesuai Standar Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	91,07	91,5	91,60	468.628.900	91,70	343.342.895	91,80	279.184.623	91,90	318.773.492	92,00	324.360.100	
5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**															
	Meningkatnya Perlindungan Arsip Untuk Menjamin Keselamatan Sesuai Standar Kearsipan Nasional	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	25,00	25,10	25,25	20.000.000	25,50	80.964.250	25,75	86.086.888	26,00	87.559.000	26,25	88.853.540	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN						**8.838.578.343**		**7.004.405.210**		**7.046.097.977**		**7.088.126.469**		**7.130.493.638**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Perikanan
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	87,97	100	100	5.979.613.218	100	5.439.726.160	100	5.403.631.927	100	5.365.940.419	100	5.394.807.588	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**															
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	12.325,20	12.332,64	12.333,87	1.123.082.000	12.335,10	254.314.000	12.336,33	257.101.000	12.337,56	261.821.000	12.338,79	265.321.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**															
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	9.898,95	9.811,74	10.098,95	1.199.416.425	10.198,95	885.200.000	10.298,95	960.200.000	10.398,95	1.035.200.000	10.498,95	1.045.200.000	
4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**															
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Persen	4,08	4,79	6,98	178.600.000	9,17	142.116.300	11,36	142.116.300	13,55	142.116.300	15,74	142.116.300	
5	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	PEMASARAN HASIL PERIKANAN															
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	67,68	68,5	68,84	357.866.700	69,18	283.048.750	69,53	283.048.750	69,88	283.048.750	70,23	283.048.750	
	PARIWISATA						**1.510.000.000**		**2.080.902.542**		**2.132.479.338**		**2.134.068.831**		**2.194.736.133**	
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**															Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Jumlah Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	39,68	45	50	532.838.000	55	932.740.542	60	944.317.338	65	945.906.831	70	982.509.133	
2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**															
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana didalam dan diluar Negeri	Event / Kegiatan	6	7	8	666.227.000	9	711.227.000	10	711.227.000	11	711.227.000	12	716.227.000	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**															
	Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	na	50%	60%	310.935.000	70%	436.935.000	80%	476.935.000	90%	476.935.000	100%	496.000.000	
	PERTANIAN						**37.355.878.185**		**31.665.269.324**		**31.853.752.522**		**32.043.753.454**		**32.235.285.463**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Dinas Pertanian
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen			100	23.959.038.241	100	22.196.811.259	100	22.196.811.259	100	22.267.002.691	100	22.335.558.160	
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**															
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						2.791.305.600		2.183.926.590		2.183.926.590		2.187.926.590		2.255.033.130	
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,15	5,20	5,22		5,23	1.315.154.250	5,24	1.315.154.250	5,27	1.319.154.250	5,29	1.386.260.790	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	426	437	458		478	252.590.000	491	252.590.000	505	252.590.000	519	252.590.000	
		Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	406,50	407,00	408,00		409,00	128.050.000	411,00	128.050.000	412,00	128.050.000	413,00	128.050.000	
		Produksi Komoditas Peternakan	Ton	10.393,78	10.430,23	10.469,37		10.524,94	488.132.340	10.584,05	488.132.340	10.612,36	488.132.340	10.639,29	488.132.340	
3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**															
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	23359	23359	23359	6.868.059.282	23359	4.293.179.742	23359	4.456.873.000	23359	4.558.732.500	23359	4.623.732.500	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**															
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						724.597.062		719.796.123		719.796.123		719.796.123		719.796.123	
		Persentase Penurunan Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	0,48	1,2	1,21		1,23	655.611.053	1,24	655.611.053,00	1,26	655.611.053,00	1,28	655.611.053,00	
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang aman dan layak dikonsumsi	Persen		96,92	96,92		96,92	64.185.070	97,69	64.185.070	97,69	64.185.070,00	98,46	64.185.070,00	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**															
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						622.750.000		425.450.000		425.500.000		425.500.000		425.500.000	
		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	98,61	98,7	98,7		98,8	215.100.000	98,8	215.100.000	98,8	215.100.000	98,8	215.100.000	
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	95	95	95		95	210.350.000	95	210.400.000	95	210.400.000	95	210.400.000	
6	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**															
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan		100	100	100	4.700.000	100	18.650.000	100	4.700.000	100	18.650.000	100	4.700.000	
7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian			0		100	2.385.428.000		1.827.455.610		1.866.145.550		1.866.145.550		1.870.965.550	
		Persentase Kelompok Tani Naik Kelas	Persen	25	25	100		25	1.797.255.610	25	1.805.745.550	25	1.805.745.550	25	1.810.565.550	
		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen		100	100		100	30.200.000	100	60.400.000	100	60.400.000	100	60.400.000	
	PERDAGANGAN						**3.457.040.190**		**4.146.148.556**		**4.170.827.939**		**4.195.706.051**		**4.220.784.636**	
1	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	53 %	100%	100%	14.429.000	100%	14.457.858	100%	14.486.774	100%	14.515.748	100%	14.544.779	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen		75	78%		80%		85%		90%		95%		
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**															
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	96 %	100%	100%	2.542.366.190	100%	3.213.809.084	100%	3.220.641.646	100%	3.227.492.770	100%	3.234.354.484	
3	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**															
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	29 %	100%	100%	328.474.000	100%	329.130.948	100%	329.789.210	100%	330.448.518	100%	331.109.686	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen		45	47%		50%		53%		56%		59%		
4	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**															
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	75 %	90%	91,50%	294.885.000	92,50%	311.310.894	93,50%	327.915.657	94,50%	344.698.974	95%	361.668.546	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)			80	82,00%		85,00%		87,00%		87,00%		89%		

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		bertanda tera sah yang berlaku														
5	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**															
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persen	90 %	100%	100%	276.886.000	100%	277.439.772	100%	277.994.652	100%	278.550.041	100%	279.107.141	
	PERINDUSTRIAN						**1.479.024.190**		**1.222.709.572**		**1.229.987.584**		**1.237.324.202**		**1.244.719.939**	
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Persen	4,23%	5,33%	5,84%	1.376.374.190	6,34%	1.112.709.572	6,85%	1.116.909.604	7,36%	1.121.264.294	7,87%	1.125.447.321	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	46%	48%	50%		52%		54%		56%		58%		
2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**															
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	-	100%	100%	27.750.000	100%	40.000.000	100%	42.077.980	100%	44.059.908	100%	46.172.618	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**															
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	25%	50%	75%	74.900.000	100%	70.000.000	100%	71.000.000	100%	72.000.000	100%	73.100.000	
	SEKRETARIAT DAERAH						**65.238.790.703**		**64.083.149.904**		**64.464.596.116**		**64.849.113.870**		**65.236.730.168**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi	Persen	100%	100%	100%	Rp39.397.370.703,0	100%	Rp39.668.939.082	100%	Rp39.905.063.033	100%	Rp40.143.088.338	100%	Rp40.383.031.713	Sekretariat Daerah Bagian Umum
		Persentase kegiatan pimpinan yang di fasilitasi keprotokolan	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah Bagian Prokopim
		Persentase Penyelesaian Penyusunan LAKIP Kabupaten	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
		Persentase Penyelesaian Penyusunan LAKIP Setda	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
		Persentase PD dengan standar pelayanan publik yang sesuai	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**															
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persen		100%	100%	Rp588.176.600,00	100%	Rp598.165.212	100%	Rp601.725.709	100%	Rp605.314.876	100%	Rp608.932.966	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
		Efektifitas kerjasama daerah	Persen		100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
	Meningkatnya kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat	Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persen		100%	100%	Rp21.570.224.300,00	100%	Rp20.270.923.398	100%	Rp20.391.583.306	100%	Rp20.513.214.811	100%	Rp20.635.826.453	Sekretariat Daerah Bagian Kesra
	Meningkatnya kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,14 (AA / Istimewa)	98,35 (AA / Istimewa)	98,50 (AA / Istimewa)	Rp513.999.500,00	99 (AA / Istimewa)	Rp522.728.411	99,20 (AA / Istimewa)	Rp525.839.881	99,50 (AA / Istimewa)	Rp528.976.405	99,60 (AA / Istimewa)	Rp532.138.205	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**															
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	Persen		100%	100%	Rp719.414.400,00	100%	Rp731.631.736	100%	Rp735.986.674	100%	Rp740.376.680	100%	Rp744.802.061	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan SDA

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektifitas kebijakan administrasi pembangunan	Persen		100%	100%	Rp724.605.550,00	100%	Rp736.911.044	100%	Rp741.297.406	100%	Rp745.719.089	100%	Rp750.176.404	Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	3/5	4/5	4/5	Rp1.724.999.650,00	4/5	Rp1.553.851.021	5/5	Rp1.563.100.107	5/5	Rp1.572.423.671	5/5	Rp1.581.822.366	Sekretariat Daerah Bagian PBJ
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	5	5		6		6		7		7		
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	1.35	1.5	1.60		1.70		1.80		1.90		2		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	32.19	35	36		37		38		39		40		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	69.69	70	71		72		73		74		75		
	SEKRETARIAT DPRD						**52.221.687.782**		**52.444.402.393**		**52.756.570.547**		**53.071.252.392**		**53.388.470.024**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	80,3	80,5	100	28.655.116.182	100	Rp27.345.302.126	100	Rp27.345.302.126	100	Rp27.145.302.126	100	Rp27.165.897.290	
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**															
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, serta penganggaran dan pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100	100	100	23.566.571.600	100	Rp25.099.100.267	100	Rp25.411.268.421	100	Rp25.925.950.266	100	Rp26.222.572.734	
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	95	100	100		100		100		100		100		
	PERENCANAAN						**10.216.653.778**		**9.762.808.840,00**		**9.820.920.628,00**		**9.879.500.354,00**		**9.938.552.130,00**	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	100%	100%	76,61%	7.934.282.268	78%	6.776.591.706,00	80%	6.756.658.781,00	82%	6.758.255.915,00	84%	6.778.255.915,00	
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**															
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100%	100%	100%	1.294.186.430,00	100%	1.393.971.630,00	100%	1.447.075.705,00	100%	2.019.416.645,00	100%	2.160.368.495,00	
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen													
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**															
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100%	100%	100%	481.028.840,00	100%	785.089.264,00	100%	785.089.264,00	100%	514.671.554,00	100%	482.771.480,00	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100%	100%	100%	234.746.500,00	100%	250.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	295.000.000,00	100%	250.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100%	100%	100%	272.409.740,00	100%	557.156.240,00	100%	557.096.878,00	100%	292.156.240,00	100%	267.156.240,00	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	KEUANGAN						**313.116.171.010**		**314.897.283.294**		**316.771.666.436**		**318.661.142.786**		**320.565.845.024**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (BPKAD)	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	100,00	100,00	100,00	35.508.198.535	100,00	38.428.215.582	100,00	39.246.980.230	100,00	40.080.390.226	100,00	40.928.574.312	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**															
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	35,00	30,00	30,00	1.304.405.550	30,00	1.504.405.550	30,00	1.504.405.550	30,00	1.504.405.550	30,00	1.504.405.550	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastuktur Pelayanan Publik	Persen	38,00	39,00	40,00		41,00		42,00		43,00		44,00		
		Persentase dokumen yang dipublikasi di website pemda	Persen	100	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	86,46	86,47	86,48	262.618.523.850	86,49	263.818.523.850	86,50	264.818.523.850	86,51	265.818.523.850	86,52	266.818.523.850	
		Persentase Penurunan SILPA	Persen	31,32	3,21	3,33		3,45		3,57		3,70		3,85		
		Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	26,12	26,50	27,00		27,50		28,00		28,50		29,00		
		Rasio PAD	Persen	8,42	8,42	8,50		8,50		9,00		9,00		9,50		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	64,39	64,50	65,00		65,50		67,00		67,50		68,00		
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	100,65	100,70	100,75		100,80		100,85		100,90		100,95		
		Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	105,97	106,60	109,10		111,93		111,93		111,93		115,07		
		Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	31,27	31,00	30,73		30,46		30,19		29,92		29,65		
		Persentase Informasi tentang Anggaran untuk Unit	Persen	89,78	89,80	89,85		89,90		89,95		90,00		90,05		

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Pelayanan yang dapat diakses di website pemda														
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Persen	100	100	100	400.043.650	100	600.043.650	100	600.043.650	100	600.043.650	100	600.043.650	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**															
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan nilai aset tetap	Persen	6,24	6,24	6,54	1.002.160.200	6,84	1.202.160.500	7,14	1.202.160.500	7,44	1.202.160.500	7,44	1.202.160.500	
		Manajemen Aset	kategori	4	4	4		4		4		4		4		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,67	80,00	80,50	8.862.425.525,00	80,60	Rp7.843.934.162,00	80,70	Rp7.903.934.162,00	80,80	Rp7.843.934.162,00	80,90	Rp7.843.934.162,00	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**															
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persen	0,15	0,20	0,21	3.420.413.700,00	0,26	Rp1.500.000.000,00	0,30	Rp1.495.618.494,00	0,35	Rp1.611.684.848,00	0,35	Rp1.668.203.000,00	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan[9]	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen													
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen													
	KEPEGAWAIAN						**10.030.779.367**		**9.945.497.329**		**9.915.629.460**		**9.986.326.321**		**10.057.592.874**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	6.860.506.517	100	6.671.302.829	100	6.707.434.960	100	6.778.131.821	100	6.849.398.374	
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**															
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen	100	100	100	536.526.450	100	536.615.500	100	536.615.500	100	536.615.500	100	536.615.500	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi	Persen	53	60	70		70		75		80		80		
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	16,12	15	15	1.724.657.000	15	1.762.451.200	15	1.762.451.200	15	1.762.451.200	15	1.762.451.200	
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	65	75	75		77		80		80		80		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	14.64	15	15		17		20		20		20		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	70.19	72	72		75		75		75		75		
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai kompetensinya	Persen	11,28	12	12	467.716.400	12	533.734.000	12	467.734.000	12	467.734.000	12	467.734.000	
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai BAIK	persen	99,9	100	100	441.373.000	100	441.393.800	100	441.393.800	100	441.393.800	100	441.393.800	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**2.073.724.000,00**		**Rp1.836.735.000**		**Rp1.936.735.000**		**Rp1.936.735.000**		**Rp1.936.735.000**	
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**															Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	persen	8	10	10	1.793.736.000,00	8	Rp1.556.735.000	8	Rp1.556.735.000	8	Rp1.556.735.000	8	Rp1.556.735.000	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	persen	2	2	2	279.988.000	2	280.000.000	3	380.000.000	3	380.000.000	3	380.000.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**1.614.999.990**		**948.670.563**	2	**954.317.396**	2	**960.009.698**	2	**965.747.871**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**															Badan Perencanaan Pembanguna

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen			100%	835.565.030	100%	750.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	750.000.000,00	n Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**															
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persen			100%	779.434.960,00	100%	198.670.563,00	100%	204.317.396,00	100%	210.009.698,00	100%	215.747.871,00	
	INSPEKTORAT DAERAH						**22.570.686.395**		**22.532.053.881**		**22.666.172.859**		**22.801.371.812**		**22.937.660.233**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	N/A	100	100	16.616.191.995	100	14.628.888.785	100	14.724.727.197	100	14.812.402.432	100	14.900.791.692	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**															
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	88,93	91	92	4.998.446.000	93	6.931.129.496	94	6.969.410.062	95	7.016.933.780	96	7.064.832.941	
		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	Persen	88,85	90	91		92		93		94		95		
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**															
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3,1	3,2	956.048.400	3,3	972.035.600	3,4	972.035.600	3,5	972.035.600	3,6	972.035.600	
	KECAMATAN AMUNTAI TENGAH						**13.123.760.943**		**10.400.039.409**		**10.461.944.225**		**10.524.347.523**		**10.587.253.681**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Amuntai Tengah
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	78,65%	100%	100%	10.600.042.383	100%	8.420.740.715	100%	8.481.264.029	100%	8.535.218.335	100%	8.543.667.327	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase Terpenuhinya Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persen			100%	716.124.610	100%	263.982.000	100%	231.982.000	100%	231.982.000	100%	277.922.090	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan		98,60%	100%	100%	159.900.000	100%	74.052.326	100%	74.052.326	100%	74.052.326	100%	74.052.326	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	Persen	94,66%	100%	100%	1.468.025.950	100%	1.486.996.368	100%	1.515.377.870	100%	1.523.826.862	100%	1.532.343.938	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air	Persen	0	100%	100%	58.168.000	100%	38.168.000	100%	38.168.000	100%	38.168.000	100%	38.168.000	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik	Persen	66,52%	100%	100%	111.100.000	100%	106.100.000	100%	111.100.000	100%	111.100.000	100%	111.100.000	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketetiban umum yang diselesaikan	Persen	0	100%	100%	10.400.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
	KECAMATAN AMUNTAI UTARA						**3.218.581.742**		**2.858.254.883**		**2.875.268.256**		**2.892.418.626**		**2.909.707.198**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Amuntai Utara

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	2.177.260.352	70	100%	*2.924.528.692*	100%	*2.658.886.633*	100%	*2.675.900.006*	100%	*2.693.050.376*	100%	*2.710.338.948*	
	Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase Terpenuhinya Sumber Daya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persen			100%	*107.580.450*	100 %	*107.580.450*	100%	*107.580.450*	100%	*107.580.450*	100%	*107.580.450*	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Nilai IKM Kecamatan	Persen	7.328.000	100%	100%	9.400.000	100%	9.400.000	100%	9.400.000	100%	9.400.000	100%	9.400.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	Persen	9.985.000	100%	100%	19.674.800	100%	19.674.800	100%	19.674.800	100%	19.674.800	100%	19.674.800	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
	Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air	Persen	10.383.400	100%	100%	36.859.000	100%	36.859.000	100%	36.859.000	100%	36.859.000	100%	36.859.000	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keamanan	Persen	0	0%	100%	0	100%	5.915.200	100%	5.915.200	100%	5.915.200	100%	5.915.200	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik	Persen	19.180.000	100%	100%	120.538.800	100%	19.938.800	100%	19.938.800	100%	19.938.800	100%	19.938.800	
	KECAMATAN AMUNTAI SELATAN						**3.615.551.757**		**3.175.284.695**		**3.194.185.144**		**3.213.237.786**		**3.232.443.960**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Amuntai Selatan

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	2.259.292.624	100 %	100 %	2.995.206.217	100 %	2.854.043.095	100 %	2.847.324.686	100 %	2.841.986.186	100 %	2.861.192.360	
	Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase Terpenuhinya Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persen		100 %	100 %	164.917.040	100 %	163.851.600	100 %	189.470.458	100 %	183.851.600	100 %	173.851.600	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan		136.190.200	100 %	100 %	78.000.000	100 %	77.000.000	100 %	77.000.000	100 %	77.000.000	100 %	77.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	Persen	18.371.600	100 %	100 %	45.600.000	100 %	15.400.000	100 %	15.400.000	100 %	15.400.000	100 %	15.400.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketetiban umum yang diselesaikan	Persen	14.936.000	100 %	100 %	0	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	15.000.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air	Persen	0	100 %	100 %	124.999.700	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik	Persen	32.368.000	100 %	100 %	206.828.800	100 %	9.990.000	100 %	9.990.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	KECAMATAN SUNGAI PANDAN						**3.654.028.568**		**3.340.859.828**		**3.360.745.840**		**3.380.791.982**		**3.400.999.661**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Sungai Pandan
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	93,02	100%	100 %	3.111.055.418	100 %	2.943.400.000	100 %	2.944.637.160	100 %	2.964.186.759	100 %	2.961.700.000	
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase terpenuhinya sumberdaya penunjang pelayanan kecamatan	Persen			100 %	224.183.750	100%	165.444.972	100%	182.150.000	100%	190.000.000	100%	191.000.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	Persen	64,26	100%	100 %	10.000.000	100 %	9.000.000	100 %	10.000.000	100 %	11.000.000	100 %	11.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	77,55	100%	100 %	38.539.400	100 %	37.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keamanan	Persen	72,5	100%	100 %	3.300.000	100 %	3.400.000	100 %	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %	4.000.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	83,26	100%	100 %	129.800.000	100 %	96.000.000	100 %	95.500.000	100 %	88.400.000	100 %	102.549.661	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase Keselarasan antara APBDes dengan RKPDes	Persen	82,24	100%	100 %	137.150.000	100 %	86.614.856	100 %	84.458.680	100 %	83.205.223	100 %	90.750.000	
	KECAMATAN BABIRIK						**3.346.668.988**		**3.033.148.859**		3.051.203.264		3069403050		3087749494	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Babirik
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	87%	100%	100%	2.834.617.478	100%	2.629.873.976	100%	2.646.869.163	100%	2.650.066.122	100%	2.647.898.944	
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase terpenuhinya sumberdaya penunjang pelayanan kecamatan	Persen	89%	100%	100%	290.321.510	100%	236.635.595	100%	227.580.000	100%	238.780.000	100%	257.280.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	Persen	89%	100%	100%	13.610.000	100%	14.379.288	100%	22.494.101	100%	24.296.928	100%	26.310.550	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase meningkatnya tertib administrasi pelayanan masyarakat	Persen	77%	100%	100%	23.100.000	100%	33.600.000	100%	33.600.000	100%	35.600.000	100%	35.600.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketetiban umum yang diselesaikan	Persen	90.77%	100%	100%	11.400.000	100%	16.750.000	100%	16.750.000	100%	16.750.000	100%	16.750.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
	Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100%	100%	100%	49.940.000	100%	52.830.000	100%	52.830.000	100%	52.830.000	100%	52.830.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES	Persen	98%	100%	100%	123.680.000	100%	49.080.000	100%	51.080.000	100%	51.080.000	100%	51.080.000	
	KECAMATAN DANAU PANGGANG						**2.930.883.423**		**2.588.452.750**		**2.603.860.163**		**2.619.391.641**		**2.635.048.275**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Danau Panggang
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen		100%	100%	2.448.793.863	100%	2.290.737.939	100%	2.306.200.563	100%	2.313.172.041	100%	2.319.078.675	
	Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase Terpenuhinya Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persen		100%	100%	162.886.360	100%	88.448.811	100%	81.956.400	100%	85.516.400	100%	88.266.400	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase meningkatnya tertib administrasi pelayanan masyarakat	Persen		100%	100%	53.650.000	100%	6.438.000	100%	7.450.000	100%	9.550.000	100%	13.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	Persen		100%	100%	20.950.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	20.500.000	100%	21.000.000	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air	Persen		100%	100%	101.303.200	100%	94.200.000	100%	103.303.200	100%	104.203.200	100%	106.203.200	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketetiban umum yang diselesaikan	Persen		100%	100%	25.400.000	100%	20.000.000	100%	26.000.000	100%	26.500.000	100%	27.000.000	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik	Persen		100%	100%	117.900.000	100%	73.628.000	100%	58.950.000	100%	59.950.000	100%	60.500.000	
	KECAMATAN BANJANG						**3.118.519.400**		**2.985.705.451**		**3.003.477.456**		**3.021.392.567**		**3.039.452.043**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Banjang
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	84,47%	100%	100%	2.624.517.840	100%	2.644.453.651	100%	2.656.225.656	100%	2.674.140.767	100%	2.692.200.243	
	Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase Terpenuhinya Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persen				310.342.160	100%	225.551.800	100%	231.551.800	100%	231.551.800	100%	231.551.800	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Fersentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	Persen	68,69%	100%	100%	15.000.000	100%	9.700.000	100%	9.700.000	100%	9.700.000	100%	9.700.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Perentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	98,83%	100%	100%	20.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
	Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	88,78%	100%	100%	59.300.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya Keamanan dan Ketrtiban Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keamanan	Persen	0,00%	100%	100%	0	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/ Kelurahan	Persentase Keselarasan Antara APBDES dengan RKPDES	Persen	98,62%	8.299.800	100%	89.359.400	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	
	KECAMATAN PAMINGGIR						**3.501.500.188**		**3.199.329.880**		**3.218.373.455**		**3.237.570.376**		**3.256.921.990**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Paminggir
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	2.014.535.735	3.032.023.868	100	2.929.923.588	100	2.649.951.866	100	2.662.534.655	100	2.711.208.185	100	2.700.033.793	
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase terpenuhinya sumberdaya penunjang pelayanan kecamatan	Persen			100	342.178.600	100	236.342.600	100	242.282.600	100	212.282.600	100	242.282.600	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Persentase meningkatnya tertib administrasi pelayanan masyarakat	Persen	102.973.200	19.000.000	100	26.240.000	100	75.597.214	100	79.068.000	100	79.591.391	100	74.127.397	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	8.360.000	24.829.000	100	43.900.000	100	71.080.000	100	71.080.000	100	71.080.000	100	71.080.000	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
	Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	0	51.402.200	100	51.568.000	100	63.000.200	100	63.000.200	100	63.000.200	100	63.000.200	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															
	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentasi Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES	Persen	29.440.000	18.650.000	100	94.190.000	100	88.400.000	100	85.450.000	100	85.450.000	100	91.440.000	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Trantib	Persentase Tingkat Partipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keamanan	Persen	0	0	100	13.500.000	100	14.958.000	100	14.958.000	100	14.958.000	100	14.958.000	
	KECAMATAN SUNGAI TABUKAN						**3.525.169.754**		**3.192.472.100**		**3.211.474.855**		**3.230.630.627**		**3.249.940.761**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Sungai Tabukan
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen			100%	2.808.190.354	100%	2.688.228.227,00	100%	Rp2.691.308.740,00	100%	Rp2.694.414.323,00	100%	Rp2.697.545.199,00	
	Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase Terpenuhinya Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persen			100%	178.274.400	100%	227.257.600,00	100%	Rp227.257.600,00	100%	Rp227.257.600,00	100%	Rp227.257.600,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Persentase meningkatnya tertib administrasi pelayanan masyarakat	Persen	100%	100%	100%	61.549.000	100%	14.455.664,00	100%	Rp17.536.178,55	100%	Rp20.641.762,52	100%	Rp23.772.638,28	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100%	100%	100%	223.773.000	100%	178.063.617,00	100%	Rp181.663.801,23	100%	Rp185.291.653,28	100%	Rp188.947.408,53	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyrakat Dalam Kegiatan Keamanan	Persen	100%	100%	100%	42.260.000	100%	7.080.664,00	100%	Rp10.161.178,55	100%	Rp13.266.763,00	100%	Rp16.397.638,28	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															
	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES	Persen	-	100%	100%	151.063.000	100%	23.580.664,00	100%	Rp26.661.178,55	100%	Rp29.766.762,52	100%	Rp32.897.638,28	

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
	Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	-	100%	100%	60.060.000	100%	53.805.664,00	100%	Rp56.886.178,55	100%	Rp59.991.762,52	100%	Rp63.122.638,28	
	KECAMATAN HAUR GADING						**2.987.043.100**		**2.865.857.670**		**2.882.916.297**		**2.900.112.286**		**2.917.446.845**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Kec. Haur Gading
	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	81,31%	100%	100%	2.446.088.500,00	100%	2.544.352.670,00	100%	2.533.035.297,00	100%	2.550.019.286,00	100%	2.532.533.845,00	
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase terpenuhinya sumberdaya penunjang pelayanan kecamatan	Persen	81,31%	100%	100%	304.989.200	100%	184.336.800,00	100%	200.836.800,00	100%	191.636.800,00	100%	209.916.800,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**															
	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	Persen	96,17%	100%	100%	32.966.000	100%	27.449.000,00	100%	28.099.000,00	100%	28.099.000,00	100%	31.889.000,00	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**															
	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	99,78%	100%	100%	39.950.000	100%	27.300.000,00	100%	28.800.000,00	100%	28.800.000,00	100%	29.300.000,00	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keamanan	Persen	54,60%	100%	100%	11.729.700	100%	5.915.200,00	100%	9.465.200,00	100%	9.465.200,00	100%	13.215.200,00	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	0,00%	100%	100%	45.429.700	100%	37.050.000,00	100%	38.840.000,00	100%	38.840.000,00	100%	45.840.000,00	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES	Persen	99,14%	100%	100%	105.890.000	100%	39.454.000,00	100%	43.840.000,00	100%	53.252.000,00	100%	54.752.000,00	
	PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**8.434.307.459**		**7.058.641.118**		**7.100.656.717**		**7.143.010.640**		**7.185.705.863**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Persen	77%	80%	100%	3.885.682.994	100%	3.151.691.164	100%	3.151.691.164	100%	3.151.691.164	100%	3.151.691.164	
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**															
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	70%	100%	100%	1.749.076.500	100%	1.107.401.989	100%	1.149.417.588	100%	1.191.771.511	100%	1.234.466.734	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**															
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	70%	100%	100%	1.343.201.965	100%	1.343.201.965	100%	1.343.201.965	100%	1.343.201.965	100%	1.343.201.965	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**															

NO.	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	*BAELINE*		TARGET										PERANGKAT DAERAH
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	80%	100%	100%	30.789.000	100%	30.789.000	100%	30.789.000	100%	30.789.000	100%	30.789.000	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**															
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Persen	100%	100%	100%	415.025.000	100%	415.025.000	100%	415.025.000	100%	415.025.000	100%	415.025.000	
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**															
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100%	100%	100%	1.010.532.000	100%	1.010.532.000	100%	1.010.532.000	100%	1.010.532.000	100%	1.010.532.000	
						TOTAL	**1.731.394.743.104**		**1.715.669.906.829**		**1.725.882.198.013**		**1.736.176.722.248**		**1.746.554.202.410**	

Sumber: hasil proyeksi, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sekaligus pembangunan daerah, dibutuhkan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai tolok ukur keberhasilan pencapaian target-target pembangunan. Bab ini memuat indikator kinerja yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama (IKU) memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Adapun IKU pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,43	4,52	4,61	4,70	4,80	4,89	4,99
2	Indeks Gini	Persen	0,266	0,260	0,255	0,250	0,245	0,240	0,235
3	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	26,06	28,42	37,83	47,25	56,66	66,07	73,59
4	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	536,61	544,42	552,34	560,37	568,52	576,79	585,18
5	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar rupiah	1.047,71	1.126,39	1.210,99	1.301,93	1.399,71	1.504,82	1.617,84
6	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Rupiah	24.120.000.000	24.361.000.000	24.848.000.000	25.594.000.000	26.618.000.000	27.950.000.000	28.118.000.000
7	Rasio Kewirausahaan	Rasio	2,49	4,72	4,84	4,96	5,07	5,19	5,29
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,75	5,46	5,19	4,93	4,68	4,45	4,23
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,73	3,66	3,58	3,51	3,44	3,37	3,30
10	Indeks Desa	Indeks	427,034	487,50	490	493	496	499	502
11	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,74	72,79-73,87	73,48	74,17	74,87	75,58	76,30
12	Prevalensi Stunting	Persen	27,6	28	27,02	26,04	25,06	24,08	23,10
13	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
14	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	3,61	3,63	3,65	3,66	3,68	3,70	3,72
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,29	70,34	70,40	70,45	70,50	70,56	70,61
16	Nilai LHE AKIP Daerah	Nilai	64,82	66,12	67,44	68,79	70,16	71,57	73,00
17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,69	3,78	3,86	3,95	4,02	4,11	4,20
19	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24
20	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	2,21	2,17	2,03	1,89	1,75	1,57
21	Indeks Risiko Bencana	Indeks	97,69	97,67	97,65	97,63	97,61	97,59	97,57
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,33	69,16	69,47	69,78	70,10	70,41	70,73

Sumber: hasil analisis, 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan hasil kerja yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. IKD adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

Indikator Kinerja Daerah memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,2	81,70	82,20	82,70	83,20	83,70	84,20
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	N/A	5,57	5,43	5,30	5,16	5,02	4,9
3	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Aman	Persen	N/A	25	27,19	29,38	31,56	33,75	35,5
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	0,392	0,46	0,53	0,60	0,67	0,72
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,33	69,16	69,47	69,78	70,10	70,41	70,73
6	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	N/A	1,69	5,65	9,61	13,56	17,52	20,68
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	N/A	2,00	3,75	5,50	7,25	9,00	10,40
8	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	N/A	10,49	10,62	10,74	10,87	10,99	11,09
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	N/A	40	40,25	40,50	40,75	41	41,2
10	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	2,21	2,17	2,03	1,89	1,75	1,57
11	Penurunan Emisi GRK:								
	- Tahunan	Ton CO2eq	N/A	41.054,95	75.421,17	134.746,12	130.592,70	108.225,78	162.503,65
	- Kumulatif	Ton CO2eq	N/A	1.422.849,92	1.498.267,84	1.633.010,73	1.763.600,45	1.871.823,41	2.034.323,15
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	97,69	97,67	97,65	97,63	97,61	97,59	97,57
13	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,43	4,52	4,61	4,70	4,80	4,89	4,99
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,75	5,46	5,19	4,93	4,68	4,45	4,23
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	26,06	28,42	37,83	47,25	56,66	66,07	73,59
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,73	3,66	3,58	3,51	3,44	3,37	3,30
5	Indeks Gini	Indeks	0,266	0,260	0,255	0,250	0,245	0,240	0,235
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,74	72,79-73,87	73,48	74,17	74,87	75,58	76,30

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Nilai PDRB Kabupaten (ADHB)	Miliar Rupiah	6,61	6,8	7,30	7,85	8,43	9,05	9,72
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,49	72,5	72,73	72,97	73,20	73,43	73,62
9	Prevalensi Stunting	Persen	27,6	28	27,02	26,04	25,06	24,08	23,10
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	N/A	140	135,65	131,30	126,95	122,6	119,12
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persen	N/A	90	90,63	91,25	91,88	92,5	93
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persen	N/A	90	90,63	91,25	91,88	92,5	93
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	N/A	99	99,06	99,13	99,19	99,25	99,3
14	Cakupan perawatan penyalahgunaan narkoba	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	9,6	9,74	9,87	10,01	10,14	10,24
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,21	14,25	14,31	14,38	14,44	14,5	14,55
17	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		N/A						
	- Literasi Membaca	Persen	N/A	35,57-43,47	37,31-45,16	39,06-46,85	40,80-48,54	42,54-50,23	43,93-51,58
	- Numerasi	Persen	N/A	17,42-21,3	19,43-23,42	21,45-25,54	23,46-27,66	25,47-29,76	27,08-31,45
18	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		N/A						
	- Literasi Membaca	Persen	N/A	16-19,56	19,05-22,80	22,1-26,04	25,34-29,28	28,20-32,51	30,60-35,10
	- Numerasi	Persen	N/A	0,9-1,1	4,02-4,92	7,15-8,74	10,27-12,56	13,39-16,37	15,89-19,42
19	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	10.981	11.379	11.792	12.219	12.662	13.121	13.597
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	N/A	8,48-9,37	8,61-8,63	8,74-8,78	8,87-8,93	9,00-9,95	9,10-10,07
21	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	N/A	46,45-53,78	48,03-55,14	49,62-56,5	51,20-57,86	52,78-59,22	54,05-60,49
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	N/A	24,7-27,3	26,68-29,45	26,68-31,60	28,65-33,75	32,60-35,88	34,18-37,60
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	N/A	18-19	19,38-20,38	20,77-21,76	22,15-23,14	23,53-24,53	24,64-25,64

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,42	65,16	65,91	66,67	67,44	68,21	69,00
25	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,465	0,445	0,425	0,405	0,385	0,365	0,345
26	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Rasio Ketergantungan	Persen	45,1	44,60	44,10	43,60	43,10	42,60	42,10
2	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	8,12	12,82	12,99	13,15	13,32	13,48	13,61
3	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB	Persen	2,76	3,00	3,08	3,15	3,23	3,3	3,36
4	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	99,81	99,82	99,83	99,84	99,84	99,85	99,86
5	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	15,84	15,85	15,86	15,86	15,87	15,88	15,89
6	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	536,61	544,42	552,34	560,37	568,52	576,79	585,18
7	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar rupiah	1047,71	1126,39	1210,99	1301,93	1399,71	1504,82	1617,84
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	N/A	125.000	188.750	252.500	316.250	380.000	431.000
9	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persen	N/A	41,41-50,61	42,95-52,50	44,50-54,39	46,04-56,28	47,58-58,15	49,12-59,66
10	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Persen	N/A	0,22	0,29	0,36	0,43	0,5	0,55
11	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persen	N/A	1,05	1,18	1,31	1,44	1,57	1,68
12	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Rupiah	24.120.000.000	24.361.000.000	24.848.000.000	25.594.000.000	26.618.000.000	27.950.000.000	28.118.000.000
13	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,38	0,43	0,48	0,53	0,58	0,63	0,68
14	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,49	4,72	4,84	4,96	5,07	5,19	5,29
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	N/A	67,19	67,99	68,79	69,59	70,39	71,03
16	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	70,98	60,48	61,36	62,24	63,12	63,13-65,11	63,66-66,04
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	N/A	6,18	6,28	6,37	6,47	6,56	6,64
18	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Persen	8,12	8,84	9,62	10,46	11,39	12,39	13,48

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-45,40	-40	-37,31	-34,63	-31,94	-29,25	-27,1
20	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	3,61	3,63	3,65	3,66	3,68	3,7	3,72
21	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,834	0,851	0,867	0,887	0,905	0,921	0,933
22	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	N/A	72,22	72,74	73,26	73,77	74,29	74,69
23	Persentase Desa Mandiri	Persen	24,30	25,23	25,70	26,17	26,64	26,64	26,91
24	Indeks Desa	Indeks	427,034	487,50	490	493	496	499	502
25	Tingkat Inflasi	Persen	2,24	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
26	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	44,59	50,31	55,04	59,77	64,5	69,23	73,96
27	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,96	4,02	4,05	4,07	4,1	4,13	4,15
28	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	N/A	54,1	54,39	54,68	54,96	55,08-55,59	55,28-55,89
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,29	70,34	70,40	70,45	70,50	70,56	70,61
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,51	2,6	-	-	-	-	-
4	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,69	3,78	3,86	3,95	4,02	4,11	4,20
6	Indeks Integritas Nasional	Indeks	N/A	60,49-63,67	61,88-65,02	63,27-66,37	64,65-67,72	66,04-69,06	67,15-70,14
7	Nilai LHE AKIP Daerah	Nlai	64,82	66,12	67,44	68,79	70,16	71,57	73,00
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,41	0,61	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,06	85,49	85,91	86,34	86,77	87,21	87,64
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	61,39-67,85	62,42-69	63,46-70,14	64,49-71,28	65,52-72,41	66,35-73,32
13	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
14	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,61	3,63	3,65	3,66	3,68	3,70	3,72

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
	PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	80,38	87	90	92	95	97	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	93,73	95	96	97	98	99	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	12,27	10	8	6	4	2	0
	KESEHATAN								
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk	1,23	1.5	0.80	1.00	1.20	1.30	1.50
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	78,72	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	85,9	100	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	84,29	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	92,12	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	99,5	100	100	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	67,54	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	85,09	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	99,69	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	112,6	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	102,97	100	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	114,36	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	107.46	100	100	100	100	100	100
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persen							
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	27,72	28,32	29,83	31,44	33,16	35,04	37
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	60,09	60,13	60,15	60,18	60,22	60,27	60,33
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	92,45	94	95	97	99	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	93,95	95	96	98	99	100	100
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	37,14	50	20,83	33,33	45,83	58,33	58,33
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	56,34	57,75	59,2	60,65	62,1	63,55	65
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	8,87	10	12,5	15	17,5	20	22,5
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0,12	0	0,05	0,11	0,14	0,16	0,19
4	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,41	7,18	6,96	6,75	6,55	6,35	6,16
5	Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	4,02	100	100	100	100	100	19,44
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	10	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	6.630	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	540	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	26	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
	SOSIAL								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	90,55	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	0	100	100	100	100	100	100
	TENAGA KERJA								

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen		100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	181.785.294,11	31.540.000	32.000.000	32.500.000	33.500.000	34.000.000	35.000.000
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	2.307	15	20	25	30	35	40
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	16,34	4	4	4	5	5	5
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen (%)	8,71	15	20	25	30	35	40
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen (%)	0,0344	0,022	0,022	0,024	0,024	0,025	0,025
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	per 100.000 penduduk perempuan	15,09	11,61	11,61	12,27	12,27	13,93	13,93
	PANGAN								
1	Persentase Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persen	75,29	100	100	100	100	100	100
	PERTANAHAN								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	90	92	93	94	95	97
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	0	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	0	100	100	100	100	100	100
4	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee	Pessen	0	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
6	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0	100	100	100	100	100	100
	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,50	69,16	69,42	69,67	69,92	70,17	70,42
2	Persentase Sampah yang ditangani	Persen	48,20	49	49,37	49,86	50,36	50,86	51,69
3	Persentase penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	100	0	0	0	0	0	0
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,07	99	99.02	99.03	99.04	99.05	99.06
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	60,82	62	63	64	65	66	67
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97,57	98,50	98,60	98,70	98,80	98,90	99
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	11,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	PEMBERDAYAANN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	62,75	42,99	47,66	52,34	58,41	65,42	72,43
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	64,40	65,22	66,06	66,90	67,76	68,62	69,50
2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persen	93,67	93,81	93,95	94,08	94,22	94,36	94,50
3	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	10,10	9,72	9,34	8,99	8,65	8,32	8,00
4	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	20,55	22,12	23,82	25,64	27,61	29,72	32,00
5	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,82	58,65	59,50	60,35	61,22	62,11	63,00
6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	88,30	88,74	89,19	89,64	90,09	90,54	91,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,37	2,38	2,37	2,35	2,34	2,33	2,32
8	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	27,90	26,17	24,55	23,02	21,60	20,26	19,00
	PERHUBUNGAN								
1	Rasio konektivitas	Rasio Konektivitas	0,65	0,65	0,720	0,744	0,765	0,789	0,800
2	V/C Rasio	Rasio Volume/Capacity	0,86	0.86	0.89	0.90	0.91	0.92	0.95
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	50	57,14	64,29	71,43	85,71	100
2	Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	58,82	73,00%	75,00%	77,00%	79,00%	81,00%	83%
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	78,73	82	84	86	88	90	92
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	35,59%	7,34%	57,79%	68,88%	77,62%	84,26%	84,61%
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	2,83	1,28	1,41	1,54	1,68	1,81	1,94
	PENANAMAN MODAL								
1	Persentase peningkatan investasi	Persen	223,941	1	2	3	4	5	6
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	37,18	40	44	48	52	56	60
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	10,99	15	20	25	30	35	40
3	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	25	130	150	160	170	180	190

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	STATISTIK								
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	65,79	65	70	75	80	85	90
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	65,79	65	70	75	80	85	90
	PERSANDIAN								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	Nilai	76,74	580	620	660	700	740	780
	KEBUDAYAAN								
1	Persentase cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	PERPUSTAKAAN								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	68,83	68,85	69,00	69,20	69,40	69,60	69,80
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	80,86	80,70	80,80	81,00	81,20	81,40	81,60
	KEARSIPAN								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	91,10	91,50	91,60	91,70	91,80	91,90	92,00
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	83,33	83,35	83,40	83,45	83,50	83,55	83,60
	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	22.224,15	22.331,59	22.432,82	22.534,05	22.635,28	22.736,51	22.837,74
	PARIWISATA								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	Persen	0	0	0	5	7,5	10	12,5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	Persen	39,69	45	50	55	60	65	70
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	34,86	37	40	43	45	47	50
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	2,76	3	3,25	3,50	3,75	4	4,25
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,37	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65
	PERTANIAN								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton Per Hektar Per Tahun	516,85	5,22	5,23	5,24	5,25	5,26	5,27
2	Persentase Penurunan Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen (%)	-0,48	1,20	1,21	1,23	1,24	1,26	1,28
	PERDAGANGAN								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Persen	71,43	75,00%	80,00%	85,00%	90%	95%	100%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	44,45%	47%	50%	53%	56%	59%	62%
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	82,54%	80%	83%	85%	87%	89%	91%
	PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Persen	4.23%	5.33%	5,84%	6,34%	6,85%	7,36%	7,87%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	45,99	48%	50%	52%	54%	56%	58%
3	Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	65	50%	75%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PENGAWASAN DAN KEUANGAN								
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	26,12%	26,50%	27.00%	27.50%	28,00%	28.50%	29.00%
2	Rasio PAD	Persen	8,69	8,42%	8,50%	8,50%	9,00%	9,00%	9,50%
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	64,39%	64,50%	65,00%	65.50%	67.00%	67.50%	68.00%
4	Opini Laporan Keuangan	Jumlah 1 - 10 Opini WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	PENGADAAN								
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	5	5	6	6	7	7
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	1,35	1,5	1,60	1,70	1,80	1,90	2
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	32,19	35	36	37	38	39	40
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	69,69	70	71	72	73	74	75
	KEPEGAWAIAN								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	65	75	75	77	80	80	80
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	14,64	15	15	17	20	20	20
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	70,19	72	72	75	75	75	75

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	MANAJEMEN KEUANGAN								
1	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen (%)	12,29	100,70%	100,75%	100,80%	100,85%	100,90%	100,95%
2	*Revenue mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen (%)	1,39	106,60%	109,10%	110,36%	111,93%	113,50%	115,07%
3	Assets Management	Jumlah Manajemen Aset 1, 2, 3, 4.	1. Daftar Aset Tetap (Ya). 1. Manual Penyusunan Aset Tetap (Ya). 3. Proses Inventarisasi Aset Tahunan (Ya). 4. Nilai Aset Tercantum dalam Laporan Keuangan (Ya).	1. Daftar Aset Tetap (Ya). 1. Manual Penyusunan Aset Tetap (Ya). 3. Proses Inventarisasi Aset Tahunan (Ya). 4. Nilai Aset Tercantum dalam Laporan Keuangan (Ya).	1. Daftar Aset Tetap (Ya). 1. Manual Penyusunan Aset Tetap (Ya). 3. Proses Inventarisasi Aset Tahunan (Ya). 4. Nilai Aset Tercantum dalam Laporan Keuangan (Ya).	1. Daftar Aset Tetap (Ya). 1. Manual Penyusunan Aset Tetap (Ya). 3. Proses Inventarisasi Aset Tahunan (Ya). 4. Nilai Aset Tercantum dalam Laporan Keuangan (Ya).	1. Daftar Aset Tetap (Ya). 1. Manual Penyusunan Aset Tetap (Ya). 3. Proses Inventarisasi Aset Tahunan (Ya). 4. Nilai Aset Tercantum dalam Laporan Keuangan (Ya).	1. Daftar Aset Tetap (Ya). 1. Manual Penyusunan Aset Tetap (Ya). 3. Proses Inventarisasi Aset Tahunan (Ya). 4. Nilai Aset Tercantum dalam Laporan Keuangan (Ya).	1. Daftar Aset Tetap (Ya). 1. Manual Penyusunan Aset Tetap (Ya). 3. Proses Inventarisasi Aset Tahunan (Ya). 4. Nilai Aset Tercantum dalam Laporan Keuangan (Ya).
4	*Cash Management* : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	31,27%	31,00%	30,73%	30,46%	30,19%	29,92%	29,65%
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
1	Persentase Informasi tentang Anggaran untuk Unit Pelayanan yang dapat diakses di website pemda	Persen	89,78%	89,80%	89,85%	89,90%	89,95%	90,00%	90,05%
2	Persentase dokumen yang dipublikasi di website pemda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: hasil proyeksi, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 telah disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan sinergi dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Selanjutnya, Pemerintah daerah akan menyusun RKPD setiap tahun dengan berpedoman pada RPJMD sehingga akan terwujud keselarasan antar dokumen perencanaan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penganggaran.

Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025–2029, yaitu "**HSU Bangkit (Berkeadilan, Unggul, dan Kreatif) sebagai Pusat Agrominapolitan Penopang Logistik Kalimantan Selatan**", menjadi arah utama yang mencerminkan apa yang akan dicapai pada akhir periode pemerintahan bupati dan wakil bupati. Visi ini diturunkan ke dalam lima misi, yaitu: 1). Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing; 2). Mengembangkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berakhlak, dan Bebas Narkoba; 3). Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah; 4). Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik; dan 5). Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Risiko Bencana.

Substansi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 menekankan penguatan sektor unggulan seperti pertanian rawa, perikanan, dan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, maka pembangunan kabupaten dilaksanakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dan berorientasi pada pencapaian transformasi HSU sebagai pusat agrominapolitan sekaligus penopang logistik Kalimantan Selatan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu pengaturan kaidah pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan guna mewujudkan visi dan misi daerah. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Bupati dan Wakil bupati mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029.
2. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi dan media.
3. Perangkat Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.
4. Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.
5. Pemerintah Daerah melakukan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah setiap tahun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
6. Pemerintah Daerah melakukan manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan.
7. Pelaksanaan RPJMD melibatkan berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun non pemerintah, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan komunikasi publik secara berkesinambungan.
8. Dalam membiayai pembangunan jangka menengah, pemerintah mengupayakan sumber pembiayaan selain dari APBD kabupaten, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah.
9. Pemerintah daerah melaksanakan dan melaporkan kinerja program strategis nasional sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

5.3. Evaluasi Hasil RPJMD

Setelah RPJMD ditetapkan, maka pemerintah daerah melakukan evaluasi hasil terhadap RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Adapun beberapa hal mengenai evaluasi yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.
2. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi hasil RPJMD secara periodik, yang bersumber dari evaluasi hasil RKPD setiap tahun.
3. Evaluasi hasil RPJMD dilaporkan ke Bupati untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur.
4. Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
5. Jika berdasarkan hasil evaluasi RPJMD direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD, maka dapat dilakukan dengan memedomani peraturan yang berlaku.

5.4. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 ini berlaku selama 5 (lima) tahun kedepan. Pada saat dokumen RPJMD akan berakhir, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah perlu disusun RPJMD periode berikutnya. Penyusunan RPJMD periode berikutnya dilakukan berdasarkan tahapan dan tatacara yang diatur oleh pemerintah pusat, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Lebih lanjut, pada tahun 2029 akan dilakukan penyusunan RKPD tahun 2030. Penyusunan RKPD tahun 2030 dilakukan dengan memedomani rencana tahun 2030 dalam RPJMD tahun 2025-2029 serta permasalahan dan isu strategis daerah yang terkini. Dengan kondisi RPJMD periode berikutnya belum disusun, maka RKPD tahun 2030 juga memedomani arah kebijakan RPJPD pada periode berkenaan, serta peraturan yang berlaku.

Keseluruhan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Implementasi RPJMD membutuhkan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah, dukungan pemangku kepentingan, serta pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Dengan pelaksanaan yang efektif, RPJMD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Utara, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas untuk generasi sekarang dan mendatang. Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan "HSU BANGKIT".

Bupati Hulu Sungai Utara,

(.....)

HULU SUNGAI UTARA

Bangkit

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Ahmad Yani No. 14 Amuntai Provinsi kalimantan selatan 71415

Telp / Fax. (0527) 62773